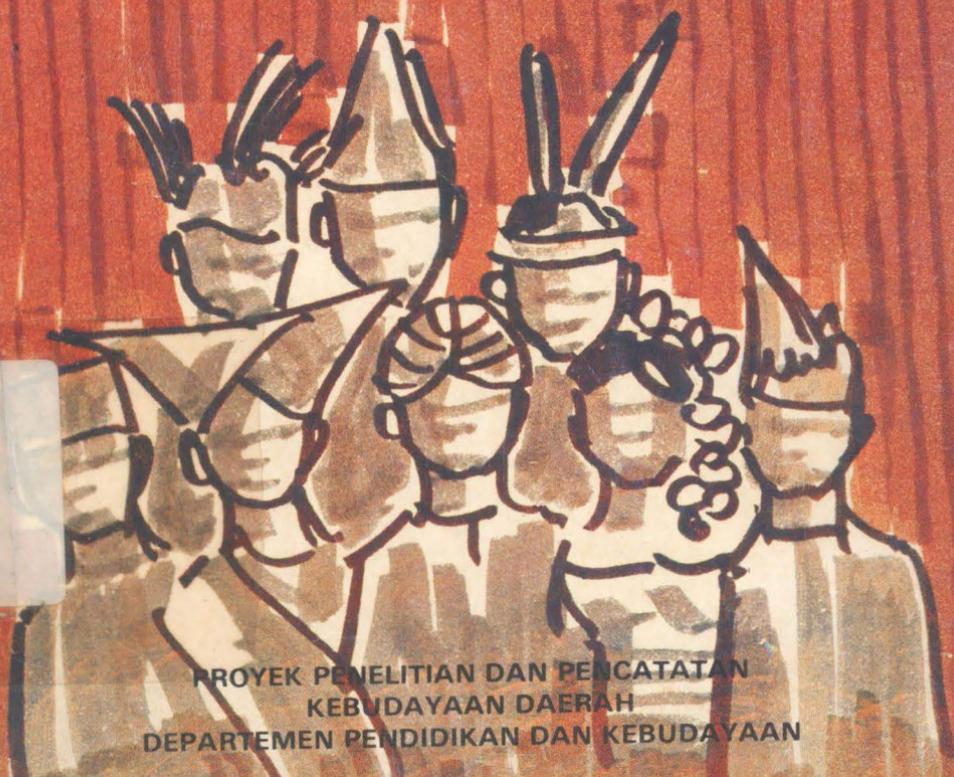


Milik Departemen P dan K  
Tidak diperdagangkan

# SEJARAH KEBANGKITAN NASIONAL DAERAH UMATERA BARAT



PROYEK PENELITIAN DAN PENCATATAN  
KEBUDAYAAN DAERAH  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

# Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Sumatra Barat



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PUSAT PENELITIAN SEJARAH DAN BUDAYA  
PROYEK PENELITIAN DAN PENCATATAN  
KEBUDAYAAN DAERAH  
1977/1978**

PERPUSTAKAAN KEBUDAYAAN DITJEN KEBUDAYAAN	
TGL. TERIMA	19-01-00
TGL. CATAT	19-01-00
NO. INDUK	W73/00
NO. CLASS	959.81.02
KOPI KE :	2

## **SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dalam tahun anggaran 1977/1978 telah berhasil menyusun naskah **SEJARAH KEBANGKITAN NASIONAL DAERAH SUMATERA BARAT**.

Selesainya naskah ini terutama karena adanya kerjasama yang baik dari semua pihak baik di pusat maupun di daerah, terutama dari pihak perguruan tinggi, Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Daerah serta Lembaga Pemerintah/Swasta yang ada hubungannya.

Naskah ini adalah suatu usaha permulaan dan masih merupakan tahap pencatatan yang dapat disempurnakan pada waktu yang akan datang.

Usaha menggali, menyelamatkan, memelihara serta mengembangkan warisan budaya bangsa seperti yang disusun dalam naskah ini masih dirasakan sangat kurang, terutama dalam penerbitan.

Oleh karena itu saya mengharapkan bahwa dengan terbitnya naskah ini akan merupakan sarana penelitian dan kepustakaan yang tidak sedikit artinya bagi kepentingan pembangunan bangsa dan negara khususnya pembangunan kebudayaan.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu suksesnya proyek pembangunan ini.

Jakarta, Oktober 1982  
Direktur Jenderal Kebudayaan

Prof. Dr Haryati Soebadio  
NIP: 130119123

## PENGANTAR

Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dalam tahun anggaran 1977/1978 telah menghasilkan naskah SEJARAH KEBANGKITAN NASIONAL DAERAH SUMATERA BARAT.

Kami menyadari bahwa naskah ini belumlah merupakan suatu hasil penelitian yang mendalam, tetapi baru pada tahap pencatatan, sehingga di sana-sini masih terdapat kekurangan-kekurangan yang diharapkan dapat disempurnakan pada waktu-waktu selanjutnya.

Berhasilnya usaha ini berkat kerjasama yang baik antara Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya dengan Pimpinan dan staf Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan, Pemerintah Daerah, Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Perguruan Tinggi dan tenaga ahli perorangan di daerah Sumatera Barat serta Leknas/LIPI.

Oleh karena itu dengan selesainya naskah SEJARAH KEBANGKITAN NASIONAL DAERAH SUMATERA BARAT ini maka kepada semua pihak yang tersebut di atas kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih.

Demikian pula kepada tim penulis naskah ini di daerah yang terdiri dari: 1. Mardjani Martamin, 2. Ishaq Taher, 3. Amir. B, 4. Mahyuddin; dan tim penyempurna naskah di pusat yang terdiri dari: 1. Sutrisno Kutoyo, 2. M. Soenjata Kartadarmadja, 3. Anhar Gonggong, 4. Mardanas Safwan, 5. Masjkuri, 5. Surachman, 7. Muchtaruddin Ibrahim, 8. Sri Sutjiatiningsih.

Harapan kami dengan terbitnya naskah ini mudah-mudahan ada manfaatnya.

Jakarta, Oktober 1982  
Pemimpin Proyek,

Drs. Bambang Suwondo  
NIP: 130117589

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	1
A. TUJUAN PENELITIAN .....	1
B. MASALAH .....	2
C. RUANG LINGKUP .....	5
D. PERTANGGUNGAN JAWAB ILMIAH PRO- SEDUR PENELITIAN .....	6
E. HASIL AKHIR .....	9
 <b>BAB II. KEADAAN DI SUMATERA BARAT AKHIR ABAD XIX</b> .....	 11
A. PEMERINTAHAN .....	11
B. SOSIAL BUDAYA .....	23
1. Pendidikan .....	23
2. Seni Budaya .....	31
C. KEHIDUPAN EKONOMI .....	33
D. PERKEMBANGAN ALAM PIKIRAN DAN KEPERCAYAAN .....	41
 <b>BAB III. KEADAAN DI DAERAH DARI TAHUN ± 1900- 1923</b> .....	 46
A. PENGARUH POLITIK ETIKA DI DAERAH .....	46
B. KEGIATAN MASYARAKAT YANG BER- GAYUTAN (RELEVAN) DENGAN ATAU- PUN YANG MERUPAKAN EMBRIO DARI KEBANGKITAN NASIONAL DI DAE- RAH .....	48
C. INTERAKSI DI DAERAH DENGAN BER- DIRINYA PARTAI/ORGANISASI .....	55

1. Situasi di Sumatera Barat awal Abad XX	55
2. Sarekat Islam	57
a. Sarekat Sumatera	58
b. Sumatera Thawalib	61
c. Persatuan Muslimin Indonesia	65
3. Indische Partij	73
4. Muhammadiyah	75
5. Taman Siswa	83
6. Organisasi Kepemudaan	89
7. Partai Komunis Indonesia	94
8. Gerakan Perburuhan	99
9. Nahdatul Ulama (NU)	99
10. Gerakan Wanita	99
11. Partai Nasional Indonesia	99
<b>D. KEADAAN DI DAERAH SEKITAR PERANG DUNIA (1914-1918)</b>	
1. Sikap Pemerintah Hindia Belanda	105
2. Keadaan Masyarakat	109
3. Hubungan dengan Volkskraad	110
4. Anggota Volkskraad yang mewakili Daerah	116
5. Dewan-Dewan (Raad) yang berdiri di Daerah	122
<b>E. PERJUANGAN DI DAERAH</b>	123
1. Interaksi dengan Pemogokan-Pemogokan di sekitar tahun 1913	123
2. Interaksi dengan Pemberontakan tahun 1926/1927	123
3. Sikap Masyarakat terhadap Azas Non-Koperasi dan Koperasi terhadap Pemerintah Hindia-Belanda	128
4. Interaksi dengan Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan	132

<b>BAB IV. KEADAAN DI DAERAH DARI TAHUN 1928 – 1942</b> .....	136
<b>A. PENGARUH POLITIK PEMERINTAH HINDIA-BELANDA PADA TAHUN 1930</b> .....	136
1. Politik Keras Terhadap Gerakan Non-Koperasi .....	136
2. Undang-Undang Sekolah Swasta (Wilde Scholen Ordonantie) .....	142
<b>B. DEPRESI EKONOMI DI DAERAH</b> .....	148
<b>C. INTERAKSI TERHADAP KEPARTAIAN / ORGANISASI</b> .....	148
1. PNI Baru .....	148
2. Partindo .....	151
3. Partai Sarekat Islam Indonesia .....	153
4. Parindra .....	157
5. GAPI .....	158
6. MIAI .....	159
7. Petisi Soetarjo .....	160
8. Gerakan Indonesia Berparlemen .....	162
<b>D. KEADAAN DI DAERAH SUMATERA BARAT MENJELANG KERUNTUHAN PEMERINTAH HINDIA-BELANDA DAN KEDATANGAN TENTARA JEPANG</b> .....	166
1. Sikap Pemerintah Hindia-Belanda .....	166
2. Keadaan Masyarakat .....	167
3. Sikap Masyarakat terhadap Pemerintah Hindia-Belanda .....	169
4. Keadaan Pemerintah Hindia-Belanda di Sumatera Barat pada saat terakhir .....	170
<b>E. KEDATANGAN PASUKAN PENDUDUKAN JEPANG</b> .....	171

1. Propaganda Jepang yang terasa di Sumatera Barat .....	171
2. Waktu Kedatangan Pasukan Jepang .....	173
3. Sikap Jepang terhadap Aparatur Pemerintahan Hindia-Belanda .....	175
4. Sikap Jepang terhadap Bangsa Indonesia.	178
5. Sikap rakyat Indonesia terhadap Jepang	180
<b>DAFTAR KATA DAN NAMA .....</b>	<b>183</b>
<b>DAFTAR APENDIK .....</b>	<b>195</b>
<b>DAFTAR CATATAN .....</b>	<b>203</b>
<b>DAFTAR BACAAN .....</b>	<b>213</b>

## BAB I PENDAHULUAN

### A. TUJUAN PENELITIAN

Laporan Penelitian ini merupakan laporan yang kedua dalam Proyek Pencatatan dan Penelitian Kebudayaan Daerah (P-3KD) dari Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta khususnya yang bertalian dengan pencatatan dan penelitian Sejarah Daerah Sumatera Barat.

P3KD di Jakarta mendapat tugas dari Pusat Penelitian sejarah dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Untuk mewujudkan tugas yang berat itu, maka dibentuklah tim-tim daerah untuk menggarapnya. Pada tahun 1976 dibentuk sepuluh tim daerah dengan sebuah tim pusat di Jakarta. Ke dalam salah satu dari kesepuluh tim daerah itu, termasuk Sumatera Barat.

Tugas-tugas dari kesepuluh tim itu adalah melakukan pencatatan dan penelitian dari daerahnya masing-masing mengenai lima aspek, yaitu:

1. Aspek Sejarah daerah yang dimulai dari zaman Pra-Sejarah sampai dengan zaman Kemerdekaan (S.M – 1975 M).
2. Aspek Geografi Daerah yang meliputi seluruh aspek kebudayaan.
3. Aspek cerita rakyat Daerah dengan dua puluh judul cerita rakyat yang belum pernah dipublikasikan.
4. Aspek Adat-istiadat Daerah yang meliputi seluruh masalah adat-istiadat.
5. Aspek Ensiklopedi Musik dan Tari Daerah sebanyak dua ratus judul.

Pada tahun 1976 itu kegiatan utama adalah melakukan penatatan dan penelitian mengenai kelima aspek tersebut di atas secara umum.

## **B. MASALAH**

Di dalam melaksanakan pencatatan dan penelitian itu terdapat beberapa masalah, baik masalah yang berhubungan dengan tujuan penelitian, maupun masalah-masalah yang dihadapi sewaktu penelitian sedang dilaksanakan.

### **1. Masalah Penelitian**

Sampai saat sekarang, yaitu sesudah tiga puluh dua tahun lebih kita merdeka belum ada lagi sebuah tulisan mengenai Sejarah Daerah Sumatera Barat yang menyeluruh yang dapat dijadikan sebagai buku pegangan bagi ahli-ahli sejarah khususnya, maupun bagi bangsa Indonesia umumnya.

Penelitian ini, dengan demikian tidak pula bermaksud untuk menjadi buku babon, melainkan hanya sekedar memberikan sumbangan data yang pada saatnya akan diolah menjadi buku babon, mungkin dua atau tiga tahun lagi, bersama-sama dengan data atau naskah yang telah ada sebelumnya.

Di situlah letak pentingnya masalah dalam penelitian ini, yaitu untuk membuat suatu buku secara daerah yang dapat dijadikan pegangan bagi generasi yang akan datang, perlu dilakukan pencatatan-pencatatan terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi di daerah itu dengan segera, terutama data dari orang-orang yang pernah mengalami peristiwa itu sendiri. Hal ini tidak dapat ditangguhkan lagi karena jumlah mereka sudah bertambah sedikit juga.

### **2. Masalah Pelaksanaan**

Ternyata sumber data dari orang-orang tua yang masih mengalami peristiwa-peristiwa itu secara keseluruhan tidak banyak lagi jumlahnya. Dari jumlah yang sedikit itu sebagian besar sekarang bertempat tinggal di sekitar Sumatera Barat dan tidak semuanya pula dapat dihubungi. Dengan sendirinya data wawancara tidak lengkap. Tetapi dari data yang ada itu sudah dapat disusun sebuah laporan yang agak lengkap juga mengenai masalah yang diteliti.

Tentang data kepustakaan juga demikian keadaannya. Kepustakaan yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti tidak banyak ditemui. Ada juga ditemui beberapa buku, tetapi ditulis dalam bahasa Belanda. Dalam hal ini para pencatat menemui kesulitan dalam bahasa karena tidak mengerti bahasa Belanda. Kalau akan diterjemahkan, maka waktu yang tersedia yang relatif sangat

sedikit itu akan habis dalam usaha menterjemahkan saja.

Sebetulnya data kepustakaan ini sangat banyak pada Museum Pusat Jakarta. Sayangnya tidak dapat dicapai oleh pencatat sehubungan dengan terbatasnya biaya. Dengan demikian data yang dipergunakan dalam menyusun laporan itu terbatas pada data yang ada di Sumatera Barat yang tidak semuanya pula terjangkau oleh pencatat. Dapat dibayangkan betapa keringnya data dalam laporan ini.

Dari kedua sumber data itulah dicoba menyusun laporan pencatatan dan penelitian Sejarah Daerah Sumatera Barat pada zaman Kebangkitan Nasional ini. Setelah laporan selesai dibuat masih sangat terasa betapa sedikitnya peristiwa-peristiwa yang dapat dicatat dan diteliti. Oleh karena itu semua masalah yang telah digariskan oleh P3KD pusat untuk dicatat dan diteliti, tidak dapat dikerjakan karena memang tidak/belum diketemukan datanya sampai saat laporan ini ditulis.

Di samping itu ada beberapa masalah yang tidak dicantumkan oleh P3KD Pusat untuk dikumpulkan atau dicatat dimasukkan juga dalam laporan ini, karena datanya sangat penting dan sangat berpengaruh pada perkembangan sejarah Sumatera Barat selanjutnya, khusus mengenai zaman Kebangkitan Nasional antara tahun 1900 – 1942.

### **3. Masalah Waktu**

Dalam pelaksanaan pencatatan dan penelitian ini memang sangat dirasakan akan kekurangan waktu. Praktis waktu yang tersedia yang hanya beberapa bulan itu, yaitu kira-kira enam bulan tidak cukup untuk menyelesaikan pencatatan dan penelitian secara baik. Dalam waktu enam bulan tersebut semuanya harus disiapkan, mulai dari perencanaan kegiatan, pelaksanaan pencatatan dan penelitian, menyusun draft laporan dan menyusun laporan dalam bentuk naskah seperti kerangka laporan yang telah disusun P3KD pusat di Jakarta. Di samping itu waktu yang sudah sedikit itu masih diperlukan untuk menyelesaikan tugas-tugas pokok secara rutin. Praktis waktu efektif yang dapat dipergunakan sampai dengan menyusun naskah laporan ini maksimal hanya selama tiga bulan saja. Oleh karena itu segala sesuatu mengenai pencatatan dan penelitian ini dilaksanakan dalam serba tergesa-gesa yang menyebabkan kurang baiknya isi laporan ini secara keseluruhan.

Tidak ada salahnya di sini dianjurkan apabila nanti pencata-

tan dan penelitian ini dilanjutkan dengan tema lainnya diharapkan agar waktu yang diberikan kepada para petugas pelaksana di daerah betul-betul disesuaikan dengan kerangka isi laporan yang akan dibuat. Dengan demikian tujuan seperti yang diharapkan semula mungkin akan dapat dicapai dengan lebih baik.

Sekedar sebagai contoh dapat kami kemukakan di sini mengenai masalah waktu ini dalam menghubungi seorang responden misalnya si A buat wawancara diperlukan satu hari (pagi tak dapat dipergunakan karena harus berada di kantor untuk menyelesaikan tugas rutin sebagai pegawai negeri), karena waktu yang dipergunakan hanya sore dan malam hari saja. Tetapi sebagian responden tidak dapat dihubungi dalam satu kali saja, karena sesuatu hal. Rata-rata waktu yang telah kami pergunakan untuk menghubungi seorang responden minimal empat kali dalam pengertian empat hari. Kalau hasil wawancara memerlukan *feedback* maka dibutuhkan waktu yang lebih banyak lagi. Responden yang telah dihubungi ternyata tidak berada dalam satu tempat, tetapi terpencil dalam beberapa tempat yang kadang-kadang sangat sulit dicapai dengan kendaraan bermotor. Kesimpulan waktu yang diperlukan untuk menghubungi responden diperlukan lebih satu bulan efektif, dan selama itu tidak memungkinkan untuk mencatat data kepustakaan. Khusus mengenai pencatatan data kepustakaan diperlukan waktu yang lebih lama. Sedangkan waktu yang efektif dapat dipergunakan dalam penelitian ini hanya selama tiga bulan. Dapat dibayangkan betapa sulitnya para petugas mengatur waktu dalam penyelesaian penelitian ini.

Hal ini perlu dikemukakan supaya dapat dijadikan pertimbangan untuk masa yang akan datang, lebih-lebih bagi Tim P3KD Pusat yang akan menetapkan kerangka laporannya.

#### 4. Masalah Biaya

Berbicara mengenai masalah biaya untuk suatu penelitian, memang relatif sifatnya berapa besar biaya sesungguhnya untuk suatu penelitian, karena sifat dan jenis penelitian itu sendiri berbeda-beda pula. Tetapi yang penting bagi petugas-petugas penelitian di Sumatera Barat bukanlah masalah biaya ini, melainkan masalah melaksanakan penelitian itu sendiri. Cukup atau tidak cukup biaya yang diberikan, penelitiannya tetap akan dilaksanakan, karena keuntungan pertama dari hasil penelitian ini akan dimanfaatkan oleh Sumatera Barat sendiri.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas khusus mengenai aspek Sejarah Daerah Sumatera Barat dana yang disediakan oleh P3KD Pusat dianggap cukup.

## 5. Masalah Lain

Karena penelitian ini merupakan pesanan dari pusat, maka setelah laporan ini selesai dibuat dalam bentuk sebuah naskah, berarti tugas pelaksana di daerah bebas selesai, karena penilaian masih akan diberikan oleh Tim P3KD Pusat. Karena itu apabila ternyata masih terdapat kekurangan dalam naskah ini menurut penilaian Tim P3KD Pusat, petugas di daerah akan berlapang dada untuk melengkapi data yang kurang itu, walaupun batas waktu akhir Maret 1978 sudah terlewati, karena penilaian dari Tim Pusat itu sekaligus merupakan perbaikan dalam penyempurnaan naskah ini.

## C. RUANG LINGKUP

Zaman Kebangkitan Nasional dari Sejarah Daerah Sumatera Barat mencakup zaman antara tahun 1900-1945. Untuk memasuki zaman tahun 1900 atau abad XX perlu digambarkan sedikit mengenai keadaan Sumatera Barat pada akhir abad XIX sebagai latar belakang yang dijelaskan pada bagian pendahuluan.

Bagian pertama dari laporan ini akan menggambarkan keadaan di Sumatera Barat antara tahun 1900-1928, dimulai dengan munculnya organisasi politik di Sumatera Barat sampai dengan diucapkan ikrar Sumpah Pemuda tahun 1928. Pada bagian ini akan terlihat bagaimana pengaruh politik etis di Sumatera Barat, kegiatan masyarakat yang merupakan embrio. Kebangkitan Nasional di Sumatera Barat dan intraksi masyarakat dalam kegiatan partai ataupun organisasi yang muncul waktu itu.

Bagian berikutnya akan menggambarkan keadaan di Sumatera Barat sekitar masa Perang Dunia I (1914-1918) dan pendirian Volksraad. Kemudian pada bagian berikutnya akan meulukiskan tentang perjuangan rakyat di daerah Sumatera Barat sesudah masa Perang Dunia I karena sejarah daerah pada masa ini memperlihatkan corak tersendiri. Selanjutnya pada bagian berikutnya akan di lukiskan mengenai keadaan Sumatera Barat antara tahun 1928-1942. Pada bagian ini akan digambarkan mengenai pengaruh perubahan politik pemerintah Hindia-Belanda di Sumatera Barat sesu-

dah Sumpah Pemuda, pengaruh depresi ekonomi terhadap perjuangan di daerah, kegiatan masyarakat adalah melalui partai-partai politik dan organisasi masa dalam menentang kekuasaan pemerintah Hindia-Belanda di Sumatera Barat, keadaan di Sumatera Barat menjelang keruntuhan Belanda di Indonesia dan mengenai kedatangan pasukan penduduk Jepang ke Sumatera Barat serta bagaimana sikap Jepang terhadap rakyat di daerah dan sikap rakyat Sumatera Barat terhadap Jepang sendiri.

Sebagai bagian penutup dari laporan ini akan digambarkan keadaan di Sumatera Barat selama berada di bawah penduduk pasukan Jepang sampai dengan suasana diucapkan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Demikian ruang lingkup yang dicakup oleh penelitian ini.

#### D. PERTANGGUNGAN JAWAB ILMIAH PROSEDUR PENELITIAN

1. Karena proyek pencatatan dan penelitian Sejarah Daerah Sumatera tematis: zaman Kebangkitan Nasional ( $\pm$  1900-1945) ini merupakan proyek pusat seluruhnya, dalam pengertian Ketua dan Bendaharawan P3KD berdomisili di Jakarta maka kegiatan di daerah hanya terbatas pada:
  - a. penyusunan alat pengumpul data.
  - b. pengumpul data
  - c. pengolahan data
  - d. penyusunan laporan.

Untuk melaksanakan semua kegiatan ini di daerah dibentuk satu tim terdiri dari tiga orang yang sama hak serta kewajibannya. Berbeda dengan proyek pencatatan dan penelitian sebelumnya, kali ini di daerah tidak diangkat Ketua Sub Proyek dan Bendaharawannya, hanya dibentuk satu tim petugas yang terdiri dari tiga orang dan salah seorang di antaranya bertindak sebagai penanggung jawab di daerah maupun ke P3KD Pusat di Jakarta.

#### 2. Jenis Data

- a. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui wawancara dengan pemuka-pemuka masyarakat atau pejabat-pejabat setempat

dan kepustakaan. Supaya data wawancara dapat dikumpulkan se-maksimal mungkin maka dibuatkan semacam pedoman wawan-cara (interview guide) yang berpedoman pada TOR yang dibuat P3KD Pusat. Data kepustakaan diperoleh dari sejumlah buku-buku atau naskah.

#### **b. Data primer**

Data ini diperoleh melalui wawancara dengan orang-orang yang telah ditetapkan sebelumnya dengan kriteria mengalami peristiwa yang akan dicatat atau mengetahui peristiwa itu karena hidup yang berdekatan dengan masa peristiwa-peristiwa itu terjadi. Di samping itu data primer juga diambil melalui peninjauan lang-sung ke daerah tempat terjadinya peristiwa. Sayangnya hasil obser-vasi ini tidak begitu banyak hasilnya selain daripada beberapa foto. Karena keterbatasan waktu data primer maupun data sekunder ti-dak sempat direkam, hanya dicatat sewaktu melakukan wawanca-ra.

### **3. Lokasi**

Lokasi pencatatan dan penelitian hanya terbatas pada daerah Sumatera Barat. Idealnya seluruh lokasi tempat peristiwa yang berhubungan dengan ruang lingkup pencatatan dan penelitian da-pat dihubungi. Tetapi oleh karena keterbatasan dalam banyak ma-salah hal itu tidak dapat dilakukan.

Daerah Sumatera Barat sendiri tidak pula dapat dihubungi se-cara keseluruhan hanya terbatas kepada daerah-daerah yang dapat dicapai pulang pergi dalam satu hari dari Padang.

Sesungguhnya lokasi untuk pencatatan dan penelitian Seja-rah Daerah Sumatera Barat sangat banyak terdapat di Jakarta. Di sana, di samping, adanya Museum Pusat yang banyak menyim-pan dokumen mengenai masalah yang hendak dicatat, juga masih terdapat beberapa orang tokoh yang mengalami sebagian peristiwa-peristiwa di Sumatera Barat pada masa yang bersangkutan serta beberapa orang tokoh yang mengenal peristiwa itu dengan baik yang dapat diketahuinya secara tak langsung. Tetapi semua ini tidak dapat dicapai.

Perlu dijelaskan di sini mengenai pengertian istilah Sumatera Barat. Untuk keperluan pencatatan dan penelitian pengertian Su-matera Barat adalah daerah yang mencakup batas-batas wilayah daerah Propinsi Sumatera Barat yang sekarang. Sedangkan untuk

keperluan menjelaskan peristiwa-peristiwa pengertian Sumatera Barat adalah daerah yang mencakup batas-batas wilayah daerah Minangkabau dahulu. Dalam hal ini Sumatera Barat sama dengan Minangkabau dan orang Minangkabau sama dengan orang Sumatera Barat.

#### 4. Metode dan Teknik Pencatatan dan Penelitian

Metode utama yang dipergunakan dalam pencatatan dan penelitian ini adalah dengan mengajukan pertanyaan sebanyak mungkin terhadap responden. Data dari wawancara ini dibandingkan dengan data kepustakaan yang ada lalu digabungkan untuk pembuatan laporan.

Supaya jumlah data terkumpul dalam jumlah yang dikehendaki, maka sewaktu-waktu diadakan wawancara yang sangat mendalam, bahkan kadang-kadang telah menjurus ke arah diskusi kecil. Wawancara mendalam ini dipergunakan untuk masalah-masalah yang secara mendetail ingin diungkapkan. Di samping itu juga dipergunakan wawancara bebas untuk mengetahui hal-hal yang umum sifatnya.

#### 5. Prosedur Pengolahan

Sesuai dengan namanya, maka penelitian ini bersifat kuantitatif dan kurang mendalam. Hal ini bukan berarti akan menghindari masalah yang kualitatif, tetapi pada taraf pencatatan ini hal-hal yang kualitatif belum diperlukan. Dengan sendirinya data tidak diolah dengan analisa yang mendalam dengan mempergunakan rumus-rumus statistik yang ruwet. Untuk keperluan pencatatan terhadap data yang telah dikumpulkan masa yang berlaku supaya terjamin pertalian data yang satu dengan data yang lainnya. Untuk sekedar memperdalam pengetahuan tentang peristiwa atau hal-hal tertentu dipergunakan ezra yang bersifat *exploratory* (penjelajahan) terhadap beberapa data. Sifat deskriptif dipergunakan untuk menggambarkan sifat keadaan, gejala atau kelompok tertentu dalam masyarakat, atau untuk menggambarkan frekwensi penyebaran sesuatu gejala atau frekwensi adanya hubungan tertentu antara satu gejala atau faktor-faktor lain dalam masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui lebih mendalam masalahnya. Sifat pengolahan yang *explanatory* atau uraian yang sangat terperinci untuk menguji

hipotesa-hipotesa tidak dilakukan dalam penelitian ini.

Untuk menutup bagian pendahuluan ini perlu dijelaskan dua masalah lagi, yaitu daftar catatan yang terdapat di akhir laporan ini dipergunakan untuk menjelaskan istilah daerah yang terdapat dalam laporan ini atau menjelaskan istilah yang meragukan dan juga dipergunakan untuk menunjukkan dari mana sumber keterangan diambil (catatan kaki).

Kadang-kadang untuk memudahkan pekerjaan selanjutnya, maka perlu dibuatkan indeks sesudah daftar catatan. Indeks dibuat dengan tidak mencantumkan nomor halamannya. Sedangkan kata-kata yang diindeks hanya terbatas pada beberapa jenis istilah, nama tempat dan nama orang, tidak semua istilah dimasukkan dalam indeks. Kegunaan dari indeks ini adalah untuk meringankan tugas pengerjaan, berikutnya. Daftar indeks dibuat menurut abjad.

Seharusnya laporan ini dilengkapi dengan foto-foto yang diterakan langsung pada halaman yang berhubungan tetapi karena kesukaran teknis terpaksa dilampirkan diluar laporan ini.

## E. HASIL AKHIR

Naskah ini pada akhirnya merupakan hasil kerja sama antara berbagai pihak. Naskahnya yang asli dikerjakan oleh suatu Tim Penyusunan di daerah Sumatera Barat yang penggarapannya mengikuti pola dan kerangka seperti ditentukan oleh Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah di Pusat. Selanjutnya terhadap naskah ini diadakan penyempurnaan dan penilaian bersama, baik oleh Tim dari Pusat (P3KD) maupun oleh Tim Penyusun di daerah Sumatera Barat. Hasil penyempurnaan dan penilaian itulah yang dijadikan pedoman untuk lebih menyempurnakannya lagi dalam pekerjaan editing.

Sedangkan mengenai pekerjaan editing itu sendiri kegiatannya diarahkan kepada beberapa segi, yaitu: materi atau bahan, kebahasaan dan pendekatan. Segi materi didasarkan pada hasil penilaian, sedangkan kebahasaan diperhatikan beberapa hal, seperti ejaan, istilah dan keterbacaan. Dalam menulis naskah sejarah daerah, kiranya pendekatan regiosentris merupakan cara yang wajar, dan dari naskah ini dapatlah dikemukakan, bahwa para penyusun telah berusaha mendekati permasalahannya dengan cara demikian.

Selanjutnya naskah ini hendaknya dipandang sebagai pe-

rintis jalan ke arah penelitian dan penyusunan sejarah daerah yang lebih baik dengan berbagai kemungkinan yang lebih kaya, lebih beragam dan lebih memenuhi sasaran, perlu juga dikemukakan, bahwa meskipun di dalam naskah ini hal-hal mengenai sejarah nasional masih kelihatan agak jelas, namun hendaknya dilihat, sebagaimana dikemukakan oleh Tim Penyusunannya sendiri, dalam hubungannya dengan latar belakang peristiwa ataupun konteks permasalahan kesejarahannya. Sebaliknya bahan-bahan mengenai sejarah daerah itu sendiri akan merupakan bahan yang berguna untuk menyusun sejarah nasional pada tema Kebangkitan Nasional. Hasil akhir ini secara keseluruhannya dapat dipandang sebagai sesuai dengan *Terms of Reference* sebagaimana dijabarkan oleh Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah.

## BAB II

### KEADAAN DI SUMATERA BARAT AKHIR ABAD 19

Pada tahun 1800 secara politis seluruh Indonesia jatuh ke dalam pemerintahan Belanda. Belanda datang kembali ke Sumatera Barat 1) (sebelumnya dikuasai oleh Inggris) pada tahun 1819. Ketika Belanda mendarat di Padang, situasi di Sumatera Barat. (Di daerah pedalaman Sumatera Barat), yaitu daerah Luhak Tanah Datar, Luhak Agam dan Luhak Lima Puluh Kota, 2) telah dikuasai oleh kaum Paderi, 3) yang melakukan pembaharuan terhadap praktek ajaran Islam yang telah jauh menyimpang dari Al Qur'an dan Hadist.

Oleh karena Belanda ingin memperkuat kekuasaannya kembali di Sumatera Barat maka Belanda memerangi kaum Paderi yang telah menguasai daerah Minangkabau asli sewaktu Belanda datang kembali pada tahun 1819 itu. Belanda menganggap seluruh wilayah Indonesia sudah berada dibawah kekuasaan Belanda semenjak tahun 1800. Perang itu berlangsung selama 16 tahun, yaitu antara tahun 1821 - 1837 dan berakhir dengan kemenangan Belanda.

Dengan didudukinya Benteng Bonjol serta daerah Bonjol dan sekitarnya pada tahun 1837 dan dengan dibuangnya Tuanku Imam Bonjol ke luar daerah Sumatera Barat, maka lumpuhlah seluruh kekuatan Sumatera Barat dalam menentang Belanda. Akibatnya semenjak awal abad ke-19 dominasi politik Belanda tertanam semakin kuat dan kokoh di hampir seluruh daerah Sumatera Barat. Dominasi politik itu dijadikan Belanda sebagai landasan untuk perkembangan perekonomian Belanda dan penetrasi kebudayaan Barat di Sumatera Barat.

Dalam perkembangannya, selama akhir abad ke-19 ada beberapa hal yang patut dicatat dalam sejarah Sumatera Barat, walaupun catatan itu sebahagian akan melukiskan kegiatan Belanda di Sumatera Barat.

#### A. PEMERINTAHAN

Belanda sudah lama mengandung maksud untuk melaksanakan suatu sistem pemerintahan pusat (sentralisasi) untuk

mengatur pemerintahan Hindia Belanda dengan pusat kegiatannya berada di Batavia. 4) Karena Belanda mengalami banyak kesukaran dari rakyat Indonesia, maka cita-cita tersebut baru dapat terlaksana pada pertengahan abad ke-19. Sebelum itu perlawanan rakyat yang terjadi di hampir seluruh daerah Indonesia menyebabkan Belanda terpaksa menahan keinginan tersebut, karena pusat perhatiannya terpaksa dicurahkan untuk menghadapi dan menahan gelombang perlawanan rakyat yang silih berganti.

Di daerah Sumatera Barat hal itu tidak merupakan kekecualian, artinya mulai pertengahan abad ke-19 dijalankan suatu sistem pemerintahan pusat dalam bentuk birokrasi yang ketat dengan stafnya orang-orang Belanda sendiri. Pada puncak kekuasaan terdapat Raja kerajaan Belanda sebagai penguasa tunggal. Walaupun orangnya berada jauh di seberang laut, tetapi kekuasaannya terasa di seluruh wilayah Hindia Belanda. Tempat kedua terdapat Gubernur Jenderal yang diangkat oleh kerajaan Belanda. Gubernur Jenderal merupakan penguasa tunggal yang otokratis di Hindia Belanda. Dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari Gubernur Jenderal dibantu oleh beberapa badan sebagai penasihat dan kelengkapan pemerintah.

Kedua struktur pemerintahan yang telah disebutkan di atas tidak terdapat di Sumatera Barat, karena raja berada di negeri Belanda dan Gubernur Jenderal berkedudukan di Batavia. Sedang di Sumatera Barat sendiri terdapat susunan pemerintahan sebagai berikut:

Sesudah Perang Minangkabau, Sumatera Barat dijadikan sebuah residensi yang dikepalai oleh seorang Residen yang berkedudukan di Padang. Dalam menjalankan pemerintahannya sesudah Perang Minangkabau dibantu oleh tenaga-tenaga ahli di bidang adat dengan pangkat Wedana, yang bertindak sebagai instansi tertinggi dalam penyelesaian segala masalah yang berkenaan dengan adat, termasuk pengawasan terhadap pemangku-pemangku adatnya. Disamping memegang kendali dalam masalah pemerintahan, Residen juga berkedudukan sebagai pimpinan tertinggi untuk pengadilan dan kepolisian. Dengan demikian dapat kita lihat bahwa kekuasaan seorang Residen sangat besar dan dia merupakan penguasa tunggal yang otokratis di Sumatera Barat.

Pada penghujung abad ke-19 Karesidenan Sumatera Ba-

rat dijadikan dua daerah yaitu pertama adalah Karesidenan Padang Darat 5) yang berkedudukan di Bukittinggi yang meliputi seluruh daerah pedalaman Sumatera Barat. Yang kedua, Karesidenan Padang Pesisir yang berkedudukan di Padang yang meliputi seluruh daerah pesisir Sumatera Barat. Tahun 1891 daerah Karesidenan Padang Pesisir juga meliputi daerah yang terletak antara Agam Utara dengan daerah Tapanuli oleh Belanda dinamakan *daerah Ophir*.

Jabatan Residen hanya dijabat oleh orang Belanda, yang berlangsung sampai dengan jatuhnya Sumatera Barat ke tangan Jepang.

Pada eselon kedua di Sumatera Barat terdapat daerah administrasi 6) "afdeeling" 7), yang pada akhir abad ke-19 terdapat lima daerah yaitu:

1. *Afdeeling Zuid Benedenlanden,*
2. *Afdeeling Tanah Datar,*
3. *Afdeeling Agam*
4. *Afdeeling Lima Puluh Kota, dan*
5. *Afdeeling Solok*

Daerah administrasi *afdeeling* ini dikepalai oleh seorang Asisten Residen. Pada penghujung abad ke-19, sewaktu Sumatera Barat dibagi atas dua Karesidenan, maka Karesidenan Padang Darat terdiri dari 5 sampai 8 *afdeeling* dan daerah Karesidenan Padang Pesisir terdiri dari 3 sampai 5 *afdeeling*. Dengan demikian jumlah Asisten Residen juga bertambah sebanyak *afdeeling*nya. Asisten Residen pada waktu itu juga terdiri dari orang-orang Belanda.

Sebelum pertengahan abad ke-19, tepatnya sewaktu Perang Minangkabau berkecamuk daerah administrasi *afdeeling* ini belum ada.

Daerah administratif onder *afdeeling* ini merupakan suatu penyimpangan dari pola umum pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia. Seperti di Jawa dan Madura kesatuan daerah ini tidak ada, sebaliknya disana masih dipertahankan daerah administratif regensi (keregenan).

Di Sumatera Barat daerah administratif *onder-afdeeling* ini terdapat sebanyak 19 buah, yaitu:

1. *Afdeeling Zuid Benedenlanden*
  - a. *Onder-afdeeling Padang Eilanden*

- b. *Onder-afdeeling Painan*
  - c. *Onder-afdeeling Mentawai Eilanden.*
2. *Afdeeling Tanah Datar*
    - a. *Onder-afdeeling Pariaman*
    - b. *Onderafdeeling- Padang Panjang*
    - c. *Onderafdeeling- Batipuh X Koto*
  3. *Afdeeling Agam*
    - a. *Onder afdeeling Oud Agam*
    - b. *Onder afdeeling Maninjau*
    - c. *Onder afdeeling Lubuk Sikaping*
    - d. *Onder afdeeling Ophir*
  4. *Afdeeling Lima Puluh Kota*
    - a. *Onder afdeeling Payahkumbuh*
    - b. *Onder afdeeling Suliki*
    - c. *Onder afdeeling Bangkinang*
  5. *Afdeeling Solok*
    - a. *Onder afdeeling Sawah Lunto*
    - b. *Onder afdeeling Solok*
    - c. *Onder afdeeling Alahan Panjang*
    - d. *Onder afdeeling Muara Labuh*
    - e. *Onder afdeeling Sijunjung.*

Setiap daerah administratif ini dikepalai oleh seorang *Controleur* yang diangkat oleh Residen atas nama Gubernur Jenderal. Jabatan ini merupakan jabatan terendah yang dijabat oleh pegawai-pegawai Belanda. Oleh karena itu pejabat inilah yang sangat banyak berhubungan dengan rakyat yang menyebabkan dia sangat ditakuti oleh rakyat, karena segala cara yang otokrasi dari Residen dan Assisten Residen, realisasinya terlihat melalui *Kontroleur* ini.

Dalam soal pemerintahan sebenarnya Kontrolur inilah yang berhubungan langsung dengan *Laras* atau Kepala Negari. Seorang *Kontrolur* bertugas mengawasi *Laras*. Biasanya seorang Kontrolur bertugas mengawasi beberapa daerah Kelarasan, tetapi apabila suatu daerah dianggap sangat penting dalam pengertian masih rawan atau merupakan sumber kekayaan Belanda dan sebagainya, akan diawasi oleh seorang Kontrolur yang hanya khusus ditugaskan untuk satu daerah itu. Dengan demikian pengawasannya dapat diberikan secara penuh.

Kontrolur ini terbagi pula atas beberapa tingkat. Makin penting daerah yang diawasi makin tinggi kedudukan atau tingkat seorang Kontrolur. Suatu daerah yang tidak menghasilkan apa-apa, bahkan sebaliknya akan mendatangkan pengeluaran yang besar saja bagi Belanda, cukup diawasi oleh seorang Kontrolur tingkat tiga atau paling bawah. Tetapi seorang Kontrolur yang bertugas menerima dan menyampaikan perintah Asisten Residen atau Residen, merupakan Kontrolur kelas satu atau yang paling tinggi tingkatnya dalam urutan Kontrolur.

Sebetulnya tugas seorang Kontrolur bukanlah pada bidang administrasi pemerintahan, melainkan di bidang pengawasan barang atau tanaman ekspor. Daerah penghasil kopi, teh, cengkeh, lada dan lain-lain bahan ekspor harus diawasi oleh seorang Kontrolur kelas satu.

Dalam teorinya tugas Kontrolur hanya mengawasi, tetapi dalam prakteknya seorang kontrolur merupakan alat pemaksa dari Asisten Residen atau Residen terhadap rakyat. Kontrolur inilah yang menangkap rakyat yang dianggapnya keras kepala. Dalam menjalankan tugasnya seorang Kontrolur dapat langsung masuk ke dalam *suatu Negari* tanpa izin Kepala Nagarnya. Karena itu rakyat lebih takut kepada Kontrolur daripada Residen sendiri. Dalam prakteknya tugas Kontrolur adalah sebagai alat pemaksa atasannya dan tugas inilah yang selalu dijalankan, supaya barang dan tanaman ekspor jangan sampai turun jumlahnya dan kekuasaan Belanda tetap tertanam dengan kuat.

Jadi seorang Kontrolur mempunyai tugas ganda. Ke atas sebagai alat penghubung antara Laras dan Kepala Nagari dengan Asisten Residen dan Residen, sedangkan ke bawah merupakan algojo Belanda yang sewaktu-waktu siap menerkam mangsanya, seorang tukang pukul yang selalu patuh melaksanakan perintah majikannya.

Dalam menjalankan tugasnya sehari-hari Kontrolur dibantu oleh: seorang wakil Kontrolur, seorang jurutulis kelas I, seorang jurutulis kelas II, dan beberapa orang opas.

Eselon berikutnya adalah daerah administratif Kelarasan yang dikepalai oleh *seorang Laras*. Kata Laras di Minangkabau tidak pernah digunakan sebagai bagian dari organisasi pemerintahan. Biasanya kata Laras hanya dipergunakan untuk membicarakan hukum adat. Dalam hal ini Laras berarti "kesejajar-



an” adat istiadat yang dipakai oleh pendudukan Minangkabau seperti Laras Koto-Piliang dan Laras Bodi-caniago.

Tetapi oleh Belanda Laras dijadikan pangkat kepala daerah administratif dengan wilayah kekuasaannya dinamakan Kelarasan. Beberapa buah nagari yang mempunyai latar belakang adat istiadat yang sama atau sejajar, dijadikan sebuah kesatuan daerah yang disebut kelarasan dan kepalanya dinamakan Laras. Laras sebagai Kepala Kelarasan oleh orang Minangkabau dibuat dengan *Angku Lareh* atau *Tuanku Lareh* <sup>9)</sup>

Kalau diperhatikan lebih lanjut bahwa Laras adalah sesungguhnya seorang kepala daerah yang berkuasa secara tradisional yang disertai Belanda sebagai seorang Laras yang mengepali beberapa orang Kepala Nagari yang juga merupakan kekuasaan tradisional yang langsung mengatur kehidupan rakyatnya, maka kelihatannya Belanda tidak mau mencampuri urusan tentang kehidupan masyarakat Minangkabau, bahkan tata kehidupan itu tetap diakui dan diperkuat. Seolah-olah Belanda senang dengan adanya tata kehidupan yang demikian.

Tetapi apakah demikian keadaan yang sesungguhnya? Pada dasarnya Belanda tetap saja melakukan hal-hal yang menguntungkan dirinya sendiri. Dengan membiarkan kekuasaan tradisional itu berkuasa terus tanpa dicampuri oleh Belanda akan menyebabkan rakyat lambat laun bersimpati kepada Belanda. Justru hal inilah yang sesungguhnya diinginkan oleh Belanda. Masih sangat terasa oleh pihak Belanda luka-luka yang diderita akibat ketidak-simpatian rakyat pada awal dan bagian kedua abad ke-19 di Sumatra Barat. Kalau pada akhir abad ke-19 ini hal itu terulang lagi mungkin akibatnya akan lebih parah. Oleh karena itu lebih baik mengalah dengan jalan mengambil hati rakyat seperti yang telah disebutkan di atas, sementara itu kekuasaan dan wewenang Laras dan eselon bawahannya dikurangi secara diam-diam, sehingga pada akhirnya mereka itu akan merupakan pelaksana yang baik buat kepentingan Belanda.

Sebaliknya dengan Laras sendiri, sesuai dengan perkembangan zaman, banyak di antara mereka dan keluarga mereka yang telah dapat mengecap dunia pendidikan yang tanpa disadari Belanda nanti akan merupakan bumerang bagi mereka. Dengan demikian maka Laras dan seluruh bawahannya dijabat oleh orang Sumatera Barat sendiri.

Pada eselon yang paling rendah dalam susunan pemerin-

tahan Belanda di Sumatera Barat terdapat *Nagari*, yang merupakan kesatuan teritorial terkecil pada sistem pemerintahan menurut adat di Minangkabau. Kepala Nagari dipilih melalui suatu kerapatan adat atau kerapatan penghulu dalam nagari itu melalui musyawarah. Seorang Kepala Nagari yang telah terpilih dengan sistem demikian oleh Residen Sumatera Barat dikukuhkan dalam sebuah surat putusan atas nama Gubernur Jenderal di Batavia, setelah melalui seleksi yang ketat oleh pemerintah Belanda secara bertahap.

Tingkat pertama oleh Kontrolur yang menerima itu dari Laras. Sesudah disetujui oleh Kontrolur dilanjutkan kepada Asisten Residen. Sesudah mendapat persetujuan pada tingkat ini lalu diteruskan kepada Residen yang kalau disetujui akan segera ditetapkan sebagai kepala Nagari.

Walaupun dilakukan seleksi demikian tetapi sesungguhnya rakyat tidak merasakannya, bahkan sebaliknya mereka merasa sudah merupakan sesuatu kewajiban saja. Demikian pintarnya Belanda mempergunakan keadaan, sehingga segala sesuatu yang mengenai pemerintahan Nagari itu sesungguhnya sudah ditentukan oleh Belanda.

Kedudukan seorang Kepala Nagari merupakan kedudukan yang paling sulit dalam hirarkhi pemerintahan Belanda di Sumatera Barat, karena harus selalu menekan perasaan dalam menjalankan tugasnya. Sebagai seorang kepala dalam suatu Nagari yang diangkat melalui kerapatan adat nagari, dia tidak mempunyai kekuasaan, seluruh kekuasaannya telah dikurangi oleh Belanda. Ke atas dia harus memenuhi seluruh tuntutan Belanda yang disampaikan melalui Kontrolur, yang biasanya tidak sanggup dipenuhi. Ke bawah dia harus memaksa anak kemenakan yang sangat menghantuinya untuk memenuhi segala tuntutan Belanda itu. Sedangkan dia sendiri sangat menyadari akan kesukaran kehidupan anak kemenakannya. Kalau tidak dilaksanakan tugas tersebut, dia mungkin ditangkap dengan segala macam alasan, tetapi kalau dilaksanakan bertentangan dengan hati nurani sendiri. Ibaratnya seperti orang memakan "buah simalakama, dimakan ayah mati, tidak dimakan ibu mati." 11)

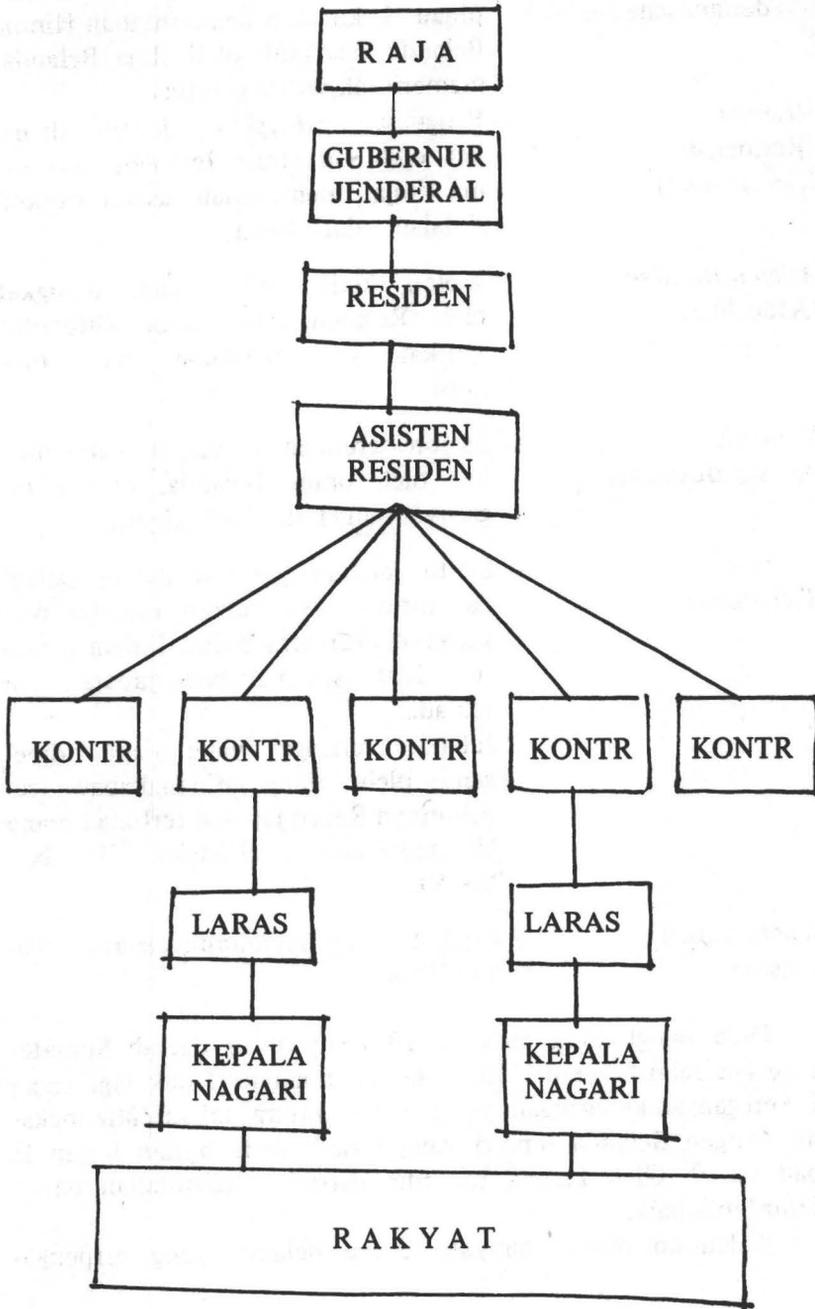
Oleh karena itu, kebanyakan Kepala Nagari sadar terpaksa "main kucing-kucingan" atau "main menang" saja. Sedapat mungkin bersikap pura-pura, bermain sandiwara, tapi kalau terpaksa dilaksanakan juga, tapi dengan resiko yang paling sedi-

kit menimbulkan kerugian.

Disamping hirarki pemerintahan seperti yang telah disebutkan terdapat suatu kekhususan di Sumatera Barat, ialah ditetapkan Padang dan Fort de Kock (Bukittinggi sekarang) sebagai kotapraja. Kepala kotapraja diangkat oleh Asisten Residen dimana Kotapraja itu berada. 10)

Kalau diambil kesimpulan dari apa yang telah diuraikan di atas itu maka terlihatlah gambaran sebagai berikut:

**STRUKTUR PEMERINTAHAN DAERAH  
SUMATERA BARAT**



- Raja Belanda*  
(Nederland) — Berada di Negeri Belanda tetapi pengaruhnya sangat terasa di Indonesia.
- Gubernur Jenderal*  
(Nederlandsche Indie) Berada di Batavia sebagai pucuk pimpinan kekuasaan Pemerintahan Hindia Belanda, diangkat oleh Raja Belanda, memerintah secara otoritas.
- Residen*  
(Residensi/  
Karesidenan) — Penguasa tertinggi di daerah, diangkat oleh Gubernur Jenderal atas nama Raja, memerintah secara otokrasi dalam daerahnya.
- Asisten Residen*  
(Afdeeling) — Eselon kedua di daerah, diangkat oleh Residen, atas nama Gubernur Jenderal juga berkuasa secara otokrasi.
- Kontrohur*  
(Onder afdeeling) — Eselon terendah di daerah yang diangkat oleh orang Belanda, karena tugasnya, sangat ditakuti rakyat.
- Laras*  
(Kelasaran) — Suatu jabatan yang diadakan Belanda untuk memudahkan mereka berkuasa di Sumatra Barat. Dalam struktur adat Minangkabau jabatan ini tak ada.  
Jabatan tertinggi yang dapat dipegang oleh orang Minangkabau (sebelumnya Regent jabatan tertinggi orang Minangkabau, awal/bagian II abad ke-19).
- Kepala Nagari*  
(Nagari) — Pejabat yang memimpin suatu wilayah Nagari.

Pada penghujung abad ke-19 keadaan di daerah Sumatera secara relatif berada dalam keadaan aman. Tidak lagi terjadi ketegangan-ketegangan yang serius antara rakyat Minangkabau dengan Belanda seperti yang terjadi pada bagian I dan II abad ke-19. Oleh karena itu administrasi pemerintahan dapat diatur lebih baik.

Walaupun makin banyak tenaga Belanda yang berpenga-

laman yang didatangkan ke Sumatera Barat, tetap saja belum sanggup melola administrasi pemerintah Sumatera Barat dengan baik, karena jumlah tenaga mereka itu relatif sedikit jika dibandingkan dengan tugas yang akan digarapnya. Disamping itu bantuan dari orang Minangkabau sendiri tak banyak dapat diharapkan karena pendidikan mereka sangat terbatas. Sebagai contoh: Pada tahun 1852 pegawai Belanda yang ditempatkan di daerah Karesidenan Sumatera Barat hanya sebanyak 76 orang sedangkan mereka harus melola sebanyak 400 buah nagari lebih kurang. Oleh karena itu kebanyakan dari mereka hanya ditempatkan pada pusat-pusat pemerintahan atau pusat-pusat pasar yang penting, seperti di Bukittinggi. Akibatnya mau tidak mau Belanda sendiri terpaksa melatih orang Sumatera Barat untuk ikut melancarkan roda administrasi pemerintahan tersebut. Pada tahun 1882 sudah terdapat 48 buah kantor administrasi pemerintahan daerah yang masing-masing mempunyai pegawai terdiri dari orang Belanda dan orang Sumatera Barat sendiri. Tugas utama mereka adalah mengawasi jalannya pemerintahan Nagari-Nagari, karena dalam pemerintahan Nagari inilah sesungguhnya dijalankan administrasi pemerintahan yang penting di Sumatera Barat. Sedangkan Nagari-Nagari itu sendiri sudah diatur secara tradisional oleh kepala Nagarnya.

Secara tradisional di Sumatera Barat peranan *penghulu suku* 12) sangat penting dan menentukan dalam masyarakat. Dalam hal pengaturan suku atau kaumnya kepala suku atau penghulu suku itu mempunyai kekuasaan penuh terhadap sukunya dan tidak dapat dicampuri oleh suku lain, apalagi oleh orang asing seperti Belanda. Belanda sendiri sesungguhnya sudah menyadari keadaan yang demikian berdasarkan pengalaman mereka selama berada di daerah Sumatera Barat dan berdasarkan laporan ahli adat mereka yang juga diperbantukan sebagai pegawai sipil Belanda. Sedikit saja Belanda ikut campur dalam masalah suku di Minangkabau, dengan segera mereka mendapat reaksi spontan dari anggota-anggota suku itu melalui kepala atau penghulu sukunya. Oleh karena itu Belanda mengambil sikap tidak akan ikut mencampuri urusan suku itu bahkan sedapat mungkin ikut mempertahankan eksistensinya, tetapi disamping itu berusaha memanfaatkannya sedemikian rupa sehingga kepentingan Belanda di Sumatera Barat dapat disalurkan melalui penghulu suku itu. Disinilah letak efektivitas tak-

tik Belanda yang secara pelan-pelan menghancurkan sistem dan struktur adat yang sangat kuat dalam masyarakat Minangkabau. Tetapi syukurlah kehancuran itu hanya terjadi pada kulitnya dalam arti kata hanya terjadi pada sebagian oknum penghulu suku, sedangkan sistem dan struktur adatnya tak tergoyahkan oleh usaha Belanda itu.

Demikianlah Belanda mempergunakan keadaan dan situasi di Sumatera Barat yang demikian untuk memperkuat dan memperkokoh kekuasaannya dan mengeruk keuntungan yang besar. Di antara penghulu suku ada yang tetap dibiarkan sebagaimana adanya tanpa diganggu dan dicampuri, tetapi sebagian dari mereka ada yang diangkat dan dijadikan Belanda sebagai pegawai pemerintahan dengan fasilitas untuk menggunakan wewenang dan kekuasaannya lebih besar. Orang-orang yang demikian lambat laun diberikan pendidikan untuk sekadar mengetahui bagaimana melola administrasi pemerintahan.

Dengan pemberian pendidikan itu tidak berarti bahwa Belanda sudah berbaik hati terhadap rakyat Sumatera Barat lalu memberikan pendidikan secara cuma-cuma. Tidak demikian keadaan yang sebenarnya. Dalam hal ini Belanda mempunyai dua tujuan yang tersembunyi. Pertama, mempersiapkan tenaga terdidik untuk segera dapat dipergunakan membantu Belanda dalam menjalankan kelancaran administrasi pemerintahan, karena mereka sendiri sangat kekurangan tenaga. Tentu saja pendidikan ini diberikan tidak merupakan pendidikan tinggi, tapi cukup sekedar untuk mengetahui pengelolaan administrasi pemerintahan tingkat rendah. Kedua, tujuan Belanda adalah untuk mempersiapkan suatu golongan adat sendiri yang sudah terlatih dan diberikan dasar pendidikan Barat yang sangat mementingkan masalah secara individual. Mereka yang telah mendapatkan pendidikan yang demikian, kalau dilepaskan lagi ke tengah kehidupan masyarakat akan memperlihatkan sikap dan cara berpikir yang lain dari sikap dan cara berpikir tradisional. Karena Belanda mengembangkan sistem birokrasi yang sama sekali tidak berdasarkan hukum adat, maka mereka yang telah mengalami pendidikan itu akan timbul ambisi pribadi yang pada saatnya akan mampu melakukan segala cara untuk kepentingan dan keuntungan pribadinya. Dari mereka inilah Belanda mengharapkan timbulnya suatu kekuatan baru secara otomatis yang akan bertentangan atau akan mele-

mahkan kekuasaan adat secara berangsur-angsur.

Tujuan yang kedua inilah yang sangat berbahaya bagi kelestarian adat istiadat Minangkabau. Dari tujuan ini dapat kita ketahui bahwa bagaimana baiknya sikap dan tindakan Belanda yang tampak dari luar, tetapi pada hakekatnya tetap bertujuan untuk menghancurkan kekuatan yang hidup dalam masyarakat, sehingga akhirnya yang tinggal hanya kekuatan yang membantu Belanda. Usaha ini dijalankan Belanda dengan sistematis hingga rakyat Minangkabau sebagian besar tidak merasakannya. 1845 awal abad ke-20 tentu saja tidak sama dengan apa yang telah digambarkan itu, misalnya pangkat Regen mulai dihapus sesudah tahun 1845, sedangkan sebelumnya sangat dibutuhkan oleh Belanda. Demikian juga mulai awal abad ke-20 sistem administrasi pemerintahan ini mengalami sedikit perubahan tetapi secara garis besarnya struktur yang telah dijalankan itu tetap berlaku. Perubahan itu terutama terjadi untuk usaha penyempurnaan.

## B. SOSIAL BUDAYA

### 1. Pendidikan

Dalam rangka modernisasi sistem pemerintahan Belanda di Sumatera Barat, Belanda membutuhkan tenaga terdidik atau kader terlatih untuk mengisi jabatan yang akan ditinggalkan oleh pejabat yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan.

Untuk pembentukan kader atau tenaga terdidik Belanda terpaksa harus membangun lembaga pendidikan. Sekolah pertama yang didirikan Belanda bertujuan untuk membentuk tenaga atau kader pegawai rendah dan murah. Oleh karena itu Sekolah yang didirikan itu pada tahap pertama merupakan sekolah-sekolah rendah, seperti Sekolah Nagari, Sekolah Kelas II, Sekolah Kelas I, *Vervolg school*, *Schakel School* dan lain-lain.

Demikianlah di Sumatera Barat tahun 1840 mulai didirikan Sekolah Nagari yang mendapat persetujuan Raja Belanda tanggal 30 September 1848. Setelah berjalan beberapa tahun Belanda menganggap pendirian sekolah-sekolah itu sebagai suatu keberhasilan karena membantu pemerintah Belanda menambah tenaga pegawai rendah dan murah yang memang sangat dibutuhkan di Sumatera Barat waktu itu. Karena perkembangan

situasi dan keadaan, makin terasa akan perlunya peningkatan mutu pendidikan. Untuk itu diperlukan guru yang terdidik khusus untuk itu.

Untuk memenuhi kebutuhan tenaga guru yang demikian maka pada 1 April 1856<sup>13)</sup> di Bukittinggi didirikan Sekolah Normal.<sup>14)</sup>

Tamatan Sekolah Normal itu tidak saja dipekerjakan sebagai guru pengembang pengetahuan dan kebudayaan Barat, tetapi juga sebagai pegawai sipil dan tenaga jaksa di Badan Peradilan (*Landraad*) yang disebar bukan saja di Sumatera Barat, tetapi juga keseluruh daerah Sumatera. Bersamaan dengan dihasilkannya tenaga-tenaga guru itu, sekaligus berarti bahwa unsur pengembang kekuasaan Belanda dan kebudayaan Barat juga mulai diproduksi secara sistematis dan terarah.<sup>15)</sup>

Dari 28 orang tamatan Sekolah Normal angkatan pertama, hanya 12 orang yang diangkat menjadi guru pada Sekolah Nagari, sedangkan selebihnya ada yang bekerja sebagai pegawai administrasi pemerintahan, jaksa, pengawas gudang dan lain-lain jabatan bukan guru.

Satu hal yang perlu diperhatikan disini ialah bahwa orang Minangkabau tamatan Sekolah Normal itu, baik yang bekerja sebagai guru, maupun pegawai sipil lainnya, dalam bidang tugasnya menunjukkan prestasi kerja yang baik. Bahkan hasil kerja yang mereka capai luar perkiraan orang Belanda sendiri, terutama mereka yang bekerja sebagai pegawai administrasi pemerintahan Belanda rata-rata menunjukkan hasil yang gemilang. Rupa-rupanya pekerjaan ini cocok bagi orang Minangkabau.

Akibat sampingan dari pendidikan yang diberikan Belanda itu adalah, pada pertengahan abad ke-19 di Sumatera Barat muncul kaum terpelajar yang mulai terbuka pikirannya terhadap berbagai kepincangan dalam kehidupan masyarakat. Ilmu yang mereka perdatap telah menimbulkan cara berfikir kritis, timbul daya kritik terhadap kehidupan yang selama ini mereka diamkan saja, antara lain terhadap kekakuan pelaksanaan hukum adat dan kekuasaan asing yang menjajah mereka.

Karena penghasilan mereka sebagai pegawai Belanda melebihi kebutuhan hidup mereka dan hasil pendidikan yang mereka peroleh banyak mendatangkan manfaat, maka akhirnya timbul kegairahan dan minat yang besar dikalangan masyara-

kat untuk mengikuti pendidikan formal yang diadakan Belanda terutama terhadap pendidikan yang lebih tinggi tingkatannya masyarakat, terutama Kaum terpelajar menyadari bahwa pendidikan yang diberikan pada Sekolah Nagari tingkat rendah tidak banyak mendatangkan manfaat bagi mereka, hanya sekedar pandai menulis dan membaca saja. 16) Oleh karena itu bagi masyarakat yang berkecukupan timbul minat yang lebih tinggi, untuk menyekolahkan anak-anak mereka ke Jawa, di mana terdapat lembaga pendidikan yang lebih tinggi seperti Sekolah Dokter Jawa, bahkan ada juga mengirim anak mereka ke negeri Belanda untuk dididik menjadi ahli hukum, ahli Ekonomi dan sebagainya. Kesempatan untuk itu mudah mereka peroleh, karena sebagai pegawai administrasi pemerintahan Belanda, mereka memperoleh keringanan dan fasilitas dari Belanda sendiri dan perongkosan dibayar dengan gaji yang berlebih buat hidup saja.

Tenaga-tenaga beginilah yang kemudian sebagian dari mereka menjadi *ujung tombak* dalam proses persiapan kemerdekaan Indonesia, lebih-lebih sesudah abad-20.

Inilah efek sampingan yang sama sekali tidak diperkirakan oleh Belanda dari semula. Belanda menggerakkan dan mendidik mereka dalam rangka memantapkan kekuasaan politik ekonomi mereka di Sumatera Barat. 17) Tenaga mereka diharapkan akan muncul sebagai kekuatan baru yang akan menentang kekuatan adat dan kekuatan agama yang hidup dengan kuat dalam masyarakat, karena dasar pendidikan mereka yang mengutamakan unsur kebudayaan Barat sudah dipertentangkan dengan prinsip-prinsip kaum adat dan alim ulama Minangkabau. Tetapi setelah mata mereka terbuka justru sebaliknya yang terjadi. Mereka mulai melihat kepincangan dalam kehidupan masyarakat yang setiap saat tampak makin jelas oleh mereka. Memang sebagian tujuan orang Belanda semula dapat juga dicapai, tetapi rasa harga diri dari orang Minangkabau yang sangat tertekan pada akhirnya menghilangkan usaha untuk mencapai keuntungan pribadi dan berubah dengan usaha untuk membangkitkan harga diri dari mereka inilah pada akhirnya muncul berbagai kekuatan embrio untuk mempersiapkan kemerdekaan.

Tetapi sampai pada akhir abad ke-19 mereka belum merupakan suatu kekuatan yang akan dapat mendobrak kekuasaan

an penjajahan. Mereka barulah merupakan kaum intelek Barat yang dipergunakan Belanda untuk mempertahankan kepentingan politik ekonominya. Tetapi sebagai suatu kekuatan embrio dalam masyarakat Minangkabau mereka sudah memunculkan dirinya. 18)

Di Sumatera Barat, seperti juga halnya dengan daerah-daerah lain di Indonesia didirikan tiga macam sekolah menurut cara penerimaan muridnya. Pertama, adalah Sekolah Desa Nagari 19), Sekolah Kelas II, Sekolah Kelas I yang disediakan bagi rakyat biasa. 20)

Kedua, adalah sekolah yang menerima murid anak-anak para bangsawan, pegawai sipil pada pemerintahan Belanda 21), orang kaya. Sekolah yang demikian antara lain adalah HIS, Mulo, AMS, *Kweekschool* dan sebagainya. Adakalanya pada sekolah ini juga menerima anak-anak Belanda.

Ketiga, adalah sekolah yang hanya menerima anak-anak orang Eropah. Sekolah ini dinamakan *Europeesche School*, sampai abad ke-19 di Sumatera Barat belum terdapat sekolah Tinggi.

Pada tahun 1870-an administrasi pemerintahan kolonial Belanda mengalami perubahan, yaitu menuju ke arah lebih modern untuk melakukan perubahan ke arah organisasi administrasi modern diperlukan tenaga terdidik dan terlatih yang berpengalaman. Pendidikan yang diberikan pada Sekolah Nagari dirasakan tidak cukup lagi memberikan kecakapan dan keterampilan yang memadai untuk peningkatan dan modernisasi administrasi pemerintahan, maka sistem dan mutu pendidikan Sekolah Nagari harus diperbaiki.

Disamping itu Sekolah Nagari sejak mulai didirikan tidak mendapat penghargaan dari orang Sumatera Barat sendiri; sebahagian orang Minangkabau merasa tidak perlu dengan lembaga pendidikan Sekolah Nagari itu, karena mereka kurang yakin dengan mutu pendidikannya dan kurang mempercayai Sekolah tersebut. Apalagi sekolah-sekolah demikian tidak menambah prestasi dan prestasi mereka dalam masyarakat. Dari-pada masuk sekolah Nagari, lebih baik mereka masuk sekolah tradisional 22) yang telah lama ada di Sumatera Barat. Mereka lebih merasa terhormat jika masuk sekolah tradisional daripada masuk Sekolah Nagari.

Di samping itu keadaan Sekolah Nagari itu sendiri me-

mang sangat menyedihkan. Kebanyakan muridnya berasal dari orang tua yang kurang mampu, karena kebanyakan mereka adalah pegawai lapisan terbawah yang penghasilannya tak cukup. Hanya masalah prestise saja yang menyebabkan mereka menyekolahkan anak-anaknya, padahal sebetulnya kurang mampu. Keadaan yang beginilah menyebabkan Sekolah Nagari kurang nilainya dalam pandangan masyarakat Sumatera Barat. Tamatan Sekolah Nagari seolah-olah tidak dihargai oleh Belanda sendiri, karena walaupun mereka diangkat menjadi pegawai Belanda, tempat pada tempat yang paling rendah. Demikian keadaan sekolah Nagari menjelang tahun 1870.

Sejalan dengan perbaikan pemerintahan Belanda, maka tahun 1870 lembaga pendidikan Sekolah Nagari diperbaiki, baik kurikulum maupun pembiayaannya. Dalam kurikulum mulai terlihat nilai pendidikan yang berguna ketimbang sebelumnya. Mengenai biaya, langsung dikeluarkan dari dana pemerintahan Belanda. Dengan demikian penyelenggaraan pendidikan dapat diperbaiki.

Sejalan dengan itu pendidikan Sekolah Normal pun mendapat perbaikan, dan akan diusahakan menjadi sebuah lembaga pendidikan yang terbaik di Indonesia. 23)

Perluasan daerah kekuasaan Belanda di akhir abad ke-19 memberi kesempatan kepada orang Minangkabau, dan mendorong orang Sumatera Barat untuk mengorganisasi dirinya supaya dapat menyesuaikan diri dengan pembaharuan yang dilakukan Belanda.

Sejalan dengan perluasan pendidikan di Sumatera Barat pada akhir abad ke-19 itu, timbul pula masalah nilai baru dalam kehidupan masyarakat. Berbagai corak pendidikan memberikan pula bermacam kedudukan dan peranan dalam masyarakat. Pendidikan seseorang menentukan prestisenya di tengah masyarakat. Makin tinggi pendidikan seseorang makin tinggi kedudukannya di tengah masyarakat dan makin besar perannya. Kemampuan berbahasa Belanda menjadi kriteria utama dalam penentuan penerimaan pegawai pemerintahan Belanda. Makin hebat kemampuan bahasa Belanda seseorang, makin tinggi pula prestisenya.

Dari sekian banyak kedudukan yang terhormat pada akhir abad ke-19 di Sumatera Barat, tiga kedudukan yang menonjol, yang dianggap luar biasa oleh orang Minangkabau, ialah:

*Angku Doto, Angku Lareh, Angku Guru. 24)*

Karena ada dua tempat yang sangat dihormati masyarakat dapat dicapai melalui pendidikan, maka minat rakyat umumnya terhadap pendidikan makin meningkat, apakah pendidikan rendah, menengah atau pendidikan tinggi sekalipun. Hal ini menyebabkan banyak orang Minangkabau yang dikirim ke Jawa untuk melanjutkan pendidikannya, bahkan tidak kurang banyaknya yang dikirim ke Negeri Belanda. Nilai pendidikan makin dihargai masyarakat Minangkabau sejak tahun 1870 pada waktu mutu pendidikan di Sumatera Barat mulai diperbaiki.

Pada akhir abad ke-19 ada suatu masalah pendidikan di Sumatera Barat yang tak dapat dilupakan karena sangat besar artinya bagi daerah Sumatera Barat di kemudian hari.

Semenjak Tuanku Imam Bonjol ditangkap dan dibuang keluar Sumatera, maka mulai saat itu di Sumatera Barat terasa adanya kekosongan pemimpin di bidang agama Islam. Hal ini berlangsung sampai dengan bahagian ketiga abad ke-19 ketika muncul kembali ulama-ulama muda Islam di Sumatera Barat.

Pada waktu itu untuk menunaikan ibadah haji ke Mekah bagi penganut Islam yang mampu tidak dihalangi oleh Belanda. Salah seorang yang naik haji dari Sumatera Barat adalah Ahmad Chatib yang sesudah menunaikan haji dan menuntut ilmu pengetahuan Islam secara mendalam, akhirnya menetap di Mekah.

Syekh Ahmad Chatib inilah yang memberikan petunjuk kepada orang Minangkabau yang menunaikan haji ke Mekah.

Ahmad Chatib adalah salah seorang putra Minangkabau yang menentang hukum warisan menurut adat, karena bertentangan dengan hukum agama Islam. Kepada setiap orang Minangkabau yang naik haji di Mekah beliau selalu tekankan bahwa hukum warisan Minangkabau itu bertentangan dengan hukum agama Islam. Syekh Ahmad Chatib tidak bosan-bosannya memberi penjelasan kepada ulama Islam Minangkabau yang datang ke Mekah.

Salah seorang ulama Islam Minangkabau yang sangat berpengaruh oleh ajaran Syekh Ahmad Chatib adalah Muhammad Yahya dari Luhak Tanah Datar. Setelah kembali dari Mekah Muhammad Yahya menetap di Simabur, yaitu salah satu Kenagarian di dalam Luhak Tanah Datar. Disana beliau mengembang-

kan ajaran agama Islam secara murni menurut hukum Islam seperti yang terdapat di dalam Al Qur'an . Kemudian Muhammad Yahya terkenal dengan sebutan *Tuanku Simabur*.

Murid-murid Tuanku Simabur sangat banyak yang berdatangan dari seluruh pelosok Minangkabau. Sekolah dilaksanakan dengan sistem pendidikan surau. Jauh sebelum kedatangan Belanda ke Sumatera Barat pendidikan surau ini sudah ada di Sumatera Barat. Murid-murid duduk mengelilingi gurunya sambil mendengar apa yang diucapkan guru tersebut. Sampai dengan awal abad ke-19 pelajaran-pelajaran itu sudah diperluas dengan membicarakan hukum Islam, ilmu Nahu, tafsir Al Qur'an, ilmu fiqh dan lain-lain walaupun sistemnya masih tetap tidak berubah. Murid diharuskan menghafal semua ilmu yang diajarkan gurunya. Sesudah hafal baru ditambah dengan pengajian baru. Sesudah tamat belajar semua ayat Al Qur'an harus sudah terhafal. Demikian juga mengenai hadis nabi, ilmu nahu dan lain-lain itu. Setamat belajar dapat dikatakan seorang merupakan sebuah kamus Islam yang berjalan.

Demikian juga dengan Tuanku Simabur. Bedanya sedikit ialah tentang isi pelajaran Tuanku Simabur sangat menekankan pada ajaran Islam. Bagaimana supaya murid-murid beliau dapat memahami segala ajaran Islam itu dan mempraktekkan dalam kehidupan masyarakat. Seorang murid tidak hanya merupakan kamus lagi tetapi harus dapat memahami isinya.

Khusus mengenai hukum waris menurut Islam mendapat perhatian beliau yang sangat besar dan sangat ditekankan kepada murid-murid beliau, karena mengenai hukum waris itu kenyataan yang berlaku dalam masyarakat Minangkabau sangat bertentangan dengan hukum waris menurut ajaran Islam. Hal ini beliau kemukakan bukan saja di surau tempat pengajian, tetapi juga pada setiap tempat diluar surau itu dan dikemukakan secara terus terang ke hadapan khalayak ramai.

Khusus mengenai hukum adat tentang kaitan warisan sangat ditentang oleh Tuanku Simabur. Hal ini selalu beliau kemukakan pada setiap kesempatan, dalam khotbah-khotbah Jum'at, pengajian-pengajian agama, dalam tulisan beliau dan lain-lain. Tantangan ini terutama ditujukan kepada kaum adat yang melaksanakan hukum adat dalam harta warisan itu. Disamping itu tidak sedikit ulama Islam yang beliau serang, yaitu ulama-ulama yang ikut membantu menegakkan hukum adat menge-

nai harta warisan ini.

Akibatnya timbul reaksi dari kaum adat dan ulama-ulama penyokongnya yang juga membalas semua serangan Tuanku Simabur itu dengan penerangan kepada rakyat. Hal yang demikian menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat yang kian lama kian menghebat, akhirnya pertentangan ini meningkat menjadi pertentangan fisik antara pengikut Tuanku Simabur dengan pengikut kaum adat. Karena sudah meningkat pada pertentangan fisik akhirnya pemerintah Belanda ikut campur dan menangkap Tuanku Simabur dan dibuang ke Cirebon tahun 1904.

Nilai yang penting terhadap sistem pendidikan Tuanku Simabur ini bukanlah dari segi gelombang pertentangan yang ditimbulkannya, tetapi pengaruh beliau terhadap murid-murid beliau di kemudian hari. Dalam hal mengajarkan agama Tuanku Simabur boleh dikatakan sebagai pelopor pembaharuannya. Ajaran Islam yang diberikan melalui perdebatan dengan murid-murid beliau, Murid tidak hanya menerima secara pasif, tetapi ikut mengeluarkan pendapat terutama terhadap penyimpangan dalam praktek di tengah masyarakat. Beliau sendiri menganjurkan kalau perlu memperbaikinya itu melalui jalan kekerasan.

Cara memberikan pengajaran inilah yang besar nilainya terhadap pengikut beliau. Hal ini akan kelihatan nanti pada awal abad ke-20, dimana ulama-ulama Islam pengikut beliau menyempurnakan sistem pengajaran surau itu dengan sistem "madrasah". 25)

Faham yang disebarkan Tuanku Simabur ini banyak sedikitnya ikut menentukan jalannya sejarah Sumatera Barat pada abad ke-20 dan akan membangkitkan nasionalisme lokal di bahagian pertama abad ke-20.

Kalau dilihat secara tegas, maka sistem pendidikan surau ini tidak banyak memberikan keuntungan pada rakyat di abad ke-19 itu. Tetapi hasil pendidikan surau ini nanti menimbulkan faham nasionalisme lokal pertama di Minangkabau yang sangat mempengaruhi corak sejarah Sumatera Barat. Disitulah letak nilainya sistem pendidikan surau yang oleh Belanda tidak dipandang sebelah mata,

## 2. Seni Budaya

Perkembangan Seni Budaya pada akhir abad-19 ini tidak banyak mengalami perubahan. Kesenian tradisional Minangkabau tetap hidup dengan iramanya yang spesifik. Tari piring, misalnya hampir sama dengan tari piring yang sekarang, hanya macamnya tidak sebanyak tari piring sekarang serta kegunaannya khusus untuk pesta adat. Begitu juga dengan tarian lain hanya dikeluarkan pada pesta adat seperti *tari sewa* dan *tari gelombang* yang sampai sekarang masih tetap ada. Permainan *randai* juga tetap berkembang waktu itu, hanya saja waktu penampilannya tidak seperti sekarang. Penampilan *randai* dengan tujuan pengumpulan dana belum ada pada waktu itu. Sedangkan pakaian anak *randainya* lebih orisinal dari pakaian anak *randai* Sumatera Barat sekarang. Begitu juga dengan seni bunyi-bunyian *salung*, kecapi, rebana, rebab dan sebagainya masih hampir sama seperti yang sekarang.

Seni ukir dan seni pahat gaya Minangkabau seperti yang terlihat pada seni ukir dan seni pahat pada rumah adat Minangkabau di Taman Mini Jakarta dewasa ini, merupakan mode pada setiap pembuatan rumah penduduk. Setiap jenis ukuran itu mempunyai nama dan makna tersendiri pula.

Gaya dan teknik pembuatannya hampir sama dengan gaya dan teknik pembuatan ukiran yang sekarang, hanya pada waktu itu alat-alatnya masih sederhana dan masih dapat diproduksi sendiri. Demikian juga dengan pakaian adat, tidak berapa beda dengan pakaian orang Minangkabau yang hidup pada abad ke-20 ini.

Tetapi ada suatu kehidupan seni budaya yang waktu itu hidup ditengah masyarakat, sekarang tidak ada lagi. Pada tiap upacara adat selalu dimeriahkan dengan tarian dan nyanyian tradisional Minangkabau. Untuk lebih memeriahkan suasana pesta upacara tersebut dan khusus bagi yang muda-muda juga diadakan sejenis pertandingan dalam bentuk ketangkasan. Ketangkasan itu dapat dipertunjukkan dalam melemparkan lembing menuju suatu sasaran, mengadu kepandaian bermain pedang, beradu ketangkasan menunggang kuda, bermain sepak raga. 26) Jenis permainan pertandingan ini merupakan olah raga bagi para pemuda waktu itu. Lempar lembing tidak seperti sekarang, yaitu siapa yang terjauh lemparan dia yang menang. Lempar lembing waktu itu ditujukan pada suatu sasar-

an yang telah ditentukan dalam jarak yang tertentu pula. Siapa yang paling tepat dan paling sering mengenai sasarannya, dialah yang menang. Permainan pedang sejalan dengan kepandaian silat dilaksanakan. Makin terkenal seorang pendekar makin mahir permainan pedangnya. Batas kalah menang seseorang dalam permainan pedang tidak hanya sekedar menyentuh lawan dengan ujung pedang, tapi sampai salah seorang takut menghadapi lawannya. Atau kalau keduanya sama berani dan pendekar, batas kalah menang sampai ada yang luka parah dan tidak kuat lagi mengangkat senjatanya. Bahkan ada yang sampai meninggal. Karena itu penggemar permainan pedang tidak banyak jumlahnya, tapi dari yang sedikit penggemarnya itu, baik yang menang, maupun yang kalah, kedua-duanya dihormati oleh masyarakat. Permainan menunggang kuda sampai sekarang masih ada dalam bentuk pacuan kuda. Pada waktu itu orang naik ke punggung kuda tanpa pelana. Ketangkasan dipertunjukkan sewaktu menaiki kuda dan sewaktu menunggangnya melalui jalan semak-semak. Jenis permainan begini yang dipergunakan dalam upacara adat atau pesta perkawinan tidak ada lagi sekarang, sedang pada akhir abad ke-19 itu menjadi mode dalam kehidupan masyarakat.

Pada akhir abad-19 di Sumatera Barat bersamaan dengan ditingkatkannya bidang pendidikan, sekaligus unsur seni budaya Barat juga memasuki Sumatera Barat. Hal ini terlihat dari cara berpakaian sebagian orang Minangkabau. Masih pada awal abad ke-19 orang Minangkabau belum mau memakai pentalon. Kebanyakan mereka memakai kain sarung atau celana hitam dari kain katun atau *merekan*. Tetapi pada akhir abad ke-19 kelihatannya pengaruh cara berpakaian gaya Barat mulai menampakkan dirinya di Sumatera Barat, terutama bagi orang Minangkabau yang telah mengeyam sistem pendidikan Belanda. Bersamaan dengan itu pengaruh musik Barat juga terasa. Citar, terompet dan lain-lain mulai digemari rakyat. Not-not *heptatonis* mulai terdengar di samping not-not yang *pentatonis*. Lagu dengan tujuh irama tangga nada mulai terdengar di samping lagu yang bertangga nada lima di tengah masyarakat. Cara berpikir dan bertingkah lagi menurut dasar kebudayaan Barat juga terlihat mulai hidup dalam masyarakat.

Tetapi walaupun sudah kelihatan adanya kehidupan seni budaya Barat dalam masyarakat Minangkabau, namun pengaruh-

nya secara keseluruhan boleh dikatakan tidak ada terhadap kehidupan seni budaya Minangkabau. Paling-paling yang kelihatan sedikit agak menonjol adalah di sebahagian kecil daerah pesisir, sedangkan di daerah pedalaman sama sekali tidak kelihatan. Konstruksi bangunan rumah juga mulai kelihatan ada pengaruh bangunan Barat, tapi itupun di sebahagian daerah pesisir saja.

### C. KEHIDUPAN EKONOMI

Pada pertengahan abad ke-19, sebelum Belanda memperkenalkan tanaman kopi di Sumatera Barat, kehidupan ekonomi desa masih tergantung dari hasil desanya sendiri. Mata pencaharian penduduk sebagian besar adalah bertani. Tanaman utama mereka ialah padi. Bertani di sawah dengan tanaman padi itulah mata pencaharian pokok rakyat Sumatera Barat waktu itu.

Musim turun ke sawah sangat lama, paling cepat sekali dalam setahun, tergantung dari turunnya hujan. Kalau musim kemarau panjang, maka lama pula waktunya untuk mulai turun ke sawah. Cara pengerjaan sawah adalah mempergunakan cangkul dan bajak. Ada sawah yang dikerjakan sendiri-sendiri dan ada pula yang dikerjakan secara kelompok atau gotong royong.

Lamanya padi di sawah kira-kira tujuh bulan dari mulai mencangkul, menanam sampai panen. Cara menuai padi adalah dengan tuai. Sisa batang padi yang ditinggal di sawah dibiarkan demikian saja sampai busuk. Proses pembusukan ini kadang-kadang memakan waktu enam bulan, selama itu sawah termasuk tidak digarap.

Dilihat dari cara penggarapan sawah yang sederhana itu yang praktis satu kali dalam 13 atau 14 bulan, bahkan kadang-kadang lebih, kelihatannya kehidupan perekonomian Sumatera Barat waktu itu agak memadai. Mereka tak perlu buru-buru turun ke sawah, tak perlu dua kali setahun panen. Sedangkan padi merupakan sumber kehidupan mereka, maksudnya dari padi itu mereka menjual untuk mendapatkan uang, kemudian digunakan untuk memenuhi keperluan mereka antara lain: pakaian, rumah, keperluan rumah tangga sehari-hari dan lain-lainnya. Oleh karena itu orang yang mempunyai banyak padi dianggap orang kaya, orang berharta, karena dari ha-

sil penjualan padi itu mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk memperoleh padi mereka tinggal mengerjakan sawah yang telah tersedia secara turun temurun.

Di samping padi yang merupakan mata pencaharian hidup pokok sebagian kecil penduduk juga mempunyai pekerjaan tambahan sebagai sumber penghasilan kedua, misalnya berdagang, menukang, menenun, mengrajin dan sebagainya yang mereka kerjakan sewaktu tidak musim turun ke sawah. Bagi orang yang tidak mempunyai modal atau kepandaian lainnya waktu antara satu musim ke sawah dengan musim berikutnya dipergunakan mengerjakan kebun atau ladang dengan tanaman tembakau, cabe, buah-buahan, sayuran dan tanaman palawija lainnya. Semuanya ini hanya sebagai pekerjaan sambilan atau mata pencaharian tambahan disamping ke sawah, walaupun kadang-kadang waktu untuk mengerjakan pekerjaan tambahan itu sampai lebih dari enam bulan. Tetapi kalau sudah mulai turun ke sawah semuanya ditinggalkan atau dikerjakan pada sore atau malam harinya saja. Khusus tentang memelihara ternak dilakukan sepanjang tahun.

Pemerintahan Belanda di Sumatera Barat melihat bahwa para petani mengerjakan sawahnya tanpa memperhitungkan waktu dengan baik. Disamping itu areal sawah yang dikerjakan dari tahun ke tahun, tidak bertambah, sedangkan tanah yang akan digarap masih sangat luas.

Hal ini mendatangkan pikiran bagi Belanda, lebih-lebih lagi tenaga Indonesia makin banyak yang dipekerjakan oleh Belanda. Sumatera Barat merupakan daerah yang potensial sebagai penghasil beras yang dibutuhkan Belanda, terutama untuk keperluan di pulau Jawa. Pemikiran ini menyebabkan Belanda akhirnya ikut campur dalam masalah pengerjaan sawah rakyat tersebut.

Pada mulanya Belanda mendesak pemuka-pemuka masyarakat dan penghulu-penghulu di Sumatera Barat untuk mempeluas areal sawah mereka. Agar hasil panen besar maka cara pengerjaan sawah harus diperbaiki. Waktu turun ke sawah yang lebih dari satu tahun itu diatur oleh Belanda menjadi kira-kira tujuh bulan saja, sehingga panen dapat dilakukan dua kali dalam satu setengah tahun. Hal ini berarti peningkatan satu kali lipat dari cara sebelumnya. Supaya waktu turun ke sawah tidak tergantung kepada musim penghujan, maka sistem iriga-

si perlu diperbaiki. *Bandar-bandar* 30) diperbaiki, daerah kering dialiri dengan air. Daerah yang belum ada *tali bandarnya* dibuat irigasi menurut sistem terbaru. Semua ini dilaksanakan Belanda supaya panen padi dapat ditingkatkan.

Bersamaan dengan itu, pengawasan terhadap tanaman padi juga diperketat. Pengawasan ini dianggap perlu karena orang Sumatera Barat belum pandai mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Disamping itu pengawasan ini perlu digiatkan supaya beras Sumatera Barat jangan sampai lari ke Pantai Timur dimana orang Inggris telah menunggu. Dengan adanya pengawasan yang ketat itu pemerintah Belanda dapat membeli beras dalam jumlah besar untuk dikirim ke Jawa melalui pantai barat Sumatera Barat.

Walaupun bermacam usaha yang dilakukan pemerintah Belanda di Sumatera Barat mengenai peningkatan hasil padi ini, tapi akhirnya sampai pada akhir abad ke-19 usaha itu tetap tidak berhasil, walaupun pada bagian ketiga abad ke-19 (1858 - 1866) Belanda dapat membawa beras ke Jawa dalam jumlah besar setiap tahunnya. Tetapi sesudah itu terus menerus sampai menjelang akhir abad 19. Baru pada bagian pertama abad 20 hasil panen padi Sumatera Barat dapat ditingkatkan kembali.

Semua pekerjaan ini, baik yang pokok maupun pekerjaan tambahan hanya dikerjakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri. Tidak ada yang khusus untuk diperdagangkan, apalagi sebagai barang dagang yang akan dijual ke luar daerah mereka.

Apalagi ada kelebihan dari hasil tambahan itu atau untuk menjual padi, mereka membentuk satu pasar yang dinamakan *Pasar Mingguan*. Dinamakan demikian karena pasar itu hanya terjadi satu kali seminggu. Orang Minangkabau menamakan pasar yang demikian dengan *pekan* atau *pokan* menurut dialek masing-masing daerah. Nama ini timbul karena diadakan hanya sekali seminggu, sedangkan seminggu disebutkan orang Minangkabau dengan *sepekan*. Karena itu ada pasar yang bernama "Pekan Senayan", "Pekan Selasa", "Pekan Rabu", "Pekan Kamih", "Pekan Jum'at", "Pekan Satu", "Pekan Akat". 27) Di Nagari mana pasar ini akan diadakan, ditetapkan melalui kesepakatan antara beberapa nagari yang membutuhkannya.

Satu kali dalam seminggu diadakan pula pasar yang lebih

besar, yang menampung segala kegiatan yang tidak tertampung pada "pekan-pekan" itu. Biasanya pasar yang besar ini diadakan pada ibukota Luhak, misalnya untuk daerah Luhak Lima Puluh Kota, diadakan di Payakumbuh dengan nama "Pekan Akat", karena dilangsungkan pada hari Minggu. Untuk daerah Luhak Agam diadakan di Bukittinggi dan dinamai "Pekan Satu", karena dilaksanakan pada hari Sabtu dan sebagainya.

Pasar yang demikian masih hidup sampai tahun 1977 ini di daerah Sumatera Barat, walaupun pasar besarnya sudah diramaikan setiap hari seperti di Padang, di Bukittinggi, di Payakumbuh dan lain-lain ibukota kabupaten sekarang. Sedang untuk pasar di luar kota-kota itu masih tetap berjalan seperti semula.

Pada pasar yang demikianlah terjadinya kehidupan sosial dan kehidupan ekonomi yang nyata dalam masyarakat Minangkabau. Dalam pasar inilah terjadi transaksi jual beli, mulai dari yang sekecil-kecilnya sampai pada yang besar-besar.

Khusus untuk barang-barang yang tidak dapat dihasilkan sendiri, seperti garam, bawang, ikan asin, kain barang kelontong dan lain-lain dilakukan oleh pedagang-pedagang khusus yang mendatangi pasar itu setiap minggunya. Bahkan ada di antaranya yang hidup antara satu pasar dengan pasar yang lain.

Biasanya pasar ini hanya diramaikan sampai tengah hari kira-kira jam satu. Mulai jam dua ke atas pasarnya sudah lenggang karena orang sudah pulang ke tempat masing-masing. Sesudah jam dua para pedagang kelontong dan lain-lain itu mulai membenahi barang-barangnya untuk bersiap-siap membawa barang dagangannya ke pasar berikutnya di tempat lain kesokan harinya. Biasanya barang-barang itu dibawa dengan gerobak atau pedati di waktu malam supaya sampai pada waktunya di pasar berikutnya.

Pada pasar inilah dapat dilihat kehidupan sosial yang nyata dari masyarakat Minangkabau di samping kegiatan kehidupan ekonominya. Pasar bukannya merupakan pusat perekonomian saja tetapi juga merupakan tempat tukar menukar informasi antara satu Nagari dengan Nagari yang lainnya, karena pada hari pasar itulah mereka dapat berkumpul dan bertemu muka. Pada kesempatan itulah mereka menceritakan tentang sesuatu kejadian dalam nagari masing-masing atau mengenai pekerjaan yang sudah diputuskan untuk dilaksanakan pada masa-

masa berikutnya.

Bagi muda-mudi pasar ini merupakan tempat khusus untuk memadu kasih, karena pada hari-hari biasa dalam kampungnya hal itu tidak mungkin dilakukan, dibatasi oleh adat yang sangat ketat. Di pasar itulah mereka dapat berbuat sedikit leluasa, walaupun hanya sekedar bertemu untuk memberikan sepucuk surat. Karena hal itu terjadi di luar daerah masing-masing, maka peraturan yang berlaku buat mereka juga sedikit agak longgar. Tetapi untuk berbuat melampoi batas juga tidak dapat. Demikianlah hampir separoh dari pasar itu diramaikan oleh muda-mudi yang keluar memakai pakaian terbagus mereka dengan tingkah laku yang sengaja dibuat-buat untuk menarik perhatian para pemuda. Pada waktu sekarang khusus mengenai hal terakhir ini masih terdapat dan hidup dalam *Pekan Akat* Payakumbuh.

Memasuki akhir abad 19 ekonomi desa Minangkabau mulai berubah, sesuai dengan keinginan pemerintah Belanda yang secara berangsur-angsur akan menguasai perekonomian rakyat Minangkabau. Pada mulanya kebijaksanaan yang dijalankan pemerintahan Hindia Belanda terhadap pasar ini adalah perdagangan bebas. Rakyat dibiarkan berdagang menurut cara mereka sendiri, sementara itu beberapa macam barang dagang seperti lada, kopi, tembakau dan lain-lain mulai dibeli Belanda dalam jumlah besar kemudian ditumpuk dalam gudang yang mereka dirikan pada pusat-pusat pasar yang penting. Dalam perdagangan yang begini pemerintah Belanda hanya memungut pajak pasar, cukai penjualan dan sebagainya.

Hal ini dibiarkan pemerintah Belanda karena mereka menganggap orang Minangkabau memang berjiwa dagang yang rasional. Tetapi kebebasan ini akhirnya Belanda sendiri menjadi terdesak apalagi setelah kopi mengalahkan barang-barang lain di pasaran dunia. Pemimpin-pemimpin tradisional seperti penghulu dan pemuka masyarakat lainnya muncul sebagai pedagang perantara atau kontraktor dengan pemerintah Belanda di Sumatera Barat.

Dengan meningkatnya harga kopi, di Sumatera Barat perdagangan kopi juga berkembang. Penanaman kopi pun jadi berkembang. Tetapi walaupun demikian, perdagangan kopi ini pada mulanya tidak banyak mendatangkan keuntungan bagi Belanda, karena mereka kalah bersaing dengan kepala-kepala suku

sebagai pedagang perantara, bahkan kadang-kadang sudah menjadi tengkulak kopi. Dengan sendirinya harga pun banyak sedikitnya dapat mereka tentukan dan hal ini sebetulnya tidak disukai Belanda.

Untuk menjamin tersedianya kopi menurut kebutuhan Belanda, akhirnya Belanda menetapkan harga kopi, sehingga para pedagang perantara tidak dapat banyak berbuat lagi, karena rakyat dapat langsung menjual kopinya kepada petugas-petugas Belanda yang ada pada setiap pasar penting.

Supaya lalu lintas kopi dapat diatur dengan mudah, maka Belanda membuat beberapa jalan baru yang menghubungkan pusat-pusat kekuasaan Belanda di Padang dan Bukittinggi dan lainnya dengan daerah pedalaman penghasil kopi, misalnya antara Tiku dengan Meninjau dibuka jalan baru. Antara Padang Pariaman - Padang Panjang juga diperbaharui jalan-jalannya.

Akibat perluasan pembuatan jalan ini, perekonomian rakyat juga berkembang dan Nagari-nagari sepanjang jalan raya itu pun mulai tumbuh roda perekonomiannya. Pedagang-pedagang Minangkabau mulai membentuk kongsi-kongsi dagang untuk menghadapi Belanda yang mau menang sendiri saja dalam perdagangan ini, terutama perdagangan kopi.

Menjelang berakhirnya abad 19 di Sumatera Barat, sifat perekonomian desa masyarakat Minangkabau mulai mengalami perubahan. Belanda maupun para pedagang perantara mulai membeli barang dagang dalam jumlah besar, terutama kopi. Akhirnya rakyat sendiri sebagai penghasil kopi secara tradisional atau secara sambilan saja mulai berusaha menanam kopi untuk keperluan dagang, karena perdagangan kopi mendatangkan keuntungan yang banyak bagi mereka. Usaha yang pada mulanya ditujukan untuk mencukupi kebutuhan sendiri, mulai digiatkan untuk tujuan dijual kepada orang lain, dalam hal ini kepada pedagang-pedagang perantara dan Belanda. Dengan sendirinya timbul persaingan antara petani kopi dalam usahanya memperbanyak hasil kopinya, suatu hal yang selama ini belum pernah terjadi di Sumatera Barat. Tetapi justru hal inilah yang akan menghancurkan ekonomi desa di Minangkabau yang aman dan tenteram. Sejalan dengan perobahan sistem perekonomian itu usaha rakyat mulai terlihat di bidang kopra (kelapa), kasiavera (kulit manis) sebagai tanaman perdagangan, karena hasil dan jenis tanaman ini mendatangkan keuntungan besar pula.

Karena harga kopi makin melonjak di pasaran dunia, akhirnya pemerintahan Belanda di Sumatera Barat menetapkan tanaman kopi secara paksa kepada rakyat Sumatera Barat. Rakyat disuruh menanam kopi di tempat-tempatnya sendiri, atau di tempat yang ditentukan oleh Belanda. Jumlah kopi yang harus ditanam ditentukan oleh pemerintah Belanda. Hasil kopi yang telah ditetapkan itu semuanya harus dijual pada pemerintah Belanda, demikian juga harganya. Selanjutnya hak pengikutan menjadi monopoli pemerintah Belanda lewat badan yang ditunjuk. 28)

Rakyat yang dipaksa menanam kopi itu tidak diberi imbalan apa-apa dan ongkos untuk pengerjaan penanaman kopi ditanggung sendiri oleh rakyat. Bahkan rakyat dipaksa mengerjakannya walaupun musim turun ke sawah sudah tiba. Akibatnya kehidupan rakyat Minangkabau jadi morat-marit, sangat sengsara dan tertekan. Siapa yang tak mau mengerjakan diancam dengan kekerasan atau hukuman, bukan saja bagi pekerjaannya, tetapi juga kepada keluarga mereka. Sistem yang dijalankan Belanda ini dikenal di Sumatera Barat dengan nama *rodi kopi* 29) atau tanaman pekan kopi.

Sistem rodi dalam tanaman kopi di Sumatera Barat ini menghancurkan kehidupan masyarakat Minangkabau. Walaupun terjadi perlawanan dari rakyat, tetapi karena dijalankan dengan keras dan ketat serta dengan organisasi yang teratur sampai ke pelosok-pelosok, sistem rodi ini tetap dipertahankan Belanda di Sumatera Barat hingga beberapa saat walaupun akhirnya pada pemulaan abad 20 Belanda terpaksa menghapuskannya.

Suatu masalah yang perlu dibicarakan dengan adanya sistem rodi dalam tanaman kopi ini adalah masalah penyelundupan kopi di pantai timur Sumatera Barat. Bagaimanapun ketatnya penjagaan Belanda terhadap perdagangan kopi ini, tetap saja masih sangat banyak kopi yang lolos dari pengawasan Belanda. Pedagang-pedagang perantauan Sumatera Barat berusaha mencari jalan keluar setelah Belanda menjalankan sistem rodi kopi dan monopoli pembelian serta pengangkutannya. Jalan keluar itu ialah melalui pantai Timur Sumatera. Dari sana kopi dapat dibawa ke Singapura untuk dijual. Pantai Timur itu dapat ditempuh melalui jalan air (sungai) atau jalan darat walaupun ada pengawasan Belanda. Waktu itu hanya sebagian kecil dari

daerah yang penting yang dapat diawasi oleh Belanda sedangkan sebahagian besar daerah masih tetap terbuka buat penyelundupan. Jalan inilah yang ditempuh oleh pedagang-pedagang Sumatera Barat itu, walaupun sebagian besar penuh dengan hutan belantara dan bahaya sepanjang jalan. Tetapi mereka menganggap lebih baik berdagang dengan Inggris di Singapura daripada menyerahkan kopinya kepada pemerintah Belanda. Karena di Singapura jauh lebih besar keuntungannya jika dibandingkan dengan bahaya di perjalanan, apa lagi di Sumatera Barat mereka tidak akan mendapatkan apa-apa dari kopi mereka, karena semuanya akan diambil demikian saja oleh pemerintah Belanda tenaga pembayaran yang memadai.

Demikianlah karena perdagangan kopi di pantai Timur Sumatera ini makin ramai dan dilakukan secara terang-terangan akhirnya Belanda bertekad untuk menguasai wilayah pantai Timur Sumatera secara keseluruhan untuk menghentikan penyelundupan kopi ke Singapura. Hal ini diputuskan oleh pemerintah Hindia Belanda di Batavia, karena biaya blokade yang telah dilaksanakan terlampau besar. Akhir abad 19 daerah pesisir Timur Sumatera itu telah dapat dikontrol Belanda dengan bermacam-macam cara, baik dengan kekerasan senjata maupun dengan jalan damai melalui perundingan.

Sejalan dengan perkembangan sistem perekonomian baru itu di Sumatera Barat sendiri terbuka kesempatan kerja yang banyak. Untuk melola suatu perdagangan besar diperlukan modal besar dan administrasi yang baik. Sedangkan perdagangan keliling seperti semula tidak mendatangkan keuntungan lagi. Untuk mengurus perdagangan yang baik diperlukan kantor yang tetap dengan kopers pegawai yang tetap pula. Maka timbullah di kalangan orang Sumatera Barat Perseroan-Perseroan Dagang yang berkedudukan di Padang, Bukittinggi atau tempat penting lainnya. Hubungan dagang dengan luar Sumatera Barat, misalnya dengan Jawa, Kalimantan, Singapura sudah menjadi hal yang lumrah. Dalam hal ini orang Sumatera Barat mudah menyesuaikan diri dengan keadaan.

Banyak keluarga Minangkabau yang tinggal menetap di kota-kota untuk kepentingan dagangnya. Mereka mencurahkan perhatian yang lebih besar terhadap usaha dagang ini karena mendatangkan keuntungan yang lebih besar, yang akan menjamin mereka memperoleh kekuasaan dan kedudukan yang

baik dalam masyarakat kolonial. Sebab kekuasaan dan kedudukan yang baik ini akan menyebabkan mereka akan dapat memikirkan keadaan yang sebenarnya yang hidup dalam masyarakat, karena walaupun bagaimana berkuasanya atau baiknya kedudukan orang Sumatera Barat di tengah masyarakat kolonial Belanda itu, tetap saja lebih rendah dari orang Belanda lapisan paling bawah. Hal ini mendatangkan kesadaran kepada mereka bahwa kekuasaan Belanda itu seharusnya diusir dari Sumatera Barat. Bagaimana caranya, mereka sendiri belum menemukan jalannya. Dalam sejarah berdirinya lembaga pendidikan nasional dan organisasi pergerakan nasional pada abad ke-20, pedagang-pedagang yang demikian sangat banyak memberikan bantuannya berupa modal dan tenaga, karena mereka sendiri sudah merasakan bagaimanapun baiknya kedudukan mereka dalam masyarakat, namun mereka tetap hidup dibawah tekanan pemerintah Belanda.

#### D. PERKEMBANGAN ALAM PIKIRAN DAN KEPERCAYAAN.

Secara keseluruhan *Gerakan Paderi* yang membawa rakyat Minangkabau menentang kekuasaan Belanda di Sumatera Barat tidak mencapai hasil seperti yang diharapkan untuk mengubah struktur sosial politik Minangkabau yang telah berakar sangat dalam itu di tengah masyarakat.

Walaupun demikian, dalam beberapa hal nampak juga pengaruhnya. Pertama, hal itu kelihatan dalam kekuatan ulama-ulama. Gerakan Paderi telah dapat memperkuat dan memperluas kekuatan agama melalui sistem sosial politik. Kalau selama ini ulama-ulama besar Minangkabau hanya mementingkan bidang agama mulai pertengahan abad ke-19 dan selanjutnya ulama besar Minangkabau ikut memperbaiki kehidupan masyarakat melalui jalan agama Islam. Dulu tampaknya ulama-ulama Islam seperti menutup diri dalam surau tempat pengajian mereka, tanpa memperhatikan kehidupan sosial dalam masyarakat, sekarang mereka mulai keluar dengan fatwa-fatwa agama Islam, memperbaiki kepincangan hidup dalam masyarakat. Hukum adat yang bertentangan dengan ajaran agama Islam ditentang oleh mubalikh-mubalikh Islam. Sedangkan hukum adat yang tidak bertentangan, dibenarkan hidup di tengah masyarakat.

Suatu perumusan adat yang baru diperkenalkan dalam

masyarakat, yaitu antara adat *jahiliah* dengan *adat Islamiah*. Adat yang tertinggi adalah "*adat yang sebenarnya adat*"<sup>31)</sup> dan "*adat yang sebenarnya adat*" ini ditafsirkan sebagai Al Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad saw. karena dia mempunyai hukum-hukum mutlak yang tidak dapat dirubah.

Pencampuran antara hukum adat dengan ajaran agama Islam dapat kita lihat dalam pepatah adat: "*Adat bersendikan syarak (Islam) dan syarak bersendikan Kitabullah (Al Qur'an)*". Inilah nilai yang paling tinggi dari Peran Minangkabau itu untuk masyarakat Sumatera Barat.

Anggapan sementara ahli, bahwa perang yang ditimbulkan oleh Gerakan Paderi adalah pertentangan antara kaum adat dengan kaum agama di Minangkabau, sebelumnya tak mungkin terjadi, karena antara adat Minangkabau, dengan agama Islam sudah hidup secara serasi dalam masyarakat jauh sebelum gerakan Paderi dimulai<sup>32)</sup>. Antara keduanya saling isi mengisi. Sudah menjadi kebiasaan pelaksanaan pepatah "*Syarak mengatakan, adat memakai*", artinya apa yang tertulis dalam ajaran Islam menjadi pedoman pula dalam hukum adat. Dalam hal ini hukumnya terdapat dalam Islam, pelaksanaannya dibimbing oleh adat.

Hanya saja pada permulaan abad ke 19 pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari sudah menyimpang dari hukum Islam seolah-olah sudah dinomorduakan. Hal itulah yang diluruskan kembali oleh ulama-ulama Islam melalui gerakan Paderi. Dan hasilnya adalah keserasian antara hukum adat dengan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari, kecuali mengenai pembagian harta warisan. Khusus mengenai hal terakhir ini sampai sekarang masih merupakan pangkal sengketa dalam masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat.

Dengan kata lain dapat diakui oleh orang Minangkabau bahwa adat adalah manifestasi yang benar dari agama Islam. Di samping itu sebagai akibat juga dari gerakan Paderi, maka pada akhir abad ke 19 kedudukan guru agama Islam bertambah baik. Sekolah agama sistem surau bertambah banyak didirikan. Pengaruh guru agama dalam masyarakat bertambah luas. Kedudukan ulama dalam pemerintahan Nagari bertambah baik dengan ikut sertanya mereka sebagai salah satu tiang pemerintahan Nagari tersebut.

Pada akhir abad ke 19 terjadi suatu perubahan mengenai agama. Sebelum Gerakan Paderi di Minangkabau berkembang, dalam agama Islam telah berkembang *aliran Syiah* selama 2½ abad

dengan *Tarikat Syattariah*. Tarikat ini berpusat di Ulakan, dekat Pariaman, dan beranggapan bahwa segala sesuatu dalam alam merupakan "manifestasi dari Allah", "perwujudan Allah"

Tetapi sesudah Perang Minangkabau pada pertengahan abad ke 19 mulai masuk ke Minangkabau aliran *Tauhid* baru, yaitu *Tarikat Naqsyabandiah* yang mengatakan, bahwa segala sesuatu yang ada dalam alam luas ini bukanlah manifestasi atau perwujudan Allah, tetapi adalah "kesaksian tentang adanya Allah".

Sesudah pemerintah Belanda menguasai seluruh daerah Minangkabau, Belanda mengambil kebijaksanaan yang longgar terhadap kaum agama. Ulama Islam dibiarkan mengajarkan agamanya dengan bebas asal tidak mengganggu keamanan umum.<sup>33)</sup> Bahkan banyak di antara mereka yang disuruh menunaikan haji ke Mekah. Dalam hal ini Belanda bersedia mengeluarkan ongkos pulang pergi ke Mekah itu.

Mulai bagian kedua abad ke 19 itu di tanah Arab sendiri berkembang Tarikat Naqsyabandiah. Salah seorang ulama Islam Minangkabau di sana merupakan seorang dari tokohnya, yaitu Syekh Ahmad Chatib. Walaupun Syekh Ahmad Chatib menetap di Mekah, tetapi pengaruhnya sangat besar terhadap calon-calon haji yang datang dari Minangkabau.

Demikianlah pertengahan abad ke 19 paham Tarikat Naqsyabandiah berkembang di Minangkabau melalui haji-haji yang baru kembali dari Mekah yang telah terpengaruh oleh Syekh Ahmad Chatib. Seperti telah dikatakan antara Tarikat Syattariah dengan Tarikat Naqsyabandiah, terdapat pertentangan pendapat. Pertentangan pendapat ini di Minangkabau tidak hanya di mimbar agama, tetapi sampai-sampai membawa pertentangan pisik antara para penganutnya. Terutama Tarikat Naqsyabandiah yang sangat keras menjalankan ajaran fahamnya, membuka front terbuka terhadap penganut Syattariah, bahkan juga terhadap kaum adat dan terhadap pemerintah Belanda sendiri yang mereka anggap orang kafir. Pertentangan pendapat ini akan membawa rakyat Minangkabau ke dalam konflik agama sampai menjelang abad ke 20.

Pertentangan antara beberapa faham atau aliran dalam agama Islam di Minangkabau ini menyebabkan bermunculan lembaga-lembaga pendidikan agama Islam dengan sistem surau. Melalui lembaga-lembaga inilah rakyat Minangkabau dibimbing menurut faham masing-masing.

Dengan banyaknya terjadi pertentangan faham dalam masya-

rakat Minangkabau dengan berkembangnya pengajaran agama Islam, rakyat diajarkan berpikir kritis, dalam menentukan sikap mau masuk penganut faham yang mana. Cara berpikir yang demikian membawa pengaruh dalam tindakan sehari-hari.

Menjelang akhir abad ke 19 dan sampai awal abad ke 20, sendi-sendi kehidupan Minangkabau mendapat cobaan dan serangan dari segala pihak. Kalau dikategorikan secara umum, maka serangan itu datang dari tiga pihak: *kaum agama*, *kaum adat* dan dari *Belanda* sendiri. Dengan itu terlibat dalam masalah agama, adat, sistem ekonomi dan cara berpikir.

Mengenai masalah sistem ekonomi baru di Minangkabau datangnya dari pihak Belanda, Karena cara yang dijalankan Belanda untuk keuntungan besar, maka sistem ekonomi desa Minangkabau bertumpu untuk memenuhi kebutuhan sendiri berubah menjadi sistem ekonomi yang mempergunakan hasil produksi menjadi barang dagang. Dengan sendirinya cara pelaksanaannya tidak asal saja lagi, tetapi mulai direncanakan supaya mendapat hasil yang besar. Untuk mereka membutuhkan suatu sistem organisasi kerja yang lebih baik yang menyebabkan mereka mendidik anak-anaknya sebagai kader pengganti mereka. Dengan sendirinya cara berpikir mulai berkisar dari yang sederhana ke arah yang lebih rumit.

Serangan dari Belanda, di samping yang telah disebutkan di atas terlihat dalam segala tindakan yang dijalankan di Sumatera Barat. Hal ini memang telah direncanakan Belanda untuk menghancurkan sendiri-sendiri kehidupan masyarakat Minangkabau, supaya mereka lebih mudah menguasainya. Hal ini mereka lakukan dengan sistematis, sehingga dari luar tidak kelihatan apa-apa, tetapi dari dalam mereka berusaha menggerotinya.

Sesuatu hal yang luar biasa terjadi di Minangkabau, dimana adat Minangkabau yang mendapat cobaan dan serangan yang berat itu, justru tetap bertahan dengan tenang. Serangan berat yang datang dari segala penjuru itu hanya menyentuh kulitnya, hanya pemangku-pemangku adatnya yang terkena pengaruh itu, sedang adatnya sendiri tetap berdiri dengan kokoh di tengah masyarakat, dan tetap bertahan sampai dewasa ini.

Hukum adat yang prinsipil di Minangkabau memang telah dibuktikan oleh sejarah perkembangan daerah itu, tidak tergoyahkan oleh pengaruh yang datang dari luar. Misalnya pepatah adat yang berbunyi "*Anak di pangku, kamanakan dibimbing*" 34)

(anak dipangku, dalam arti diasuh atau dididik; kemenakan dibimbing, dalam arti mengenai adat), merupakan salah satu pranata sosial yang pokok dalam kehidupan masyarakat Minangkabau, yang memberikan corak khusus pada kebudayaan Minangkabau, tidak pernah terganggu oleh pengaruh-pengaruh itu, bagaimanapun kuat datangnya pengaruh itu. Adat yang mengatur hubungan antaran *mamak* 35) – *kemenakan* ini tidak tergoyahkan sampai sekarang.

Dalam hal ini, mengenai masalah pokok dalam adat itu, berlaku pepatah yang mengatakan:

"*indak lapuk dek ujan*"

"*indak lakang dek paneh*" 36)

(tidak lapuk karena hujan dan tidak lejang karena panas).

Kalaupun ada juga terlibat perubahan, hal itu hanya terbatas pada pribadi-pribadi seseorang tidak sampai kepada adatnya sendiri. Biasanya hal itu disebabkan oleh motif tertentu, misalnya motif keuntungan. Tetapi orang yang demikian biasanya tidak tahan tinggal terus di dalam nagarnya, karena dia akan dikucilkan oleh masyarakat.

Jadi mengenai hal yang prinsip, misalnya tentang adat yang sebenarnya adat memang sukar dilakukan perubahan, karena unsur adat itu sendiri sangat kuat. Dari pepatah di atas dapat kita lihat bahwa adat itu sendiri dicontohkan seperti tak apa-apa kena panas atau hujan. Sedangkan di dunia ini, tidak satu pun unsur alam yang dapat bertahan terhadap daya ubah yang ditimbulkan oleh hujan atau panas. Tetapi adat Minangkabau digambarkan sebagai tidak terpengaruh oleh hujan dan panas itu, selalu dapat bertahan dan hidup terus.

Sedangkan mengenai bagian kulitnya seperti yang termasuk "adat istiadat", kebiasaan hidup sehari-hari, mungkin mengalami sedikit perubahan, tetapi perubahan itu dalam batas pengertian "penyesuaian", karena adat Minangkabau itu demikian elastisnya sehingga dapat hidup menyesuaikan diri pada segala zaman.

### BAB III

#### KEADAAN DI DAERAH DARI TAHUN ± 1900 – 1923

##### A. PENGARUH POLITIK ETIKA DI DAERAH

Sebagaimana diketahui pada bagian kedua abad ke-19 di negeri Belanda sendiri berkembang faham liberalisme, sebagai akibat pengaruh Revolusi Perancis. Faham liberalisme ini menimbulkan kelompok-kelompok liberal dalam masyarakat Belanda. Pengaruh perkembangan dan kegiatan kelompok liberal di negeri Belanda itu terasa juga di Indonesia.

Dengan dipelopori oleh beberapa orang tokoh liberal di Indonesia, seperti Baron van Hovel dan Edward Douwes Dekker atau Multatuli, kaum liberal mulai menyerang kebijaksanaan pemerintah Hindia Belanda di Indonesia. Akhirnya Belanda yang telah menjadi sebuah negara imperialis dan kapitalis membelokkan arah politik ekonomi dan kolonialnya ke arah yang lebih sesuai dengan tuntutan kaum liberal. Maka dijalankanlah di Indonesia Politik Etis. Dengan demikian terjadilah perubahan dalam pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia. Undang-undang Dasar Pemerintahan Hindia Belanda dikeluarkan. Dewan Pemerintahan Hindia Belanda dan beberapa Dewan daerah lainnya didirikan. Politik sentralisasi ditukar dengan politik desentralisasi dalam administrasi pemerintahan.

Supaya kesejahteraan rakyat meningkat, ekonomi rakyat harus ditingkatkan. Sistem monopoli dalam perekonomian Indonesia harus dihapuskan. Pendidikan rakyat harus ditingkatkan. Untuk itu pemerintah Hindia Belanda mendirikan sekolah-sekolah sebagai dasar segala macam kehidupan rakyat. Dengan berbuat demikian pemerintah kolonial Belanda merasa telah membayar hutangnya terhadap rakyat Indonesia yang selama beberapa ratus tahun telah dikuras kekayaan alam dengan segala cara jalan kekerasan.

Sayangnya segala macam hal yang muluk muluk dari kaum liberal itu untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat hanya tinggal di atas kertas atau hanya sekedar memberikan nama yang muluk terhadap politiknya yang dijalankan di Indonesia. Politik etis hanya etis dalam perumusannya. Sedangkan pelaksanaannya seringkali tidak mempunyai etika.

Dengan politik etis ini kaum liberal menginginkan agar

taraf hidup rakyat jajahan meningkat, supaya sanggup membeli barang industri Belanda. Di samping itu modal swasta mereka masukkan ke Indonesia.

Di Minangkabau sendiri politik etis hanya terasa dengan masuknya modal swasta ke Sumatera Barat yang menyebabkan kegiatan ekonomi jadi meningkat. Untuk mengatur perekonomian yang demikian diperlukan tenaga khusus dan terdidik. Akibatnya lahirlah di Minangkabau elite intelektual atau setengah intelektual berdasarkan kebudayaan Barat.

Sebetulnya di Sumatera Barat kemajuan di bidang pendidikan bukanlah pengaruh langsung dari politik etis Belanda. Kemajuan ini bagi Sumatera Barat hanya merupakan penambahan dari unsur pendidikan sebelumnya. Dalam hal kemajuan, masyarakat Minangkabau selalu bergerak dengan cepat, selalu mengambil posisi yang tepat terhadap perubahan yang diadakan oleh Pemerintah Belanda berdasarkan kebudayaan Barat yang sebetulnya sangat bertentangan dengan norma adat Minangkabau sendiri. Tetapi karena adat itu sendiri mempunyai daya penyesuaian yang luwes, mereka segera mengambil posisi yang tepat untuk segera menyesuaikan diri dengan unsur pembaharuan itu. Sementara itu dengan nilai-nilai pembaharuan mereka memperkokoh kedudukan adat Minangkabau di tengah masyarakat atau dipergunakan untuk hal yang menguntungkan mereka.

Walaupun di Sumatera Barat tidak banyak pengaruh politik etis ini, tetapi dalam bidang pendidikan suatu hal perlu diperhatikan. Tiga profesi yang sangat digemari orang Sumatera Barat waktu itu, ialah menjadi seorang *dokter*, menjadi *Tuaniku Laras* (pegawai tinggi pemerintahan Hindia Belanda di Minangkabau) dan menjadi seorang *guru*. Sesuai dengan ketiga profesi yang sangat digemari itu, maka sekolah dokter (Stovia) yang ada di Batavia (Jakarta) didatangi oleh orang-orang Sumatera Barat. Bahkan pada suatu saat pernah terjadi sampai 25% dari seluruh mahasiswa Stovia adalah orang Minangkabau, suatu prosentase yang cukup besar jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Sumatera Barat yang hanya 3% dari seluruh jumlah penduduk Indonesia. Di tempat lain, di Balai Pustaka, separo dari jumlah pengarangnya adalah orang Minangkabau. Hampir di semua bidang pendidikan terdapat orang Minangkabau, yang waktu itu sebagian berada di tanah Jawa, karena di sanalah yang banyak terdapat lembaga pendidikan tinggi.

Pada dasarnya kelompok elite intelektual Indonesia yang berpendidikan Barat inilah nanti yang akan menjadi pembuat perumusan konsep cita-cita kemerdekaan yang mulai awal abad ke-20 dengan berpusat di Jawa. Justru mereka inilah yang telah terbuka matanya melihat segala kepincangan yang terdapat di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Di dalam hal ini tidak pula ketinggalan elite intelektual asal Sumatera Barat yang mulai akhir bahagian kedua abad ke-20 menampakkan dirinya sebagai elite intelektual Nasional Indonesia. Dari merekalah ide kemerdekaan bagi bangsa Indonesia muncul.

#### B. KEGIATAN MASYARAKAT YANG BERGAYUTAN (RELEVAN) DENGAN ATAUPUN YANG MERUPAKAN EMBRIO DARI KEBANGKITAN NASIONAL DI DAERAH

Struktur kehidupan sosial masyarakat Minangkabau diatur oleh undang-undang adat yang didasarkan pada jaringan hubungan *Mamak-kemenakan*. Mamak sebagai kepala keluarga adalah anggota keluarga laki-laki tertua dari pihak ibu. Mamak bertanggung jawab atas pengawasan dan pemeliharaan harta pusaka keluarga dan kesejahteraan atas anak-anak saudaranya<sup>37)</sup> yang perempuan. Mamak inilah yang menjadi wakil keluarga dalam urusan *suku* (kaum). Kemenakan harus menganggap mamak sebagai "raja" dalam keluarganya. Mamak adalah orang yang dituaikan dalam keluarganya. Dalam hal harta pusaka mamak merupakan penguasa tertinggi begitu juga hal penentuan jodoh kemenakannya mamak mempunyai "*kata putus*"<sup>38)</sup> Kemenakan sendiri tinggal dalam posisinya sebagai kemenakan dengan serba keterbatasan hak dan kekuasaan sampai tiba gilirannya untuk menjadi mamak, yang kebanyakan tak kunjung datang, sebab dalam satu generasi hanya seorang yang akan diangkat jadi mamak.

Situasi kehidupan sosial yang demikian ketat dengan aturan adatnya sudah barang tentu menimbulkan berbagai konflik dalam kehidupan sehari-hari. Sering terjadi pertentangan yang sengit antara mamak dengan kemenakan, yang ada kalanya sampai membawa korban jiwa. Tapi bagaimanapun sengitnya pertentangan itu, aturan adat tetap menang dan mengatasi segala-galanya dengan kemenakan selalu hidup antara kemauan mamaknya dengan aturan adat yang ketat.

Dalam keadaan yang demikian itu "*merantau*" merupakan

suatu jalan ke luar. Merantau berarti pergi meninggalkan kampung halamannya dalam waktu tertentu yang sifatnya sementara.

"Merantau" merupakan suatu unsur mobilitas sosial dalam masyarakat Minangkabau yang sangat menonjol. Kegiatan merantau dapat dilakukan dengan segala cara, dengan jalan kaki, dengan naik kuda, mengikuti aliran sungai dan sekarang dilakukan dengan alat komunikasi modern. Kadang-kadang tujuan "merantau" tidak jelas, pokoknya asal dapat meninggalkan kampung halaman yang serba menekan dengan segala peraturan adatnya.

Orang Minangkabau membagi daerahnya atas dua bagian besar, yaitu *daerah darek* dan *daerah rantau* <sup>39)</sup> *Darek* adalah daerah asli Minangkabau dan *rantau* adalah daerah di luar *darek* tempat orang *darek* mencari nafkah mengumpulkan kekayaan. Gabungan antara *daerah* dengan *rantau* istilah Minangkabau yang oleh orang Minangkabau sendiri disebut *Alam Minangkabau* <sup>40)</sup>.

Di sini pengertian merantau adalah pergi ke luar Kampungnya untuk mencari kekayaan yang akan dibawa pulang ke kampungnya kembali, supaya setelah sampai di kampung dapat hidup berdiri sendiri tanpa mengganggu harta pusakanya yang merupakan milik bersama itu. Orang yang pergi "merantau" dinamakan "perantau". Daerah "rantau" dapat saja merupakan daerah-daerah di sekitar Minangkabau sendiri dan dapat juga merupakan daerah-daerah yang jauh diluar Minangkabau.

Pada abad ke-19 motif "merantau" sudah agak berbeda.

Waktu ini motif merantau tidak saja untuk mencari kekayaan, tetapi juga untuk menuntut ilmu. Sesuai dengan salah satu ayat Al Qur'an yang menyuruh pemeluknya supaya menuntut ilmu sampai ke ujung negeri sekalipun. <sup>41)</sup>

Dengan merantau mereka akan bertemu dengan unsur-kebudayaan lain dan akan mengetahui betapa sempitnya alam tempat mereka berpijak selama ini. Pengalaman yang didapat oleh pemuda-pemuda perantau itu akan memperkaya pengalaman pribadi sendiri dan hal ini akan mempercepat mereka matang dalam menanggulangi masalah kehidupan kelak apabila sudah kembali ke kampungnya.

Demikianlah pada abad ke-19 itu banyak orang Minangkabau pergi merantau dengan motif menuntut ilmu yang lebih tinggi.

Pemuda yang merantau di daerah Minangkabau sendiri sambil

menambah ilmu dinamakan *orang siak*. Biaya hidup mereka tanggung sendiri dengan jalan meminta derma pada orang-orang sekitar mereka. Orang yang meminta derma atau meminta sedekah ini untuk keperluan hidup mereka selama menuntut ilmu di negeri orang dinamakan *pakiah*. Dari orang siak atau pakiah inilah kemudian muncul pemimpin-pemimpin Islam di tengah masyarakat dan mereka merupakan pemimpin yang ulet karena telah ditempa dengan penghidupan yang serba berat.

Setelah Mingkabau dikuasai pemerintah Hindia Belanda kembali pertengahan abad -19 "daerah rantau" orang Minangkabau yang sangat digemari adalah Mesir atau Tanah Arab. Umumnya yang pergi merantau ke sini adalah pemuda-pemuda Islam yang haus pada pembaharuan.

Pada akhir abad ke-19 pemuda-pemuda Minangkabau yang merupakan ulama-ulama muda banyak sekali yang pergi dan pulang dari perantauan mereka di Mesir dan Mekah.

Pergi ke Mekah misalnya waktu itu sangat terbuka, bahkan sebagian besar dari mereka dibiayai pulang pergi oleh pemerintah Hindia Belanda di Minangkabau dalam rangka merangkul pemuda-pemuda Islam Minangkabau. Disamping mereka sudah menjadi seorang haji, ilmu mereka mengenai Islam juga makin dalam.

Pengalaman selama merantau di luar negeri memberikan kesadaran kepada mereka untuk merumuskan sesuatu yang baru guna memperbaiki keadaan di "Alam Minangkabau". Kongsi mereka mengenai "Alam Minangkabau" itu menjadi berubah. Mereka dapat melihat betapa kecilnya tempat mereka yang dinamakan "Alam Minangkabau" itu jika dibandingkan dengan dunia luar. Betapa sangat mengikatnya hukum adat nagari mereka dibandingkan dengan kebebasan bergerak di luar negeri. Betapa berbahayanya kekuasaan pemerintah kolonial Belanda apabila dibiarkan terus-menerus berada di Indonesia bagi kebebasan gerak mereka. Mereka yang melihat betapa pentingnya konsep kesatuan ide dan persatuan di antara sesama umat manusia, khususnya persatuan antara orang Minangkabau dengan orang di luar Minangkabau di Indonesia dalam menghadapi tekanan pemerintah Belanda. Hal ini bukan saja dirasakan, tetapi juga disebar-luaskan ke tengah kehidupan masyarakat sekembali mereka merantau itu. Dapat dibayangkan betapa berbahayanya kedudukan pemerintah kolonial Belanda di Sumatera Barat kalau hal ini dibiarkan saja oleh Belanda waktu itu.

Mereka ini merupakan manusia Minangkabau yang fanatik terhadap paham yang mereka anut dan merupakan pemimpin Islam yang telah matang dalam memperjuangkan ideologi walaupun mendapat halangan dan tekanan yang berat dari pemerintahan Hindia Belanda di Minangkabau.

"Surau" tempat mereka mengaji dijadikan pusat kegiatan dakwah. Untuk anak-anak diajarkan bagaimana membaca Al Qur'an, para pemuda digembleng dengan ajaran Islam sejati, pemimpin-pemimpin adat diajak berdiskusi mengenai pelaksanaan adat yang bertentangan dengan agama Islam dan bagaimana memperbaikinya, untuk orang-orang tua diberikan penerangan bagaimana keadaan hidup penganut Islam sesudah meninggal dunia, kegiatan ini terutama ditujukan kepada para pemuda yang kalau perlu disuruh pergi pula memperdalam ilmunya ke Mekah atau Mesir dengan biaya ditanggung bersama.

Para ulama muda yang sudah kembali dari luar negeri merupakan orang yang militan di bidangnya masing-masing. Mereka tidak takut ancaman Belanda, tidak takut akan ditangkap bala tentara Belanda, tidak takut akan dibuang ke luar Sumatera Barat. Bahkan seluruh ancaman itu mempertebal keyakinan mereka, bahwa cita-cita mereka benar.

Di antara mereka ada yang sangat ekstrim dalam menjalankan kegiatannya. Sesuatu yang tidak sefaham dengan mereka, terus diserang secara terbuka, apakah itu kaum adat, kaum agama sendiri atau orang Belanda. Khusus mengenai Belanda dianggap orang kafir, karena itu harus keluar dari Sumatera Barat atau Indonesia.

Dalam menghadapi orang-orang yang begini pemerintah Belanda terpaksa mengambil sikap keras dengan jalan menangkap yang bersangkutan dan mengasingkannya ke tempat lain. Tokoh-tokoh Islam inilah yang membawa nilai pembaharuan ke Sumatera Barat pada abad ke-19. Di antara mereka yang sangat terkenal adalah Syekh Ahmad Chatib yang tinggal menetap di Mekah, tetapi pengaruhnya tetap terasa di Sumatera Barat. Pengikut beliau yang sangat keras adalah Syekh Simabur yang akhirnya ditangkap dan dibuang Belanda ke luar Sumatera Barat.

Mereka inilah yang merupakan pelopor kebangkitan nasional di daerah Sumatera Barat. Dari merekalah lahirnya embrio kebangkitan Nasional Sumatera Barat, karena merekalah yang meletakkan dasar pembaharuan di Sumatera Barat yang kenyataannya

akan memperlihatkan diri pada bagian pertama abad ke-20.

Embrio pertama adalah berbuahnya lembaga pendidikan agama Islam pada akhir abad-19, dari sistem pendidikan "surau" menjadi lembaga pendidikan Islam Modern. Terkenal *Surau Jembatan Besi* di Padang Panjang di bawah pimpinan Haji Rasul, seorang ulama perantau pada penghujung abad ke-19. Haji Rasul dianggap sebagai pelopor gerakan agama di Sumatera Barat.

Lembaga pendidikan agama Islam yang telah diorganisasi dengan sistem kelas dikatakan sebagai embrio kebangkitan Nasional di Sumatera Barat adalah karena pelopor-pelopor Gerakan kebangkitan Nasional pada abad ke-20 di Sumatera Barat dimulai oleh orang-orang yang berasal dari sekolah-sekolah agama ini yang kebanyakan bekerja sebagai guru atau pemuka agama.

Sebagai media komunikasi bagi ulama-ulama ini untuk menyebarkan ajaran mereka menggunakan lembaga-lembaga pendidikan agama itu. Di samping itu media komunikasi yang tidak kalah pentingnya adalah *pasar* atau *pekan*<sup>42)</sup> yang diadakan sekali seminggu. Tidak jarang diadakan penerangan agama sewaktu *pekan* sedang ramai-ramainya. Tidak jarang pula di waktu *pekan* ini ulama-ulama Islam bertukar informasi mengenai prinsip-prinsip ajaran mereka, sekaligus diatur di mana akan diadakan pertemuan dan penerangan agama berikutnya.

Di samping itu suatu media komunikasi yang sangat benar artinya adalah yang dinamakan *lapau*<sup>43)</sup> atau juga dinamakan *kedai kopi*, karena di sana orang dapat minum kopi dengan beberapa makanan ringan sambil mengobrol dengan santai. *Lapau* ini mulai ramai menjelang sore hari sampai malamnya, di waktu mana tugas pokok di sawah sudah selesai dikerjakan.

Pada *lapau* ini rakyat berkumpul secara sukarela dan berkomunikasi antara sesama mereka. Yang berkumpul di *lapau* terdiri dari segala lapisan masyarakat, tidak memandang tinggi rendah golongan. Di sinilah biasanya dibicarakan segala macam masalah mulai dalam kehidupan sehari-hari, sampai kepada yang berat seperti masalah pemerintahan. Pada *lapau* ini juga semua kritik terhadap pemerintah dilontarkan. Ada saja sesuatu gerakan dalam masyarakat dibicarakan dalam *lapau* secara panjang lebar. Dengan demikian *lapau* ini akhirnya merupakan sebuah alat komunikasi masa yang sangat aktif dan efektif. Di samping itu sekaligus *lapau* juga merupakan alat kontrol sosial yang sangat ampuh. Di sini dibicarakan segala kejelekan yang terjadi dalam

masyarakat dan juga dibicarakan bagaimana usaha mengatasinya. Dalam *lapau* tidak ada sesuatu yang tersembunyi dan semuanya dilempar secara terbuka. Karena yang bersangkutan ikut mendengarkan dan berbicara dalam *lapau* itu maka perbaikan perbaikan mudah dilakukan dan diterima secara terbuka. Di dalam *lapau* inilah orang dapat ikut campur membicarakan masalah keluarga lain dalam masyarakat, hal mana sangat tabu kalau dilakukan di luar *lapau*. Tidak jarang sebuah *lapau* meningkat menjadi sebuah rapat umum sebuah pertemuan atau rapat nagari, karena semua unsur masyarakat ada di dalamnya.

Keadaan *lapau* yang demikian terdapat di hampir seluruh pelosok Sumatera Barat. Bahkan sampai sekarang *lapau* yang demikian masih ada di Sumatera Barat.

Dengan demikian *lapau* merupakan alat komunikasi secara dua arah yang sangat efektif. Rakyat membicarakan segala masalah yang sedang dihadapinya. Pemuka-pemuka masyarakat menyampaikan hal-hal yang patut dikerjakan oleh rakyat. Dan komunikasi itu terjadi secara langsung. Biasanya pokok pembicaraan yang hangat adalah mengenai masalah sosial, ekonomi dan pemerinthan. Di sini suatu ide atau suatu konsep dikritik, diterima dan disebar luaskan ke tengah masyarakat ramai.

Sejalan dengan masalah yang telah dibicarakan di atas, hal lain yang juga banyak kaitannya dengan kebangkitan Nasional di daerah Sumatera Barat adalah unsur pendidikan yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda di Sumatera Barat. Pada mulanya lembaga pendidikan rendah yang didirikan Belanda tidak mendapat perhatian dari masyarakat Sumatera Barat. Tetapi setelah mereka mendapat beberapa hal yang berguna dari lembaga pendidikan ini, perhatian masyarakat menjadi meningkat, minat rakyat untuk sekolah bertambah besar.

Dengan meningkatnya kebutuhan penentangan Belanda di Sumatera Barat pada tenaga-tenaga terdidik, mulai tingkat rendah sampai pada tingkat yang tinggi, maka makin meningkat pula pertambahan jumlah lembaga pendidikan itu. Sejalan dengan itu minat orang Minangkabau untuk mendapat pendidikan yang lebih tinggi makin meningkat pula.

Walupun seluruh lembaga pendidikan yang diadakan oleh pemerintah Belanda mendasarkan pendidikannya dengan kebudayaan Barat, orang Sumatera Barat yang telah tamat pendidikan itu tidak banyak terpengaruh, tetapi sebaliknya mereka sangat

banyak mendapat keuntungan untuk diri mereka sendiri atau untuk kehidupan masyarakatnya. Dalam menerima dasar kebudayaan Barat itu, mereka tidak melupakan adatnya sendiri yang telah melingkari hidupnya semenjak dilahirkan. Justru dengan pendidikan Barat itu mereka mulai berpikir kritis seperti orang Barat sendiri. Hal ini membantu membuka mata mereka untuk melihat kepincangan kehidupan dalam masyarakat. Kepincangan yang telah mulai tampak itu jumlahnya mulai menumpuk, lambat laun mendatangkan kesadaran pada mereka bahwa hal itu perlu diperbaiki. Tetapi sebagai pegawai sipil yang bekerja pada pemerintahan Belanda mereka menghadapi rintangan yang tidak kecil dalam mencari jalan ke luar untuk mengatasi kepincangan-kepincangan itu. Akhirnya sebagian dari mereka kebanyakan terpaksa berdiam diri saja.

Walaupun demikian, mereka yang telah sadar itu merupakan embrio-embrio dasar kebangkitan Nasional, karena walaupun mereka berdiam diri, mereka selalu memikirkan cara bagaimana memperbaiki kepincangan-kepincangan hidup itu, bahkan sekarang mereka memikirkan cara yang lebih sistematis dengan mempergunakan nilai-nilai pendidikan Barat yang telah mereka terima. Dari mereka inilah lahirnya pejuang-pejuang Nasional yang tenang dan matang menghadapi segala situasi. Walaupun perjuangan mereka itu tidak bergelora, tetapi hasilnya lebih matang dan lebih nyata kelihatan di tengah-tengah masyarakat.

Dalam hal ini embrio pertama Kebangkitan Nasional Daerah Sumatera Barat adalah dengan didirikannya lembaga pendidikan dengan sistem kebudayaan Barat untuk kepentingan orang Barat pula. Tapi justru hal itulah yang mempertajam cara berpikir mereka secara sistematis yang kemudian dihadapkan kepada Belanda sendiri. Dalam hal ini daerah Sumatera Barat tidak banyak bedanya dengan daerah lain di Indonesia. Bedanya adalah pada kesempatan yang lebih terbatas, karena fasilitas di daerah jauh lebih kurang dari fasilitas di Batavia misalnya sebagai pusat administrasi pemerintahan Belanda.

Dari uraian di atas secara pokok kelihatan dua sebab utama yang kemudian melahirkan Kebangkitan Nasional di Minangkabau.

Pertama, perkembangan lembaga-lembaga pendidikan Islam yang dipengaruhi oleh perkembangan Islam di Mekah dan Mesir. Menjelang akhir abad ke-19 kita mengenal nama Tuanku Simabur

di Sumatera Barat sebagai penggerak ke arah pembaharuan pendidikan Islam. Pada awal abad ke-20 muncul nama ulama-ulama muda di Minangkabau yang sangat mempengaruhi perkembangan kehidupan masyarakat Islam, mereka itu antara lain adalah Syekh Jamil Jambek yang dikenal dengan nama "Inyik"<sup>43)</sup> Jambek", di Bukittinggi Syekh Abdul Karim Amarullah yang dipanggilkan "Inyik Rasul"<sup>44)</sup> dari Maninjau yang tahun 1918 mendirikan "Sumatera Thawalib" di Padang Panjang dan merupakan gudang yang melahirkan tokoh-tokoh Nasionalisme Lokal di Minangkabau; Syekh Abdullah Ahmad yang mendirikan pendidikan *Adabiah* di Padang; Syekh Chatib Ali di Muara Labuh dan sebagainya. Mereka merupakan ulama-ulama muda Minangkabau yang sangat aktif menyebarkan pengajaran Islam melalui pendidikan Islam yang telah dimodernisasi dari sistem surau ke sistem kelas.

Kedua dari pendidikan Barat sendiri telah membukakan bagi pikiran baru bagi generasi muda di Sumatera Barat. Tetapi pada awal abad ke-20 tokoh-tokoh Sumatera Barat justru tidak berada di Sumatera Barat, sebaliknya berada di Jawa dan bersama-sama dengan tokoh pergerakan Nasional lainnya di Jawa mereka memperjuangkan Indonesia merdeka. Walaupun demikian pengaruh mereka terasa juga di Sumatera Barat.

## C. INTERAKSI DI DAERAH DENGAN BERDIRINYA PARTAI/ORGANISASI

### 1. Situasi di Sumatera Barat awal abad 20.

Berbeda dengan keadaan di Jawa, Sumatera Barat di awal abad ke-20 masih disibukkan tekanan hidup yang diakibatkan oleh tindakan kasar pemerintahan Belanda di Sumatera Barat. Misalnya, Tanaman Paksa yang menurut pelaksanaannya pada tahun 1870 sudah dihapuskan di seluruh Jawa dan Sumatera, ternyata di Sumatera Barat tanaman paksa untuk kopi masih dilaksanakan sampai dengan tahun 1908.

Berkaitan dengan keinginan Belanda untuk mendapatkan keuntungan yang besar dari barang dagang kopi ini, maka rakyat dipaksa mengumpulkan kopi dan menyerahkannya kepada pemerintah Belanda yang menimbulkan kesengsaraan hidup yang hampir tak terderitakan lagi oleh rakyat Minangkabau.

Pada tahun 1908 Belanda akan menghapus tanaman paksa

kopi, tetapi akan menggantikannya dengan *belasting*, yang merupakan semacam iuran paksa dari rakyat yang berupa rodi dan uang kontan. Akibat *belasting* bagi rakyat akan sama saja dengan akibat tanaman paksa kopi. Karena itu penderitaan dan tekanan yang dirasakan rakyat Sumatera Barat yang sudah sangat berat itu, mencapai klimaksnya pada tahun 1908 dengan terjadinya pembangkangan rakyat dan mengangkat senjata terhadap Belanda. Demikianlah hampir di seluruh daerah Sumatera Barat rakyat menyerang Belanda, terjadilah ketegangan di daerah Sumatera Barat. Di Kamang (Lubuk Agam), Manggopoh (daerah Padang Pariaman), Batusangkar, Tanjung Barulak, Lintau Buo (Luhak Tanah Datar). Kandang Empat, Lubuk Alung (Padang Pariaman) rakyat menyerang Belanda sebagai pelampiasan rasa benci mereka terhadap Belanda.

Dengan demikian terjadi kekacauan di hampir seluruh daerah Sumatera Barat. Yang menyebabkan Belanda melakukan pembalasan dengan kejam, akibatnya kehidupan rakyat makin sengsara dan menderita. Di Sumatera Barat sendiri perlawanan rakyat ini disebut *Perang Belasting* (Perang Pajak).

*Perang Belasting* pada dasarnya timbul karena rakyat Minangkabau ingin mempertahankan hanya di daerahnya sendiri. Dengan akan dijalankannya *belasting*, rakyat Minangkabau merasa sangat terhina, sebab mereka harus membayar pajak terhadap tanah kepunyaan mereka sendiri yang telah diwarisi semenjak berabad-abad lamanya kepada Belanda. Seumur hidup mereka hal ini belum pernah terjadi. Sedangkan tanah di Minangkabau adalah kepunyaan keluarga (suku) dan dikerjakannya sendiri tanpa campur tangan pihak lain. Dengan datangnya peraturan *belasting* mereka merasa haknya dilanggar secara berlebihan. Dari pada dihina demikian lebih baik mati, maka mereka mengangkat senjata melawan Belanda.

Di samping itu, modernisasi Minangkabau, terutama dalam cara berfikir, yang telah dimulai semenjak akhir abad ke-19 membawa perubahan yang relatif cepat dalam waktu yang singkat. Perubahan cara berpikir itu membawa ketegangan dan kegoncangan dalam masyarakat. Kegelisahan itu mencapai puncaknya dalam *Perang Belasting* pada tahun 1908.

Demikian situasi di Sumatera Barat di awal abad ke-20. Dengan sendirinya rakyat Minangkabau belum sempat mengatur dirinya secara baik dan terorganisasi menghadapi Belanda seperti

yang dilakukan di Jawa dengan organisasi Budi Utomo misalnya.

Walaupun demikian pengaruh Budi Utomo terasa juga di Sumatera Barat, karena banyaknya orang Sumatera Barat yang pulang pergi ke Jawa, mereka melihat apa yang terjadi di Jawa dan membawa beritanya ke Sumatera Barat. Tetapi karena situasi tidak mengizinkan mereka menyalurkan dalam bentuk lain yang wadahnya sudah lama ada, yaitu melalui lembaga-lembaga pendidikan Islam yang telah mengalami pembaharuan dalam sistemnya. Tokoh-tokoh ulama muda Minangkabau di Padang tahun 1911 telah menerbitkan majalah *Al Munir* yang menyebarkan modernisasi dan reformasi Islam di Sumatera Barat. Pendiriannya adalah Syekh Abdullah Ahmad atas anjuran Syekh Muhammad Jamil Jambek (Inyik Jambek) dan Syekh Abdul Karim Amarullah. Melalui majalah *Al Munir* inilah mereka menyebar luaskan bagaimana sebaiknya kehidupan sosial di Sumatera Barat diatur.

Dengan uraian di atas Budi Utomo secara langsung tidak terdapat di Sumatera Barat sebagai suatu organisasi modern yang ikut memperjuangkan kehidupan rakyat menuju kepada kesejahteraan. Tetapi secara tidak langsung ide dan konsepsi perjuangan organisasi dan partai-partai di Jawa diambil alih oleh orang Sumatera Barat untuk dijadikan dasar ide atau konsep perjuangan organisasi atau partai yang ada di Sumatera Barat seperti apa yang terjadi dengan organisasi *Sumatera Thawalib* di Padang Panjang pada tahun 1918.

## 2. Sarekat Islam

Sarekat Islam yang berdiri tahun 1912 di Jawa cepat pula menjalar ke Sumatera Barat. Serikat Islamlah organisasi pergerakan keagamaan yang pertama lahir di Sumatera Barat sebagai cabang dari serikat Islam di Jawa. Tahun 1916 Sarekat Islam sudah ada di Sumatera Barat. Tahun 1917 Abdul Muis salah seorang pendiri Sarekat Islam di Jawa singgah di Sumatera Barat dalam perjalanannya ke Eropah. Kegiatannya di Padang membawa kaum muda di Sumatera Barat yang tergabung dalam Sarekat Islam ke arena kegiatan politik sesuai dengan pusat kegiatan Sarekat Islam di pusatnya di Jawa guna mencapai perbaikan ekonomi dan kematangan politik bagi rakyat Indonesia yang beragama Islam.

Pada tahun 1917 Sarekat Islam di Jawa mulai dimasuki oleh aliran sosialisme kiri dan segera Sarekat Islam terpecah

menjadi dua, yaitu Sarekat Islam Putih dan Sarekat Islam Merah. Sarekat Islam Merah yang penuh dengan orang komunis yang berkedok Islam pada tahun 1923 menjadi Sarekat Rakyat, dan memasuki daerah Sumatera Barat pada tahun 1924.

Sarekat Rakyat inilah yang merembes ke Sumatera Barat dan berusaha mempengaruhi tokoh-tokoh Islam muda. Sebagaimana orang-orang komunis mereka segera melihat pertentangan paham dan kepincangan Masyarakat Sumatera Barat. Maka untuk memperbesar pengaruh mereka di Sumatera Barat situasi ini segera mereka manfaatkan. Ulama-ulama muda yang semenjak akhir abad-19 sudah bertentangan paham dengan ulama-ulama tua mereka rangkul. Kesengsaraan penghidupan rakyat mereka pakai jalan untuk membujuk rakyat dengan janji yang muluk-muluk supaya mau mengangkat senjata terhadap Belanda. Segala rasa tidak puas dalam masyarakat mereka pergunakan sebaik-baiknya dengan segala cara dan dengan segala janji. Mereka muncul sebagai orang-orang terdepan yang anti Belanda, muncul sebagai orang-orang yang membela kaum adat, kaum buruh dan sebagainya. Demikianlah intensifnya cara menggarap orang Sumatera Barat, sehingga akhirnya sebagian dari mereka dapat disesatkan oleh propaganda komunis itu. Kesesatan itu memuncak tahun 1926-1927 dengan meletusnya *Perang Silungkang*. Tetapi sesudah pecahnya Perang Silungkang ini rakyat Sumatera Barat kembali sadar bahwa kaum komunis hanya mempergunakan mereka sebagai alat untuk memperjuangkan ide mereka, tetapi kesadaran itu sudah terlambat karena banyak diantara mereka yang ditangkap dan dibuang oleh pemerintah Belanda ke Digul.

Untunglah beberapa orang tokoh muda Sumatera Barat yang lebih awas dan mempunyai pendirian yang teguh tidak ikut terpengaruh oleh komunis dalam Sarikat Rakyat itu dan tidak terbawa dalam Perang Silungkang. Di antara mereka itu adalah Syekh Muhammad Majil Jambek, Syekh Haji Abdul Karim Amarullah dan Syekh Abdullah Ahmad.

#### a. Sarikat Sumatera

Pertentangan paham antara kaum Muda dan kaum tua Islam di Sumatera Barat bertambah tajam pada awal abad ke-20. Pertentangan itu disebabkan karena perbedaan mazhab yang dianut mereka, Ulama-ulama muda umumnya terpengaruh oleh paham yang berasal dari Mesir. Sedangkan ulama-ulama tua menga-

nut paham yang berasal dari Mekah. Pertentangan ini mereka bawa sampai ke Sumatera Barat. Sudah menjadi pola hidup masyarakat Islam di Sumatera Barat waktu itu saling menyerang melalui khotbah Jum'at atau tabliq agama Islam. Keduanya mempunyai pengikut yang hampir sama banyak. Kaum muda merasakan pertentangan ini sebagai suatu penghambat dalam memperjuangkan cita-cita mereka. Karena itu harus segera diatasi masalahnya.

Demikianlah pada tahun 1918 diadakan sebuah rapat umum di Bukittinggi. Tiga puluh buah organisasi pendidikan dan organisasi masa kaum muda berkumpul di Bukittinggi. Dalam pertemuan itu dirumuskan akan membentuk suatu organisasi federasi Sumatera yang akan mengkoordinasi seluruh kegiatan dan aktivitas kaum muda. Federasi itu berdiri dengan nama *Budi Baik*.

Tetapi karena situasi waktu itu tidak mengizinkan, bahwa kaum muda menganggap segala aktivitasnya dihalangi oleh Belanda, maka pusat organisasi "*Budi Baik*" dipindahkan ke Batavia. Lebih-lebih lagi setelah Abdul Rivai dan Abdul Muis mengatakan bahwa berdasarkan hasil pengamatan mereka selama berada di Jawa, maka suatu partai politik bagi rakyat di Sumatera sebaiknya berpusat di Batavia. Di sana mereka akan dapat berbuat lebih banyak dan akan menjadi salah satu kelompok masyarakat yang akan ikut menentukan calon-calon atau wakil-wakil yang tepat untuk duduk di *Volksraad*.

Demikianlah setelah pindah ke Batavia organisasi politik tersebut dikenal dengan nama *Sarekat Sumatera*. Sarekat sebagai suatu partai politik mempunyai tugas pokok sebagai penghubung antara gerakan politik di Jawa dengan gerakan politik di Sumatera. Di samping itu Sarekat Sumatera juga bertindak sebagai juru bicara politik untuk partai-partai di daerah.

Sarekat Sumatera yang dimulai di Bukittinggi itu, sesudah berpusat di Jawa, tugasnya tidak terbatas untuk Sumatera Barat saja lagi, tetapi untuk seluruh Sumatera. Dengan demikian ulama-ulama muda Sumatera Barat mulai berpolitik bersama-sama dengan suku bangsa lain di Indonesia dalam satu kelompok politik.

Karena bidang gerakannya sudah bertambah luas dan kegiatannya bertambah banyak maka akhirnya dirasa perlu adanya satu badan yang khusus menanggulangi masalah politik Sumatera Barat saja. Hal ini lebih dirasakan keperluannya lagi untuk memu-

tuskan saran-saran buat komisi Pembaharuan Pemerintah Belanda. Maka pada bulan April 1919, Bagindo Djamaluddin Rasjad mengambil prakarsa untuk mendirikan *Sarekat Combinatie Minangkabau* yang disingkat dengan nama SCM.<sup>45)</sup>

Anggota SCM kebanyakan terdiri dari kaum muda. Pada mulanya SCM bersikap mau kerja sama (koperasi) dengan pemerintahan Belanda dan kebanyakan bergerak dalam organisasi pendidikan serta organisasi politik di Sumatera Barat.

Di bawah pimpinan Bagindo Djadaluddin Rasyad dan Sulaiman Effendi, SCM mulai bergerak secara radikal dan bersikap tak mau bekerja sama dengan pemerintahan Belanda. Di waktu itu SCM banyak dipengaruhi oleh *Indische Partij* di bawah pimpinan Douwes Dekker yang orientasi politiknya jelas ditujukan untuk kemerdekaan Indonesia. Demikianlah mulai tahun 1921 SCM mulai mengambil bagian yang aktif dalam percaturan politik di Jawa. SCM berpartisipasi dalam gerakan otonomi untuk meningkatkan keikutsertaan rakyat daerah dalam administrasi pemerintahan. Gerakan otonomi ini dipelopori oleh anggota-anggota *Volksraad* bangsa Indonesia yang duduk di sana. Walaupun gerakan menuntut otonomi itu gagal di *Volksraad*, tetapi bagi SCM gerakan itu merupakan langkah pertamanya ke arah kerjasama dengan partai-partai politik lain di Jawa. Dalam meningkatkan kerjasamanya itu, tahun 1922 SCM ikut serta dalam *Kongres seluruh Indonesia* (All Indian Congress) yang disponsori oleh *Indische Partij*.

Pada bulan Juni 1922, SCM dengan beberapa tokoh muda dari *Indische Partij* dan Sarekat Islam menjadi tuan rumah untuk Kongres Persatuan Sumatera.

Kongres ini diadakan di Padang dan dihadiri oleh wakil-wakil partai dari Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Sumatera Timur, Aceh dan Sumatera Barat sendiri sebagai tuan rumah. Kongres ini memperoleh hasil besar karena telah berhasil membawa peranan Sumatera untuk ikut menentukan kehidupan masa depan Indonesia. Dalam kongres itu juga telah ditetapkan membentuk suatu kelompok Sumatera untuk seluruh suku-suku bangsa di Sumatera, sehingga terlihat satu kesatuannya yang kuat. Juga telah ditetapkan membentuk satu Dewan Pusat untuk seluruh organisasi politik yang ada di Sumatera.

Tetapi bagi SCM, maupun bagi Sarekat Sumatera, kongres Persatuan Sumatera ini membawa kemundurannya. Keputusan-

keputusan yang diambil secara radikal dalam kongres menimbulkan kecurigaan pemerintahan Belanda, sehingga sesudah kongres banyak di antara pemimpin-pemimpinnya, terutama yang bersikap tak mau kerja sama dengan Belanda, ditangkap. Beberapa pemimpinnya yang bersikap kooperatif dibebaskan seperti Sutan Muhammad Zein dan Sutan Pemuncak. Mereka merasa tercengang karena masalah Minangkabau sendiri dicampuradukkan dengan masalah persatuan Sumatera. Hal ini menimbulkan kegoncangan di antara mereka yang berakibat mundurnya gerakan Sarekat Sumatera.

b. Sumatera Thawalib

Syekh Abdul Karim Amarullah yang di Sumatera Barat waktu itu terkenal dengan nama Haji Rasul merupakan tokoh muda dalam gerakan pembaharuan pengembangan agama Islam di Sumatera Barat. Banyak ide pembaharuan Haji Rasul yang dibawanya dari luar negeri diterapkan di Sumatera Barat.

Dalam akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 banyak tokoh ulama Islam yang mengadakan pembaharuan sistem pendidikan Islam di Sumatera Barat. Di antara mereka itu yang terkenal adalah :

Syekh M. Thaib Umar di Sungayang, Batusangkar (1874 – 1920)

Syekh Abdullah Ahmad di Padang (1878-1933)

Syekh Abdul Karim Amarullah di Maninjau (1879 – 1945)

Syekh H.M. Jamil Jambek di Bukittinggi (1860 – 1947)

Syekh H. Suleiman Ar Rasuli Cantung, Bukittinggi.

Syekh Ibrahim Musa, Parabek Bukittinggi.

Syekh H.M. Jamil Jaho, Padang Panjang.

Syekh H. Abbas Abdullah, Padang Japang Payakumbuh dan saudaranya

Syekh H. Mustafa Abdullah.

Syekh H. Abdul Wahid, Tabat Gadang, Padang Japang Payakumbuh.

Syekh M. Sa'ad, Mungkar Payakumbuh<sup>46)</sup>  
dan lain-lain.

Pada tahun 1912 Haji Rasul menjadi guru pada *Surau Jembatan Besi* di Padang Panjang.

Surau Jembatan Besi adalah salah satu surau tempat mengaji agama Islam yang banyak terdapat di Sumatera Barat. Sistem pengajian dilakukan secara tradisi. Pokok pengajaran pada mula-

nya adalah membaca ayat-ayat Al Qur'an yang di Sumatera Barat dinamakan "belajar mengaji".

Haji Rasul, yang menggantikan Haji Abdullah Ahmad, membawa pembaharuan ke dalam sistem pendidikan surau Jembatan Besi itu. Pada tahun 1915 pada Surau Jembatan Besi didirikan *Koperasi Pelajar Surau Jembatan Besi* atas inisiatif Haji Habib. Pendirian koperasi di sana diilhami oleh penerangan yang dibagikan oleh Bagindo Djamaluddin Rasjad salah seorang intelektual Minangkabau dengan dasar pendidikan Barat, yang menjalankan pentingnya "persatuan" untuk mencapai cita-cita bersama. Setahun kemudian koperasi itu diperluas oleh Haji Hasjim.

Dari pendirian sebuah koperasi pada surau Jembatan Besi terlihat bahwa lembaga pendidikan tradisional terbuka dan mau menerima sesuatu ide baru, lebih-lebih ide itu dikemukakan oleh seorang yang mendapat pendidikan Barat. Tetapi karena dianggap berguna dan menguntungkan ide itu dapat diterima. Hal ini merupakan sesuatu yang baru waktu itu di Sumatera Barat.

Pada tahun 1918, Zainuddin Labai. Djalaluddin Thaib dan Inyik Bandaro Basa mengubah nama koperasi ini dengan "*Sumatera Thawalib*" dengan memperluas ruang lingkup aktifitasnya. Perubahan nama sekaligus mengubah nama surau Jembatan Besi menjadi lembaga pendidikan *Sumatera Thawalib*. Hal ini diilhami oleh kegiatan *Jong Sumatranen Bond* yang waktu itu sudah mempunyai cabang di Bukittinggi dan Padang.

Haji Rasul memperkenalkan sistem kelas dalam Sumatera Thawalib. Dengan demikian semenjak tahun 1918 sistem pendidikan surau yang tradisional berubah menjadi sistem pendidikan memakai kelas. Dalam sistem surau murid duduk mengelilingi gurunya sambil mendengarkan guru mengaji yang terus diucapkan pula oleh murid-muridnya. Pada sistem kelas, sekolah dibagi atas beberapa tingkat kelas, murid duduk secara teratur di dalam di atas sebuah kursi dengan sebuah meja. Guru mengajar di depan dengan mempergunakan papan tulis.

Haji Rasul menyusun sekolah itu kembali Kurikulum, metoda mengajar dan buku-buku teks diperbaharui semua. Untuk mengawasi jalannya sekolah itu diangkat sebuah badan pengawas yang dinamakan *Dewan Sekolah* yang terdiri dari alumni-alumni Surau Jembatan Besi, guru-guru dan pedagang-pedagang Islam. Dewan ini dibentuk supaya administrasi sekolah mudah dikontrol dan untuk menjaga supaya sekolah jangan jatuh dalam pengaruh se-

seorang saja. Suatu hal yang sama sekali baru di Sumatera Barat yang menyebabkan pendidikan Sumatera Thawalib menjadi model bagi lembaga pendidikan Islam lainnya di Sumatera Barat. Dalam memperbaharui sistem dan metoda mengajar ini tidak sedikit andil yang diberikan oleh Haji Djalaluddin Thaib.

Pada waktu yang sama di Parabek, Bukittinggi ada pula sebuah madrasah Islam di bawah pimpinan Syekh Ibrahim Musa, yang kemudian terkenal dengan nama Syekh Ibrahim Musa Parabek. Madrasah Islam Parabek ini juga terkenal di Sumatera Barat dengan cara-caranya sendiri pula.

Pada tanggal 15 Pebruari 1919, dengan mengambil tempat di surau Syekh Muhammad Jamil Jambek di Bukittinggi, diadakan pertemuan antara pelajar-pelajar Sumatera Thawalib dengan pelajar-pelajar Parabek. Pertemuan ini mengambil suatu keputusan untuk membentuk suatu persatuan antara pelajar-pelajar kedua lembaga pendidikan itu. Persatuan pelajar itu juga dinamakan Sumatera Thawalib (Organisasi Pelajar Pelajar Sumatera). Tujuan utama dari organisasi pelajar itu ialah untuk mempelajari ilmu dan mengembangkan Islam.

Pada tahun 1921 Syekh Ibrahim Musa memperkenalkan *sistem Polos* pada madrasah Parabek seperti yang dilaksanakan Sumatera Thawalib dan mengubah nama madrasahnya dengan Sumatera Thawalib juga.

Semenjak itu lembaga pendidikan di Padang Jepang (Paya-kumbuh), Maninjau dan Batusangkar mengubah namanya dengan nama Sumatera Thawalib dan mempergunakan sistem yang dilaksanakan pada Sumatera Thawalib Padang Panjang.

Dengan tersebarnya pendidikan Sumatera Thawalib di Sumatera Barat, timbul keinginan untuk menyatukan semua pelajar itu di bawah satu naungan organisasi pelajar. Demikianlah pada tanggal 22 Januari 1922, atas undangan pelajar-pelajar Sumatera Thawalib di Padang Panjang diadakan pertemuan umum antara wakil-wakil seluruh pelajar Sumatera Thawalib itu. Pertemuan memutuskan membentuk satu kesatuan organisasi Pelajar-pelajar Thawalib di bawah satu Dewan Pusat dengan cabang-cabangnya di daerah. Sebagai pusat ditetapkan Padang Panjang. Di antara para pengurusnya terdapat Haji Djalaluddin Thaib dan Dt. Batuah. Pada tahun 1923 Dt. Batuah sekembali dari Jawa membawa pengaruh Komunis ke dalam Sumatera Thawalib, tetapi untung cepat diketahui sehingga tidak sampai terseret.

Organisasi pelajar Sumatera Thawalib berhubungan dengan SCM (Sarikat Combinatie Minangkabau) yang diprakarsai oleh Bagindo Djalaluddin Rasjad tahun 1919 dan antara keduanya saling tukar informasi di bidang pendidikan dan politik waktu itu di Sumatera Barat. Kedua organisasi itu sama-sama bergerak di bidang pendidikan. Bedanya kalau Sumatera Thawalib secara murni bergerak dalam lembaga pendidikan, sedang pendidikan, sedang SCM memperjuangkan pendidikan melalui saluran politik.

Dalam jumlah, anggota Sumatera Thawalib jauh melebihi anggota SCM. Cabang-cabang Sumatera Thawalib tersebar di seluruh daerah Sumatera Barat sampai ke pelosok-pelosok, sedangkan cabang-cabang SCM hanya terbatas di kota-kota. Dengan demikian, kedudukan Sumatera Thawalib lebih kuat dari SCM. Karena antara kedua organisasi itu terlihat ada persaingan dalam merebut pengaruh. Hal ini lebih-lebih terasa mulai tahun 1923 setelah Dt. Batuah mempengaruhi Sumatera Thawalib dengan paham komunisme yang dibawanya dari Jawa. Sumatera Thawalib yang pada mulanya bergerak dalam lembaga pendidikan saja akhirnya mulai tahun 1923 juga ikut bergerak di bidang politik dalam memperjuangkan cita-citanya.

Dalam memperebutkan pengaruh antara kedua organisasi tersebut, Bagindo Djalaluddin Rasjad berusaha melemahkan kekuatan Sumatera Thawalib. Karena kedudukan Dewan Pusat Sumatera Thawalib sangat kuat SCM berusaha mempengaruhi cabang-cabang Sumatera Thawalib. Karena itu Bagindo Djalaluddin Rasjad menyarankan pada Pengurus Dewan Pusat Sumatera Thawalib supaya cabang-cabangnya diberi otonomi yang lebih besar agar dapat bergerak lebih bebas lagi. Terhadap Dewan Pusat Sumatera Thawalib sendiri dianjurkannya supaya jangan bergerak di bidang lembaga pendidikan saja tetapi sesuai dengan tuntutan zaman Sumatera Thawalib seharusnya juga bergerak di bidang politik dan bidang ekonomi.

Dengan menganjurkan demikian SCM dengan perantaraan Bagindo Djalaluddin Rasjad mengharapkan cabang-cabang Sumatera Thawalib dapat dirangkulnya dan kedudukan Dewan Pusat Sumatera Thawalib menjadi lemah dengan bertambahnya bidang kegiatannya. Demikianlah kegiatan Sumatera Thawalib menjadi lebih diperluas dengan kegiatan sosial ekonomi dan kegiatan politik, lebih-lebih lagi setelah pengaruh Dt. Batuah bertambah besar di dalam tubuh Sumatera Thawalib sendiri.

Akibat kegiatannya itu pemerintah Belanda di Sumatera Barat mengambil tindakan. Tindakan pertama pemerintah Belanda adalah menutup kafetaria Sumatera Thawalib pada tahun 1926 yang dianggap sebagai pusat kegiatan kaum komunis.

Setelah terjadi Perang Silungkang tahun 1926 – 1927, banyak di antara guru-gurunya dilarang mengajar, karena dianggap berbahaya oleh Belanda. Akibatnya kegiatan Sumatera Thawalib sebagai lembaga pendidikan menjadi lumpuh. Di samping itu juga akibat terjadinya gempa bumi di Padang Panjang tahun 1927 gedung-gedung Sumatera Thawalib hancur berantakan.

Pada tanggal 21 Januari 1928 diadakan rapat umum antar seluruh anggota-anggota Sumatera Thawalib dengan mengambil tempat di Parabek. Dalam rapat itu diambil keputusan untuk membangun kembali pusat Sumatera Thawalib di Padang Panjang dan akan mempengaruhi sistem pendidikan yang telah terpengaruh anasir komunis. Akhirnya Organisasi Islam Sumatera Thawalib yang bercorak Nasionalisme Radikal ini dalam kongresnya di Bukittinggi tanggal 24 – 17 Mei 1930 menjelma menjadi *PERMI* (Persatuan Muslimin Indonesia)

### c. Persatuan Muslimin Indonesia (PERMI)

Seperti telah dikatakan bahwa Sumatra Thawalib akhirnya menjelma menjadi PERMI. Setelah selesai Perang Silungkang tahun 1926 – 1927 Sumatera Thawalib mengalami kegoncangan dan kemerosotan yang drastis karena banyak di antara pelajar-pelajar dan guru-guru Sumatera Thawalib yang terlihat kegiatan komunis ditangkap oleh Belanda. Praktis sampai dengan tahun 1929, Sumatera Thawalib menjadi lumpuh sama sekali.

Tetapi masih ada di antara tokoh-tokoh Sumatera Thawalib yang tidak terlihat pengaruh komunis dan sadar bahwa kemunduran Sumatera Thawalib tak dapat dibiarkan berlarut-larut. Oleh karena itu harus dicari jalan ke luar. Jalan ke luar itu hanya dapat dibicarakan dalam suatu kongres Sumatera Thawalib yang akan dihadiri oleh anggota-anggotanya yang tidak terlibat komunis.

Untuk usaha itulah pada tahun 1928, atas prakarsa Haji Udin Rahmani diadakan pertemuan di Parabek, Bukittinggi. Seperti telah dikatakan dalam pertemuan itu diambil keputusan untuk membangun kembali Sumatera Thawalib dan memperbaiki sistem pendidikannya.

Di samping itu juga dibentuk sebuah Panitia Kongres yang

bertugas memikirkan kehidupan Sumatera Thawalib selanjutnya. Susunan Panitia Kongres adalah sebagai berikut:

Ketua : Ali Amran  
Wakil Ketua : Haji Udin Rahmani  
Sekretaris : Darwis Thaib  
Pembantu : Haji Djalaluddin Thaib.

Tugas pertama dari Panitia Kongres ini adalah mempersiapkan acara Kongres. Persiapan ini dilakukan selama satu tahun. Ditetapkan Kongres akan dilaksanakan di Bukittinggi, karena situasi di Padang Panjang tidak mengizinkan untuk diadakan kongres.

Demikianlah pada tanggal 24 – 27 Mei 1930 dilaksanakan Kongres Sumatera Thawalib di Bukittinggi. Salah satu keputusan yang penting dari kongres ini adalah Sumatera Thawalib menjelma menjadi "*Persatuan Muslimin Indonesia*" (PMI). Dengan berubahnya nama Sumatera Thawalib menjadi PMI maka keanggotaan PMI terbuka untuk umum dan kegiatannya tidak terbatas pada bidang sosial dan pendidikan saja lagi, tetapi juga sudah bergerak aktif di bidang politik dalam usahanya memperjuangkan kepentingan rakyat umum.

Untuk mengetahui ide perjuangan PMI kita akan melihat pandangan beberapa tokoh yang dominan dalam tubuh PMI. Mereka inilah yang memberikan corak perjuangan PMI selanjutnya.

Fakih Hasyim, salah seorang tokoh PMI yang sudah mulai bergerak mulai dari Surau Jembatan Besi adalah seorang tokoh PMI yang mempopulerkan ide ekonomi yang terdiri pada kaki sendiri (antarki) dan menganjurkan pembentukan Bank Nasional yang berdiri sendiri pula. Fakih Hasyim sebelumnya adalah anggota *Indonesische Studie Club* di Surabaya yang banyak mempengaruhi cara berpikir selanjutnya. Haji Abdullah Madjid dan A. Gaffar Ismail pandangan politiknya lebih cenderung kepada pandangan Islam yang banyak dipengaruhi oleh PSII (Partai Serikat Islam Indonesia). Haji Djalaluddin Thaib dan Darwis Thaib pandangan mereka lebih banyak dipengaruhi oleh pandangan Partindo dan PNI – Hatta.

Selanjutnya faham Nasionalisme dan Islam menjadi dasar rumusan ideologi PMI berkat bantuan Haji Ilyas Yakub seorang anggota pendatang baru dari Kairo. Ia menyatakan kemajuan kehidupan umat manusia hanya dapat dicapai kalau memper-

hubungkan sistem ekonomi, moral dan spritual secara penuh dan simultan, artinya pendidikan ekonomi tidak dapat dipisahkan dengan pendidikan moral. Hal ini sejajar dengan tiga aspek pokok dalam kehidupan manusia, yaitu sebagai makhluk beragama, anggota suatu bangsa dan putra ibu pertiwi. Dengan dasar pemikiran yang begini PERMI mendasarkan perjuangannya kepada "Islam" dan "kebangsaan".

Dalam kongres PMI pertama tanggal 5 – 9 Agustus 1930 di Payakumbuh yang diikuti oleh 6 cabang PMI ditetapkanlah landasan perjuangan organisasi ini dalam anggaran Dasar PMI. Antara lain disebutkan bahwa: Indonesia yang terdiri dari banyak pulau dengan 80% penduduknya memeluk agama Islam yang merupakan bagian dari dunia Timur mendasarkan perjuangan mereka atas Islam dan Kebangsaan. Muslimin Indonesia sedang berjuang untuk kemajuan agar memperoleh hak-hak kemanusiaan yang harus tercermin dalam tata kehidupan sosial, kemakmuran dan kemuliaan hidup mereka, dan sebagainya.

Untuk melengkapi dan menyempurnakan partai, maka PMI dilengkapi dengan beberapa bagian yang khusus mengurus bidangnya saja, seperti bagian Pendidikan, Perusahaan, Propaganda Islam dan Kepanduan. Selanjutnya, dalam waktu yang singkat akan dibentuk cabang-cabang untuk seluruh Indonesia.

Pada kongres kedua PMI tahun 1932 di Padang, nama PMI ditukar dengan PERMI dan mulai saat itu resmilah PERMI menjadi satu partai politik. Sikap perjuangan PERMI terhadap pemerintah Hindia Belanda adalah tidak mau bekerjasama (Non Koperasi) dan berjuang secara radikal dalam menghadapi musuh bangsa dan agama. Sikap PERMI yang demikian tegas, kembali membangunkan semangat juang rakyat Sumatera Barat dari kelesuan yang disebabkan akibat perang Silungkang 1925 – 1927.

Dalam waktu yang singkat PERMI berkembang dengan cepat. Cabang-cabang dan ranting PERMI terdapat di seluruh Sumatera Barat. Cabangnya berjumlah sebanyak 30 buah dan ranting-rantingnya sebanyak 160 buah di seluruh daerah Sumatera Barat. Jumlah seluruh anggota adalah 750.000 orang.<sup>47)</sup>

Untuk menyebarkan aspirasi perjuangan mereka ke tengah-tengah masyarakat Sumatera Barat, maka PERMI menerbitkan sebuah majalah yang bernama "*Medan Rakyat*" di Padang dan dipimpin oleh Haji Ilyas Yakub. Majalah "*Medan Rakyat*" ini betul-betul dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan semula.

Dalam waktu yang relatif singkat media pers ini dapat memperluas pengaruh ke seluruh pelosok Sumatera Barat, hingga jumlah simpatisan PERMI jauh melebihi jumlah anggotanya sendiri. Ke dalam majalah itu dituangkan semua ide perjuangan PERMI, bagaimana cara perjuangan yang hendak ditempuh, apa perlunya kehidupan ekonomi rakyat ditingkatkan dan sebagainya. Di samping itu pada "Medan Rakyat" juga terlihat pokok-pokok pikiran menurut garis sosialisme ekstrim yang mencemaskan pemerintah Belanda di Sumatera Barat dan hal ini menyebabkan segala kegiatan PERMI diawasi pemerintah Belanda dengan ketat.

Untuk menghimpun masa yang banyak sebagai pengikut, PERMI sering melaksanakan rapat umum yang dihadiri oleh masyarakat dan semua golongan. Dalam pidato yang berapi-api dan revolusioner mereka mempergunakan kefanatikan beragama dari rakyat untuk mencari pengikut. Di samping itu cita-cita Nasionalisme Indonesia selalu dipergunakan dalam setiap kesempatan untuk menarik masa sebagai pengikut.

Karena akhirnya anggota PERMI telah menjadi sangat banyak yang terdiri dari baik kaum pria maupun kaum wanita, maka pengurus Besar PERMI terpaksa dibagi dua, yaitu PERMI PUTRA dan PERMI WANITA.

Ke dalam PERMI masuk tokoh-tokoh organisasi Islam lainnya, karena PERMI sendiri tidak membatasi anggota-anggotanya dan terbuka untuk umum. Demikianlah ada tokoh-tokoh Muhammadiyah, Diniyah dan lain-lain yang menjadi anggota PERMI.

Tetapi setelah PERMI resmi menjadi politik, terjadilah perpecahan atau pertentangan pendapat dengan pemimpin-pemimpin Muhammadiyah dan Perguruan Diniyah (Padang Panjang). Muhammadiyah akan mengeluarkan pemimpin-pemimpin mereka yang berorientasi politik sebagai anggota Muhammadiyah. Begitu juga dengan Perguruan Diniyah. Pendeknya Muhammadiyah dan Perguruan Diniyah tidak mau ikut berpolitik. Sebaliknya PERMI sendiri yang dimasuki oleh sebagian pemimpin kedua organisasi itu jelas-jelas merupakan sebuah partai politik yang memperjuangkan cita-citanya melalui bidang politik. Karena jalan ke luar belum diketemukan, buat sementara perpecahan itu menjadi berlarut-larut. Ada beberapa orang pengurus Muhammadiyah yang dikeluarkan dari Muhammadiyah.

Di samping itu beberapa orang penasehat Sumatera Thawalib dari angkatan tua yang masih sangat berpengaruh seperti Dt. Ban-

daru Basa dan Syekh Ibrahim Musa Parabek dari semula sudah menentang pembubaran Sumatera Thawalib dan dijadikan PERMI.

Walaupun demikian PERMI tetap jalan dengan garis politiknya, bahkan berjuang dengan cara yang radikal. Bahkan secara umum pada dasarnya ulama-ulama muda Sumatera Barat tidak ada yang melontarkan kritiknya terhadap perjuangan PERMI. Haji Rasul, seorang tokoh Islam yang terkenal sangat kritis terhadap ideologi Islam dan Kebangsaan, menanggapi PERMI sebagai salah satu dari tiga organisasi Islam yang besar waktu itu yang sedang berjuang untuk kemajuan bangsa dan agama dengan caranya sendiri yang waktu itu merupakan cara terbaik. 48)

Sedangkan ulama-ulama Islam yang netral bersikap memberi peluang kepada PERMI untuk melaksanakan cita-cita perjuangannya melalui garis politik, karena mereka sendiri juga mendambakan kemajuan dan perbaikan tingkat penghidupan dalam masyarakat Sumatera Barat.

Kesimpulannya perpecahan yang timbul di kalangan ulama-ulama Sumatera Barat dengan menjadi partai politiknya PERMI hanya terbatas dalam masalah "Pro dan Kontra" saja. Sedangkan seluruh ulama muda Islam itu sama-sama menginginkan kemajuan untuk rakyat Sumatera Barat khususnya, rakyat Indonesia umumnya. Hal ini menyebabkan PERMI dengan cepat dapat menyebarkan pengaruhnya sampai ke pelosok-pelosok Sumatera Barat.

Keberhasilan PERMI dalam menyebarluaskan pengaruhnya ke seluruh daerah Sumatera Barat, karena PERMI mempunyai pelopor-pelopor pejuang pada setiap Nagari di Sumatera Barat.

Karena banyak organisasi masa Islam lainnya yang bergabung dengan PERMI, maka PERMI dengan mudah mempergunakan sekolah-sekolah Islam sebagai bawahan dari organisasi-organisasi masa Islam sebagai medan komunikasi. Guru-guru Sekolah Sumatera Thawalib yang telah terdapat di seluruh pelosok Sumatera Barat menjadi basis pertama dalam menyebarkan pengaruh ini. Pada tempat-tempat yang tidak terdapat sekolah dilaksanakan rapat-rapat umum. Di mana mungkin PERMI ikut serta dalam kegiatan masyarakat dan mendorong organisasi-organisasi daerah ke arah kemajuan.

Dalam kongresnya pertama PERMI menetapkan menjadikan Padang sebagai pusat kegiatannya. Kota Padang sebagai ibukota karesidenan Sumatera Barat memberi peluang yang lebih besar kepada PERMI untuk lebih meningkatkan perjuangannya. Bukit-

tinggi, Padang Panjang dan lain-lain kota di pedalaman tidak banyak memberi kesempatan berkembang bagi PERMI. Di samping itu kepindahan ke Padang dimaksudkan supaya status PERMI dapat mencapai status perjuangan tingkat nasional dalam waktu yang singkat.

Di Padang PERMI segera menceburkan dirinya dalam kegiatan organisasi yang ada. Langkah pertama, bulan Juni 1930 PERMI ikut dalam kegiatan Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB) dalam rangka menentang rencana pemerintah Hindia Belanda di Sumatera Barat untuk menghentikan perluasan HIS.

Selanjutnya PERMI segera terlihat dalam kegiatan yang tak habis-habisnya. PERMI berusaha mengajak kerjasama organisasi-organisasi lain, terutama persatuan pedagang, organisasi-organisasi agama, dan organisasi dagang lainnya. PERMI juga mensponsori pembentukan "*Komite Pembina Persatuan*"<sup>49)</sup> dengan sasaran jangka pendek mendirikan sebuah Gedung Pertemuan Nasional yang permanen. Tetapi usaha ini gagal, karena banyak di antara para pedagang di Padang yang diharapkan menjadi sponsor tidak merasa tertarik sebab sedang menghadapi depresi ekonomi. Dengan kegagalan ini PERMI tidak berhenti berusaha dan mencoba mengumpulkan dana melalui pemimpin-pemimpinnya yang kaya. Tetapi karena PERMI tidak mendapatkan izin dari pemerintahan Belanda di Sumatera Barat, PERMI terpaksa membatalkan kegiatan pengumpulan dana itu dan harus membayar denda kepada pemerintah Belanda.

Di Padang usaha PERMI tidak terbatas hanya untuk mempengaruhi golongan Islam saja, tetapi juga berusaha mempengaruhi para intelektual Barat Minangkabau. Pada mulanya mereka hanya dapat mempengaruhi pemuda intelektual Barat itu melalui perkumpulan *Jong Islamiaten Bond*. Tetapi akhir tahun 1930 PERMI telah dapat mengumumkan berdirinya cabang-cabang PERMI di kota Padang dengan anggotanya terdiri dari segala golongan masyarakat. Akhir tahun 1930 itu juga PERMI sudah memulai pekerjaan beratnya dengan mengadakan pertemuan-pertemuan masa dan menerbitkan majalah. Usaha itu mencapai puncaknya ketika suatu panitia perayaan seluruh kota Padang dapat diorganisasi di bawah pengaruh PERMI. Panitia itu bernama *Komite Perayaan Islam*.

Dalam bulan Desember 1930, sebelum perayaan Mikradj Nabi dilangsungkan, PERMI mengambil inisiatif untuk memben-

tuk Panitia Permanen Perayaan-perayaan Agama. Dengan kegiatan itu PERMI dapat mengatasi kegiatan Muhammadiyah yang telah lebih dulu berada di Padang. Muhammadiyah telah mempunyai wakil dalam Panitia Permanen. Dengan terdapatnya dominasi PERMI dalam Panitia itu, PERMI dapat menetapkan siapa-siapa orang yang akan berbicara/berpidato dalam upacara-upacara perayaan itu dan mengatur susunan acaranya. Dengan demikian, dalam waktu yang relatif singkat, PERMI telah mengambil langkah penting ke arah pengambilalihan kepemimpinan pemuda di kota Padang.

Segala kegiatan PERMI ini dapat dicapai dengan berhasil berkat bantuan para pedagang besar *Pasar Gadang* di Padang yang bertindak sebagai pendorong dan pemberi dana yang dibutuhkan. Dengan bantuan Basa Bandaro, seorang tokoh terkemuka dalam masyarakat pedagang di Padang, PERMI dapat berhubungan *Himpunan Sandang Indonesia* di Padang. Hal ini melapangkan dada PERMI untuk memperoleh dana buat penunjang program pendidikannya, terutama untuk pembangunan *Islamic College*.

Pada permulaan tahun 1931, perkembangan PERMI di Padang telah melampaui fasa kritis, artinya sebagai suatu partai politik yang baru, PERMI sudah dapat menempatkan dirinya di Padang sebagai suatu kekuatan yang harus dipertimbangkan dalam segala kegiatannya. Baik kawan maupun lawan sudah mengakui eksistensi PERMI di Padang sebagai sesuatu yang harus dipertimbangkan. Sementara itu di daerah-daerah PERMI pun berhasil membebaskan diri dari pemurnian yang dilancarkan oleh Muhammadiyah. Bahkan di Pariaman PERMI melakukan infiltrasi ke dalam organisasi-organisasi Islam golongan tua yang ortodoks.

Sesuai dengan tujuan pindah ke Padang, di samping menjalin kerjasama dengan organisasi-organisasi beraliran Islam, PERMI juga mengadakan perhubungan dengan PNI di Jawa. Antara PERMI dengan PNI seolah-olah telah ada persetujuan tak resmi, yaitu di mana ada PERMI di situ tak perlu ada PNI. Sebaliknya di mana ada PNI di situ tidak perlu ada PERMI. Di Jawa telah berdiri PNI, karena itu kehadiran PERMI tak perlu lagi. Di Sumatera sudah ada PERMI, maka tak perlu ada PNI. Dalam kampanye di Jawa oleh PNI, PERMI diikutsertakan pula. Begitu pula sebaliknya dalam kampanye PERMI di Sumatera, PNI diikutsertakan pula.

Seperti telah dikatakan bahwa, PERMI akan mendirikan

*Islamic College* di Padang. Pendirian Lembaga ini adalah dalam rangka usaha menjalani kerjasama dengan para intelektual Barat. Pada waktu itu, para intelektual Barat asal orang Sumatera Barat sendiri memandang rendah terhadap para ulama Islam. Mereka menganggap kedudukan mereka sangat tinggi di tengah masyarakat karena mereka telah melalui sistem pendidikan yang dilaksanakan oleh orang Barat yang mereka anggap mempunyai kelebihan yang dari orang Timur. Karena pendidikan dengan sistem Barat yang mereka terima, mereka bekerja pada pemerintahan Belanda dan untuk itu mereka mendapat gaji yang cukup besar dan dimanjakan oleh Belanda. Sedangkan para ulama adalah tamatan pendidikan tradisional yang mereka anggap rendah tingkatnya. Oleh karena itu mereka, para intelektual Barat menganggap rendah kepada para ulama Islam. Bahkan mereka tidak mau diajak kerjasama dalam usaha ulama-ulama itu memperjuangkan cita-cita dalam masyarakat. Di samping itu mereka menganggap apa yang diperjuangkan ulama-ulama itu sebagai suatu usaha yang merongrong pemerintahan Belanda, yang berarti merongrong mereka juga. Anggapan yang demikian merupakan jurang pemisah yang sangat dalam antara para ulama dengan para intelektual Barat itu.

Sebaliknya para ulama Islam menganggap bahwa para intelektual Barat itu merupakan tenaga yang sangat bermanfaat dalam perjuangan mereka kalau saja mereka mau kerjasama dengan mereka. Tapi karena ada jurang pemisah yang dalam, sampai sejauh itu para ulama, termasuk PERMI belum berhasil mengajak intelektual Barat itu ikut berjuang bersama-sama mereka.

Dengan membuka *Islamic College* tingkat pengetahuan ulama-ulama dapat ditingkatkan karena *Islamic College* adalah lembaga pendidikan setingkat Sarjana Muda. Itulah usaha PERMI dalam mendekati para intelektual Barat itu, jadi intelektual Barat didekati dengan intelektual Islam.

Di dalam tubuh PERMI sendiri terdapat dua golongan besar yaitu golongan nasionalisme dan golongan Islam. Golongan Nasionalisme lebih mengutamakan rasa persatuan kebangsaan dalam memperjuangkan ide-idenya. Golongan Islam mengutamakan cara-cara yang diajarkan agama Islam dalam memperjuangkan ide-idenya. Di antara kedua golongan itu tujuan perjuangannya sama, tetapi cara yang ditempuh untuk memperjuangkannya agak berbeda. Hal ini sudah terasa sejak PERMI diresmikan jadi partai politik. Antara tahun 1930 – 1932 salah satu usaha PERMI ke

dalam dirinya sendiri adalah mempersatukan kedua pandangan ini, karena masing-masing golongan ini mempengaruhi golongan lain, mereka saling berebut pengaruh dalam tubuh PERMI sendiri. Hal ini apabila dibiarkan berlanjut terus mungkin akan melemahkan perjuangan PERMI sendiri karena tubuhnya digerogeti dari dalam oleh elemen-elemennya sendiri.

Dalam kongres PERMI tahun 1932 di Padang, tokoh-tokoh yang berusaha saling menarik PERMI ke pihaknya sendiri di keluarkan dari PERMI. Mulai saat itu PERMI mulai mengembangkan ide politiknya di bawah pimpinan Haji Ilyas Yakub.

Pada tahun 1934 pemerintah Belanda mempergunakan "hak luar biasa" Gubernur Jenderal terhadap PERMI. Kegiatan PERMI dibatasi, pemimpin-pemimpinnya ditangkap dan dibuang ke Digul. PERMI dilarang mengadakan rapat. Jika anggota PERMI berkumpul lebih dari tiga orang, mereka dianggap rapat dan mereka dapat ditangkap tanpa diperiksa lagi.

Mulai tahun 1934 itu PERMI praktis sudah melakukan kegiatan bawah tanah untuk memperjuangkan cita-citanya. Akibatnya antara PERMI dengan pemerintahan Belanda sering timbul ketegangan yang gawat. Karena Pemerintah Belanda tak mau mengambil resiko yang lebih gawat, maka tahun 1937 PERMI dibubarkan pemerintah Hindia Belanda. Inilah cara satu-satunya yang dapat ditempuh Belanda. Dengan dibubarkan itu berarti ruang gerak PERMI dihapuskan sama sekali di Sumatera Barat dan semenjak itu PERMI dapat dikatakan sudah bubar.

Tetapi apakah demikian keadaan yang sebenarnya? PERMI sebagai satu partai politik memang sudah tidak ada lagi di Sumatera Barat semenjak tahun 1937 itu. Tetapi cita-cita perjuangannya tetap hidup terus dan dilanjutkan oleh tokoh-tokoh lain dengan cara yang lain pula.

### 3. Indische Partij

*Indische Partij*, sudah sejak mula berdirinya menjadi partai politik, *Indische Partij* didirikan di Bandung pada tahun 1912. Tujuan utama dari partai ini adalah mempersiapkan untuk kehidupan bangsa yang merdeka.

Keanggotaan *Indische Partij* terbuka bagi semua lapisan dalam masyarakat. Tetapi berbeda dengan partai-partai lainnya, maka anggota-anggota *Indische Partij* pada mulanya adalah orang-orang Eropah atau peranakan Eropah lainnya.

Menurut susunan pemerintah kolonial Belanda waktu itu di Indonesia terdapat jurang pemisah yang tajam antara orang Eropah dengan orang Indonesia, orang Eropah berada di tempat yang tinggi, orang Indonesia di tempat yang rendah. Bukan hanya itu saja, bahkan antara orang Indonesia sendiri dibuat sedemikian rupa orang pemerintah Belanda sehingga orang-orang Indonesia yang telah mengalami pendidikan Barat melalui sistem pendidikan Barat melalui sistem pendidikan Belanda menganggap dirinya jauh lebih tinggi dari bangsanya sendiri yang tidak mendapat pendidikan Barat itu. Perbedaan pandangan yang demikian memperlihatkan dirinya dalam kehidupan sehari-hari.

*Indische Partij* ingin melenyapkan hal yang demikian, dengan cara keanggotaan *Indische Partij* terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Walaupun mula-mula keanggotaannya kebanyakan terdiri dari orang Eropah, tetapi kemudian banyak orang Indonesia yang masuk di dalamnya, Pimpinan *Indische Partij* telah menunjukkan garis yang tegas, yaitu ingin agar rakyat Hindia Belanda merupakan suatu kesatuan penduduk yang multi-rasial. Tujuan ini benar-benar revolusioner, karena berusaha menghilangkan kenyataan politik rasial Belanda di Indonesia waktu itu.

Karena tujuan *Indische Partij* yang radikal itu dan melalui tulisan-tulisan pemimpinya yang sangat revolusioner, akhirnya setelah baru satu tahun menjadi partai politik, pemimpin-pemimpin yang radikal revolusioner itu ditangkap Belanda dan dibuang ke negeri Belanda. Semenjak itu *Indische Partij* yang telah kehilangan pemimpinya berubah menjadi *Insulinde* yang kemudian tahun 1919 berubah lagi menjadi *National Indische Partij* (NIP).

*Insulinde*, sebagai penjelmaan dari *Indische Partij* inilah yang pada tahun 1916 mulai mendirikan cabang-cabangnya di Sumatera Barat yang pada mulanya hanya merupakan unit-unit kecil. Unit-unit *Insulinde* ini didirikan di Sumatera Barat atas pengaruh dari Marah Sutan yang waktu itu menjadi ketua cabang *Insulinde* di Batavia.

Sama juga dengan *Insulinde* di pusatnya di Jawa segera mendapatkan pengakuan badan hukum dari pemerintah Hindia Belanda, begitu juga dengan *Insulinde* di Sumatera Barat. Cabang Padang, Solok dan lain-lain segera mendapat pengakuan hukum pemerintah Belanda di Sumatera Barat. Cabang Padang di bawah pimpinan Sulaiman Effendi dan Raja Ibrahim, *Insulinde* memper-

kenalkan bagi Sumatera Barat betapa pentingnya peranan kesatuan politik bagi Indonesia dan memperjuangkan cita-citanya. Insulinde melihat betapa kelompok-kelompok adat di Sumatera Barat tidak sungguh-sungguh menghadapi situasi terakhir di Sumatera Barat. Karena itu Insulinde mengusahakan berdirinya lembaga-lembaga lain dalam masyarakat di luar lembaga-lembaga adat yang ada. Melalui lembaga-lembaga ini Insulinde memberikan pendidikan terhadap individu-individu supaya mereka dapat mengembangkan dirinya sendiri dalam perjuangan hidupnya.

Setelah Insulinde berubah menjadi *Nasional Indische Partij* (NIP) di pusatnya, terjadi perubahan dalam politik. NIP bersama-sama dengan Sarekat Islam membentuk persekutuan anti pemerintah. Demikian juga di Sumatera Barat, Insulinde berubah menjadi NIP. NIP segera mempengaruhi SCM (Sarekat Combinatie Minangkabau). Sulaiman Effendi yang merupakan salah seorang pelopor NIP di Sumatera Barat masuk ke dalam SCM sebagai salah seorang pemimpinnya di samping Bagindo Djalaluddin Rasjad yang mendirikan SCM. SCM yang baru saja berdiri segera mengambil garis politik NIP sebagai pedoman politiknya.

Demikianlah NIP bersama-sama kaum muda Sarekat Islam dan SCM menjadi tuan rumah dalam Kongres Persatuan Sumatera yang diadakan di Padang.

#### 4. Muhammadiyah

Muhammadiyah merupakan sebuah organisasi sosial berdasarkan Islam yang kebanyakan bidang gerak utamanya adalah bidang pendidikan agama Islam. Muhammadiyah didirikan oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Nopember 1912 di Yogyakarta.

Sebelumnya, pada tahun 1909 Kyai Haji Ahmad Dahlan bergabung dalam Budi Utomo dengan maksud agar dapat mengajarkan agama Islam kepada anggota-anggota Budi Utomo yang kebanyakan berasal dari pegawai administrasi pemerintahan Hindia Belanda dan dari guru sekolah Belanda. Terutama terhadap guru yang menjadi anggota Budi Utomo Kyai Haji Ahmad Dahlan mengharapkan agar mereka nantinya dapat pula mengajarkan agama Islam kepada murid mereka.

Nampaknya cita-cita Kyai Haji Ahmad Dahlan ini mendapat sambutan dari tokoh-tokoh Budi Utomo sendiri. Mereka menganjurkan supaya Kyai Haji Ahmad Dahlan membuka Sekolah sendiri yang diorganisasi secara baik dalam suatu organisasi yang

permanen dengan peraturan yang jelas dan tegas, sehingga kelas sekolah itu tidak akan tergantung kepada satu orang saja, misalnya sangat tergantung pada tokoh pendirinya saja, setelah tokoh itu tiada, sekolah itu pun ikut tiada. Dengan sekolah yang disarankan kepada Kyai Haji Ahmad Dahlan jangan sampai terjadi demikian pula, hendaknya sekolah itu dapat hidup terus, walaupun para pendirinya sudah tiada lagi. Karena itu harus ditunjang dengan suatu sistem organisasi permanen yang kuat.

Sebagai jawaban dari saran-saran pemimpin Budi Utomo itu, maka pada tahun 1912 Kyai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah di Yogyakarta dengan tujuan dapat menyebarkan agama Islam kepada anggota-anggotanya dalam usaha menunjukkan kehidupan beragama di Indonesia.

Agar tujuan itu dapat terdapat, maka Muhammadiyah tidak saja bergerak di bidang pendidikan agama Islam, tetapi juga bergerak di bidang lainnya, seperti mengadakan rapat umum dan tabliq akbar; mengumpulkan wakaf; mendirikan mesjid, rumah sakit, panti asuhan anak yatim; menerbitkan buku, majalah, surat kabar dan banyak lagi kegiatan sosial lainnya.

Dari bidang kegiatan Muhammadiyah tersebut di atas kelihatan bahwa Muhammadiyah tidak ikut bergerak di bidang politik yang waktu itu menjadi modal bagi perjuangan bangsa Indonesia.

Sebagai suatu organisasi Islam, Muhammadiyah segera berkembang ke luar Yogyakarta dan menyebarkan ke seluruh Indonesia. Perantau-perantau Islam Minangkabau memberikan sambutan yang konkrit terhadap kehadiran Muhammadiyah ini. Organisasi perantau Minangkabau di Pekalongan yang bernama "*Nurul Islam*" segera mengubah dirinya menjadi cabang Muhammadiyah Pekalongan.

Fakih Hasyim, seorang ulama Islam yang awal abad ke-20 banyak bergerak di bidang pendidikan di Sumatera Barat, pada waktu itu mengadakan tabliq di Surabaya dan membicarakan masalah Muhammadiyah ini. Maka kemudian atas inisiatip Kyai Haji Mas Mansyur didirikanlah cabang Muhammadiyah di Surabaya.

Syekh Haji Abdul Karim Amarullah (Haji Rasul) yang waktu itu sedang berada di Jawa, sangat terkesan melihat peranan organisasi perantau Minangkabau di Jawa dan melihat kegiatan Muhammadiyah dalam mengembangkan agama Islam. Demikianlah

pada bulan Juni 1925 Syekh Abdul Karim Amarullah mendirikan cabang Muhammadiyah yang pertama di Sumatera Barat di Sungai Batang, Maninjau, tempat kelahiran beliau sendiri. Cabang Muhammadiyah di Maninjau merupakan cabang yang pertama di luar Jawa.

Cabang Muhammadiyah di Maninjau itu sebelumnya adalah sebuah lembaga pendidikan yang bernama *Sandi Aman*. Semboynannya berbunyi "*Sandi aman Tiang Selamat*" dianggap rakyat sebagai anti adat dan anti penghulu, karena itu lembaga itu tidak mendapat pengikut yang banyak.

Berbeda dengan Muhammadiyah yang didirikan berdasarkan sistem sosial dan sistem perekonomian rakyat yang telah ada, jadi tidak menimbulkan ketegangan di kalangan rakyat.

Di Maninjau sendiri yang menjadi tokoh-tokoh Muhammadiyah di samping Haji Rasul, adalah adik-adiknya sendiri, yaitu Haji Yusuf Amarullah dan Jakfar Amarullah, yang sebelumnya juga merupakan perantau pedagang Minangkabau di Jawa dan telah menjadi anggota Muhammadiyah di sana.

Di Maninjau itu Haji Rasul berhasil mendirikan sebuah Sekolah Dasar Muhammadiyah yang dalam waktu yang relatif singkat telah mempunyai murid sampai ribuan orang merupakan keberhasilan Muhammadiyah di Sungai Batang, Maninjau itu mempercepat perkembangan Muhammadiyah sendiri di Sumatera Barat.

Pada mula berdirinya Muhammadiyah di Maninjau itu tidak menggantungkan hidupnya kepada sumbangan masyarakat Islam atau iuran dari para anggota-anggotanya, sebaliknya Muhammadiyah mendapat dana dari perantau-perantau pedagang Minangkabau yang sering pula pergi ke Jawa. Perantau-perantau itu di samping sebagai pedagang juga merupakan tokoh-tokoh Muhammadiyah yang Militan.

Muhammadiyah lebih berkembang lagi di Maninjau setelah tiga orang pedagang kembali ke Maninjau dari Pekalongan, yaitu Jakfar Datuk Majo Lelo, Datuk Nan Barena dan Sutan Marajo. Ketiga orang itu merupakan penghulu-penghulu suku di Maninjau yang mempunyai kedudukan yang baik dalam masyarakat. Dengan status mereka yang demikian dan dengan keuangan yang cukup mereka membantu mengembangkan pengaruh Muhammadiyah di Maninjau.

Berbeda dengan beberapa organisasi sosial yang terdahulu maka Muhammadiyah sama sekali tidak menentang adat dan

penghulu adat walaupun mereka merupakan penganut agama Islam yang sangat taat dan konsekwen dengan pendirian mereka. Sebaliknya mereka bahkan ikut berpartisipasi ke dalam kehidupan masyarakat dan mencari posisi yang baik dalam lembaga adat. Penghulu-penghulu adat yang menjadi anggota Muhammadiyah mengembangkan Muhammadiyah secara adat yang berlaku.

Atas usul Datuk Majo Lelo, adalah seorang anggota Kerapatan Adat Nagari Sungai Batang, disetujui untuk mendirikan Sekolah kelas II atas dasar Islam. Sekolah ini mendapat perlindungan dari Nagari Maninjau sendiri, walaupun statusnya swasta dan berada di bawah pengawasan Muhammadiyah. Yang menjadi gurunya diambilkan dari alumni Sumatera Thawalib. Walaupun sekolah ini belum sebaik sekolah pemerintah sendiri yang ada di Sungai Batang, tetapi para orang tua di sana lebih suka memasukkan anaknya ke sekolah Muhammadiyah itu. Hal ini disebabkan karena Muhammadiyah sendiri merupakan sebagian dari masyarakat, sedangkan sekolah pemerintah waktu itu seakan-akan terpisah dari masyarakat.

Haji Rasul yang kemudian menetap di Padang Panjang pada tanggal 20 Juni 1925 mendirikan sebuah perkumpulan bernama *Tabliq Muhammadiyah*, yang menjadi anggota pertama-tama adalah pelajar-pelajar Sumatera Thawalib Padang Panjang yang berasal dari Maninjau. Di sini mereka belajar teknik berkhotbah dan tabliq. Dengan segera Tabliq Muhammadiyah menjadi pilihan baru bagi pelajar di Padang Panjang yang tidak mau bergabung dengan Sumatera Thawalib yang telah kemasukan faham Komunis.

Dengan segera *Tabliq Muhammadiyah* menjadi sasaran serangan pelajar-pelajar Sumatera Thawalib yang telah dipengaruhi komunis. Mereka mencela Haji Rasul yang dikatakan berafiliasi dengan organisasi Islam di Jawa yang mendapat subsidi dari pemerintah.

Di samping itu pemerintah Belanda sendiri bersikap curiga terhadap Tabliq Muhammadiyah ini, karena klub itu berada di bawah pimpinan Haji Rasul, seorang tokoh Islam yang mereka takuti dan tidak disenangi oleh karena itu pemerintah Belanda sendiri menghalang-halangi ruang gerakan Thabliq Muhammadiyah, hingga akhirnya merupakan suatu organisasi yang eksistensinya ada tetapi tak mampu berkembang. Walaupun demikian pengaruh Muhammadiyah mulai meluas di Sumatera Barat.

Saalah Sutan Mangkuto dapat menghimpun pengikut-peng-

ikut Muhammadiyah di Pitalah, salah satu Nagari di Padang Panjang. Berbeda dengan "Thabliq Muhammadiyah, di sini anggota-anggotanya terdiri dari orang dewasa dan mempunyai anak cabang yang bernama "Perkumpulan Tani" Tetapi di sini pun tidak berkembang dengan baik, karena bagaimanapun juga Nagari Pitalah merupakan salah satu tempat yang dijadikan komunis sebagai daerah basisnya. Oleh karena itu Muhammadiyah pun dicurigai dan dianggap akan merupakan suatu ancaman baru bagi nagari itu dan seluruh kegiatannya dicurigai oleh penguasa nagari setempat dan Saalah Sutan Mangkuto sendiri menjadi tidak populer di kalangan para pemangku adat.

Untuk mengatasi masalah kemandekan Muhammadiyah di Padang Panjang ini yang kegiatannya tidak selicin seperti di Sungai Batang, Maninjau, maka Haji Yusuf Amarullah, sekretaris Muhammadiyah di Sungai Batang, pada bulan Desember 1926 membubarkan *Tabliq Muhammadiyah* dan mendirikan Cabang Muhammadiyah Padang Panjang dengan menjadikan Pitalah sebagai anak cabangnya. Sebagai ketua cabang Muhammadiyah di Padang Panjang diangkat Syekh Muhammad Jamil Jaho, salah seorang Ulama Islam dari Kaum Tua yang sangat berpengaruh di Padang Panjang dan dia sendiri tidak dicurigai oleh pemerintah Belanda. Syekh Muhammad Jamil Jaho sendiri percaya bahwa dengan Muhammadiyah dia akan dapat membendung pengaruh komunis yang sudah mulai meluas di daerah Sumatera Barat.

Syekh Muhammad Zain, salah seorang tokoh ulama kaum Tua di Sumabur, Batusangkar juga menggabungkan dengan Muhammadiyah dan dia menarik penghulu-penghulu pemangku adat di sana ikut dalam Muhammadiyah.

Dengan demikian Muhammadiyah mulai bergerak kembali, sesudah mengalami kemacetan beberapa bulan, dalam usahanya menyebarkan agama Islam di Sumatera Barat dengan suatu organisasi yang teratur rapi.

Pada awal perkembangannya Muhammadiyah mendapat tantangan keras dari Sumatera Thawalib sendiri yang telah banyak terkena pengaruh komunis. Datuk Batuah seorang teman seperjuangan Haji Rasul di Sumatera Thawalib, menyerang Haji Rasul dengan hebatnya yang menyebabkan Haji Rasul kemudian meninggalkan Sumatera Thawalib. Akibatnya antara Sumatera Thawalib yang dipengaruhi komunis itu dengan Muhammadiyah terjadi saling mencaci melalui penerangan agama atau khotbah Jum'at.

Tema pokok yang diperdebatkan adalah tentang cara perjuangan antara Islam dan Nasionalisme.

Pada umumnya Sumatera Thawalib (baca Komunis) mengancam Muhammadiyah yang tidak mau bergerak di bidang politik, tidak mau memperjuangkan kepentingan bangsa dari tekanan pemerintah Belanda, hanya mengurus sebagian orang saja. Sebaliknya Muhammadiyah mencela Sumatera Thawalib karena mereka tidak melandaskan perjuangannya dengan agama Islam. Sebagai orang Islam sewajarnya kalau Islam dijadikan dasar dan tujuan perjuangan Sumatera Barat.

Jadi hambatan pertama terhadap perkembangan Muhammadiyah di Sumatera datangnya dari kalangan orang Islam sendiri, tetapi orang Islam yang sudah dipengaruhi paham komunis. Atau dengan kata lain tantangan itu datang dari orang komunis yang mempergunakan Islam sebagai kedok.

Sementara itu Muhammadiyah di Sungai Batang sudah dapat mendirikan *Aisyiah*, suatu organisasi wanita yang berada di bawah naungan Muhammadiyah. Anggota-anggotanya yang pertama adalah para istri dari pemimpin-pemimpin Muhammadiyah Sungai Batang sendiri. Dengan kembalinya putri Haji Rasul dari Pekalongan pada pertengahan tahun 1927. *Aisyiah* mulai berdiri sendiri dan banyak memberikan bantuannya dalam perkembangan Muhammadiyah selanjutnya.

Sebelumnya, pada permulaan tahun 1927 Muhammadiyah Sungai Batang juga telah mendirikan sebuah organisasi Kepanduan dengan nama *Hizbul Wathan*. Organisasi Kepanduan ini bertujuan untuk memajukan pendidikan pemuda-pemuda dan anak-anak di luar sekolah supaya mereka dapat menjadi manusia yang berguna dan mampu berdiri sendiri di tengah masyarakat. Pendidikan pemuda-pemuda dan anak-anak itu didasarkan pada ajaran Islam.

*Hizbul Wathan* segera menjadi alat propaganda yang sangat efektif bagi Muhammadiyah. Walaupun dalam anggaran dasarnya dikatakan bahwa yang boleh menjadi anggota *Hizbul Wathan* adalah pemuda-pemuda yang berumur 18 tahun ke bawah tetapi di Sungai Batang sendiri banyak anggotanya yang terdiri dari orang dewasa. Melalui mereka inilah Muhammadiyah melebarkan sayapnya.

Setelah Muhammadiyah Sungai Batang mendapat kunjungan dari Haji Fachruddin, wakil ketua umum Muhammadiyah pusat, maka perkembangan Muhammadiyah di sana menjadi cepat sekali.

Walaupun kunjungan itu tidak terlalu lama tetapi hal itu berhasil meningkatkan kegiatan Muhammadiyah. Kepada organisasi Aisyiah dijelaskan tentang persamaan hak antara wanita dan laki-laki. Juga dijelaskan betapa pentingnya organisasi kaum wanita di tengah masyarakat.

Selama kunjungan Haji Fachruddin itu Muhammadiyah Sungai Batang, Maninjau berhasil mendirikan suatu organisasi sosial yang diberi nama *Penolong Kesusahan Umum* yang bertugas mengorganisir pekerjaan sosial dan kesehatan masyarakat. Usaha untuk mendirikan HIS Muhammadiyah juga dibicarakan waktu itu. Sampai akhir tahun 1927 Muhammadiyah Sungai Batang, Maninjau sudah mempunyai dua sekolah agama dan dua sekolah kelas II.

Di Sungai Batang Muhammadiyah dapat berkembang dengan cepat dan lancar, tetapi di Padang dan daerah lainnya di Sumatera Barat waktu itu Muhammadiyah sedang menghadapi rongrongan kaum Komunis. Komunis mencap Muhammadiyah sebagai PEB (Pengikut Ekor Belanda) karena Muhammadiyah menerima subsidi dari Pemerintah Belanda. Keterangan yang dihembus-hembus oleh kaum komunis mungkin akan meningkat terus kalau tidak segera diatasi.

Maka untuk memperlancar perkembangan Muhammadiyah di Sumatera Barat, Muhammadiyah Pusat di Yogyakarta mengutus A.R. Sutan Mansyur ke Sumatera Barat. A.R. Sutan Mansyur adalah seorang putra Minangkabau yang ikut duduk sebagai Pengurus besar Muhammadiyah Pusat.

Berkat usaha A.R. Sutan Mansyur perkembangan Muhammadiyah bertambah luas. Dengan kemampuannya membaca situasi yang sedang dihadapi dan dengan kemampuannya meyakinkan orang lain akan kebenaran jalan yang ditempuhnya dan dengan ketenangan menghadapi musuh yang agresif, A.R. Sutan Mansyur mampu memperluas pengaruh Muhammadiyah di Sumatera Barat. Banyak penghulu suku pemangku adat Minangkabau di Padang Panjang, Bukittinggi, Lubuk Basung dan tempat-tempat lain di Sumatera Barat yang menjadi tulang punggung Muhammadiyah di daerahnya masing-masing. Bahkan kader-kader komunis yang telah dibina sejak lama, seperti M. Zein Jambek, Abdullah Kamil, Abdul Malik Sidik dan lain-lain, berbalik menjadi pemuka-pemuka dan mubaliq-mubaliq Muhammadiyah yang terkenal, karena pengaruh A.R. Sutan Mansyur.

A.R. Sutan Mansyur melihat bahwa untuk menjamin kelanjutan organisasi Muhammadiyah perlu digembleng kader-kader sebagai calon pemimpin Muhammadiyah di masa yang akan datang. Oleh karena itu selama A.R. Sutan Mansyur berada di Sumatera Barat, dia telah berhasil membina kader-kader Muhammadiyah yang militan. Supaya Muhammadiyah tersebar ke seluruh Sumatera Barat dengan cepat, maka kader-kader itupun diambilkan dari hampir seluruh daerah Sumatera Barat. Di antara mereka itu adalah seperti berikut:

- a. MAMKA (Haji Abdul Malik Karim Amarullah dari Maninjau),
- b. Udin dari Kurai Taji, Pariaman,
- c. Rasyid Idris dan Yakub Idris dari Padang,
- d. Haji Khatib dari Kubang, Payakumbuh,
- e. Darwis Muin dari Talago Payakumbuh,
- f. Samik Ibrahim dari Pasisir Selatan,
- g. Haji Abu Samad dari Bukittinggi,
- h. Imam Arifin dari Solok,
- i. Kahar Taher dari Sulit Air,
- j. Haji Mukhtar dari Simabur, Batusangkar, dan lain-lain.

Kader-kader wanita yaitu:

- a. Fatimah Latif dari Padang,
- b. Khadijah Idrus dari Padang,
- c. Hindun Sahih dari Padang,
- d. Cik Ani kesuma dari Padang,
- e. Jawanis Syarif dari Pariaman,
- f. Muraini Zain dari Pariaman,
- g. Meimunah dari Padang Panjang,
- h. Rohani dari Padang Panjang,
- i. Rukayah Rasyad dari Bukittinggi,
- j. Rubiah Syuib dari Bukittinggi,
- k. Daniah Sidik dari Bukittinggi,
- l. Fatimah Jalil dari Payakumbuh,
- m. Cendrawati dari Payakumbuh, dan
- n. Raminsan dari Payakumbuh.

Setelah melalui gemblengan A.R. Sutan Mansyur dan pemimpin-pemimpin Muhammadiyah Sumatera Barat lainnya, mereka dilepas dengan harapan untuk mengembangkan Muhammadiyah di kemudian hari.

Pada tanggal 11 September 1927, dengan mengambil tempat di surau Inyik Jambek, di bawah pimpinan Hitam Sutan Muda dibentuk cabang Muhammadiyah Bukittinggi dengan organisasi Aisyiah dan Kepanduan Hizbul Wathan. Selanjutnya cabang-cabang Muhammadiyah didirikan di hampir seluruh daerah Sumatera Barat 12 September 1925 cabang Padang Panjang, 13 Desember 1928 cabang Batusangkar, 21 Desember 1928 cabang Payakumbuh. Selanjutnya cabang-cabang di Padang, Pariaman, Maninjau, Sumabur dan lain-lain. Pengertian cabang di sini adalah cabang dari Muhammadiyah Pusat di Yogyakarta, bukan seperti cabang-cabang sebelumnya yang berarti cabang Muhammadiyah di Sungai Batang di Maninjau.

Walaupun merupakan cabang, tetapi Muhammadiyah Sumatera Barat mempunyai kebebasan dalam mengambil kebijaksanaan pemilihan pimpinan cabang, bertindak ke dalam. Pokoknya asal tidak bertentangan pedoman pokok Muhammadiyah pusat, Cabang Muhammadiyah di daerah dapat berbuat menurut situasi dan kondisi setempat.

Semenjak 1930 Muhammadiyah Sumatera Barat mendapat kemunduran dengan dipecatnya beberapa orang anggota Muhammadiyah yang bersemangat dan aktif, karena terlibat politik. Tapi mereka mendapat penampungan dalam PSII, Sumatera Thawalib dan PERMI.

Sampai dengan masuknya bala tentara Jepang ke Sumatera Barat, Muhammadiyah adalah satu-satunya organisasi Islam yang masih tetap diberi kebebasan bergerak oleh pemerintah Hindia Belanda.

## 5. Taman Siswa

Suwardi Suryaningrat (kemudian terkenal dengan nama Ki Hajar Dewantara) salah seorang pendiri *Indische Partij* pada tahun 1911, sekembalinya dari pembuangan di Negeri Belanda pada tahun 1919 terus meninggalkan kegiatan politik, selanjutnya menerjunkan diri ke dalam dunia pendidikan. Pada 3 Juli 1922 Suwardi Suryaningrat mendirikan lembaga pendidikan yang ber-corak nasional dengan nama *Taman Siswa* di Yogyakarta.

Tujuan pendirian Taman Siswa adalah untuk mengganti sistem pendidikan dan pengajaran Belanda dengan sistem baru berdasarkan kebudayaan Indonesia. Untuk mewujudkan cita-cita itu Taman Siswa memakai sistem "*Among*", yaitu suatu sistem

pendidikan yang mendasarkan pendidikan kebangsaan yang mengandung juga aliran-aliran pendidikan Barat modern yang sudah berkembang waktu itu di Eropah. Sistem "Among" mengutamakan semboyan "*Tutwuri Handayani*", yang berarti "mengikuti dari belakang sambil mempengaruhi."

Untuk lebih jelasnya mengenai corak nasional dalam Taman Siswa itu baiklah di sini dicantumkan tentang cita-cita pendidikan Taman Siswa yang dinamakan "*Panca Dharma*" (Lima Kewajiban).

- a. Cukup memberi "kebebasan" dan Kemerdekaan pada anak-anak agar bertumbuh atau berkembangnya tidak semata-mata bersandarkan "perintah" dan "paksaan" dari pendidik.
- b. Selalu mengindahkan pengaruh-pengaruh yang baik dari "kodrat alam anak-anak."
- c. "Menuntun perkembangan jasmani dan rohani anak-anak dari sifat kodratnya ke arah "adab dan kebudayaan."
- d. Memperkuat jiwa "kebangsaan" serta melakukan hidup kebangsaan agar anak-anak tetap bersatu dengan masyarakatnya serta merasa bangga dan bertanggung jawab sebagai anggota dari masyarakat kebangsaan itu.
- e. Menyesuaikan hidup kebangsaannya dengan dasar-dasar "Perikemanusiaan" serta menginsafkan dan menyadarkan, bahwa kebangsaan itu adalah bentuk khusus dari sifat kemanusiaan dan karena itu sekali-kali tidak boleh bertentangan dengan atau menyalahi hukum perikemanusiaan. 50)

Lembaga pendidikan yang bercorak nasional berdasarkan kebudayaan Indonesia yang di dalamnya nyata-nyata terlihat asas kemerdekaan dan kebangsaan, mendapat sambutan dari masyarakat Indonesia "Tidak saja di tanah Jawa, tetapi juga di daerah-daerah lain di Indonesia, terutama di Sumatera."

Pada waktu itu hampir seluruh Indonesia sudah meningkatkan perjuangannya menuntut Indonesia merdeka melalui bermacam-macam cara, ada yang melalui politik, ada yang melalui organisasi massa lain, ada yang bekerjasama dengan Belanda, ada yang tidak mau kerjasama dengan Belanda, ada yang dengan cara yang sangat radikal, ada yang konservatif dan sebagainya dengan tujuan yang hampir sama yaitu meninggikan derajat Indonesia di tengah masyarakat dunia. Untuk mencapai tujuan itu satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah membebaskan Indonesia

dari jajahan Belanda.

Dalam suasana Indonesia yang demikianlah Perguruan Taman Siswa didirikan oleh Suwardi Suryaningrat. Dengan sendirinya Taman Siswa yang bercorak nasional itu mendapat sambutan di mana-mana. Peranan Taman Siswa menjadi lebih penting lagi di tengah masyarakat setelah pemerintah Hindia Belanda menekan dengan kekerasan pengaruh pergerakan nasional Indonesia lebih-lebih terhadap pergerakan yang bersifat radikal dan tidak mau bekerjasama dengan Belanda.

Taman Siswa walaupun hanya bergerak di bidang pendidikan tetapi sebetulnya merupakan suatu lembaga yang menyemai dan membina cita-cita nasional Indonesia sesuai dengan cita-cita Suwardi Suryaningrat sewaktu mendirikan *Indische Partij*. Di sinilah letak pentingnya kemunculan Taman Siswa di tengah masyarakat Indonesia waktu itu.

Sumatera Barat dalam sejarah pergerakan Nasional Indonesia merupakan salah satu daerah yang mempunyai respon yang tinggi terhadap kebangkitan Nasional Indonesia. Sudah sejak awal abad kedupuluh kegiatan yang berbau politik dan lembaga pendidikan swasta yang bersifat nasional memasuki kehidupan masyarakatnya.

Oleh karena itu Sumatera Barat tidak terlepas dari tindakan reaksioner dari Gubernur Jenderal de Jonge (1931 – 1936) dalam menghancurkan kekuatan rakyat Indonesia. Ia melakukan tindakan keras tanpa kompromi dalam usahanya menghancurkan hak hidup penerahan nasional rakyat Indonesia. Di Sumatera Barat mulai tahun 1933 ia menjalankan tangan besinya melarang seluruh kegiatan partai politik dan menangkap serta membuang tokoh-tokoh pergerakan nasional Sumatera Barat. Di antara tokoh pergerakan yang terkena antara lain adalah Rasuna Said, Muchtar Lutfi, Haji Ilyas Yakub dan lain-lain.

Dalam keadaan yang demikian pemimpin-pemimpin pergerakan rakyat di Sumatera Barat buat sementara terpaksa mengalihkan kegiatan politiknya ke bidang sosial ekonomi, terutama di bidang pendidikan. Demikianlah salah seorang di antaranya yang bernama Anwar St. Saidi mempelopori berdirinya Taman Siswa di Sumatera Barat.

Anwar St. Saidi lahir pada tanggal 10 April 1910 di Bukittinggi. Pendidikannya hanya sampai SD 5 tahun (Sekolah Gubernemen kelas II). Ia adalah seorang pedagang besar di Bukittinggi.

Dalam mengurus usaha dagangnya itu ia sering pulang pergi ke Jawa. Di Jawa ia berkenalan dengan Dr. Sutomo, seorang tokoh pergerakan Nasional Indonesia yang pada tahun 1929 mendirikan "Bank Nasional Indonesia" di Surabaya. Usaha perjuangan Dr. Sutomo sangat terkesan di hati Anwar St. Saidi. Walaupun pendirian Bank Nasional Indonesia itu tidak merupakan suatu tindakan perjuangan yang radikal, tetapi nyata-nyata ditujukan untuk kepentingan pergerakan nasional Indonesia. Oleh karena itu pada tanggal 30 September 1930, Anwar St. Saidi mendirikan pula P.T. Bank Nasional di Bukittinggi.

Berkat pengaruh seorang tokoh Sumatra Barat yang bernama Jamaluddin, maka Anwar St. Saidi juga terjun ke dalam gelanggang Pergerakan Nasional di Bukittinggi sejak tahun 1926. Ia bergaul dengan tokoh-tokoh politik waktu itu seperti Haji Muchtar Lutfi, Haji Djalaluddin Thaib, Haji Ilyas Yakub, Drs. Mhd. Hatta dan sebagainya dalam kegiatannya di bidang politik Sumatra Barat. Ketiga pergerakan politik sudah sangat tertekan di Sumatra Barat. maka Anwar St. Saidi mempelopori berdirinya Perguruan Taman Siswa.

Bukittinggi dan daerah sekitarnya merupakan salah satu daerah di Sumatra Barat yang rakyatnya sangat kuat minatnya untuk menyekolahkan anak-anaknya. Akibatnya sekolah yang didirikan oleh pemerintah Belanda tidak mencukupi untuk menampung arus murid yang banyak itu. Hal ini sangat terasa oleh rakyat Bukittinggi dan daerah sekitarnya.

Matur, salah satu daerah yang terletak di luar kota Bukittinggi juga merasakan keadaan kekurangan sekolah. Anwar St. Saidi melihat hal ini. Atas anjuran Anwar St. Saidi, maka pemuka masyarakat Matur, Dt. Rajo Angek bersama pemuka-pemuka lainnya pada tanggal 15 Mei 1933 mendirikan Perguruan Taman Siswa di Matur. Dengan sistem Taman Siswa Anwar St. Saidi sendiri sudah lama mengetahui dan mengenal karena ia sering pulang pergi ke Jawa. Anwar St. Saidilah menunjukkan bagaimana cara-cara Taman Siswa dijalankan. Perguruan Taman Siswa di Matur merupakan Taman Siswa pertama di daerah Sumatra Barat.

Kekecewaan rakyat Sumatra Barat terhadap politik tangan besi Belanda dalam pembatasan ruang gerak pergerakan Nasional Indonesia, menyebabkan daerah Sumatra Barat menjadi daerah yang sangat subur bagi Taman Siswa yang bercorak nasional itu.

Dengan adanya Taman Siswa mereka mendapat wadah baru untuk mencapai kemajuan dan pembinaan harga diri sebagai suatu bangsa. Oleh karena itu, dalam waktu yang sangat singkat Taman Siswa berkembang dengan pesat di Sumatra Barat. Taman Siswa di Jawa segera dihubungi dan mereka memberikan bimbingan dan bantuan tenaga guru yang diperlukan untuk melaksanakan sistem pendidikan Taman Siswa.

Anwar St. Saidi sebagai pelopor pendirian Taman Siswa Sumatra Barat, bekerja tidak tanggung-tanggung dalam usahanya menyebarluaskan pembukaan Taman Siswa. Walaupun dia seorang pedagang yang sangat sibuk, tetapi dari sisa waktunya yang sedikit itu dipergunakannya untuk mengembangkan Taman Siswa.

Pada tanggal 1 Juni 1934, atas prakarsa Anwar St. Saidi berdiri pula Taman Siswa di Bukittinggi, Tahun 1935, di Sungai Puar sebelah selatan daerah Bukittinggi, tempat kelahiran Anwar St. Saidi dibantu oleh Makmur Dt. Penghulu.

Mulai saat itu maka makin menyebarkan Taman Siswa di Sumatra Barat. Sebagai sekolah swasta yang bercorak nasional Taman Siswa waktu itu merupakan salah satu dari tiga sekolah nasional yang ada di Sumatra Barat yaitu: Sekolah-sekolah *Muhammadiyah* (dasar Islam corak Nasional), Sekolah *Adabiah* (dasar Islam corak nasional) dan Perguruan *Taman Siswa* sendiri.

Kota Padang sebagai ibu Kota Sumatra Barat dan merupakan Kota terbesar di Sumatra Barat, memberikan jawaban yang positif terhadap pertumbuhan Taman Siswa. Atas inisiatif beberapa orang pemuka masyarakat, seperti Kaharuddin (pegawai Kantor dagang Belanda), Haji Syarif Gani (saudagar besar), Haji Muhammad Arif (guru dan ulama), A, Kahar Mak Oencoe (pegawai rumah sakit tentara), Thalib Marah Sutan (saudagar), pada tanggal 3 September 1934 berdirilah "Majelis Cabang Taman Siswa". Kerja sama yang erat antara pedagang, pegawai dan ulama dalam Majelis Cabang Taman Siswa menghasilkan berdirinya Perguruan Taman Siswa di Padang.

Walaupun Taman Siswa dilaksanakan pada rumah rakyat yang disewa dan hanya dengan dua orang guru (Sulaiman dan Ratna Syahrial), pada penerimaan pertama saja murid yang masuk sudah melimpah-limpah. Tingkat yang dibuka barulah tingkat "Taman Muda" dan "Taman Dewasa".<sup>51)</sup>

Pada tanggal 19 Desember 1935, di Batusangkar berdiri pula Taman Siswa atas usaha Dt. Putih. Di Payakumbuh atas

prakarsa Anwar St. Saidi yang mendapat bantuan dari Rica St. Makmur dan Jamran Akhmad, Perguruan Taman Siswa pun didirikan.

Bukan saja kota-kota di Sumatra Barat yang memberikan respon positif terhadap "kehadiran" Taman Siswa ini, tetapi nagari-nagari juga menyambutnya dengan hangat, seperti misalnya di nagari Kota Baru dan nagari Talu (Kabupaten Pasaman).

Hal ini memang wajar terjadi, karena pada Taman Siswa di Sumatra Barat juga diberikan pelajaran Agama Islam di samping pengetahuan umum. Sistem kurikulum Taman Siswa yang demikian dapat menampung nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat Minangkabau. Oleh karena itu dalam waktu yang pendek Perguruan Taman Siswa dapat berkembang di Sumatra Barat.

Di Padang sendiri terjadi "peledakan" murid Taman Siswa. Kota Padang, sebagai pusat administrasi pemerintahan, pusat perekonomian dan pusat kegiatan sosial lainnya, sudah semenjak akhir abad 19 menerima arus penduduk yang datang dari nagari-nagari dan menetap di Padang (Urbanisasi). Karena itu pertambahan penduduk dengan cepat melonjak jumlahnya. Hal ini bukan saja menjadikan Taman Siswa kewalahan menampung murid-murid, tetapi juga sekolah Muhammadiyah dan Alabiyah kewalahan dibuatnya. Dalam usaha mengatasi masalah ini. Taman Siswa mendatangkan guru-guru dari Taman Siswa Solo, Medan dan memindahkan sebagian guru-guru Taman Siswa yang ada di Bukittinggi, Matur dan Batusangkar ke Padang.

Salah satu kegiatan Taman Siswa yang menonjol waktu itu adalah pembentukan "*Kepanduan Bangsa Indonesia*" (KBI) di Padang. Melalui KBI para pengasuh Taman Siswa berhasil memasukkan dan meningkatkan "rasa kebangsaan" dan "rasa harga diri" kepada anak-anak pandunya. Hal ini dapat lebih menyebar lagi, karena KBI sendiri bukan saja menerima pelajar-pelajar sekolah lain. Di dalam KBI itu Taman Siswa dapat membina pola hidup sederhana yang dipraktekkan oleh guru-gurunya dan hidup kekeluargaan yang rukun.

Hal terakhir inilah yang menyebabkan Taman Siswa, cepat berkembang dalam masyarakat Sumatra Barat. Pola hidup sederhana dan hidup kekeluargaan yang intim menyebabkan Taman Siswa betul-betul menjadi milik rakyat dan hidup subur di masyarakat Minangkabau waktu itu.

Sekarang semua cabang Taman Siswa di seluruh Indonesia tergabung dalam "Persatuan Perguruan Taman Siswa" yang berpusat di Yogyakarta.<sup>52)</sup>

## 6. Organisasi Kepemudaan

Sama halnya dengan organisasi-organisasi yang terdahulu, maka organisasi Kepemudaan di Sumatra Barat tidak saja disebabkan oleh faktor-faktor yang ada di Sumatra Barat sendiri, tetapi juga bersangkutan paut dengan faktor-faktor lain di luar Sumatra Barat.

Pada penghujung abad ke-19 dan awal abad ke-20 di Sumatra Barat terjadi ketegangan sosial semacam perang dingin antara "Golongan Muda" dengan "Golongan Tua" dalam kehidupan masyarakat. Pertentangan itu menyangkut masalah perbedaan faham tentang pelaksanaan ajaran Islam dalam masyarakat. Golongan Tua menginginkan bahwa semua ajaran Islam dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat secara konsekwen. Dalam hal ini yang terkena adalah hukum Adat, terutama yang menyangkut hak harta warisan. Mereka mendasarkan semuanya itu pada apa yang mereka peroleh dari tanah Arab (Mekah). Sedangkan Golongan Muda menginginkan cara-cara yang lebih lemah tetapi progresif sesuai dengan pendidikan yang mereka terima dari Mesir (Al Azhar). Pertentangan itu bukan pertentangan antara agama Islam dengan adat Minangkabau. Di samping itu pertentangan faham itu diramaikan lagi oleh golongan intelektual yang memperoleh dasar pendidikan Barat. Antara golongan intelektual agama dengan golongan intelektual yang berpendidikan Barat tidak terdapat saling pengertian dalam pengaturan hidup masyarakat, dalam perubahan yang terjadi di bidang sosial ekonomi dan di bidang politik. Pertentangan faham antara masalah-masalah itu merupakan suatu fenomena yang belum terjawab selama awal-awal abad ke-20. Hal ini menimbulkan kegelisahan di kalangan generasi muda, baik dari angkatan muda yang mendapatkan pendidikan berdasarkan agama Islam, maupun di kalangan angkatan muda yang mendapat pendidikan Barat yang telah mulai menyadari keadaan yang sesungguhnya sedang terjadi dalam kehidupan masyarakat Sumatra Barat khususnya, umumnya dalam masyarakat Indonesia.

Melihat fenomena yang belum terpecahkan itu, sekelompok pemuda perantau Minangkabau di Jakarta yang telah terbuka

matanya terhadap kepincangan hidup dalam masyarakat pada tahun 1918 membentuk suatu organisasi pemuda yang bernama "*Jong Sumatranen Bond*" (Pemuda Sumatra) di Jakarta. Anggotanggotanya kebanyakan berasal dari lapisan tingkat atas<sup>54</sup>) masyarakat Minangkabau yang telah dibesarkan dalam zaman pertentangan faham di Sumatra Barat dan zaman penuh perdebatan tentang masalah kemajuan zaman. Golongan intelektual ini menghargai adat (dalam lingkungan mana mereka dibesarkan), tetapi penghargaan itu hendaklah berdasarkan kepada logika ilmu pengetahuan yang telah mendidik mereka, supaya dapat membangun dan mendirikan suatu bangsa baru. Cara berpikir yang sempit yang dibatasi oleh lingkaran adat harus disesuaikan dengan tuntutan kemajuan zaman. Hal itu tidak berarti hanya merupakan suatu sikap baru terhadap adat, tetapi logika berpikir menurut ilmu pengetahuan moderen harus dimasukkan ke dalam adat. Dengan demikian adat itu sendiri akan dapat merupakan suatu alat pembaharuan, bukan menjadi penghalang pembaharuan. Untuk mencapai hal itu, seluruh perantau Minangkabau tanpa memandang golongan dan dasar pendidikannya harus menyatakan buah pikirannya ke dalam satu wadah yang tepat. Dengan demikian didirikanlah *Jong Sumatranen Bond* itu.

Pada tahun 1918 itu juga pemuda Nazir Dt. Pamuncak, seorang mahasiswa asal Minangkabau di Jawa, dikirimkan ke Sumatra Barat sambil pulang kampung, untuk menyebarkan ide-ide yang terkandung dalam *Jong Sumatranen Bond*. Hal ini mendapat sambutan dari pemuda-pemuda Minangkabau yang masih menetap di Sumatra Barat dan ide-ide *Jong Sumatranen Bond* dapat diterima. Dalam waktu yang relatif singkat berdirilah cabang-cabang *Jong* tempat lain *Sumatranen Bond* di Padang, Bukittinggi, dan pengurus *Jong Sumatranen Bond* cabang Padang adalah sebagai berikut:

- a. Anas Munaf sebagai Ketua
- b. Bahder Johan sebagai Sekretaris
- c. Mohammad Hatta sebagai Bendahara
- d. Abdul Malik sebagai Komisaris
- e. Aisyiah Yahya sebagai Komisaris<sup>56</sup>)

Salah satu kegiatan *Jong Sumatranen Bond* di Padang adalah mendirikan sebuah tugu dinamakan *Tugu Pemuda Suamtra*. Dengan penamaan *Pemuda Suamtra* terhadap tugu itu memper-

lihatkan bahwa ruang lingkup kegiatan perjuangan mereka tidak hanya terbatas pada daerah Sumatra Barat tetapi juga untuk seluruh daerah Sumatra. Juga mereka tidak melihat perbedaan suku bangsa dengan garis yang tajam, bahkan ketajaman garis pandangan itu ditujukan terhadap "perantauan pemuda Sumatra"<sup>55)</sup>

Tujuan *Pemuda Sumatra* ialah untuk menambah pengaruh bangsa Indonesia dalam pemerintahan dan mengajak pemuda berpikir secara nasional dengan menghilangkan perasaan kesukuan masing-masing. Tokoh pemuda Sumatra Barat di samping yang telah disebutkan tadi adalah Muhammad Yamin.

Dipengaruhi oleh organisasi "Pemuda Sumatra" inilah timbulnya organisasi Sumatra Thawalib (Persatuan Pelajar Sumatra) di Padang Panjang. Pada mulanya pada Sekolah agama Sumatra Thawalib sudah ada satu kesatuan masyarakat koperasi yang dinamakan "Persatuan Sabun". Tetapi karena pengaruh adanya Organisasi "Pemuda Sumatra", pelajar-pelajar Sumatra Thawalib meningkatkan ruang lingkup bidang kegiatannya. Atas prakarsa pemuda Zainuddin Labai dan Jalaluddin Thaib, pada tahun 1918, organisasi koperasi itu ditingkatkan aktifitasnya dan dijadikan organisasi pemuda dengan nama "Sumatra Thawalib" yang berarti "Persatuan Pelajar Sumatra".<sup>57)</sup>

Pada waktu yang bersamaan suatu organisasi pemuda pelajar didirikan pula pada sekolah agama Parabek, Bukittinggi di bawah pimpinan Syekh Ibrahim Musa.

Pada bulan Pebruairai 1919, organisasi pemuda pelajar di Padang Panjang dengan organisasi pemuda pelajar di Parabek, Bukittinggi itu mengadakan suatu federasi, maka lahirlah suatu organisasi pemuda pelajar yang lebih besar dengan nama tetap "Sumatra Thawalib" (organisasi umum Pemuda-pelajar Sumatra.<sup>58)</sup> Tidak lama sesudah itu pemuda-pemuda pelajar agama di Padang Jepang, (Payakumbuh), Maninjau dan Batusangkar juga bergabung ke dalam "Sumatra Thawalib". Dengan demikian lahirlah suatu organisasi pemuda pelajar yang besar dan kuat yang menghimpun hampir seluruh pelajar-pelajar Islam di Sumatra Barat yang mempunyai suatu Dewan Pimpinan Pusat (di Padang Panjang) yang mengkoordinasi semuanya.

Selanjutnya kegiatan Sumatra Thawalib seperti apa yang telah dijelaskan pada bagian terdahulu.

Perlu dijelaskan di sini bahwa nama Sumatra Thawalib

dipergunakan untuk bermacam-macam sekolah dan organisasi dari sekolah-sekolah agama sejenis misalnya:

- a. Sekolah Agama Jembatan Besi dinamakan Sumatra Thawalib
- b. Sekolah agama di Parabek juga kemudian dinamakan Sumatra Thawalib.
- c. Gabungan antara kedua Sekolah tersebut di atas juga dinamakan Sumatra Thawalib.
- d. Kemudian sekolah agama di Padang Japang (Payakumbuh) di Maninjau dan di Batusangkar juga dinamakan Sumatra Thawalib.
- e. Gabungan dari kesemuanya sekolah tersebut di atas juga dinamakan Sumatra Thawalib.
- f. Organisasi pelajar dari semua sekolah itu, baik secara tersendiri menurut sekolah masing-masing maupun secara gabungan juga dinamakan Sumatra Thawalib.

Jadi yang dimaksudkan dalam bagian organisasi Kepemudaan ini adalah organisasi pemuda pelajar dari semua sekolah Sumatra Thawalib yang juga dinamakan Sumatra Thawalib.

Dalam organisasi Kepemudaan ini perlu dibicarakan peranan dari "*Persatuan Murid-Murid Diniyah School*" (PMDS)<sup>59</sup>) di Padang Panjang yang didirikan tahun 1922. Perkumpulan ini terdiri dari bagian putra dan bagian putri. Bagian putrinya dipimpin oleh Rahmad El Yunusiah Labai yang kemudian berhasil mendirikan Sekolah Diniyah Putri Padang Panjang. Di sini juga terkenal beberapa orang tokoh wanita lainnya seperti: Rasuna Said, Ratna Sari Darwisah. Rahmah El Yunusiah lebih banyak bergerak giat dalam dunia pendidikan dan baru menjelang akhir hayatnya aktif dalam bidang politik.

Lain halnya dengan Rasuna Said, yang sepanjang hayatnya dihabiskannya untuk aktif dalam pergerakan politik. Ia seakan-akan tidak lagi memperhatikan dirinya dan masa depannya. Yang penting cita-citanya terlaksana. Ia juga seorang propagandis dan penulis yang cekatan yang berpendirian sangat konsekwen. Bersama-sama dengan Ratna Sari, Rasuna Said merupakan tokoh perjuangan wanita yang ditakuti oleh pemerintahan Belanda di Sumatra Barat. Ke mana saja ia pergi, ia selalu diikuti oleh mata-mata Belanda, karena setiap gerak geriknya sangat dicurigai oleh Belanda. Bersama dengan Rasimah Ismail akhirnya Rasuna Said ditangkap Belanda dan dikirim ke penjara di Jawa

Tengah (Semarang). Tetapi setelah meringkuk selama satu setengah tahun di penjara Semarang itu, Rasuna Said muncul kembali dengan sikap yang lebih berapi-api. Karena segala kegiatannya dicurigai Belanda, akhirnya Rasuna Said menerbitkan sebuah majalah yang bernama "*Menara Putri*". Melalui majalah itulah Rasuna Said menyatakan pendirian dan pandangan politiknya secara bebas.<sup>60)</sup>

Dinyah bagian putri tidak melibatkan diri dalam bidang politik. Tetapi PMDS bagian putranya kemudian banyak sekali anggotanya yang tertarik pada bidang politik. Mereka terpengaruh dengan cita-cita politik PNI-Hatta dan pemuda-pemuda PMDS inilah nanti yang merupakan anggota-anggota pertama dari PNI-Hatta di Suamtra Barat.

Organisasi kepemudaan lainnya yang terdapat di Suamtra Barat adalah organisasi Kepanduan, yang merupakan bawahan dari organisasi induknya, misalnya:

Hisbul Wathan – Organisasi kepanduan dari Muhammadiyah  
Al Hilal – Organisasi kepanduan dari Partai Politik  
PERMI.

KBI – Organisasi kepanduan dari perguruan Taman  
Siswa.

Seperti telah dikatakan organisasi kepanduan ini merupakan salah satu alat dari induk organisasinya. Hizbul Wathan merupakan alat propaganda dari Muhammadiyah, Al Hilal merupakan tempat pengemblengan kader PERMI, KBI merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Perguruan Taman Siswa melalui mana pemuda anggotanya digembleng dengan azas kemerdekaan dan kebangsaan Indonesia.

Di samping itu juga terkenal di Suamtra Barat *Himpunan Pemuda Pelajar Imdomesia* (HPII) nama yang kemudian muncul dari pemuda pelajar Sumatra Thawalib. Di bawah pimpinan Haji Zainal Abidin Ahmad pengaruh HPII juga tersebut ke seluruh Sumatra Barat sebagai sebuah organisasi pemuda yang merupakan kader pemimpin di kemudian hari.

Antara tahun 1923 – 1926 muncul pula sebuah organisasi pemuda yang lain yaitu organisasi pemuda INS Moh. Syafei dari Ruang Pendidikan INS Kayutanam. Pemuda ini lebih banyak bergerak di bidang sosial dan pendidikan. Tetapi karena dasar pendidikan pada INS ini ditanamkan rasa untuk dapat hidup

sendiri melalui kecintaan terhadap alam sekitarnya, kemudian hari pemuda-pemuda INS ini merupakan pemimpin-pemimpin yang militan dalam masyarakat Indonesia.

Semua kependuan ini merupakan suatu wadah yang sangat tepat bagi pemuda-pemuda Sumatra Barat karena di sinilah mereka dapat belajar dengan bebas tentang kehidupan masyarakat tanpa mendapat rintangan. Lebih-lebih sewaktu di Sumatra Barat segala kegiatan politik dilarang maka organisasi kependuan merupakan wadah yang menampung aktifitas pemuda Sumatra Barat. Melalui kependuan ini pemuda-pemuda itu masih dapat melihat bahwa cara hidup tradisional di Sumatra Barat tidak memadai lagi untuk menghadapi perubahan sosial ekonomi dan politik.

Organisasi kependuan di Sumatra Barat merupakan organisasi yang mempunyai hubungan yang nyata dengan organisasi induknya atau dengan partai-partai politik. Karena itu organisasi kependuan merupakan organisasi tempat pembinaan kader pemimpin dari organisasi induknya.<sup>61)</sup> Dengan demikian organisasi kependuan ini, seperti juga halnya dengan organisasi kependuan lain di daerah Indonesia, akan membawa anggota-anggotanya kepada kesatuan terhadap masyarakatnya dan mencintainya sebagai keluarga besar bangsa Indonesia.

Sebetulnya dalam organisasi kepemudaan ini termasuk masalah organisasi sosial dan organisasi politik yang telah dibicarakan atau yang akan dibicarakan kemudian, karena semuanya itu justru digerakkan, diaktifkan atau dipelopori oleh pemuda-pemuda Sumatra Barat dalam memperjuangkan kehidupan yang layak bagi bangsa Indonesia di tengah masyarakat dunia. Oleh karena itu membicarakan organisasi sosial atau organisasi politik sudah menyinggung tentang organisasi pemudanya, karena antara keduanya sebetulnya tidak dapat dipisahkan.

Oleh karena itu setiap membicarakan organisasi sosial dan organisasi politik sekaligus sudah membicarakan tentang organisasi pemuda.

## **7. Partai Komunis Indonesia**

Krisis yang dialami Minangkabau sebagai akibat Perang Minangkabau, dengan berakhirnya abad ke-19 belum lagi hilang. Bahkan krisis itu berlanjut ke dalam abad ke dua puluh. Pada awal abad 20 "Alam Minangkabau" mengalami serangan dari segala arah terhadap sendi-sendi kehidupannya. Sementara itu faham

gerakan pembaharuan Islam mulai berkembang dalam masyarakat Minangkabau dan faham kebangsaan mulai menjalar ke dalam kehidupan rakyat Minangkabau, terutama ke dalam lembaga-lembaga pendidikan Islam. Bersamaan dengan itu kekuatan politik dan ekonomi Belanda makin kuat dan pengaruhnya terasa pada berbagai-bagai aspek kehidupan masyarakat. Sistem ekonomi uang yang dijalankan pemerintah Belanda di Indonesia dengan cepat mempengaruhi kehidupan rakyat sampai ke pelosok-pelosok nagari dan menghancurkan sistem perekonomian tradisional rakyat minangkabau. Pada tahun 1908 pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan sistem pajak uang dan pajak penghasilan ke dalam kehidupan rakyat yang berakibat fatal bagi rakyat Minangkabau. Keadaan yang demikian masih ditambah lagi dengan akibat depresi ekonomi yang mulai terasa tahun 1920.

Dari gambaran tersebut di atas dapat diambil dua kesimpulan yang terjadi di kalangan masyarakat Minangkabau sebagai akibatnya. Pertama, masyarakat mulai akhir abad ke-19 sampai tahun 1920 hampir-hampir kehilangan pegangan hidup dan kehilangan kepercayaan pada diri sendiri. Mereka diombang-ambingkan oleh situasi Minangkabau yang tidak menentu itu. Pemimpin-pemimpin mereka tidak jelas mana yang akan diikuti karena diri sendiri terlihat dalam pertentangan faham antara sesama mereka. Di samping itu rakyat hidup di bawah tekanan kaki tangan pemerintahan kolonial Belanda yang tidak kenal balas kasihan. Kedua, rasa kebencian rakyat Minangkabau terhadap pemerintahan kolonial Belanda makin bertambah kuat. Belanda dengan sistem ekonomi kapitalisnya dan sistem pemerintahan kolonialnya dianggap rakyat Minangkabau sebagai biang yang mendatangkan malapetaka saja bagi rakyat Minangkabau.

Dalam situasi Sumatra Barat yang demikian itulah, pada tahun 1923 faham komunis dibawa dan disebarkan melalui tangan Haji Dt. Batuah di kalangan pelajar Sumatra Thawalib. Haji Dt. Batuah dilahirkan pada tahun 1895 di Kota Lawas dekat Padang Panjang. Setelah dia menamatkan sekolah kelas II pemerintah, dia belajar di Mekah selama 6 tahun (1909 – 1915). Setelah kembali ke Padang Panjang dia belajar kepada Haji Rasul (Syekh Abdul Karim Amarullah) serta membantu gurunya itu di Sumatra Thawalib. Pada tahun 1922 dia dipilih menjadi penasihat organisasi pelajar Sumatra Thawalib.

Permulaan tahun 1923 Haji Dt. Batuah pergi ke Sigli di Aceh. Di sana dia bertemu dengan orang yang bernama Natar Zainuddin, seorang Minangkabau yang telah menerima ajaran komunis di Jawa. Pertemuan tersebut mempunyai arti yang penting dalam kehidupan Dt. Batuah, karena sekarang perasaan arti Belanda yang telah lama ditahan-tahannya akan dapat dirumuskan melalui idiologi komunis. Setelah kembali ke Padang Panjang dia mulai mempropagandakan faham komunis di antara murid-muridnya di Sumatra Thawalib.

Suasana di Sumatra Barat sangat cocok untuk menyebarkan faham komunis, karena kampanye politik menentang pemerintahan Belanda sedang hangat-hangatnya dilancarkan. Pelajar-pelajar Sumatra Thawalib waktu itu sudah matang untuk ikut berpolitik. Dt. Batuah sebagai seorang Komunis sangat memahami suasana yang demikian dan segera memperbesar pengaruhnya di kalangan pelajar Sumatra Thawalib. Dengan kedudukan sebagai seorang penghulu suku dan sebagai seorang guru di daerahnya sendiri dengan mudah dan cepat dapat memperluas pengaruhnya di Kota Lawas Anggota-anggota muda Dewan Nagara Kota Lawas ditariknya ke dalam ajaran komunis dengan mengingatkan mereka bagaimana nagari mereka pada tahun 1915 bangkit menentang pungutan pajak yang dijalankan Belanda.

Natar Zainuddin yang telah diusir pemerintah Belanda dari Aceh, pada pertengahan tahun 1923 bergabung dengan Dt. Batuah di Padang Panjang. Mereka mendirikan Pusat *Komunisme Islam*. Sarekat Rakyat yang telah didirikan di Padang tanggal 23 Maret 1923 mengakui kepemimpinan Padang Panjang.

Kedua tokoh komunis itu dalam menyebarkan faham komunis di Sumatra Barat mempergunakan tabligh dan penerbitan seperti yang dipergunakan oleh ulama-ulama Islam dalam pembaharuan di Sumatra Barat sebelumnya. Dt. Batuah menerbitkan harian "*Pemandangan Islam*" dan Natar Zainuddin menerbitkan Harian "*Djago-Djago*". Di samping itu mereka berdua mendirikan "*Klub Debat Internasionale*" yang banyak diikuti oleh pelajar-pelajar dan guru-guru muda Sumatra Thawalib. Dalam "*Klub Debat Internasionale*" itulah Dt. Batuah mengajarkan dan mendiskusikan suatu ide yang memungkinkan kombinasi antara sentimen anti kafir (Belanda) dengan ajaran komunis mengenai kemiskinan. Secara tidak dirasakan oleh pelajar-pelajar Sumatra Thawalib itu, faham komunis telah memasuki cara

berfikir mereka. Besarnya pengaruh komunis terhadap pelajar-pelajar Sumatra Thawalib dibuktikan dengan sebuah demonstrasi pada bulan November 1923 yang diikuti oleh 200 orang pelajar Sumatra Thawalib itu sendiri. Demonstrasi ditujukan untuk menentang tindakan Abdul Muis yang telah memencilkan pemimpin-pemimpin komunis.

Aksi Dt. Batuah makin menjadi-jadi. Pada tanggal 4 November 1923 dia mendirikan sebuah seksi Komunis di Padang Panjang, tetapi pada tanggal 11 November 1923 Dt. Batuah dan Natar Zainuddin ditangkap pemerintah kolonial Belanda, karena dianggap sangat berbahaya.

Dengan ditangkapnya Dt. Batuah dan Natar Zainuddin pimpinan Komunis pindah dari Padang Panjang. Walaupun demikian faham komunis telah sempat mempengaruhi beberapa orang pelajar Sumatra Thawalib. Setelah tamat mereka ikut menyebarkan ide komunis itu di daerahnya masing-masing. Oleh rakyat setempat ilmu itu dikenal dengan nama "*Ilmu Kominih*" (ilmu komunis menurut dialek daerahnya) yang menyatukan ajaran Islam dengan ide anti penjajahan Belanda, anti imperialisme dan kapitalisme dari ajaran Marxis. Dalam rakyat yang telah bertumpuk terhadap pemerintahan kolonial Belanda mereka salurkan melalui ide-ide baru itu (ide komunis). Mereka menjanjikan kehidupan yang lebih baik untuk masa yang akan datang. Kemerostan ekonomi dan kegelisahan masyarakat dipergunakan untuk menghasut rakyat. Kaum kafir, kapitalis besar dan imperialis penjajah hanya dapat dilenyapkan melalui kemerdekaan dan cara merebutnya ialah dengan cara-cara menurut faham komunis. Kalau sudah merdeka berarti bebas dari pemerintahan kaum kafir dan feodalisme. Para petani, pedagang kecil, buruh mereka pengaruhi dengan janji-janji muluk dan bohong yang kemudian ternyata tidak dipenuhi komunis.

Di Silungkang, di mana ketentuan adat sangat kuat, komunis menekankan pada perjuangan kelas dalam usahanya mempengaruhi rakyat. Pengikut-pengikut komunis di sana menganggap mereka kelas menengah yang dipertentangkan oleh komunis dengan kelas bangsawan adat<sup>62)</sup> yang menindas mereka.

Demikianlah faham komunis masuk ke Sumatra Barat melalui Dt. Batuah dan Natar Zainuddin yang buat sementara mendapat pengikut dari pelajar-pelajar Sumatra Thawalib yang belum mengetahui persoalan. Tahun 1925 Komunis memasuki Dangung-

Dangung di Payakumbuh Utara. Tahun 1926 masuk ke Batusangkar.

Faham Komunis bukan dengan mudah masuk ke Sumatra Barat Padang Panjang yang terkenal sebagai kota pelajar Islam menjadikan reaksi yang kuat terhadap masuknya faham komunis ini ke sana. Haji Rasul, seorang ulama terkemuka Sumatra Barat waktu itu dan sebagai guru Dt. Batuah dari semula sudah menentang faham komunis yang diajarkan oleh Dt. Batuah. Dia dengan keras melarang pelajar-pelajar Sumatra Thawalib memasuki organisasi-organisasi komunis, mereka yang mengikuti faham komunis nyata-nyata menyimpang dari ajaran Islam. Di samping itu pemuka-pemuka masyarakat banyak yang menentang faham komunis ini masuk ke daerahnya. Tantangan para pemuka tradisional Minangkabau itulah yang merupakan salah satu sebab lain mengapa golongan komunis terpaksa memindahkan pusat kegiatannya dari Padang Panjang ke Padang. Bahkan pada beberapa tempat kaum komunis terpaksa bergerak di bawah tanah.

Kalau ditinjau secara lebih teliti, komunis tidak banyak hasilnya waktu itu di Sumatra Barat, karena ajaran Marxis yang diajarkan tidak dapat dicernakan oleh pengikut-pengikutnya. Slogan perjuangan kelas tidak mendapat jawaban dari para petani dan saudagar kelas menengah yang mereka garap. Di samping itu adat dan agama Islam sudah sangat kuat tertanam di tengah masyarakat Minangkabau, yang segera akan mengadakan reaksi spontan terhadap rongrongan yang datang dari luar. Demikianlah pengikut komunis hanya terbatas pada beberapa orang selebihnya hanya ikut-ikutan karena mereka tidak tahu situasi yang dihadapi.

Setelah Dt. Batuah dan Natar Zainuddin di tangkap Belanda, maka pimpinan komunis dilanjutkan oleh Said Ali.

Sewaktu Said Ali memimpin Komunis Sumatra Barat, kegiatan komunis di seluruh Indonesia juga meningkat. Komunis mempunyai aspirasi politik yang tersendiri di Indonesia pada tahun 1925. Komunis Sumatra Barat diwakili oleh Said Ali. Mereka memutuskan akan mengadakan revolusi di Jawa dan Sumatra.

Said Ali segera menyuruh pengikut-pengikutnya mengumpulkan senjata dan mengatur strategi revolusi tersebut. Tetapi pada tahun 1926 Said Ali dan beberapa orang gembong komunis Sumatra Barat ditangkap pemerintah Belanda.

Pada bulan Desember 1926 itu juga pecah pemberontakan di Banten yang dengan mudah dapat dipatahkan Belanda. Di Sumatra Barat, walaupun pemberontakan telah direncanakan Komunis akan dimulai di Padang dan Sawahlunto tetapi tidak terjadi apa-apa tahun 1926 itu. Sebaliknya tahun 1927 terjadi pemberontakan di Silungkang yang berhasil membunuh beberapa orang pemuka masyarakat Minangkabau. Tetapi pemberontakan ini juga dapat dipatahkan Belanda dengan cepat. Akibat pemberontakan itu pemerintah Belanda di sumatra Barat melakukan penindakan di seluruh daerah Sumatra Barat.

## 8. Gerakan Perburuhan

Mengenai gerakan buruh di Sumatra Barat belum dapat dikatakan secara konkrit, karena data mengenai masalah itu masih belum dapat diketahui. Dari keterangan yang diperoleh melalui wawancara, masih simpang siur dan saling bertentangan sehingga sukar diolah untuk dijadikan sebuah laporan. Karena itu pada saat ini masih belum dapat dibuat.

## 9. Nahdatul Ulama (NU)

Nahdatul Ulama sebagai sebuah organisasi Islam sebelum tahun 1928 belum begitu nampak di Sumatra Barat. Nahdatul Ulama baru didirikan pada bulan Desember 1926 di Jawa. Tujuannya adalah untuk memajukan syariat Islam menurut salah satu dari empat mazhab Syafei, Maliki, Hanafi dan Hambali, dan mengusahakan berlakunya hukum Islam dalam masyarakat. Juga untuk mengimbangi perhimpunan kebangsaan dan perkumpulan-perkumpulan Islam beraliran modern. Cara menyebarkan cita-citanya adalah melalui tabligh dan pengajian.<sup>63)</sup>

## 10. Gerakan Wanita

Perkembangan pendidikan yang dialami Sumatra Barat mulai awal abad ke-20 dapat juga mempengaruhi kemajuan kaum wanitanya, walaupun dalam jumlah yang tidak begitu besar jika dibandingkan dengan kaum prianya.

Tradisi dan alam pikiran orang Minangkabau waktu itu masih sangat ketat mengatur kegiatan kaum wanita. Percampuran antara hukum adat dan hukum Islam di Minangkabau menyebabkan kehidupan kaum wanita sangat terkekang. Untuk ke luar

rumah saja bagi gadis Minangkabau waktu itu sangat sukar, karena dianggap tidak sopan jika gadis berada di luar rumah. Apalagi kalau akan ikut belajar di sekolah umum yang tidak ada pembatasan antara pria dan wanita. Hal ini mengakibatkan bahwa 90% wanita Sumatra dalam keadaan buta huruf (Latin) sama sekali pada awal abad ke-20.

Pada awal abad ke-20 sudah mulai banyak orang Minangkabau menyadari hal ini. Kalau hal itu dibiarkan terus menerus maka wanita mereka akan tetap ketinggalan, sedang para pria-nya sudah menuntut pelajaran sampai jauh ke luar daerah.

Suatu daerah yang sangat cepat melihat kepincangan itu adalah nagari Kota Gadang dekat Bukittinggi. Rakyat Kota Gadang merupakan masyarakat yang haus akan pendidikan. Sudah semenjak akhir abad ke-19 rakyat Kota Gadang menunjukkan minat yang luar biasa terhadap pendidikan. Pada akhir abad 19 itu sudah ada di antara orang Kota Gadang yang tercatat sebagai mahasiswa Stovia di Jawa. Sekolah yang diminati orang Kota Gadang terutama sekolah yang didirikan pemerintah Belanda, walaupun mereka sendiri merupakan pemeluk Islam yang saleh. Mereka tidak menganggap bahwa sekolah pemerintah itu bertentangan dengan kebiasaan adat dan agama Islam yang mereka anut. Dalam hal ini rakyat Kota Gadang merupakan rakyat yang agak terbuka terhadap pembaharuan dan mereka merasa tidak terlampau terikat dengan tradisi adat yang berlaku, walaupun mereka sangat menghormati dan mengindahkannya.

Demikian antara 1900 – 1910 sudah ada orang Kota Gadang yang tamat Stovia. Pada tahun 1900 itu rakyat Kota Gadang mengumpulkan dana dari setiap anggota masyarakatnya yang tidak banyak itu, untuk keperluan mendirikan sebuah HIS di sana dan untuk mengirim pemuda-pemuda Kota Gadang belajar pada lembaga pendidikan guru di Negeri Belanda.

Kemudian apa yang dilakukan oleh rakyat Kota Gadang ini menjadi model bagi keluarga-keluarga Minangkabau yang lain. Mereka saling membantu antara anggota keluarga sekaum (sesuku) untuk mengirimkan beberapa orang anggota keluarga belajar ke Jawa (Batavia) maupun sampai ke negari Belanda. Melalui kombinasi antara sistem adat Minangkabau, tradisi merantau, sistem ekonomi Barat, kesempatan yang ada dan cara berpikir Barat mereka memberikan respon terhadap pembaharuan untuk masyarakat mereka. Bahkan pengetahuan Barat mereka

saring untuk kepentingan masyarakat mereka sendiri. Dari golongan mereka yang demikianlah kemudian muncul tokoh-tokoh pergerakan Nasional Indonesia asal Suamtra Barat.

Demikianlah, tidak seperti di daerah lain di Sumatra Barat, mulai awal abad ke-20 rakyat Kota Gadang sudah mulai mengirimkan anak-anak mereka ke sekolah yang didirikan pemerintah.<sup>64)</sup>

Di antara sejumlah kecil gadis-gadis Kota Gadang yang bersekolah itu, terdapat seorang yang bernama Rohana. Setelah Rohana menamatkan sekolah "*Normaal School voor Meisjes*" (Sekolah Normal untuk wanita), dia bersama beberapa orang temannya mendirikan suatu organisasi wanita yang bernama "*Amal Setia*"<sup>65)</sup> Organisasi ini berkedudukan di Kota Gadang dan "*Amal Setia*" merupakan organisasi wanita pertama di Sumatera Barat.

Organisasi "*Amal Setia*" bergerak di bidang pendidikan untuk wanita. Ia mendirikan kursus-kursus yang memberikan pengetahuan umum dan keterampilan kepada gadis-gadis dan wanita-wanita yang sudah bersuami. Dengan kursus itu Rohana ingin supaya kaum wanita dapat segera menyesuaikan penghidupan dengan perubahan zaman. Jangan seperti yang sudah-sudah juga: dilahirkan, dibesarkan, dipingit, dikawinkan, beranak dan seterusnya sampai meninggal, tanpa mengalami kemajuan.

Setelah Rohana kawin dengan seorang wartawan *Tjahaya Soematera* bernama Kudus, dia dikenal dengan nama Rohana Kudus dan memperluas kegiatannya dengan menulis dalam surat kabar itu mengenai masalah dan kemajuan wanita di Sumatra Barat.

Menyadari betapa penting suatu media khusus untuk wanita Minangkabau, maka Rohana Kudus meningkatkan usahanya dengan jalan menerbitkan sebuah majalah yang khusus untuk wanita. Setelah terbut majalah itu diberi nama *Sunting Melayu* tahun 1912 di Padang.

Organisasi wanita, majalah wanita dan cita-cita kemajuan wanita yang dilakukan oleh Rohana Kudus semenjak gadis remaja, merupakan suatu "revolusi" wanita waktu itu di Sumatra Barat. Wanita-wanita Sumatra Barat bahkan sampai zaman tercapainya kemerdekaan Indonesia masih banyak yang me"matang"kan gadis-gadisnya ke luar rumah tanpa ditemani oleh sanak keluarganya atau murhrimnya. Sedangkan apa yang dilakukan Rohana

Kudus di zaman di mana adat Minangkabau masih sangat ketat membatasi kegiatan wanita di luar rumah, telah menjurus kepada kegiatan sosial untuk wanita yang sebagian besar menyebabkan para wanita itu melakukan kegiatannya di luar rumah tanpa disertai muhrimnya atau sanak keluarganya. Itulah "revolusi" kebudayaan yang dilakukan Rohana Kudus di Sumatera Barat, terutama bidang "Sosial" dan "Pendidikan". Revolusi dalam cara berpikir kaum wanita dan masyarakat Minangkabau pada umumnya pada masa itu.

Selanjutnya kegiatan yang telah dilakukan oleh Rohana Kudus menjadi contoh bagi wanita-wanita Sumatera Barat lainnya. Apa yang telah dirintis oleh Rohana Kudus telah tertanam ke hati wanita-wanita Sumatera Barat, terutama terhadap wanita-wanita yang telah mengenyam pendidikan Barat. Tidak sia-sialah apa yang diperjuangkan Rohana Kudus, walaupun untuk itu terpaksa bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku di daerahnya. Untuk itu dia cukup menderita lahir batin. Tanpa adanya Rohana Kudus kaum wanita Sumatera Barat masih lama lagi dapat bangkit dari kungkungan adat yang membelit hampir seluruh kehidupannya.

Usaha yang dilakukan oleh Rohana Kudus bukan ditujukan untuk sekelompok kecil rakyat Kota Gadang saja, tetapi juga untuk seluruh kaum wanita Sumatera Barat, bahkan kaum wanita Indonesia. Setelah apa yang dilaksanakan oleh Rohana Kudus memperlihatkan hasilnya untuk perbaikan kehidupan wanita, mulailah wanita-wanita Sumatera Barat mengikuti jejak langkah yang dirintis oleh Rohana Kudus.

Ramalah dan Anjus, dua orang wanita lainnya di Sumatera Barat, setelah menamatkan pelajarannya dari *Kweekschool* di Bukittinggi mendirikan organisasi wanitayang bernama *Vrouwenbond* dan *Meisjes kring* (Perkumpulan Wanita dan Kelompok Gadis di Payakumbuh. Selanjutnya juga di Padang, Bukittinggi didirikan organisasi wanita semacam itu.

Setelah organisasi wanita semacam itu banyak didirikan dikota-kota di Sumatera Barat, maka Rohana Kudus melihat satu kekurangan yang akan mengecilkkan arti organisasi itu di tengah masyarakat Sumatera Barat. Kekurangan itu ialah tidak adanya kerja sama antara masing-masing organisasi wanita itu, bahkan saling berhubungan saja tidak ada, masing-masing berdiri sendiri terlepas dari yang lainnya. Rohana Kudus berpen-

dapat hal itu tidak dapat dibiarkan begitu saja terus menerus. Organisasi-organisasi wanita yang telah banyak itu perlu dikordinasi ke dalam satu wadah yang lebih besar dan teratur, sehingga cita-cita yang ingin diperjuangkan untuk perbaikan kehidupan kaum wanita dapat lebih diarahkan dan mudah dicapai. Kalau mereka telah terkumpul dalam suatu wadah, maka organisasinya akan kuat dan akan menimbulkan wibawa yang besar dalam masyarakat. Dengan demikian akan lebih mudah bergerak untuk kepentingan kaum wanita khususnya, kepentingan masyarakat umumnya.

Untuk mewujudkan cita-citanya itu, pada tahun 1911 Rohana Kudus berhasil mendirikan sebuah organisasi wanita yang merupakan gabungan dari beberapa organisasi wanita yang telah ada. Organisasi wanita yang baru itu bernama *Sarikat Kaum Sumatera* (SKIS) yang berpusat di Padang. Pengurusnya tidak diambilkan dari satu daerah tertentu saja, melainkan terdiri dari wanita-wanita dari bermacam-macam daerah di Sumatera Barat. Seagai ketua SKIS yang pertama terpilih Nurani.

Agar cita-cita pembaharuan yang dianut oleh SKIS dapat tersebar luas di tengah masyarakat, maka SKIS menerbitkan sebuah majalah yang bernama *Asjraq yang lansung dipimpin oleh Rohana Kudus* sendiri. Disamping itu juga diterbitkan surat kabar *Sunting Melayu* pada tahun 1912.

Sesuai dengan tujuannya maka SKIS mendirikan sekolah-sekolah yang akan memberikan pengetahuan kepada kaum wanita dan kursus keterampilan wanita seperti: jahit menjahit, masak memasak, masalah kebersihan ibu dan anak dan sebagainya.

Selanjutnya atas usaha dan inisiatif dari Rohana Kudus, maka organisasi-organisasi wanita sejenis yang terpancar di seluruh Sumatera Barat, seperti di Padang Panjang, Bukittinggi, Payakumbuh dan lain-lain, bergabung ke dalam SKIS dengan status sebagai cabang SKIS di daerah.

Pada tahun 1928 "Serikat Kaum Ibu Sumatera" ini telah mempunyai cabang-cabang yang teratur di Padang Panjang, Payakumbuh, Bukittinggi, Batusangkar, Lubuk Sikaping, Solok, Sawahlunto dan Pariaman. Di seluruh kota-kota Sumatra Barat telah terdapat cabang SKIS. Pada tahun 1929 cabang SKIS telah meluas sampai ke Palembang, Medan, Rantau Parapat dan Tanjung Pinang.

Sewaktu diadakan "Kongres Perempuan Indonesia" pertama di Yogyakarta pada tanggal 22 Desember 1928, SKIS juga mengirimkan wakilnya. Kongres telah memutuskan untuk mendirikan *Perkumpulan Persatuan Perempuan Indonesia* (PPPI) dan SKIS termasuk salah satu anggotanya yang aktif dan ikut mengirimkan wakilnya setiap Kongres PPPI diadakan.

Dengan demikian gerakan wanita Sumatera Barat yang dipelopori oleh Rohana Kudus dengan satu organisasi wanita antar senagari saja, akhirnya telah menjelma menjadi suatu organisasi antar Sumatera Barat dan Sumatera yang ruang lingkungannya sudah merupakan tingkat nasional.

Walaupun demikian SKIS, sesuai dengan anggaran Dasarnya adalah suatu organisasi wanita yang bergerak di bidang sosial dan pendidikan. Sama sekali SKIS tidak mencampuri urusan politik. SKIS berpendapat, sama juga dengan pendapat Rohana Kudus, bahwa bidang gerak wanita harus juga dibatasi sesuai dengan batas kemampuan dan tata kesopanan yang berlaku. Politik bukanlah satu-satunya jalan yang dapat ditempuh untuk membawa kemajuan buat wanita, masih banyak cara lain yang dapat ditempuh. Untuk ini SKIS memilih bidang kegiatan sosial dan terutama pendidikan yang diambilnya untuk membawa perbaharuan dalam kehidupan wanita. Melalui pendidikan yang terarah, kaum wanita akan dapat diubah cara berpikirnya yang kolot. Apabila cara berpikir kaum wanita telah berubah, logika ilmu pengetahuan modern telah menjadi dasar berpikirnya dan dengan memberikan contoh-contoh keterampilan dalam kehidupan, dengan sendirinya kaum wanita itu akan mengubah cara hidupnya, akan berubah sesuai dengan cara berpikirnya yang baru. Yang penting perubahan itu tidak disebabkan oleh orang, tidak dipaksakan oleh orang lain, tetapi akan datang dari wanita itu sendiri. Kalau cara berpikir telah berubah, cara menghadapi sesuatu telah berubah menurut logika ilmu pengetahuan, dengan sendirinya cara hidup sikap hidup juga akan berubah dan perubahan itu biasa cenderung menuju ke arah perbaikan hidup, ke arah pembaharuan dalam hidup. Tokoh-tokoh wanita SKIS disamping Rohana Kudus dan Nurani yang telah disebutkan adalah antara lain: Jusair, Syarifah Nawawi, Lasmina Kahar Mansyur dan lain-lain.

Gerakan wanita yang telah dibicarakan di atas adalah gerakan wanita yang telah mengalami pendidikan Barat. Di sam-

ping gerakan wanita yang dipelopori oleh wanita-wanita yang telah mendapat pendidikan Barat itu, di Sumatra Barat juga terdapat gerakan wanita Islam yang tergabung dalam organisasi wanita yang merupakan bagian dari organisasi-organisasi Islam seperti yang telah dibicarakan pada bahagian sebelum ini. Oleh karena gerakan wanita itu telah tercakup oleh bahagian organisasi induknya rasanya tidak usah diulangi lagi disini. Cukuplah dengan melihat ke belakang pada bahagian yang bersangkutan saja.

## **11. Partai Nasional Indonesia.**

Partai Nasional Indonesia (PNI) baru didirikan pada tanggal 4 Juli 1927 di Bandung. PNI sebagai partai politik yang berdasarkan Nasionalisme Indonesia dengan tujuan Indonesia Merdeka bersikap non-koperasi dalam menjalankan politiknya. Walaupun dua tahun sesudah berdirinya pemimpin-pemimpin PNI sudah ditangkapi pemerintah Hindia Belanda dan buat sementara mematahkan kegiatan PNI. Tetapi walaupun demikian, landasan dan konsepsi perjuangan PNI sampai juga pengaruhnya ke Sumatra Barat yang pada mulanya bukan diambil oleh partai yang bernama PNI, tetapi diserap oleh PERMI di bawah pimpinan Haji Ilyas Yakub.

Tetapi karena masalah PNI di Sumatra Barat tidak menyangkut masalah antara 1900 - 1928, bahkan akan menyangkut masalah sesudah 1928, maka masalah PNI di Sumatra Barat nanti akan dibicarakan pada waktunya.

Hanya yang perlu diketahui bahwa bersamaan dengan berdirinya PNI di Bandung, landaasan dan konsepsi perjuangan PNI sudah sampai ke Sumatra Barat dan menyusup ke dalam tubuh PERMI yang merupakan sebuah partai politik yang radikal di Sumatra Barat waktu itu. Hal ini tidak berarti mengecilkan arti PNI di Sumatra Barat hanya akan menunda pembicaraan mengenai PNI pada bagian berikutnya.

## **D. KEADAAN DI DAERAH SEKITAR PERANG DUNIA 1914 - 1918) DAN PENDIRIAN VOLKSRAAD**

### **1. Sikap Pemerintah Hindia Belanda**

Sikap pemerintah Hindia Belanda di sekitar Perang Dunia I terhadap Sumatra Barat tidak banyak bedanya, dari sikap pe-

merintah Hindia Belanda terhadap daerah lain di Indonesia. Apapun perbaikan yang dijalankan pemerintahan Hindia Belanda untuk Indonesia atau janji perbaikan yang akan dijalankan, konsep dasarnya tetap sama yaitu bahwa "Indonesia terutama untuk kepentingan Induk" (Negeri Belanda). Dalam hal ini berarti bahwa Indonesia sebagai tanah jajahan harus memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi negeri Belanda.

Beberapa kali pemerintahan Hindia Belanda mengadakan perbaikan terhadap Indonesia, tetapi di balik segala macam perbaikan yang akan dilaksanakan untuk Indonesia itu selalu terselip maksud jahat Belanda untuk mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya dari bumi Indonesia ini.

Sebagai contoh dapat dikemukakan di sini adalah misalnya dengan politik etis yang dianggap orang Belanda sendiri sebagai politik "balas budi" terhadap bangsa Indonesia yang telah memberikan kekayaan alamnya kepada pemerintahan Belanda di Negeri Belanda sendiri. Di atas kertas ide Politik Etis itu memang sangat baik untuk bangsa Indonesia. Tetapi dalam pelaksanaannya tidak mempunyai "etika" juga. Kaum liberal Belanda yang menentang kekejaman yang dilakukan pemerintahan Belanda terhadap tanah jajahannya, dan mengusulkan dilaksanakannya Politik Etis untuk Indonesia, tetapi pada dasarnya hanya untuk melindungi kepentingan modal mereka yang sudah menumpuk di Eropah. Kalau modal ini tidak dipergunakan segera, mungkin modal itu akan musnah karena tidak mempunyai tempat pelemparan. Dengan meningkatnya kehidupan bangsa Indonesia, mereka akan merupakan pasaran yang sangat baik bagi hasil industri Belanda. Kalau hal itu terjadi maka kekayaan alam Indonesia akan dapat ditransfer lagi dengan lebih banyak. Dalam kenyataannya sesudah politik Etis itu dilaksanakan, kehidupan bangsa Indonesia tidak juga menjadi baik.

Contoh kedua yang perlu dikemukakan adalah perubahan politik pemerintahan Hindia Belanda terhadap Indonesia pada tahun 1903. Sebelum tahun 1903 sistem pemerintahan Hindia Belanda yang dilaksanakan di Indonesia adalah sistem centralisasi dimana kekuasaan pemerintah Hindia Belanda disusun secara vertikal. Tetapi pada tahun 1903 sistem sentralisasi itu dirubah menjadi sistem desentralisasi. Maksud dari sis-

tem desentralisasi ini adalah supaya kekuasaan pemerintahan Hindia Belanda yang terpusat dapat dipencarkan ke daerah-daerah.

Perubahan sistem pemerintahan ini dilaksanakan melalui undang-undang, yaitu dikeluarkannya *Wet 23 Juli 1903 Staatsblad 1903 No. 329* dengan menambahkan tiga fasal baru terhadap RR 1854 (66) dari fasal 68 menjadi fasal 68, 68 a, 68 b dan 68 c.

Undang-undang ini mengubah sistem sentralisasi menjadi sistem desentralisasi. Di samping itu juga untuk memungkinkan rakyat Indonesia bersidang dan membentuk organisasi-organisasi dalam rangka mengisi Dewan-dewan pada lembaga pemerintahan yang diadakan pemerintahan Hindia Belanda.

Tetapi walaupun perubahan itu dikeluarkan melalui undang-undang, ternyata perubahan ini tidak membawa pembaharuan yang positif terhadap rakyat Indonesia. Anggota Dewan yang diadakan untuk daerah, selain dari kaula bangsa Belanda (67) harus pula pegawai-pegawai yang bekerja pada pemerintahan Belanda. Sedangkan pemilihan anggota Dewan terbatas pula. Dengan demikian anggota-anggota Dewan adalah orang Belanda sendiri, artinya bekerja untuk kepentingan Belanda. Kalau tidak mau memperjuangkan kepentingan Belanda, mereka akan diganti dengan berbagai-bagai cara.

Demikian juga yang terjadi di Sumatra Barat. Pada waktu itu sebelum tahun 1914, Sumatra Barat bernama *Sumatra's Westkust* yang berbentuk sebuah karesidenan dibagi dalam beberapa *Afdeling* yang dikepalai oleh seorang "Asisten Residen". *Afdeling* dibagi atas beberapa *Onder Afdeling* yang masing-masing dikepalai oleh seorang *Controleur*. Seorang Residen, ke delapan Asisten Residen, ke delapan Asisten Residen dan ke Sembilan belas *Kontroleur* semuanya dipegang oleh orang Belanda. Tidak satu pun dari jabatan itu yang boleh dipegang oleh orang Minangkabau sendiri.

Kemudian daerah *Onder Afdeling* dibagi lagi atas beberapa kelurahan dan daerah kelurahan dibagi pula atas beberapa Nagari. Ketua Jabatan terakhir inilah yang sudah dapat dipegang oleh orang Minangkabau. Iaras dikepalai oleh Kepala Iaras (*Laras Hoofd*) sedang Nagari dikepalai oleh *Penghulu Kepala*. Kedua jabatan terakhir ini memang tidak berani orang Belanda sendiri memegangnya, karena merekalah yang berhu-

bungan langsung dengan rakyat banyak, karena untuk tugas itu Belanda tidak sanggup.

Di sini kelihatan bahwa pemerintahan Hindia Belanda di Sumatera Barat mempergunakan sistem kepemimpinan tradisional Minangkabau untuk kepentingannya. Bahkan jabatan laras itu sebetulnya hanya diadakan atau diciptakan oleh Belanda buat kepentingannya. Struktur adat Minangkabau tidak mengenal istilah *laras* dalam sistem pemerintahannya. Istilah itu hanya dipergunakan untuk menyatakan pembagian adat ke dalam dua bagian besar yaitu *Adat Laras Koto Piliang* dan *Adat Laras Bodi Caniago*.

Baik struktur, maupun personal yang akan menjalankannya adalah atas kehendak Belanda sendiri tanpa memperhatikan kepentingan dan keinginan rakyat Sumatera Barat. Walaupun sudah tahun 1914 ada perubahan lagi terhadap sistem Kelarasan dan Nagari, tetapi perubahan administrasi pemerintahan saja, sedangkan makna "otonomi" yang terkandung dalam sistem disentralisasi itu tidak pernah diberikan pada rakyat Minangkabau.

Kenyataan yang sesungguhnya program disentralisasi hanya diperuntukkan bagi orang Belanda (baca Eropah) sebagai penduduk kelas I di Indonesia waktu itu. Sampai saat balatentara Barat Otonomi itu tidak pernah diberikan Belanda dalam arti yang sesungguhnya. Mereka menganggap orang Minangkabau seperti juga anggapannya terhadap daerah-daerah lain di Indonesia, belum cukup mampu untuk itu.

Semua hal itu menunjukkan sikap pemerintahan Hindia Belanda yang tak mau tahu terhadap keinginan rakyat Minangkabau. Mereka hanya memikirkan kepentingan mereka sendiri. Bagaimanapun manisnya bunyi peraturan yang dibuat pemerintah Belanda, tetapi pelaksanaannya tetap bagi rakyat Minangkabau, bahkan sangat pahit.

Perang Dunia I yang berlangsung antara tahun 1914 - 1918 menyebabkan pemerintah Hindia mengambil sikap yang lebih keras lagi terhadap Sumatera Barat. Perang menyebabkan perdagangan internasional ini menyebabkan kemunduran perekonomian pemerintahan Hindia Belanda. Kemunduran itu menyebabkan kemerosotan keuangan pemerintahan Hindia Belanda. Anggaran pendapatan dan belanja Pemerintahan Hindia Belanda mengalami krisis yang gawat. Kehidupan ekonomi rakyat

juga mengalami kemunduran yang menyedihkan dan tidak mendapat perhatian dari pemerintahan Hindia Belanda sedikit juga. Bahkan sebaliknya rakyat yang sudah sangat menderita itu disuruh menanggung ketekoran anggaran pemerintahan Hindia Belanda.

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bagaimana sikap pemerintahan Hindia Belanda terhadap rakyat Sumatera Barat khususnya waktu itu, umumnya terhadap rakyat Indonesia.

## 2. Keadaan Masyarakat

Seperti telah dikatakan pada bagian sebelumnya, bahwa keadaan masyarakat Sumatera Barat pada awal abad ke-20 itu sangat tidak menentu. Perekonomian rakyat yang tertutup mulai dihancurkan oleh Belanda dengan memperkenalkan sistem ekonomi uang. Rakyat Sumatera Barat, dari ekonomi yang hanya untuk mencukup kebutuhannya sendiri, dipaksa oleh Belanda penghasilan tanaman yang dibutuhkannya. Karena uang *gulden* Belanda mulai terasa pengaruhnya, rakyat juga mulai berusaha menghasilkan barang-barang yang tidak mereka butuhkan atau menghasilkan melebihi dari kebutuhannya untuk dijual kepada Belanda. Dengan demikian sistem perekonomian tertutup mulai mengarah kepada sistem perekonomian terbuka atau memproduksi barang-barang melebihi kebutuhannya.

Hal ini tidak menimbulkan perbaikan terhadap taraf hidup rakyat, bahkan sebaliknya menghancurkan penghidupan rakyat Sumatera Barat, karena hidup mereka akhir-akhir ini sangat tergantung kepada pedagang-pedagang Belanda yang bertindak sewenang-wenang dalam menetapkan harga.

Di samping itu kehidupan individualisme mulai masuk ke daerah Sumatera Barat. Hal ini menyebabkan sering terjadi pertentangan antar keluarga. Kemenakan melawan mamaknya, karena kemenakan lebih pandai berusaha daripada mamaknya atau tidak tergantung lagi hidupnya kepada mamaknya. Hal ini berarti Belanda mulai menggerogoti sendi-sendi kehidupan sosial Minangkabau yang selama berabad-abad hidup dalam ketenangan. Dengan sistem perekonomian uang, Belanda berusaha menghancurkan sendi-sendi kehidupan sosial masyarakat Minangkabau, yang mereka ketahui betul melalui peneliti-

peneliti adatnya, sangat kuat tertanam pada masing-masing orang Minangkabau.

Masalah pendidikan di waktu ini mengalami dua perubahan pokok. Pertama, unsur pendidikan Barat yang berdasarkan kebudayaan Barat mulai dikenal dan dialami oleh orang Minangkabau. Pengaruh hasil pendidikan Barat bagi orang Minangkabau ialah mulainya berubah sikap hidup dari alam tradisional ke alam modern.

Bahkan terlihat gejala meremehkan terhadap sesuatu yang berbau tradisional dan menganggap tinggi sesuatu yang berbau kebudayaan Barat. Melalui pendidikan ini Belanda mulai mengubah sistem nilai-nilai kehidupan masyarakat Minangkabau. Kedua, bersamaan dengan itu terjadi pula perubahan dan sistem pendidikannya, yaitu dari sistem pendidikan surau (Jawa = *pesantren*) berubah ke arah sistem pendidikan memakai kelas (sistem sekolah). Perubahan itu terjadi sesuai dengan kebangkitan ulama-ulama Islam Sumatra Barat untuk melaksanakan pembaharuan terhadap Minangkabau melalui cara agama Islam.

Kehidupan agama waktu itu juga mengalami pergolakan. Antara ulama yang berpendidikan Mekah dengan ulama yang berpendidikan Mesir terjadi pertentangan paham tentang cara melakukan pembaharuan pelaksanaan agama dalam kehidupan masyarakat. Antara keduanya berpegang kepada pendirian masing-masing. Akibatnya masyarakat menjadi bingung, karena tidak tahu mana yang mau diikuti.

Demikianlah keadaan masyarakat Sumatra Barat di sekitar masa Perang Dunia I (1914 - 1918). Penderitaan sudah sangat memuncak karena itu timbul gerakan ke arah pembaharuan.

### **3. Hubungan dengan Volksraad**

"Volksraad" atau Dewan Rakyat adalah suatu lembaga semacam Dewan Perwakilan Rakyat di zaman pemerintahan Kolonial Belanda di Indonesia. Dewan Rakyat berkedudukan di Batavia (Jakarta) dan hidup selama 24 tahun (1918 - 1942). Dewan rakyat ini didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda, disebabkan karena tuntutan dan desakan perjuangan rakyat Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri yang dilahirkan dan dikumandangkan terus-menerus oleh organisasi sosial dan

partai-partai politik yang telah banyak waktu itu. Menjelang Perang Dunia I desakan itu bertambah kuat dan santer, bahkan berhasil menyudutkan pemerintahan Hindia Belanda. Untuk meredakan ketegangan itu maka didirikanlah Dewan Rakyat pada tahun 1918 yang waktu itu bernama *Volksraad*.

Dewan Rakyat dibentuk dengan undang-undang yang bertanggal Desember 1916. Pelantikannya dilakukan pada tanggal 18 Mei 1918<sup>68</sup>). Pada waktu pembukaannya Dewan Rakyat beranggotakan sebanyak 39 orang yang terbagi sebagai berikut:

- a. 1 orang Ketua merangkap anggota
- b. 20 orang pribumi<sup>69</sup>) sebagai anggota
- c. 8 orang diangkat atau ditunjuk
- d. 12 orang dipilih oleh Dewan-Dewan Daerah.

Susunan keanggotaan yang begini hanya bertahan kira-kira 9 tahun, karena rakyat melalui organisasi-organisasi dan partai politik menuntut agar susunan keanggotaan itu dirubah supaya terdapat suara rakyat yang lebih besar. Pada tahun 1927 anggota Dewan Rakyat dirubah susunannya, sebagai berikut:

- a. Jumlah anggota menjadi 60 orang
- b. 25 orang dari pribumi yang terdiri dari :
  - 5 orang yang ditunjuk Gubernur Jenderal
  - 20 orang yang dipilih oleh Dewan-dewan Daerah.
- c. 30 orang terdiri dari orang Belanda
- d. 5 orang terdiri dari orang Timur Asing.

Untuk memilih anggota-anggota dari pribumi (20 orang) maka pemerintahan Hindia Belanda membagi Indonesia atas 12 daerah pemilihan sebagai berikut:

- a. Daerah Jawa Barat dan Jawa Tengah masing-masing mendapat jatah 3 orang wakil.
- b. Daerah Jawa Timur mendapat 4 wakil
- c. Daerah Solo dan Yogyakarta diwakili oleh 1 orang
- d. Daerah Selebes (Sulawesi) diwakili oleh 2 orang
- e. Tujuh daerah lainnya masing-masing diwakili oleh 1 orang wakil Daerahnya.

Karena di dalam Dewan Rakyat sendiri timbul permintaan supaya susunan keanggotaan itu masih harus dirubah, karena belum mencerminkan perwakilan dari rakyat Indonesia,

sedangkan organisasi-organisasi dan partai politik di luar Dewan Rakyat selalu mendesak agar wakil dari Daerah ditambah jumlahnya, maka pada tahun 1931 keanggotaan Dewan Rakyat mengalami perubahan susunannya lagi yaitu:

- a. 30 orang anggota Pribumi
- b. 25 orang Belanda
- c. 5 orang Timur asing.

Umur anggota-anggota Dewan Rakyat harus berkisar antara 25 - 60 tahun. Masing-masing kelompok (Pribumi, Belanda dan Timur asing) memilih anggotanya sendiri-sendiri sebanyak jatah mereka masing-masing.

Tetapi Dewan Rakyat ini tidaklah merupakan sebuah Dewan Perwakilan Rakyat bagi bangsa Indonesia karena cara pemilihan anggotanya sangat tidak adil. Seorang wakil Belanda cukup didukung oleh 2.000 orang pemilihnya, seorang Timur asing 300.000 orang pemilihnya, sedangkan untuk seorang wakil pribumi harus didukung oleh 2 juta pemilih. Sedangkan sebagian besar anggotanya adalah orang Belanda dan Kaula Belanda. Hanya sebagian kecil wakil-wakil daerah yang memperjuangkan kepentingan rakyat Indonesia, tetapi mereka selalu kalah suara. Setiap keputusan yang telah diambil Dewan selalu menguntungkan Pemerintahan Hindia Belanda dan selalu tidak memuaskan bagi rakyat Indonesia.

Dewan rakyat boleh dikatakan hanya semacam dewan tiruan yang tak berguna. Dengan adanya dewan ini pemerintahan Hindia Belanda akan dianggap oleh bangsa-bangsa lain sebagai suatu pemerintahan yang demokratis, sedangkan kenyataannya adalah sangat tidak demokratis. Boleh dikatakan Dewan Rakyat hanya sebagai tempat berkumpul-kumpul sekelompok orang Barat dalam kelompok orang Timur. Lebih dari itu tak ada hasilnya.

Walaupun demikian, betapapun jeleknya fungsi *Volksraad* itu bagi bangsa Indonesia, tetapi bagi rakyat Indonesia melalui wakil-wakilnya, *Volksraad* merupakan tempat yang baik dan aman untuk mengemukakan segala kekesalan hati rakyat. Kecaman yang sangat pedas terhadap pemerintahan Hindia Belanda, segala kejelekan yang dilakukan Belanda dikeluarkan di sini; apa-apa yang diinginkan bangsa Indonesia juga dikemukakan di sini, misalnya tuntutan Indonesia merdeka. Hal ini sebetulnya berada di luar dengan Belanda. Belanda sendiri sudah

betulnya berada di luar dengan Belanda. Belanda sendiri sudah mengatur sedemikian rupa supaya anggota-anggota Dewan adalah orang-orang yang pro Belanda. Tetapi bagi wakil-wakil bangsa Indonesia yang sedikit kesempatan yang ada di Dewan Rakyat dipergunakan sebaik-baiknya untuk mengecam tindakan Belanda dan untuk mengemukakan aspirasi bangsa Indonesia. Walaupun hasilnya belum tentu akan diperoleh, tetapi mereka memerjuangkannya tanpa mengenal lelah dan putus asa.

Berbeda dengan di Jawa yang telah didirikan Dewan Rakyat pada tahun 1918, maka di Sumatera Barat Dewan itu belum lagi ada. Untuk melihat bagaimana hubungan Sumatera Barat dengan Dewan Rakyat baik dilihat bagaimana keadaan Sumatera Barat di awal abad ke-20.

Perkembangan Lembaga pendidikan yang dijalankan oleh pemerintahan Hindia Belanda, baik yang ada di Sumatera Barat maupun yang di Jawa ataupun lembaga pendidikan yang ada di luar Indonesia yang dapat dicapai oleh orang Indonesia, menyebabkan banyak pemuda Sumatera Barat yang terdidik atau menjadi intelektual yang berpendidikan Barat. Bertambah banyaknya orang yang terdidik ini, menyebabkan orang-orang Minangkabau makin mengetahui keadaan yang sebenarnya.

Putra-putra Sumatera Barat yang belajar diluar negeri terutama di Eropa, berkenalan pula dengan faham liberal yang waktu itu sudah menguasai hampir seluruh Eropa. Sewaktu mereka kembali ke tanah airnya dan pulang ke Sumatera Barat paham liberal itu ikut terbawa yang kemudian mereka kembangkan melalui organisasi-organisasi sosial dan politik. Maka bermunculanlah organisasi sosial dan politik di Sumatera Barat. Organisasi politik ini dimungkinkan timbulnya karena semenjak tahun 1903 pemerintahan Hindia Belanda telah mengizinkan dengan menambah beberapa fasal terhadap undang-undang tahun 1815.

Seperti telah diketahui pada bahagian sebelumnya bahwa organisasi sosial yang muncul pertama-tama di Sumatera Barat adalah organisasi yang berdasarkan agama. Hal ini disebabkan karena waktu itu sudah ada ulama Islam yang kembali belajar dari Mekah dan Mesir dan sesampai di Sumatera Barat melakukan pembaharuan terhadap agama Islam, terutama

melalui bidang pendidikan agama Islam.

Organisasi sosial dan politik yang benar-benar mendasarkan perjuangannya kepada kebangsaan di Sumatra Barat barulah muncul pada tahun 1919 dengan didirikannya *Jong Sumatranen Bond* yang kemudian menjelma menjadi organisasi "Pemuda Sumatera"

*Jong Sumatranen Bond* inilah yang memelopori organisasi-organisasi itu untuk memperjuangkan kebebasan dan kemerdekaan bangsa dan tanah air dari belenggu penjajahan atau sekurang-kurangnya telah mengarah ke sana. Tidak lagi perjuangan yang semata-mata karena agama Islam. Di samping itu *Jong Sumatranen Bond* juga memperkenalkan perjuangan yang terorganisasi dengan baik kepada rakyat Sumatera Barat. *Jong Sumatranen Bond* ini didirikan pada tanggal 6 Desember 1917 di Jakarta oleh pemuda-pemuda Sumatra yang belajar di Jakarta. *Jong Sumatranen Bond* di Sumatra Barat adalah cabang yang di Jakarta.

Sewaktu Nazir Dt. Pamuncak, salah seorang tokoh *Jong Sumatranen Bond* di Jakarta pulang ke Sumatra Barat, maka banyaklah pemuda Sumatera Barat yang terpengaruh dan tergugah oleh pidato yang diucapkannya yang antara lain mengatakan bahwa persaudaraan antar pemuda Sumatera harus diperkuat dan bahwa mereka pemuda-pemuda itu mempunyai seruan hidup untuk menjadi pemimpin-pemimpin bangsanya. Antara pemuda-pemuda yang merasa tergugah itu adalah Moch. Hatta, Anas Munaf, Bahder Johan, Abdul Malik, Aisyah Yahya, Muh. Yamin dan lain-lain. Walaupun mereka masih remaja belia, tetapi mereka telah sempat mendirikan cabang *Jong Sumatranen Bond* di Padang dan Bukittinggi dengan bantuan dan ajaran Nazir Dt. Pamuncak. Pengaruh berdirinya *Jong Sumatranen Bond* terhadap Sumatera Barat banyak sekali di bidang kehidupan masyarakatnya. Di bidang organisasi kemudian muncul SI, PKI, PERMI dan lain-lainnya. Sumatra memperkenalkan perjuangan memperbaiki penghidupan masyarakat melalui organisasi yang teratur rapi dan berkelanjutan.

Sejak itu mulai timbul kritik melalui forum terbuka terhadap pemerintahan Hindia Belanda di Sumatera Barat. Gerakan yang terorganisasi dan terarah kepada pemerintahan Hindia Belanda mulai dijalankan. Hal ini menimbulkan reaksi yang keras dari Belanda sendiri dan selalu mematahkan pergerakan

itu. Tetapi walau bagaimanapun reaksioner tindakan Belanda itu, semangat perlawanan pemuda Sumatera Barat itu tetap tidak terpatahkan, karena sekarang mereka melaksanakannya dengan sistem yang teratur dan terarah serta terkendali. Patah, diganti yang lain lagi, begitu seterusnya. Bahkan akibat tindakan reaksioner Belanda itu berkali-kali terjadi perlawanan dengan kekerasan.

Akibat dari gerakan rakyat Sumatera Barat, baik yang dijalankan secara kekerasan maupun yang melalui jalan yang moderat, semuanya menyadarkan pemerintahan Belanda di Sumatera Barat, bahwa mereka harus menguasai penuh daerah Sumatera Barat dan untuk itu perbaikan dalam sistem pemerintahan harus dilaksanakan. Seluruh unsur kekuasaan di Sumatera Barat harus berada di tangan Belanda. Semua sistem pemerintahan Sumatera Barat yang didasarkan kepada faktor-faktor tradisional harus segera diganti dengan sistem modern yang dipegang orang Belanda atau kaki tangan Belanda. Setiap kepala daerah, mulai dari Residen, Asisten Residen, "Kontrolleur". *Demang* (sebelumnya Laras dan sebelumnya lagi *Regent*), Asisten *Demang* dan alin harus terdiri dari *Ambtenaar B* (= pegawai pemerintahan dalam negeri Hindia Belanda) keluaran (*alumni*) lembaga pendidikan yang telah disediakan untuk itu, kecuali pemerintah Nagari yang tetap dipertahankan seperti biasa.

Walaupun demikian kerasnya sikap pemerintahan Hindia Belanda terhadap Sumatera Barat khususnya, terhadap Indonesia umumnya perlawanan rakyat makin meningkat yang menyebabkan Belanda akhirnya terpaksa mengambil sikap lunak. Sikap lunak Belanda ini tercermin dengan pada akhirnya terpaksa mendirikan Dewan-dewan Daerah (semacam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). Di Sumatera Barat pada tahun 1938 diresmikan berdirinya *Minangkabau Raad* (Dewan Perwakilan Rakyat Minangkabau) yang mempunyai seorang wakil yang duduk dalam *Volksraad* di Jakarta. Pemerintahan nagari diatur dengan lebih baik.

*Minangkabau Raad* beranggotakan 49 orang yang terdiri dari :

- a. 38 orang pribumi
- b. 9 orang Belanda
- c. 2 orang Timur asing.

Menurut teorinya *Minangkabau Raad* merupakan Dewan Perwakilan di daerah, tetapi dalam kenyataannya hanya merupakan sebuah badan penasehat Residen. Nasehat baru diberikan jika diminta pula, kalau tidak diminta maka *Minangkabau Raad* hanya tempat omong seperti warung kopi.

4. Anggota Voksraad yang mewakili daerah Anggota *Voksraad* yang mewakili orang Sumatra Baraf adalah Muhammad Yamin buat masa sidang 1939 - 1943. Muhammad Yamin dilahirkan di Talawi, Sawahlunto pada tanggal 23 Agustus 1903. Ayahnya bernama Usman gelar Bagindo Chatib dan ibunya bernama Sitti Sa'adah. Istri Muhammad Yamin bernama Raden Ajeng Sundari Mertoatmodjo, asal Jawa dikawininya tahun 1934. Dari perkawinannya itu mereka memperoleh seorang anak laki-laki yang bernama Dang Rahadian Sinayangsih Yamin.

Pendidikan yang ditempuh Muhammad Yamin berliku-liku, artinya tidak lurus saja jalannya menurut jenjang-jenjang persekolahan sekarang. Mula-mula Muhammad Yamin belajar pada sekolah Dasar kelas II. 70) yang lama pendidikannya 5 tahun. Setelah HIS (*Hollandsch Inlandsche School*) dibuka secara resmi di Sumatra Barat, Muhammad Yamin meneruskan sekolah ke HIS dan pada tahun 1918, sewaktu Muhammad Yamin berumur 15 tahun dia menamatkan HIS tersebut.

Selama 9 tahun di Sekolah Dasar itu Muhammad Yamin sering berpindah tempat: Mula-mula di Talawi, kemudian di Sawahlunto, pindah lagi ke Solok dan terakhir di Padang Panjang. Dalam pendidikan di tingkat dasar ini Muhammad Yamin banyak mendapat bantuan kakaknya yang bernama Muhammad Yamin glr. Sultan Rajo Endah

Kemudian Muhammad Yamin melanjutkan sekolahnya ke Bogor. Mula-mula ia masuk Sekolah Dokter Hewan, tetapi karena tak tertarik pindah ke Sekolah Pertanian (*Landbouwschool*). Di sini pun Muhammad Yamin tidak selesai karena tidak tertarik minatnya. Kemudian dia pindah ke Surakarta dan masuk AMS (*Algemene Middlebare School*). Pada tahun 1927 sewaktu Muhammad Yamin berumur 24 tahun dia menamatkan AMS itu.

Selanjutnya Muhammad Yamin meneruskan pada tahun 1927 itu ke Sekolah Hakim Tinggi (*Rechts Hooge School* = RHS) dan tamat dari sana tahun 1932, sewaktu dia berumur 29 tahun dan mulai tahun 1932 ini namanya menjadi Mr. Mu-

hammad Yamin. Pada tahun 1954 nama Mr. Muhammad Yamin bertambah lagi menjadi: Prof. Mr. H. Muhammad Yamin.

Selama dalam pendidikan Muhammad Yamin sudah menerjunkan dirinya ke dalam kehidupan berorganisasi. Sewaktu berumur 17 tahun, Muhammad Yamin sudah aktif dalam *Jong Sumatranen Bond* bersama Muhammad Hatta, Bahder Johan dan lain-lain. Semenjak itu dia terus aktif di bidang organisasi pemuda tersebut.

Tahun 1923, pada *Lustrum I Jong Sumatranen Bond* Muhammad Yamin sudah mengemukakan suatu gagasan mengenai bahasa Melayu, yaitu bahasa Melayu akan berkembang nanti menjadi bahasa Nasional bangsa Indonesia. Tahun 1926 - 1928 Muhammad Yamin menjadi Ketua *Jong Sumatranen Bond*. Bersamaan dengan itu Muhammad Yamin juga menjadi anggota Perhimpunan Pelajar-pelajar Indonesia (PPPI). Sewaktu dia berumur 24 tahun dia merupakan salah seorang tokohnya bersama tokoh yang lain seperti: Sigit, Soegondo, Suwiryono, Subagio Reksodipuro, Adnan Kapau Gani, Tamzil, Sunarko, Sumanang, Amir Syarifuddin, Gularso dan lain-lain.

Dalam kongres Pemuda I (30 April - 2 Mei 1926) Muhammad Yamin mengambil peranan penting<sup>71)</sup> dan dia merupakan salah seorang pembicara yang membahas masalah kemungkinan hari depan bahasa-bahasa dan kesusasteraan Indonesia. Dalam penutupan pidatonya sudah disebutkan bahwa sejarah Indonesia sudah menuju ke arah nasionalisasi dan kemerdekaan bangsa.

Sewaktu berumur 25 tahun Muhammad Yamin menjadi Sekretaris Kongres Pemuda II (27 - 28 Oktober 1928). Muhammad Yamin merupakan pembicara pada hari pertama mengenai persatuan dan kebangsaan Indonesia. Dalam Kongres itu Muhammad Yamin memegang peranan besar dan pidatonya menjadi inti dari keputusan Kongres Pemuda yang sangat terkenal itu, yaitu pidato yang berwujud "Persatuan Kebangsaan Indonesia". Putusan Kongres Pemuda susunan Muhammad Yamin itu dikenal dengan "Sumpah Pemuda" yang akan menjiwai semangat pemuda Indonesia pada masa selanjutnya. Sebagai kelanjutan dari Sumpah Pemuda itu antara tanggal 30 Desember 1930 - 2 Januari 1931 diputuskan untuk mendirikan organisasi gabungan yang bernama "Indonesia Muda" dan organisasi pemuda sebelumnya yang masih bernama atau berbau kedae-

rahan dinyatakan dibubarkan. Pada waktu itu pun Muhammad Yamin mengucapkan sebuah pidato penting yang berjudul "Kebangunan Bangsa Indonesia".

Kegiatan Muhammad Yamin dalam bidang politik praktis baru dimulai sewaktu dia masuk dalam Partindo (Partai Indonesia) yang didirikan kira-kira tahun 1930-an sesudah PNI dibubarkan. Partindo berada di bawah pimpinan Mr. Sartono. Sesudah Partindo dibubarkan tahun 1936, pada tanggal 24 Mei 1937 Muhammad Yamin bersama teman-temannya seperti Amir Syarifuddin, A.K., Gani, Wilopo, Sumanang, Adam Malik dan lain-lain mendirikan partai baru yang bernama *Gerakan Rakyat Indonesia* (Gerindo). Karena pertentangan paham dengan pemimpin-pemimpin Gerindo, disebabkan dia duduk dalam *Volksraad* sebagai wakil Minangkabau, maka Muhammad Yamin dikeluarkan dari Gerindo.

Pada tanggal 21 Juli 1939 Muhammad Yamin mendirikan partai baru yang bernama *Partai Persatuan Indonesia* yang disingkat *Perpindo*. Di dalam *Volksraad* sendiri ada fraksi yang bernama *Nationale Fractie* di bawah Muhammad Husni Thamrin yang anggotanya terdiri dari orang-orang Indonesia dalam *Volksraad* yang sudah didirikan semenjak 27 Januari 1930. Tetapi karena konsepsi yang diperjuangkan fraksi itu menurut Muhammad Yamin terlalu sempit, maka pada tanggal 10 Juli 1939 ia mendirikan fraksi baru dalam *Volksraad* yang bernama fraksi *Golongan Nasional Indonesia* (GNI). Anggota GNI kebanyakan terdiri dari wakil-wakil daerah.

Di waktu pendudukan bala tentara Jepang, Muhammad Yamin diangkat (1943) menjadi penasehat militer Jepang di Indonesia bersama-sama tujuh orang Indonesia lainnya dengan jabatan *Sanyo* untuk *Sendenbu* (Departemen Propaganda). Sewaktu kedudukan pemerintahan balatentara Jepang di Indonesia sudah makin terjepit, Jepang memberikan janji kemerdekaan bagi Indonesia dalam rangka menarik simpati rakyat Indonesia. Jepang membentuk sebuah Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan<sup>72)</sup> dengan anggota sebanyak 62 orang, diantara mana termasuk Muhammad Yamin. Badan ini diresmikan tanggal 28 Mei 1945. Walaupun tujuan Badan ini hanya untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan, tetapi ke-62 orang anggota itu telah mempergunakan Badan ini sebaik-baiknya dan telah dapat menciptakan sebuah rancangan Undang-undang

## Undang-undang Dasar untuk Republik Indonesia Merdeka.

Dalam bidang pertama Muhammad Yamin telah mengucapkan pidato dengan judul: "Azas dan Dasar Negara Republik Indonesia". Pidato ini dengan beberapa pidato lainnya (Ir. Sukarno dan Mr. Supomo dan lain-lain), sesudah melalui penggodokan menghasilkan rumusan Dasar Negara Republik Indonesia, Pancasila.

Tanggal 22 Juni 1945 sebuah panitia kecil yang terdiri dari 9 orang berhasil merumuskan sebuah dokumen yang terkenal dengan nama Piagam Jakarta (*Jakarta Charter*) yang berisi gagasan pokok yang menjadi kemerdekaan yang akan ditenggakan yang kemudian menjadi inti Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945).

Selanjutnya Muhammad Yamin sebagai salah seorang peletak dasar Negara Republik Indonesia ini disibukkan dalam berbagai masalah negara yang baru itu, baik untuk persiapan, maupun untuk masa sesudah kemerdekaan itu diumumkan.

Di awal kemerdekaan, sesuai dengan wataknya yang sukar diraba lebih dahulu, Muhammad Yamin melakukan oposisi yang keras terhadap kabinet Syahrir II dan ikut terbawa oleh arus yang dahsyat, sehingga pada bulan Juli 1946 ia ditahan, karena ia terlibat dalam "Peristiwa 3 Juli 1946". Setelah diproses lewat pengadilan maka tanggal 27 Mei 1948 Muhammad Yamin dipersalahkan melakukan kejahatan "memimpin percoobaan untuk merobohkan pemerintah yang syah dan untuk itu ia dijatuhi hukuman 4 tahun. Tetapi tanggal 17 Agustus 1948 ia mendapat grasi dari Presiden dan dibebaskan lagi.

Selanjutnya Muhammad Yamin pada tahun 1949 diangkat menjadi penasehat Delegasi RI ke KMB di negeri Belanda. Selama KMB ini Muhammad Yamin mencurahkan seluruh perhatiannya untuk mencapai hasil yang maksimal bagi bangsa Indonesia. Tahun 1950 ia diangkat menjadi anggota DPR RIS. Tahun 1951 Muhammad Yamin menjadi Menteri Kehakiman dalam Kabinet Sukirman Suwiryo, tetapi hanya sebentar, yaitu kira-kira 3 bulan, antara bulan April 1951 - Juni 1951.

Antara bulan Juli 1953 - Juli 1955 Muhammad Yamin menjadi Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan (P.P dan K) dalam Kabinet Ali Sastroamijoyo. Di waktu ini Muhammad Yamin merintis pendirian Universitas untuk setiap ibukota Propinsi dan empat buah Perguruan Tinggi Pendidikan Gu-

ru (PTPG) yang sekarang berkembang menjadi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) yang jumlahnya sudah bertambah.

Tahun 1955 dilangsungkan Konferensi Asia - Afrika I di Bandung dan Muhammad Yamin merupakan salah seorang dari 17 orang anggota delegasi Indonesia. Tanggal 10 Juli 1958 Muhammad Yamin diangkat menjadi Menteri Sosial Kurturil dalam Kabinet Kerja, lalu menjadi Menteri Inti Urusan Khusus dalam Kabinet Kerja.

Tanggal 18 Pebruari 1960 menjadi ketua Dewan Perancang Nasional dengan jabatan sebagai Menteri. Tahun 1962 Muhammad Yamin diangkat menjadi wakil Menteri Pertama Urusan Khusus/Menteri Penerangan.

Disamping sebagai Menteri, Muhammad Yamin pada tahun-tahun terakhir hayatnya banyak dipercaya dan beberapa jabatan penting dalam Negara Republik Indonesia, yaitu:

- a. Tanggal 21 Agustus 1961 dilantik menjadi Penasehat *Ex Officio* Lembaga Pertahanan Nasional.
- b. Tanggal 11 Desember 1961 diangkat sebagai anggota Dewan Pertahanan Nasional.
- c. Tanggal 18 Maret 1962 dilantik menjadi Menteri Pertama sebagai Koordinator Bidang Khusus/Menteri Penerangan/Ketua Dewan Depernas dalam pimpinan Lembaga-lembaga Negara sebagai dalam Kabinet Kerja (susunan baru).
- d. Tanggal 13 April 1962 diangkat menjadi anggota Staf I Pembantu Presiden/Panglima Tertinggi, Komando Tertinggi Operasi Ekonomi seluruh Indonesia.

Disamping itu dia juga merangkap menjadi Ketua Penerangan Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat.

Dalam Republik Indonesia Muhammad Yamin tidak pernah terlepas dari jabatan kenegaraan. Kalau tidak menjadi Menteri, dia diangkat menjadi anggota DPR RIS 1950, DPR RI Agustus 1955, Konstituante 1955, DPR GR/MPRS.

Muhammad Yamin disamping sebagai seorang negarawan, juga seorang sastrawan dan budayawan Indonesia yang terkenal. Dia merupakan perintis dalam Pujangga Baru dengan menciptakan Soneta bersama-sama Rustam Effendi dan Sanusi Pane (Pra Pujangga Baru). Tidak sedikit jumlah syair yang sudah diciptakannya, walaupun waktu itu umurnya masih terhitung

belasan tahun. Dia juga merupakan pelopor dalam pembinaan Bahasa Persatuan Indonesia.

Dalam diri Muhammad Yamin terkumpul sekaligus beberapa sifat yang ada kalanya saling bertentangan dan sukar dimengerti oleh teman-teman seperjuangannya. Dia adalah seorang pencinta alam yang tiada taranya dan hal ini nampak dalam syair-syair yang telah diciptakannya. Sebagai seorang pejuang kemerdekaan yang selalu berhubungan dengan orang-orang lain, dia sangat individualis dalam menempuh garis perjuangannya. Dia juga seorang yang teliti, cermat dibidang kerjanya, tetapi sekaligus dia juga seorang yang tak ambil pusing untuk dirinya sendiri, terutama dalam hal berpakaian. Disamping kelembutan yang terdapat dalam syair-syairnya, dia juga seorang yang sangat keras dalam perjuangan politiknya. Sebagai seorang yang sangat sibuk dalam setiap urusannya, dalam waktu yang sama dia juga seorang "kutu buku" yang tiada taranya. Dalam dirinya sekaligus terkumpul bermacam-macam keahlian yang tidak tanggung-tanggung, dia adalah sekaligus seorang sastrawan, budayawan, negarawan, filosof, sejarawan, ilmuawan dan sebagainya. Dalam setiap bidangnya dia merupakan perintis atau pelopor atau sekurang-kurangnya orang yang terkemuka. Tidak sedikit karya tulis yang telah dihasilkannya untuk setiap bidang keahliannya itu.

Untuk bangsa Indonesia Muhammad Yamin adalah salah seorang yang sangat besar jasanya. Untuk itu dia telah dihadiahi bintang tertinggi bagi bangsa Indonesia, yaitu "Bintang Maha Putra Republik Indonesia". Disamping itu dia juga mendapat bintang jasa dari negara Yugoslavia.

Banyak dari segi kehidupan Muhammad Yamin yang menarik untuk diceritakan dan sekaligus untuk di "Suri teladan" bagi generasi sekarang dan yang akan datang sebagai pedoman dalam mempertinggi martabat bangsa Indonesia ditengah masyarakat dunia.

Dalam kamus kehidupan Muhammad Yamin ia tidak mengenal sifat menyerah, pantang putus asa, segalanya dihadapi dengan tabah, tekun dan gigih. Dia adalah seorang yang sangat kuat jiwa dan rohaninya sayang jasadnya tidak dapat mengimbangi kekuatan rohaninya itu. Demikianlah, pada saat negara Republik Indonesia sangat membutuhkan tenaganya Tuhan telah memanggilnya kembali pulang ke rahmatullah pada tang-

gal 17 Oktober 1962.

Sebagai penghargaan terakhir yang diberikan kepadanya sebagai seorang pahlawan bangsa Indonesia yang telah tidak sedikit jasanya, maka dengan Keputusan Presiden RI tanggal 6 Nopember 1973 No. 088/TK/TK. 1973, almarhum Prof. H. Muhammad Yamin SH diresmikan sebagai Pahlawan Nasional Bangsa Indonesia.

## 5. Dewan-dewan (Raad) yang berdiri di Daerah

Dewan-dewan yang ada di Sumatera Barat dalam pemerintahan Hindia Belanda baru mulai sesudah tahun 1924. Pembentukan Dewan-dewan ini dimaksudkan pemerintah Hindia Belanda untuk memberikan otonomi yang lebih luas kepada daerah dan rakyat Indonesia. Dengan mendirikan beberapa Dewan dalam pemerintahan daerah pemerintahan Hindia Belanda kelihatannya memberikan hak lebih luas kepada rakyat Indonesia untuk ikut serta dalam menentukan kebijaksanaan pemerintah. Tetapi dalam kenyataannya Dewan-dewan itu hanya sebagai semacam badan penasehat yang tidak berfungsi. Dewan-dewan ini ditetapkan melalui undang-undang.

Dewan-dewan Daerah yang telah ditetapkan di Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

### a. Pemerintah Propinsi:

- 1). Dewan Propinsi (*Provinciale Raad*) (1924).  
Anggota sebagian diangkat, sebagian lagi dipilih, Dewan ini berwewenang menyusun peraturan daerah dan juga berfungsi sebagai penasehat kepala daerah.
- 2). Dewan Pemerintah Daerah (*College van Gedeputeerden*) yang diketuai oleh Gubernur.  
Dewan bersama Gubernur merupakan pelaksanaan harian pemerintahan propinsi.
- 3). Gubernur, kepala daerah dan kepala pemerintahan propinsi.

### b. Pemerintahan Kabupaten (1924)

- 1). Dewan Kabupaten (*Regentschaps Raad*)
- 2). Dewan Pemerintahan Kabupaten
- 3). Bupati (*Regent*)

- c. Pemerintahan Kota Praja (1926)
  - 1). Dewan Kota Praja (*Stadsgemeente Raad*)
  - 2). Majelis Walikota dan Pemerintah Harian (tahun 1938 menjadi Dewan Pemerintahan Kota)
  - 3). Walikota (*Burgermeester*)
- d. *Minangkabau Raad* (1938)  
Semacam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat Propinsi, sebagai lanjutan dari Dewan Propinsi tahun 1924.

## E. PERJUANGAN DI DAERAH.

### 1. Interaksi dengan Pemogokan-pemogokan di sekitar tahun 1923.

Mengenai interaksi perjuangan di daerah dengan pemogokan di sekitar tahun 1923 yang dapat dijelaskan disini adalah bahwa pemogokan itu juga disebabkan karena pengaruh orang komunis. Seperti telah dikatakan bahwa orang komunis di Sumatera Barat memasukkan fahamnya kepada rakyat Sumatera Barat melalui beberapa cara dan cara itu disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat. Sebagai intinya orang komunis tampil sebagai pelopor Kemerdekaan Indonesia suatu siasat mengelabui rakyat Sumatra Barat dalam usahanya mengumpulkan pengikut.

Sebelumnya rakyat Sumatra Barat belum mengenal tentang pemogokan sebagai alat perjuangan dalam menuntut sesuatu terhadap pemerintah yang sah. Barulah hal ini diketahui mereka sesudah orang komunis memperkenalkannya.

Tetapi di Sumatera Barat sendiri pemogokan itu tidak mempunyai pengaruh, karena pada dasarnya rakyat tak mau dihasut sedangkan jumlah buruh belum begitu banyak, untuk ikut menentukan kebijaksanaan pemerintah.

### 2. Interaksi dengan Pemberontakan tahun 1926/1927

Pemberontakan yang terjadi di Sumatra Barat tahun 1926/1927 tidaklah suatu pemberontakan yang berdiri sendiri, tetapi bersangkutan paut dengan pemberontakan lain yang direncanakan PKI semenjak tahun 1925. Kelihatannya pemberontakan ini merupakan pemberontakan PKI terhadap pemerintahan Hindia Belanda . Tetapi kalau dilihat secara lebih mendalam maka akan kelihatan bahwa pemberontakan itu tidaklah selu-

ruhnya merupakan pemberontakan PKI melainkan lebih merupakan perlawanan rakyat yang sudah sangat menderita akibat tekanan yang dilakukan pemerintah Hindia Belanda.

Untuk jelasnya marilah kita lihat keadaan Indonesia secara menyeluruh. Pada tahun 1923 pemerintahan Hindia Belanda meningkatkan tekanannya terhadap gerakan rakyat Indonesia yang disalurkan melalui perjuangan organisasi yang teratur, baik organisasi sosial, organisasi keagamaan, maupun organisasi politik. Terutama di Jawa organisasi politik sudah makin keras tuntutanannya dan semakin menjurus kepada tuntutan Indonesia merdeka, maka pemerintahan Belanda dibawah Gubernur Jenderal de Jonge mengambil tindakan kekerasan dengan melarang semua kegiatan yang mengarah kepada kegiatan politik praktis.

Hal inilah yang antara lain menyebabkan PKI melakukan rencana pemberontakan di Jawa dan Sumatera sambil menanamkan pengaruhnya terhadap rakyat Indonesia. PKI sebagai suatu partai komunis dengan pemimpin-pemimpin didikan Moskow seperti Muso, Alimin dan lain-lain mempergunakan keadaan untuk lebih menanamkan pengaruhnya di Indonesia. Kalau mereka sendiri bergerak, maka mereka berusaha mempengaruhi rakyat supaya memberontak terhadap Belanda, dalam pada itu mereka akan mengambil untung buat kepentingan mereka.

Di Sumatera Barat sendiri PKI berusaha mengekspos masalah agama, ekonomi rakyat yang sangat tertekan dan masalah pajak yang dijalanakan oleh Belanda yang menambah beban kesengsaraan rakyat untuk menghasut rakyat supaya memberontak terhadap pemerintahan Belanda. Karena masalah yang sangat sensitif bagi rakyat Sumatera Barat yang digarap PKI, maka akibatnya, walaupun tidak seluruh rakyat yang menyukai PKI, sangat banyak melibatkan rakyat Sumatera Barat dalam pemberontakan itu.

Di samping itu gelagat politik PKI di Sumatera Barat waktu itu memperlihatkan politik yang radikal, atau menyatakan bahwa PKI berjuang untuk membebaskan rakyat Sumatera Barat dari penjajahan Belanda sebagai PKI dengan caranya itu dari semula telah memperlihatkan dirinya sebagai orang-orang nasionalis sejati, sehingga banyak di antara rakyat yang sebenarnya tidak tahu menahu ikut membantu politik PKI meng-

hantam pemerintahan Hindia Belanda.

Sejak semula PKI telah mempopulerkan slogan-slogan: "Indonesia untuk Indonesia", "Bangunlah rakyat Indonesia" dan lain-lain semanya dalam mengelabui rakyat Sumatera Barat untuk menarik massa rakyat sebagai pengikut keinginan mereka. Kadang-kadang faham Internasionalisme Komunis terhapus di mata rakyat, karena mereka mendasarkan perjuangannya atas dasar agama Islam yang menjadi pegangan dan kepercayaan hidup masyarakat Sumatera Barat. Yang ditonjolkan adalah bahwa orang Islam tidak mungkin menerima orang kafir menjadi penguasa, sedangkan pemerintahan Hindia Belanda yang berkuasa waktu itu adalah orang kafir. Dalam hal ini perasaan keagamaan rakyat yang tersentuh dan hal itu sangat sensitif mengingat tulisan ngga kebaca memeluk agama Islam. Karena itu Belanda harus diusir dari Sumatera Barat. Lebih baik menjadi komunis, karena komunis-komunis dari Rusia akan datang kesini mengusir Belanda. 73) Dengan demikian gerakan Komunis di Sumatera Barat muncul sebagai suatu gerakan anti Kapitalisme dan Imperialisme yang revolusioner dan sekaligus mereka mengemukakan dirinya sebagai komando pergerakan nasional di Sumatera Barat. Untuk itu mereka sekaligus menghimpun kekuatan nasionalis, kaum agama dan lain-lain. Kepada petani-petani ditekankan betul hidup sama rata dan sama rasa dalam kelompok-kelompok kecil. Tindakan intimidasi juga sering dipergunakan untuk memperoleh pengikut, 74) yang banyak kalau cara lunak tak mampu lagi.

Dengan cara demikian PKI berhasil meluaskan pengaruhnya di Sumatera Barat. Guru-guru muda, pelajar-pelajar Sumatera Thawalib, pedagang-pedagang, pegawai SS (PJKA), buruh dan petani-petani banyak yang kena pengaruh komunisme. Hal ini tidak berarti bahwa mereka itu merupakan pengikut komunisme. yang setia tetapi karena tertarik dengan politik anti kapitalisme dan anti imperialisme yang digembar-gemborkan PKI. Pada tahun 1926 pengaruh PKI di Sumatera Barat sudah sangat meluas dan mereka selalu mengambil prakarsa dalam kegiatan politik menghadapi pemerintahan Hindia Belanda. Sikap anti pemerintah dikemukakan PKI pada setiap kesempatan. Situasi Sumatera Barat pada tahun 1926 itu sedemikian rupa, sehingga merupakan wadah yang tepat untuk melakukan

suatu revolusi 75) yang telah mereka rencanakan semenjak akhir tahun 1925 di Surakarta (Candi Prambanan).

Tetapi pada tahun 1926 itu pemberontakan tidak meletus di Sumatera Barat, tetapi justru di Banten, Jawa Barat, dan pemberontakan ini merupakan salah satu dari revolusi yang akan mereka lakukan di Indonesia menurut rencana di bekas reruntuhan candi Prambanan itu.

Karena itu di Banten sudah meletus pemberontakan yang di prakarsai PKI, maka di Sumatera Barat pemerintahan Hindia Belanda segera mengambil tindakan tegas. Pada bulan November 1926 para pemimpin komunis ditangkapi karena mereka menghasut pengikutnya mengumpulkan senjata. Said Ali yang menjadi pemimpinnya dijebloskan ke dalam tahanan Belanda. Penangkapan ini dilakukan sebagai tindakan prefentif pemerintahan Hindia Belanda. Tetapi walaupun demikian tahun 1927 pemberontakan itu meletus juga, walaupun hampir semua pemimpin komunis sudah ditangkapi semuanya.

Untuk daerah Sumatera Barat sendiri pemberontakan yang meletus tahun 1927 itu merupakan suatu titik dimana perasaan benci terhadap pemerintahan Belanda tak tertahankan lagi. Perasaan benci rakyat Sumatera Barat ini telah menumpuk mulai awal abad ke-20 dan propaganda komunis meniup-niup perasaan benci itu sehingga meletus. Demikian efektifnya propaganda itu sampai rakyat tidak merasa bahwa mereka telah dipergunakan komunis untuk tujuan mereka.

Jadi bagi Sumatera Barat pemberontakan itu merupakan perlawanan yang timbul dari dalam sebagai akibat perubahan kehidupan masyarakat yang tidak harmonis. Hal itulah yang diperuncing oleh PKI sehingga rakyat seolah-olah mendapat jalan keluar untuk melampiaskan rasa kebencian terhadap Belanda itu melalui cara yang dikemukakan PKI.

Sekedar untuk ilustrasi baiklah dilihat kembali bagaimana keadaan penghidupan masyarakat Sumatera Barat waktu itu, walaupun sebelumnya juga telah pernah dibicarakan. Setelah sistem perekonomian tertutup rakyat Sumatera dibuka Belanda dengan sistem ekonomi uangnya, maka terjadilah semacam kegelisahan ditengah masyarakat Minangkabau. Kegelisahan itu merupakan suatu perubahan kearah revolusi dalam bidang pertanian. Kecenderungan ini terlihat pada usaha-usaha

rakyat untuk menanam tanaman keras seperti kopi dan lain-lain untuk diperdagangkan, tidak lagi hanya sekedar untuk menutupi keperluan hidup sehari-hari.

Kecenderungan yang demikian timbul sebagai akibat dari sistem ekonomi uang Belanda dan partisipasi penduduk dalam perdagangan dunia yang telah diperkenalkan Belanda. Hal ini menimbulkan konsekwensi yang lebih mendalam lagi didalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Ikatan adat menjadi longgar dengan timbulnya perasaan individualisme. Ikatan hukum adat mulai dirasakan sebagai sesuatu yang tidak begitu megikat lagi. Mamak tidak lagi sanggup memenuhi kebutuhan hidup kemenakannya yang telah mulai meningkat. Karena itu mereka lari dari lingkungan adatnya dan berdagang dengan Belanda yang memberikan sedikit keuntungan kepada mereka. Disini terlihat perkembangan ekonomi mempercepat proses individualisasi dalam masyarakat.

Sementara itu sistem ekonomi uang Belanda mengarah kepada merosotnya kedudukan para kepala suku atau penghulu. Sewaktu uang telah menjadi ukuran prestasi seseorang dalam masyarakat, para penghulu itu merasa tidak sanggup bersaing dengan orang kaya yang tidak jarang diantaranya itu anak kemenakan mereka sendiri. Disamping itu sistem ekonomi uang Belanda menggoncangkan kehidupan para petani. Hasil mereka yang sedikit tidak dapat membantu lagi keperluan kehidupan mereka, padi atau beras yang berkarung-karung kalah bersaing dengan beberapa kilo kopi di pasaran. Hal ini menimbulkan kegoncangan dalam kehidupan mereka.

Situasi yang demikian itulah sesungguhnya yang menimbulkan pemberontakan tahun 1927 itu di Sumatera Barat. Apalagi situasi yang telah tegang itu diperuncing lagi oleh golongan komunis.

Jadi Perang Silungkang tahun 1927 itu sesungguhnya merupakan perlawanan rakyat Minangkabau terhadap pemerintahan Hindia Belanda di Sumatera Barat. Hanya saja perlawanan itu dipergunakan dan diboncengi oleh golongan komunis. Bahwa Perang Silungkang itu merupakan cetusan rasa kebencian rakyat terhadap Belanda dibuktikan dengan peristiwa penangkapan gembong-gembong komunis pada bulan Nopember 1926 oleh Belanda. Walaupun sudah hampir seluruh pemimpin PKI di Sumatera Barat ditangkapi tetapi tokoh perlawanan fisik

rakyat meletus juga. Diantara pemuka-pemuka rakyat yang dihukum mati oleh pemerintah Hindia Belanda, terdapat pemuka-pemuka yang sama sekali bukan orang komunis, bahkan mereka itu termasuk pemuka-pemuka umat beragama.

Sebagai akibat dari pemberontakan tahun 1926/1927 adalah terjadinya perubahan yang mendalam pada politik kolonial Belanda. Pemerintah Belanda berkesimpulan bahwa seluruh kekuasaan yang ada di Sumatra Barat harus diambil alih. Ke-longgaran yang telah diberikan pemerintah Hindia Belanda sebagai sisa-sisa politik etis, dihapuskan sama sekali. Seluruh kekuasaan dalam administrasi pemerintahan Hindia Belanda, kecuali kepala nagari, langsung berada di tangan pemerintah Belanda. Terhadap pemerintahan nagari diatur sedemikian rupa, sehingga yang menjadi kepala Nagari adalah kaula-kaula Belanda sendiri. Segala macam kegiatan politik dilarang atau sangat dibatasi ruang geraknya, hingga menjadi lumpuh buat sementara.

### 3. Sikap masyarakat terhadap asas non-koperasi dan koperasi terhadap pemerintah Hindia Belanda

Cara yang ditempuh oleh pemimpin-pemimpin Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan terhadap pemerintahan Hindia Belanda terbagi atas dua macam. Cara atau taktik politik ini didasari dari sikap-sikap para pemimpin itu atau golongannya dalam menghadapi Belanda. Kedua macam taktik itu adalah koperasi dan non koperasi.

Secara ringkas koperasi berarti politik bekerja sama dengan pemerintahan Hindia Belanda yang sedang menguasai Indonesia dalam memperjuangkan Indonesia merdeka. Non-koperasi diartikan sebagai politik tidak bekerja sama dengan pemerintahan Hindia Belanda dalam memperjuangkan Indonesia Merdeka. Dengan perkataan lain taktik non-koperasi lebih mengandalkan kekuatan sendiri untuk mewujudkan Indonesia merdeka.

Taktik koperasi dan non-koperasi dalam pergerakan nasional Indonesia muncul sesudah adanya *Volks raad* tahun 1918. Muncul dalam pengertian dipermasalahkan oleh golongan politik yang ada, karena misalnya Budi Utomo dari 1908 sampai tahun 1926 menjalankan taktik koperassi. Tahun 1926 menukar taktiknya dengan non-koperasi, yaitu semenjak undang-

undang untuk *Volks raad* dibuat. Tetapi taktik koperasi dan non-koperasi ini menjadi masalah dan perdebatan yang sengit diantara partai-partai beberapa tahun sesudah *Volksraad* berdiri.

Walaupun sikap koperasi dan non-koperasi menjadi perdebatan yang berlarut-larut di kalangan para pejuang kemerdekaan namun kedua cara itu tetap terlihat dalam kehidupan partai-partai. Partai yang menganut taktik koperasi, berpendirian bahwa untuk mencapai Indonesia merdeka lebih baik bekerja sama dengan pemerintahan Hindia Belanda. Melalui kerja sama itu sedikit demi sedikit kemerdekaan Indonesia akan dapat diwujudkan. Melalui dewan-dewan yang telah didirikan pemerintah Hindia Belanda, kemerdekaan Indonesia dapat diperjuangkan, misalnya seperti *Volkskraad*, *Gemeente-raad* dan sebagainya.

Sedangkan partai yang menganut taktik non-koperasi berpendirian bahwa tidak mungkin bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda untuk mencapai Indonesia merdeka. Untuk mencapai Indonesia Merdeka tidak memerlukan kerja sama dengan Belanda, kekuatan sendiri mampu untuk merebutnya. Karena itu persatuan yang kuat betul-betul diperlukan.

Sementara itu ada pula sebagian partai politik yang mengambil sikap koperasi *insidental*, artinya apabila tujuan perjuangan lebih menguntungkan dicapai dengan taktik koperasi, maka mereka mempergunakan sikap bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda. Tetapi jika sikap non-koperasi lebih menguntungkan, artinya kemerdekaan akan lebih mudah dicapai dengan taktik itu, maka dia akan mengambil taktik non-koperasi dalam perjuangan politiknya.

Dalam sejarah pergerakan nasional Indonesia kedua sikap perjuangan ini telah diperlihatkan oleh bermacam-macam golongan politik dan perorangan. Sebaliknya ada partai yang bersikap non-koperasi, tetapi anggota-anggotanya tidak dilarang bekerja sama dengan pemerintahan Hindia Belanda. Tetapi ada juga partai politik yang melarang seluruh anggotanya untuk bekerja sama dengan pemerintah Belanda, seperti yang diperlihatkan oleh Gerindo terhadap Muhammad Yamin sewaktu Muhammad Yamin mau menjadi anggota *Volksraad* mewakili daerah Minangkabau. Karena Gerindo sangat konsekwen memegang sikap non-koperasi itu, maka Muhammad Yamin dipecat dari

Gerindo, walaupun dia sendiri termasuk salah seorang pendirinya.

Di Sumatera Barat sendiri, setelah *Volksraad* diresmikan tahun 1918 di Jakarta, maka tuntutan politik rakyat Sumatera Barat yang paling menonjol adalah supaya pemerintah Hindia Belanda segera membentuk pula Dewan Daerah. Kecuali PKI, hampir seluruh partai politik di Sumatera Barat menuntut supaya dewan Daerah segera didirikan di Sumatera Barat, karena undang-undang untuk itu sudah ada. Tuntutan untuk membentuk Dewan Daerah itu menjadi radikal, sesudah Belanda mengusir Abdul Muis dan menunjuk Datuk Rangkyo Maharajo duduk sebagai wakil Sumatera Barat dalam *Volksraad*.

Hal ini menimbulkan kecurigaan partai-partai di Daerah Sumatera Barat. Kecurigaan itu berkisar bahwa pembentukan Dewan Daerah (setelah berdiri dinamakan *Minangkabau Raad*) nanti hanya akan memperluas kontrol pemerintah Hindia Belanda terhadap perjuangan di Sumatera Barat.

Akibat *issue* tentang pendirian Dewan Daerah ini menimbulkan golongan pro dan kontra di Sumatera Barat, yakni timbul konflik antara organisasi sosial dan partai politik yang koperasi dan non-koperasi. Pola perpecahan lama antara beberapa golongan yaitu golongan adat, golongan agama dan organisasi lokal yang lain telah meningkat jadi perpecahan di antara partai politik. Dewan Daerah yang didesak akan diadakan oleh pemerintah Belanda itu tidak berarti apa-apa, malahan akan menambah bantuan politik bagi mereka yang selama ini pro-pemerintah. Sedangkan bagi golongan adat yang diwakili oleh penghulu-penghulu, Dewan Daerah yang akan didirikan itu dipandang tidak saja sebagai suatu lembaga yang akan dapat mempertahankan kekuasaan mereka yang sah, tetapi juga sebagai suatu arena tempat penyaluran musyawarah adat.

Harapan golongan adat untuk mempunyai Dewan Daerah itu diperkuat lagi ketika Gubernur 76) dengan stafnya mendiskusikan masalah ini secara langsung dengan wakil-wakil penghulu dari seluruh daerah Agam pada tanggal 30 Juli 1925 di Bukittinggi. Pertemuan ini segera menjadi sasaran kritik bagi golongan yang tak mau kerja sama dengan Belanda dalam Dewan Daerah itu. Hasan Nul Arifin, seorang pemuka masyarakat menyatakan tidak percaya terhadap niat pemerintah itu. Ia juga menunjukkan bahwa mayoritas dalam masyarakat dari

organisasi-organisasi umum menentang pembentukan Dewan Daerah itu. Haji Agus Salim juga tidak setuju dengan pembentukan Dewan Daerah itu.

Jadi di daerah Sumatera Barat sikap koperasi dan non-koperasi timbul sekitar tahun 1925-an ke atas. Sebagian besar organisasi yang beraliran kebangsaan bersikap non-koperasi dan ini akan berlanjut terus selama kira-kira 10 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa di Sumatera Barat sikap non-koperasi diperlihatkan oleh pemimpin-pemimpin masyarakat begitu memasuki masa bagian kedua abad 20 dan sikap ini belum diperlihatkan oleh partai politik, karena resminya partai politik ada di Sumatra Barat baru tahun 1930.

Partai politik pertama yang menunjukkan sikap non-koperasi terhadap pemerintahan Hindia Belanda adalah PERMI pada tahun 1930 bersamaan dengan tahun pendiriannya. PERMI sebagai suatu partai politik yang berpusat di daerah Sumatera Barat, mempunyai pandangan tersendiri tentang sikap koperasi dan non-koperasi, dalam hal ini khusus mengenai sikap terhadap Dewan Daerah. Menurut PERMI anggapan bahwa orang yang bersikap non-koperasi disamakan sebagai seorang anarkhis seperti di Eropah yang anti parlemen dan anggapan yang mengatakan orang yang bersikap koperasi adalah orang yang suka parlemen adalah suatu anggapan yang salah, karena Sumatera Barat tidak sama dengan Eropah. Terhadap Dewan Daerah (*Minangkabau Raad*) PERMI bersikap non-koperasi bukan berarti PERMI anti parlemen karena Dewan Perwakilan Rakyat yang wajar, tetapi hanya merupakan suatu tempat bersandiwara, di mana segala kebohongan dipertontonkan pemerintah Hindia Belanda. Dewan Daerah dan *Volksraad* adalah dua badan sandiwara itu, karena itu kehadirannya tidak diharapkan rakyat Sumatera Barat. Kalau Dewan Perwakilan Rakyat yang benar yang akan diadakan, siapa yang berani mengambil sikap non-koperasi, karena justru dalam Dewan yang semacam itulah aspirasi rakyat dapat di perjuangkan dengan benar dan jujur.

Menurut PERMI sikap non-koperasi terhadap *Volksraad* dan Dewan-dewan yang lainnya bukanlah sikap anti-parlemen. Tetapi sebaliknya PERMI menganggap justru *Volksraad* dan Dewan-dewan yang lain itulah yang anti parlemen, karena seluruh Dewan-dewan itu adalah anti demokrasi. Atau dengan

kata lain, menurut PERMI, pemerintahan Hindia Belandalah yang anti parlemen, karena merekalah yang akan mengadakan Dewan yang a-demokrasi. Oleh karena itu PERMI dengan sikap non-koperasinya akan berusaha segiat-giatnya untuk membangkitkan semangat rakyat dengan menumbuhkan sikap percaya diri sendiri untuk memperbaiki nasib bangsa sendiri.

Selanjutnya PERMI mengambil sikap non-koperasi terhadap pemerintahan Hindia Belanda, lebih-lebih PERMI setelah memperhatikan sikap politik dari partai-partai di Jawa dalam pergerakan Nasional Indonesia, pendirian PERMI makin mantap untuk mengambil sikap non-koperasi terhadap pemerintah Hindia Belanda. Dan sikap inilah nantinya yang menyebabkan tokoh-tokoh PERMI ditangkap dan dibuang ke Digul.

Golongan yang mendasarkan perjuangannya kepada agama jelas sekali menunjukkan sikap non-koperasi terhadap pemerintahan Hindia Belanda, karena dianggap pemerintahan orang kafir. Secara keseluruhan sikap masyarakat Sumatera Barat terhadap pemerintah Hindia Belanda dapat dikatakan non-koperasi, kecuali bagi sekelompok orang yang telah *vested* dalam kekuasaan semu.

#### 4. Interaksi dengan Permufakatan Perhimpunan-perhimpunan Politik Keangsaan Indonesia.

Kongres Pemuda I yang diadakan antara tanggal 30 April s/d 2 Mei 1926 di Jakarta banyak membawa hasil yang sangat berguna bagi perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Hasil utama yang dicapai dalam kongres itu adalah "mengakui dan menerima cita-cita persatuan Indonesia."

Tetapi rupanya cita-cita persatuan itu masih belum dapat diwujudkan untuk beberapa saat karena adanya perbedaan paham mengenai sifat persatuan itu, apakah berbentuk "fusi" atau "federasi", walaupun semua organisasi pemuda sudah menyetujui prinsip bersatu. Untuk mencari kata sepakat telah berkali-kali diadakan pertemuan antara organisasi pemuda itu. Tetapi memang situasi waktu itu masih sulit buat bangsa Indonesia.

Keadaan yang demikian dikejutkan oleh pengasingan terhadap Dr. Tjipto Mangunkusumo ke Banda tanpa alasan yang jelas pada tanggal 16 Desember 1927. Hal ini membangkitkan semangat para pemuda waktu itu. Apabila diantara mereka ma-

sih tenggelam dalam perbedaan pendapat antara bentuk "fusi" dan "federasi" untuk mengalang persatuan bangsa Indonesia, maka pemerintah Hindia Belanda akan terus meningkatkan "tangan besinya" untuk menindas pejuang pergerakan kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu peristiwa pengasingan Dr. Tjipto Mangunkusumo tanggal 16 Desember 1927 mereka jadikan peringatan dan langsung dijawab dengan mendirikan "Permufakatan Perhimpunan-perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia" (PPPKI) pada tanggal 17 Desember 1927 77)

Partai-partai yang tergabung dalam PPPKI adalah: PNI, *Algemene Studie Club*, Partai Syarikat Islam, Budi Utomo, Pasundan, Sarekat Sumatera, Kaum Betawi, *Indonesiache Studie Club*, Sarekat Madura, Tirtayasa (Banten), Perserikatan Celebes. 78)

Dengan terbentuknya PPPKI, maka terwujudlah cita-cita persatuan Indonesia yang sudah disepakati bersama dalam Kongres Pemuda I 1926. Pengaruh PPPKI tidak saja terasa untuk Jawa, tetapi juga terasa sampai ke daerah-daerah. Pengaruhnya jelas kelihatan terutama terhadap pergerakan nasional Indonesia. Untuk hal ini tidak terkecuali daerah Sumatera Barat *Jong Sumatranen Bond* dan Sarekat Sumatera mengirim wakil untuk duduk dalam PPPKI tersebut, misalnya Parada Harahap dan Dahlan Abdullah mewakili Sarekat Sumatera. Sedangkan Partai Sarekat Islam yang juga duduk dalam PPPKI itu, mempunyai cabang-cabang di Sumatera Barat yang pemimpin-pemimpinnya diikuti oleh rakyat. Dengan demikian jiwa "persatuan" yang telah dinyatakan melalui PPPKI juga keras gemanya terasa di Sumatera Barat. Dengan cepat jiwa persatuan itu segera diusahakan perwujudannya di Sumatera Barat.

PERMI yang didirikan kira-kira dua setengah tahun sesudah pembentukan PPPKI itu menyambut secara positif jiwa persatuan itu. PERMI sebagai partai politik yang merupakan partai pergerakan Nasional yang lahir dan berpusat di daerah Sumatera Barat tidak ketinggalan untuk mewujudkan jiwa persatuan yang terkandung dalam PPPKI itu. Hal ini dengan segera menjalar ke seluruh pelosok Sumatera Barat, karena PERMI sendiri mempunyai cabang dan ranting sampai ke pelosok-pelosok daerah Sumatera Barat. PERMI serta cabang-cabangnya tidak begitu sukar untuk menampung ide persatuan, ka-

rena PERMI sendiri mempunyai landasan geraknya yang merupakan persatuan antara agama Islam dan cita-cita kebangsaan.

PERMI segera mengikuti secara aktif dan melibatkan diri ke dalam gerakan kemerdekaan yang terdapat dan berpusat di Jawa. Dalam bulan Januari 1932 PERMI mengirimkan delegasi untuk mengikuti Kongres Indonesia Raya yang disponsori oleh PPPKI di Surabaya.

Tujuan Kongres Indonesia Raya adalah untuk menggolong persatuan antara seluruh rakyat Indonesia, apakah dia golongan tua, golongan muda, golongan kebangsaan, golongan Islam dan lain-lainnya. Supaya kekuatan dalam perjuangan mencapai Indonesia merdeka segera dapat diwujudkan. Terutama Kongres bermaksud mempersatukan Partindo dengan PNI Baru dan antara golongan Nasionalis dengan golongan Islam. Tujuan Kongres itu belum dapat terlaksana seluruhnya pada waktu itu, tetapi kemudian pengaruhnya tampak juga, karena akhirnya masing-masing golongan yang bertentangan dan berselisih itu menyadari bahwa pertentangan dan perselisihan yang mendalam dan terus menerus akan dapat membawa kehancuran diri sendiri. Dengan kata lain dapat dikatakan akhirnya Kongres Indonesia Raya dapat melaksanakan *toleransi nasional*.

Pada kesempatan Kongres Indonesia Raya itu kedua utusan PERMI yaitu Djalaluddin Thaib dan Basa Bandaro, sempat berkenalan dan bertukar pikiran dengan tokoh-tokoh nasional waktu itu, yang pada umumnya mempunyai pengertian yang kurang baik terhadap partai-partai Islam. PERMI sendiri tidak bergabung dalam PPPKI dan ini tidak berarti bahwa PERMI tidak menyetujui PPPKI, bahkan sebaliknya yang dilakukan PERMI, pengalamannya dalam Kongres Indonesia Raya dipergunakannya untuk mempropagandakan persatuan di Sumatera Barat, sehingga PERMI makin tertanam pengaruhnya dan makin disenangi rakyat sebagai organisasi yang memperjuangkan kepentingan umum.

Bulan September 1932 PERMI mengutus lagi Muchtar Lutfi ke Jawa (Jakarta) dalam usahanya ikut berpartisipasi dalam pergerakan nasional Indonesia. Pidato-pidato Muchtar Lutfi menyebabkan PERMI makin terkenal di kalangan tokoh-tokoh politik nasional.

Semenjak itu garis politik PERMI makin keras di Sumatera Barat, sampai akhirnya tahun 1935 kegiatan PERMI dilarang oleh pemerintah Hindia Belanda dan beberapa orang pemimpinnya dibuang ke Digul.

## BAB IV KEADAAN DI DAERAH DARI TAHUN 1928 – 1942,

### A. PENGARUH POLITIK PEMERINTAH HINDIA BELANDA PADA TAHUN 1930.

#### 1. Politik keras terhadap Gerakan Non-Koperasi.

Sejak tahun 1929 pemerintah Hindia Belanda telah menjalankan politik keras terhadap gerakan non-koperasi. Ir. Soekarno, Maskun, Gatot Mangkupraja, Supriadinata sebagai tokoh utama PNI yang non-koperasi pada tahun 1929 itu ditangkap dan diadili pada pengadilan negeri di Bandung (1930). Masing-masing dijatuhi hukuman penjara 4 tahun, 2 tahun, 1 tahun 8 bulan dan 1 tahun 3 bulan. Kantor PNI digeledah dan larangan rapat dikenakan terhadap PNI. Dengan tindakan pemerintah Hindia Belanda terhadap PNI yang bersifat non-koperasi terhadap pemerintah Hindia Belanda, mulailah Belanda mengambil tindakan keras terhadap perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia yang bersikap non-koperasi.

Sekedar sebagai ilustrasi, tindakan pemerintah Hindia Belanda berikut ini dapat memberikan gambaran betapa kerasnya mereka menghadapi gerakan kemerdekaan dari para pemimpin nasional Indonesia.

Tahun 1928 Dr. Tjipto Mangunkusumo diasingkan pemerintah Hindia Belanda ke Banda. Pengasingan itu dilakukan tanpa alasan yang jelas. Sebelumnya pada tahun 1913 Tjipto Mangunkusumo, Suwardi Suryaningrat (ki Hajar Dewantara) dan Douwes Dekker (Setiabudi) karena dianggap terlalu keras mengkritik pemerintahan Belanda dibuang ke Negeri Belanda selama 6 tahun. Kelihatan betapa kerasnya "tangan" Belanda mematahkan perjuangan bangsa Indonesia. Antara tahun 1926/1927, pemimpin-pemimpin nasional seperti Moh. Hatta, Ali Sastroamidjojo, Abdul Madjid dan Nasir Dt. Pamuncak karena disangka tersangkut pemberontakan tahun 1926 ditangkap dan diajukan ke pengadilan, tetapi karena terbukti tidak bersalah dibebaskan lagi tahun 1928. Walaupun demikian dengan dasar kecurigaan yang tak benar sudah dilakukan penangkapan dan menjebloskan ke dalam penjara. Betapa kerugian para pendekar kemerdekaan itu dan bangsa Indonesia, sama sekali tak dipertimbangkan oleh pemerintah Hindia Belanda.

Pada tahun 1929 kembali pemerintah Hindia Belanda mela-

kukan penangkapan terhadap Ir. Sukarno, Maskun, Gatot Mangku-pradja dan Supriadinata karena mereka dianggap sangat berbahaya dengan sikap non-koperasi yang sangat radikal. Tahun 1934 Moh. Hatta dan St. Syahrir ditangkap dan dikirim ke Digul, kemudian ke Belanda (1936), selanjutnya dipindahkan lagi ke Sukabumi (1942). Tahun 1937 kembali Ir. Sukarno ditangkap dan diasingkan ke Flores, kemudian dipindahkan ke Bengkulu (1937 - 1942).

Banyak lagi penangkapan dan penahanan yang dilakukan pemerintah Hindia Belanda yang semuanya dilakukan atas dasar ketakutan Belanda terhadap kegiatan mereka memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dari situ kelihatan betapa kerasnya sikap pemerintah Hindia Belanda terhadap pemimpin-pemimpin Indonesia yang non-koperasi. Dikatakan keras, karena sedikit saja pembicaraan mereka agak keras gerak-gerik mereka agak mencurigakan, mereka terus ditangkap dengan alasan yang dibuat-buat.

Tindakan keras pemerintah Hindia Belanda ini tidak di Jawa saja yang dilaksanakan, tetapi juga sampai ke daerah-daerah, demikian juga dengan Sumatera Barat. Di Sumatera Barat tindakan ini terlihat nyata terhadap partai politik PERMI. PERMI di Sumatera Barat merupakan partai politik yang mendasarkan perjuangannya kepada agama Islam dan kebangsaan. Sikap perjuangannya terhadap pemerintah Hindia Belanda nyata-nyata diperlihatkan dengan cara non-koperasi dan tindakannya radikal.

Partai yang sudah menyatakan garis perjuangannya melalui cara politik di Sumatera Barat barulah PERMI ini. Sebelumnya baru merupakan organisasi sosial yang mendasarkan perjuangannya untuk memperbaharui pelaksanaan ajaran agama Islam, terutama melalui lembaga pendidikan agama Islam. Walaupun demikian organisasi-organisasi itu sudah mengarah kepada perjuangan pembebasan rakyat dari penjajahan Belanda atau sudah mengarah kepada usaha mencapai Indonesia merdeka. Tetapi yang nyata-nyata mengumumkan perjuangan melalui politik adalah PERMI dan dasar yang dipergunakan adalah agama dan kebangsaan.

Pada pertengahan bulan Juli 1932, PERMI yang non-koperasi dan radikal itu mengadakan Konperensi Besar di Bukittinggi. Tokoh-tokoh PERMI waktu itu adalah Mochtar Lutfi, Ilyas Yakub, Jalaluddin Thaib, kemudian juga Darwis Taram, Marzuki Yatim, M.D. Dt. Palimo Kayo Duski Samad dan Zamzami Kimin. Di samping itu dalam PERMI juga duduk tokoh-tokoh lain seperti Abdul Majid Abdullah, Djauhari Sahir, Kamaluddin, Haji Mansur Daud

dan Darwis Thaib. Di antara tokoh-tokoh PERMI ini, Muchtar Lutfi, Ilyas Yakub dan Jalaludin Thaib terkenal sangat keras dan sangat dicurigai Belanda segala tindak tanduknya. Konferensi PERMI di Bukittinggi itu dikunjungi oleh Muhammad Yamin, yang waktu itu baru berumur 27 tahun dan Gatot Mangkupraja, keduanya dari pimpinan Partindo di Jawa.

Pada waktu itu di Sumatera Barat Pemerintah Hindia Belanda sudah mengeluarkan peraturan bahwa setiap pertemuan atau rapat dari pemimpin-pemimpin masyarakat dapat dihentikan oleh pihak penguasa (Belanda) melalui polisi rahasia (*PID*) yang selalu menghadiri setiap pertemuan atau rapat. Hal ini dikeluarkan oleh pemerintah Belanda di Sumatera Barat waktu mengurangi kegiatan gerakan kemerdekaan rakyat Sumatera Barat yang makin lama makin meningkat.

Muchtar Lufti, salah seorang tokoh pemimpin PERMI, dalam rapat besar di Bukittinggi itu telah berpidato dengan berapi-api dan mengemukakan garis politik yang akan ditempuh PERMI dalam perjuangannya. Bekerjasama dengan pemerintahan Hindia Belanda untuk mewujudkan kemerdekaan tidak akan ada gunanya, karena usaha itu selalu akan dirintangi Belanda. Jalan yang paling baik adalah menghimpun dan menyatukan kekuatan sendiri untuk merebut kemerdekaan itu.

Sikap keras dari Muchtar Lufti yang demikian dianggap Belanda (*PID*) sangat berbahaya karena dianggap sudah menghasut rakyat supaya membenci pemerintah. Oleh karena itu pidato Muchtar Lufti dihentikan sebelum habis selanjutnya Muchtar Lufti sendiri dilarang untuk mengadakan atau menghadiri pertemuan atau rapat umum di daerah Sumatera Barat.

Muhammad Yamin, seorang pemuda yang antara tahun 1920 – 1930-an di Jawa terkenal dengan nama julukan "*Mirabeau*" karena keahliannya berpidato dan Gatot Mangkupraja yang menghadiri rapat besar itu, juga mendapat perlakuan yang sama dengan Lutfi. Mereka berdua dipaksa meninggalkan Sumatera Barat, karena dalam kesempatan itu Muhammad Yamin mengatakan bahwa "Minangkabau yang terdiri dari tiga luhak telah dijual", dan menyatakan betapa pentingnya persatuan dalam mewujudkan cita-cita pergerakan dan lain-lain yang membangkitkan semangat perjuangan rakyat.

Selama rapat itu suatu hal baru terjadi di Padang, yaitu Belanda menemukan poster yang banyak jumlahnya. Di antara poster

itu ada yang berbunyi sebagai berikut: "Indonesia harus dibebaskan dari negeri Belanda", Indonesia akan dibebaskan besok pagi". Hal ini juga yang menyebabkan Muhammad Yamin dan Gatot Mangkupraja diusir pemerintah Belanda dari Sumatera Barat.

Tetapi dengan adanya poster itu membuktikan sambutan dan dukungan rakyat terhadap perjuangan yang ditempuh PERMI dan pemimpin-pemimpin Partindo itu. Dari mereka berdua rakyat telah mengetahui gerakan apa dan gerakan yang bagaimana yang telah ditempuh oleh tokoh-tokoh di Jakarta dalam usaha mewujudkan kemerdekaan Indonesia.

Karena Muchtar Lutfi telah dinyatakan berada di bawah pengawasan Belanda dalam arti kata segala gerak geriknya diawasi dengan ketat atau dilarang, maka PERMI segera menggantikan jabatannya dengan Rasuna Said dan Chadijah. Rasuna Said sendiri adalah seorang tokoh yang sangat terkenal dalam PERMI karena keahliannya dalam berpidato, pandai menghasut rakyat (*agitasi*)<sup>79</sup> sehingga dia sering berurusan dengan polisi Belanda dan berkali-kali ditangkap dan dipenjarakan.

Akhir Desember 1932, dalam usahanya menyebarluaskan garis perjuangan PERMI, Rasuna Said dianggap menghasut rakyat supaya membenci pemerintah Belanda, karena itu dia ditangkap dan dihukum pemerintah Hindia Belanda, Penangkapan dan penghukuman itu merupakan yang pertama kalinya dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk daerah Sumatera Barat terhadap tokoh pejuang pergerakan mencapai Indonesia merdeka.

Dalam bulan itu juga, Rasimah Ismail, seorang tokoh wanita PERMI lainnya, juga ditangkap pemerintah Hindia Belanda dengan tindakan yang sama, yaitu menghasut dan menyebarkan bibit kebencian dan permusuhan terhadap pemerintah Hindia Belanda. Tindakan keras pemerintah Belanda terhadap organisasi atau orang yang tak mau kerjasama (non-koperasi) itu bukan hanya kepada PERMI, tetapi juga terhadap organisasi lainnya. Kongres Pemuda Pelajar di Padang Panjang telah ditutup oleh Polisi Belanda karena Belanda tidak dapat membiarkan pemuda pelajar membicarakan masalah politik, karena rasa fanatik dan semangat juang yang rakyat Sumatera Barat mudah dibangkitkan dengan sedikit agitasi saja sebab perasaan benci terhadap pemerintah Hindia Belanda memang sudah lama tertanam pada mereka. Karena itu sebelum kongres itu mempengaruhi rakyat banyak telah ditutup Belanda.

Pemerintah Hindia Belanda memang merasa berhak mengam-

bil tindakan keras itu karena adanya undang-undang bikinan Belanda yang dapat melarang rapat umum yang bersifat menghasut rakyat dan terhadap majalah yang berisi karangan anti kolonial. Dengan hak itulah pihak Belanda melakukan tindakannya menutup atau melarang rapat, tetapi pelaksanaannya tidak pernah tidak keras. Kadang-kadang sedikit saja mencurigai mereka sudah dijadikan alasan untuk melakukan penangkapan. Bahkan tindakan Pemerintah Belanda itu kalau dibandingkan dengan tindakannya di Jawa terhadap pemimpin-pemimpin pergerakan nasional Indonesia, sudah sangat keras. Hal ini sangat menekan pergerakan rakyat di Sumatera Barat. Tetapi walaupun demikian kegiatan pergerakan rakyat Sumatera Barat justru selalu meningkat.

Antra tahun 1932 – 1933 perkembangan gerakan yang lebih radikal di Sumatera Barat makin meningkat. Hal ini menyebabkan pemerintah Belanda mengambil tindakan yang lebih keras ada di antara beberapa orang yang berjiwa nasional membentuk suatu badan untuk menolong teman-teman mereka yang ditahan melalui jalan yang legal melalui prosedur hukum. Tetapi pemerintah Belanda tidak memperdulikannya.

Dalam menghadapi gerakan nasional di daerah Sumatera Barat ini pemerintah Hindia Belanda lebih suka mempergunakan kekuasaan dan hak luar biasanya yang tidak dapat digugat oleh pengadilan. Oleh karena itu usaha rakyat menolong teman-teman mereka yang ditahan melalui saluran hukum tidak berhasil. Bahkan pemerintah Belanda telah menetapkan pembatasan perjalanan bagi tokoh-tokoh politik. Apabila mereka akan meninggalkan daerahnya mereka harus dapat izin lebih dahulu dari pemerintah. Bagi yang melanggar akan dikenakan hukuman.

Tindakan pemerintah Hindia Belanda untuk melemahkan gerakan rakyat ialah dengan membentuk jaringan mata-mata yang akan menyusup di antara orang-orang partai politik. Mata-mata ini dilatih sedemikian rupa sehingga mereka dapat bergerak dengan bebas di kalangan kaum pergerakan. Hal ini menimbulkan kecacauan di antara orang politik sendiri karena setiap rencana gerakan yang telah ditetapkan selalu didahului atau diketahui oleh polisi Belanda. Akibatnya di antara sesama mereka sering timbul curiga mencurigai.

Selanjutnya Belanda juga berusaha mengerahkan para penguasa adat yang memihak pada mereka untuk menekan anak kemenakannya. Kebanyakan di antara tokoh-tokoh pergerakan

Sumatera Barat adalah golongan agama intelektual. Belanda berusaha menimbulkan kembali rasa pertentangan antara kedua golongan itu dengan cara mengadu domba. Hal ini memang agak menyulitkan kaum pergerakan karena mereka akan berhadapan dengan sanak keluarganya sendiri. Tindakan Belanda yang begini dari luar kelihatannya tidak keras, tetapi sesungguhnya lebih kejam lagi daripada kekerasan senjata.

Semua tindakan kekerasan pemerintah Hindia Belanda terhadap rakyat Sumatera Barat menjadi perhatian pula bagi partai-partai politik induk yang berada di Jawa, karena memang sudah keterlaluhan sekali. Kalau terus dilawan dengan keras pula mungkin akan menghancurkan kegiatan politik di Sumatera Barat.

Demikianlah PSII yang berpusat di Jawa menasihatkan cabang-cabangnya di Sumatera Barat supaya agak mengurangi kegiatan yang menyakitkan hati Belanda. Begitu juga dengan PNI Baru di bawah pimpinan Moh. Hatta menyuruh membatasi anggota-anggotanya yang ada di Sumatera Barat untuk mendiskusikan tentang masalah adat dan agama, karena mungkin akan berakibat lebih parah lagi melihat gelagat pemerintah Hindia Belanda waktu itu di daerah Sumatera Barat. Sementara keadaan belum mengizinkan kegiatan ditujukan terhadap kegiatan pendidikan, terutama kursus kader partai atau memperkuat kepercayaan diri sendiri.

PERMI sebagai satu partai politik yang tidak terikat dengan partai-partai di Jawa, karena memang berpusat di Sumatera Barat sendiri, menginstruksikan kepada anggotanya supaya lebih berhati-hati. Setiap rapat yang ada harus diteliti dulu secara mendalam, jangan sampai terjebak oleh akal licik Belanda.

Tetapi PERMI sendiri meningkatkan kegiatan politiknya. Hal ini terlihat dalam surat kabar PERMI yang menyatakan bahwa tindakan keras Belanda harus dijawab dengan meningkatkan pergerakan partai dan untuk itu persatuan dan kesatuan partai harus dijaga melalui konsolidasi yang terus menerus. Akibatnya terhadap pemimpin-pemimpin PERMI dikenakan tahanan kota. Tetapi karena pidato Mochtar Lutfi yang dianggap oleh pemerintah Belanda sudah bersifat menghasut rakyat maka ia ditangkap. Antara lain dikatakannya bahwa siapa yang mau mencapai kemerdekaan dengan cara yang sopan, kalau Belanda sendiri tidak sopan dalam menekan gerakan kemerdekaan itu. Oleh karena itu kemerdekaan untuk Indonesia harus segera direbut dengan jalan apa saja. Karena

ucapan yang demikian pada tahun 1934 Muchtar Lutfi ditangkap dan dibuang ke Digul. Kemudian Ilyas Yakub dan Jalaludin Thaib juga mengalami nasib yang sama.

Pemimpin-pemimpin PSII di Sumatera Barat juga mengalami nasib yang sama. Haji Udin Rahmini dan Sabilai Rasyad juga ditangkap Belanda. Datuk Singo Mangkuto yang waktu itu berada di Jawa tak dapat pulang ke Sumatera Barat, karena ia juga termasuk daftar orang yang akan ditahan polisi Belanda (PID). Tetapi akhirnya Datuk Singo Mangkuto juga ditangkap Belanda dan ketiganya dibuang ke Digul.

Selama masa kira-kira empat tahun saja PERMI telah kehilangan lebih dari 50 orang pemimpinnya, belum lagi pemimpin yang lainnya dari PSII, PNI Baru (Pendidikan), Partindo dan lain-lainnya. Hal ini berarti bahwa tindakan keras pemerintah Hindia Belanda telah berhasil melumpuhkan pergerakan nasional di Sumatera Barat. Walaupun demikian tidak berarti bahwa perjuangan rakyat Sumatera Barat dalam mencapai Indonesia merdeka sudah terhenti, bahkan sebaliknya lebih ditingkatkan dengan cara yang lebih sistematis dan konsolidasi yang lebih rapi dengan pusat pergerakan nasional di Jawa.

Politik keras yang dijalankan pemerintah Hindia Belanda di Sumatera Barat memang agak lebih keras dari yang dijalankan Belanda di Jawa. Di Sumatera Barat pemerintah Hindia Belanda betul-betul sudah merupakan sebuah "negara polisi" karena kontrol terhadap penguasa di daerah itu terlepas dari penguasa pemerintah Hindia Belanda di pusatnya, Jakarta. Di Jakarta, Belanda tidak dapat berbuat *semou gue* karena "mata dunia" lebih ditujukan ke sana, yang merupakan alat kontrol yang sangat ditakuti pemerintah Hindia Belanda.

Demikian politik kekerasan pemerintah Hindia Belanda di Sumatera Barat, walaupun buat Sumatera kelihatannya dapat melumpuhkan pergerakan kemerdekaan di Sumatera Barat, tetapi hakekatnya menimbulkan kerugian yang tidak sedikit terhadap pemerintah Hindia Belanda dan menimbulkan semangat perjuangan yang lebih besar lagi terhadap rakyat Sumatera Barat.

## 2. Undang-undang Sekolah Swasta (Wilde Scholen Ordonnantie

Pada tahun 1932 pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan "Ordonansi Sekolah liar" (Wilde Scholden Ordonnantie). Isinya antara lain ialah memberi kuasa kepada pemerintah untuk meng-

urusi ujud dan isi sekolah swasta 80) yang tidak dibiayai oleh pemerintah. Dengan ordonansi ini pemerintah Hindia Belanda bermaksud meniadakan sekolah swasta itu, karena pada sekolah itulah disemaikan ide atau cita-cita Indonesia merdeka.

Di Sumatera Barat banyak terdapat lembaga pendidikan swasta yang mempunyai pandangan yang berlainan dengan pandangan pemerintah Hindia Belanda. Sekolah swasta yang besar pengaruhnya di Sumatera Barat banyak sekali jumlahnya, tetapi tiga jenis dari sekolah itu sangat menonjol dalam menanamkan bibit kemerdekaan dalam jiwa anak didik mereka, yaitu lembaga pendidikan yang berada di bawah asuhan *Muhammadiyah*, *Taman Siswa* dan *INS (Indonesische Nationale School)*

Tujuan lembaga pendidikan Muhammadiyah ialah untuk meluaskan agama Islam dan memupuk perasaan agama dari anggota-anggotanya. Taman Siswa berdasarkan atas kebangsaan dan kebudayaan Indonesia yang tidak pernah diberikan dalam sekolah pemerintah Belanda. Dalam penyemaian bibit kemerdekaan perguruan Taman Siswa mendapat kedudukan yang agak istimewa dari sekolah swasta lainnya di Indonesia karena seluruh tamatan sekolah Taman Siswa banyak yang menjadi pimpinan INS yang didirikan oleh Moh. Syafei di Kayutanam, Sumatera Barat pada tahun 1926 justru merupakan reaksi dari sistim sekolah yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda di Sumatera Barat yang menompakan nilai-nilai penjajahan terhadap murid-muridnya. Unsur keterampilan pada sekolah ini terutama pekerjaan tangan sangat ditekankan. Keistimewaan INS dari sekolah swasta yang lain adalah bahwa INS tidak mempunyai cabang di tempat lain selain dari hanya di Kayutanam. Namun demikian sekolah ini mencoba mengenalkan suatu sistem pendidikan yang bertentangan dengan sistem pendidikan sekolah pemerintah dan memperlihatkan perbedaan dengan sistem sekolah swasta lainnya.

Pemerintah Hindia Belanda sudah lama menaruh curiga terhadap sekolah-sekolah swasta ini, yang oleh pemerintah waktu itu dinamakan "Sekolah liar", karena sekolah-sekolah itu dianggap pemerintah Belanda merupakan pusat tempat penghasut rakyat untuk membenci pemerintah Belanda.

Sebenarnya sekolah swasta itu didirikan memang untuk menentang pemerintah kolonial Belanda di Indonesia dengan menanakan perasaan harga diri, percaya pada diri sendiri dan kemampuan sendiri dengan menanamkan rasa keagamaan yang dianut dan

rasa kebangsaan.

Di samping itu juga karena kesempatan untuk memasuki sekolah pemerintah sangat terbatas. Pemerintah Hindia Belanda merasa takut untuk membuka kesempatan yang terlalu luas terhadap rakyat Indonesia, karena dengan demikian akan cepat mencerdaskan rakyat yang akan berakibat tidak baik bagi kedudukan pemerintah kolonial Belanda di Indonesia. Karena itu mereka hanya membuka kesempatan sekolah yang sangat terbatas pada anak-anak kelompok yang mereka percayai saja, seperti terhadap anak-anak pegawai yang bekerja pada administrasi pemerintah Belanda dan terhadap anak-anak lain yang tidak memusuhi Belanda.

Tetapi karena menginginkan kemajuan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat dan menaikkan martabat rakyat Indonesia, pemuka-pemuka masyarakat tidak hanya membiarkan kesempatan terbatas itu berlangsung lama, melainkan mereka menjawabnya dengan mendirikan lembaga pendidikan yang akhirnya berjumlah sangat banyak. Pada sekolah-sekolah itulah mereka berusaha memberikan nilai-nilai kemajuan bangsa sambil menanamkan rasa kebangsaan dalam diri murid-muridnya.

Pendirian sekolah swasta ini mendapat sambutan yang luar biasa dari rakyat, sehingga berkembang sampai ke pelosok-pelosok yang sangat kecil, jauh melebihi jumlah sekolah yang didirikan pemerintah. Berkembangnya sekolah swasta di Sumatera Barat, seperti juga halnya dengan tempat-tempat lain di Indonesia, mempercepat perkembangan berpikir rakyat Sumatera Barat. Jangkauan berpikir mereka sudah dapat melampaui batas daerah mereka sendiri dan sikap hidup mereka, termasuk sikap terhadap Belanda juga berubah dengan lebih tegas.

Hal inilah menimbulkan kekhawatiran pemerintah Hindia Belanda yang menimbulkan niat pada mereka untuk mengawasi jalannya lembaga pendidikan swasta itu kalau perlu menutup sekolah-sekolah tersebut.

Sebagai ilustrasi di sini dikemukakan perkembangan sekolah swasta di Sumatera Barat yang diselenggarakan oleh berbagai organisasi Islam pada kira-kira tahun 1932 - 1933.

Organisasi	Jumlah Sekolah	Jumlah murid
Muhammadiyah	122	5835
PERMI	4	249
Diniyah	120	7136
Thawalib	44	3061
PII (Kaum Tua)	45	3651
Sekolah lain	878	50.082 81)

Sekolah-sekolah ini berdasarkan agama Islam, belum termasuk sekolah Taman Siswa dan INS serta surau-surau (pesantren) yang masih sangat banyak jumlahnya.

Pada sekolah-sekolah agama itu diajarkan bermacam-macam masalah Islam, antara lain tentang tafsir Al Qur'an. Melalui pembicaraan yang mendalam tentang ayat-ayat Al Qur'an membawa mereka dalam masalah "Terjajah" dan "tidak terjajah" serta "pemerintah kafir" dan "pemerintah tidak kafir". Pembicaraan yang begitu niscaya akan menuju kepada "konsep menentang pemerintah Belanda." Melalui partai politik pelajar-pelajar itu dapat melihat kenyataan dari konsep perlawanan itu. Konsep perlawanan itu lebih dipertegas lagi oleh sistem pendidikan pada INS dan Taman Siswa, perasaan kebangsaan berkembang dengan cepat.

Usaha pemerintah Hindia Belanda untuk mengurangi dan mengawasi sekolah swasta itu adalah dengan mengatakan berlakunya "Ordonansi Sekolah Swasta" pada tanggal 19 September 1932. Antara lain isi ordonansi itu adalah bahwa setiap orang yang akan mengajar pada sekolah swasta yang tidak mendapat surat izin dari pemerintah Belanda, harus mendapat izin terlebih dahulu dari kantor penguasa setempat, pelamar harus mempunyai sertifikat pemerintah atau sertifikat dari sekolah yang bersubsidi pemerintah dan harus dapat meyakinkan pemerintah setempat bahwa mereka tidak akan melanggar ketentuan pemerintah Hindia Belanda.

Dari isinya yang itu saja sudah dapat dilihat bahwa dengan keluarnya ordonansi itu, pemerintah Hindia Belanda bermaksud ingin menentukan segala-galanya mengenai sekolah swas-

ta itu. Dengan mengatur siapa yang akan menjadi guru berarti pemerintah Hindia Belanda sudah menentukan semuanya, karena kedudukan seorang guru waktu itu di Sumatera Barat sangat baik dan sangat menentukan program sekolahnya.

Ordonansi ini mendapat tantangan dari seluruh lapisan masyarakat, baik sekolah agama maupun sekolah-sekolah lainnya. Tidak satupun organisasi politik di Indonesia yang menyetujui Ordonansi ini. Taman siswa misalnya sudah mempersiapkan beberapa orang guru untuk ditangkap pemerintah Belanda tanpa akan melakukan perlawanan, kalau Belanda akan menindak Taman Siswa, karena Taman Siswa sangat keras menentang ordonansi ini. Partai-partai yang bersikap loyal terhadap pemerintah Hindia Belanda juga menentang Ordonansi ini, apalagi partai-partai yang bersikap non-koperasi dan radikal seperti PNI Pendidikan, Partindo dan lain-lain.

Reaksi itu di Sumatera Barat secara per kelompok organisasi mulai bulan Nopember 1932. Haji Ilyas Yakub dari PERMI menyatakan dengan keras bahwa ordonansi sekolah swasta itu menggambarkan perbedaan pandangan yang besar antara pemerintah Hindia Belanda dengan rakyat. Menurutnya Ordonansi itu akan mempengaruhi kehidupan tamatan sekolah swasta dengan buruk, akan membodohkan bangsa Indonesia secara umum. Selanjutnya PERMI menyatakan bahwa ordonansi itu sesungguhnya menghancurkan kebudayaan Indonesia di saat mereka berjuang untuk menunaikan kewajiban sesuai dengan ajaran Islam dan asas kemanusiaan.

Tanggal 19 Nopember 1932 Diniyah membuat resolusi yang menyatakan bahwa ordonansi sekolah swasta itu merupakan rintangan bagi perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan pendidikannya. Diniyah tak menyetujui ordonansi itu dan akan menentangnya bersama dengan ordonansi lain.

Pelajar-pelajar *Islamic College* mengatakan akan segera menggantikan guru-guru mereka jika mereka itu ditahan perintah Belanda.

Akhir Desember 1932 pelajar-pelajar Thawalib yang berjumlah kira-kira 10.000 orang bersedia membantu guru-guru mereka menentang Ordonansi itu.

Ulama-ulama golongan tua juga mengirimkan surat protes keras pada pemerintah Belanda mengenai Ordonansi itu. Tanggal 18 Desember 1932, PSII, sesuai dengan petunjuk dari pu-

sat, mengatakan rapat spontanitas pada setiap cabang untuk menentang ordonansi itu. Tetapi semua pertemuan itu dibubarkan oleh polisi dengan keras. Oleh karena itu PSII menganjurkan pada semua pengikutnya untuk sembahyang takhjud, baik secara kelompok, maupun secara meminta pada Tuhan supaya ordonansi itu dibatalkan.

Pada akhir Desember 1932 diadakan konperensi tingkat nasional di Yogyakarta untuk menolong mengatasi masalah pendidikan di Indonesia akibat keluarnya ordonansi itu. Marah Sutan, seorang tokoh pendidik terkenal dari Sumatera Barat menyatakan dalam konperensi itu bahwa rakyat Sumatera Barat bersedia bekerja sama dengan Ki Hajar Dewantara dan kelompok lainnya mengadakan perlawanan terhadap ordonansi itu. Di Sumatera Barat lebih dari 10.000 guru sudah siap sedia melakukan perlawanan itu secara serentak seluruh Indonesia, karena semenjak bulan September 1932 mereka telah mulai melakukan hal yang sama, bahkan kalau perlu mereka bersedia masuk penjara.

Di Sumatera Barat ordonansi ini menimbulkan persatuan dan kerja sama yang kokoh antara organisasi-organisasi induk sekolah itu sendiri. Antara kaum tua, kaum muda, Muhammadiyah, Tarbiyah Islamiyah (Sekolah PERTI), Sumatera Thawalib, Sekolah Diniyah, Taman Siswa, INS dan nagari-nagari yang mempunyai sekolah bersatu menentang Ordonansi itu karena merasa sangat tersinggung untuk mengatasi hal tersebut dibentuk satu panitia (komite) aksi untuk menentang ordonansi itu. Semua organisasi yang selama ini mempunyai sedikit pertentangan faham, bersatu padu dalam menghadapi ordonansi itu. Panitia itu diketuai oleh Haji Rasul.

Walaupun seorang Demang, Darwis Datuk Majolelo sangat bersimpati terhadap perjuangan rakyat telah memberikan informasi kepada Haji Rasul betapa berbahayanya kedudukan Haji Rasul sebagai ketua Panitia itu, tetapi Haji Rasul tetap dengan pendiriannya. Haji Rasul bersama anggota panitia lainnya mengajukan permohonan pada pemerintah Hindia Belanda untuk menarik ordonansi itu kembali. Haji Rasul menyatakan bahwa penembangan ilmu pengetahuan adalah tugas agama. Nabi telah mengajarkan kepada pengikut-pengikutnya untuk menuntut ilmu sejak dari ayunan sampai keliang kubur dan Tuhan telah memerintahkan umat manusia untuk menemukan rahasia alam

semesta. Oleh karena itu ordonansi sekolah swasta merintangai umat Islam menjalankan ibadahnya sesuai dengan ajaran Islam sendiri

Bulan Pebruari 1933 sudah hampir semua organisasi pendidikan di Sumatera Barat bergabung untu menentang ordonansi sekolah swasta itu. Selanjutnya panitia itu bergabung dengan organisasi-organisasi seluruh Indonesia dan berhubungan dengan organisasi Islam di luar negeri untuk menentang ordonansi itu.

Pemerintah Hindia Belanda melihat betapa berbahayanya kalau memaksakan menialankan ordonansi sekolah swasta tersebut, karena hampir seluruh rakyat Indonesia bangkit menentangnya. Oleh karena itu ordonansi tersebut tidak jadi dijalankan dan tahun 1933 itu juga dicabut kembali.

## B. DEPRESI EKONOMI DI DAERAH

Daerah Sumatera Barat, seperti juga dengan daerah lain di Indonesia, sangat menderita akibat tekanan ekonomi yang sangat memuncak. Beban yang harus dipikul rakyat sudah menumpuk. Hal itu ditambah lagi dengan keadaan depresi ekonomi dunia. Pemerintah Belanda di Sumatera Barat membebaskan lagi kekurangan penghasilannya kepada rakyat. Segala macam pajak dibebankan, hingga rakyat di tanah tumpah daharnya sendiri dikelilingi oleh pajak yang harus dibayar kepada orang lain, orang asing. Akibatnya penghidupan rakyat jadi bertambah sukar.

Depresi ekonomi dunia betul-betul buruk akibatnya bagi rakyat di daerah, karena disamping beban penghidupan mereka yang telah demikian berat mereka masih harus membayar segala macam pajak dan lain-lain sebagainya kepada pemerintah Belanda yang selalu dijalankan dengan keras. Tetapi justru hal inilah yang lebih memantapkan rasa kebencian rakyat terhadap pemerintah Hindia Belanda. Di waktu itu kalau sekiranya Belanda tidak berhasil membujuk rakyat dengan janji bohong, maka waktu itu Belanda dapat diusir. Tetapi kenyataannya lain sama sekali.

## C. INTERAKSI TERHADAP KEPARTAIAN/ORGANISASI

### 1. PNI - Baru

Pada tahun 1930 PNI (Partai Nasional Indonesia) dibu-

barkan karena jalan politiknya yang non-kopersi dan radikal. Umur PNI ketika dibubarkan itu baru 3 tahun, tetapi pada tahun 1930 pemimpinnya sudah ditangkap dan dihukum Belanda. Setelah tokoh-tokoh PNI ditangkap (Ir. Sukarno, Maskun, Gatot Mangkupraja dan Supriadinata), maka PNI dipimpin oleh Sartono S.H Karena dia menganggap PNI akan dilarang juga oleh pemerintah Hindia Belanda dan pengikutnya selalu dalam keadaan terancam bahaya, maka PNI dibubarkan dan diganti dengan partai baru yang bernama Partai Indonesia (Partindo), yang resmi didirikan tahun 1931 dibawah pimpinan Sartono SH.

Tetapi mereka yang tidak setuju dengan pembubaran PNI mendirikan partai lain dengan nama Pendidikan Nasional Indonesia yang disingkat dengan PNI yang oleh umum dikenal sebagai PNI-Baru atau PNI-Pendidikan.

Pada akhir tahun 1932 Moh. Hatta datang ke Sumatera Barat dalam rangka pulang kampung dan mengunjungi teman-temannya. Pada kesempatan itu dipergunakannya untuk memperkenalkan PNI-Baru pada masyarakat Sumatera Barat sampai terbentuk cabang PNI-Baru.

Pidato Moh. Hatta mendatangkan simpati rakyat kepadanya. Antara lain dikatakan bahwa kemerdekaan Indonesia pasti datang, walaupun kita tahu kapan akan datangnya. Tetapi yang jelas tujuan untuk mencapai Indonesia Merdeka itu tidak dapat dicapai hanya dengan mempergunakan "pisau menghadapi senapan dan meriam Belanda" Oleh karena itu yang penting adalah mempersiapkan organisasi yang matang dan mental yang tinggi.

Ia menganjurkan bahwa untuk memobilisasi massa dan menghimpun kekuatan massa, yang sangat penting adalah pendidikan kader yang intensif dan sistematis. Berdasarkan pengalaman yang sudah unsur persatuan sangat penting untuk menghadapi kekuatan Belanda. Jalan terbaik untuk itu adalah dengan menyusun suatu organisasi yang baik dengan anggota-anggota yang bermental tinggi dan militan, yang dapat dilatih melalui sistem kaderisasi yang terus menerus dan terarah.

Kehadiran Moh. Hatta membawa pengaruh yang dalam pada kehidupan organisasi politik di Sumatera Barat. Banyak pemimpin Muhammadiyah yang terpengaruh dan melihat PNI-Baru dapat dijadikan wadah yang tepat untuk menghadapi PERMI, karena antara Muhammadiyah dengan PERMI terdapat se-

dikit perbedaan faham mengenai cara mengembangkan agama Islam. Beberapa orang tokoh tua dari PMDS juga terpengaruh oleh seruan Moh. Hatta. Beberapa orang pemimpin lama dari PERMI tertarik juga pada ide Moh. Hatta itu. Mereka inilah yang menjadi pelopor mendirikan PNI-Baru di Sumatera Barat. Dengan demikian berdirilah PNI-Baru di Sumatera Barat pada tahun 1932 itu juga.

Kehadiran PNI-Baru dan kehadiran Moh. Hatta membawa arus baru pada politik di Sumatera Barat. Arus itu merupakan semacam pertentangan dalam lapangan politik. PERMI yang waktu itu merupakan partai politik yang baru muncul dengan prinsip non-koperasi yang keras sangat banyak mendapat pengikut, terutama dari kalangan kaum muda. Tetapi setelah kedatangan Moh. Hatta yang karena reputasi nasionalnya sebagai pejuang yang gigih dalam mencapai Indonesia merdeka, banyak mempengaruhi tokoh-tokoh politik dan organisasi sosial lain di Sumatera Barat dengan ide PNI-Baru-nya itu. Demikianlah, bahkan dari PERMI sendiri, banyak tokoh daerah yang sebelumnya telah berafiliasi pada salah satu organisasi, menjadi pelopor pendirian PNI-Baru di Sumatera Barat, karena mereka itu melihat bahwa dalam pembinaan ideologi yang berhubungan dengan aktivitas keduniawian ternyata PNI-Baru memberikan ruang gerak yang lebih luas dari PERMI tanpa menghilangkan kehormatan terhadap nilai-nilai keagamaan. PNI-Baru juga sepenuhnya mengakui agama, tetapi juga mengakui kebebasan beragama yang luas. Dalam PNI Baru kebijaksanaan partai terhadap agama sama, namun anggota-anggotanya dapat sama mempunyai pandangan dan sikap yang berlainan mengenai hal itu. Perbedaan yang nyata antara kebijaksanaan partai dan pandangan anggota-anggotanya dalam hal agama ini yang menjadi sasaran kritik yang utama terhadap PERMI. Dengan demikian kehadiran PNI-Baru di Sumatera Barat membawa pertentangan dengan PERMI yang telah dijadikan sasaran kritik oleh anggota-anggota PNI-Baru.

PERMI sendiri yang telah kehilangan sebagian tokohnya dan yang telah ditindak PNI-Baru mempergunakan agama untuk kepentingan politiknya, tidak tinggal diam. Mereka segera mengadakan reaksi terhadap kritik dari anggota PNI-Baru. PERMI mengeritik PNI-Baru mengenai konsep demokrasiya. Konsep PNI-Baru itu akan mempercepat bentrokan antara un-

dang-undang agama dengan undang-undang negara. Disamping itu juga diserang mengenai masalah kolektivisme PNI-Baru. Dalam sistem kolektivisme Indonesia tradisional ada perbedaan antara *hak milik* dengan *hak umum* (milik perorangan dan milik bersama), tetapi dalam pandangan PNI-Baru masalah hak milik perorangan ini menjadi kabur. Dikatakan bahwa hal itu sama saja dengan menentang hukum adat yang belaku dan penolakan terhadap hukum agama. Ajaran Agama Islam jelas membedakan antara milik perseorangan dengan milik bersama. Oleh karena itu faham kolektivisme sukar diterima di Sumatera Barat.

Perselisihan pendapat ini tidak saja terjadi di Sumatera Barat, tetapi telah dimulai juga dari Jawa antara Moh. Hatta dan Syahrir atau dari pihak Ir. Sukarno, Sartono S.H dan lain-lain pihak lagi. Mereka sama-sama mengakui betapa pentingnya massa aksi tetapi Moh. Hatta lebih menitik beratkan pengkaderan dengan pendidikan masyarakat dan pendidikan kader yang militan. Tanpa kader yang cukup banyak dan cukup matang, kesadaran politik massa akan berkurang dan gerakan kemerdekaan akan tergantung pada seseorang saja. Mati yang seorang itu selesailah perjuangan. Sedang Ir. Sukarno menginginkan arus yang cepat, masa rakyat yang ada sekarang ini yang harus digerakkan untuk segera dapat mencapai Indonesia merdeka. Untuk itu tak mungkin menunggu kader-kader lagi, karena memakan waktu yang lama.

Perselisihan faham politik antara PNI-Baru dengan PERMI dapat difahami, karena PERMI sendiri adalah penyokong-penyokong politik PNI - Sukarno di daerah Sumatera Barat. Asas kebangsaan, *self help* dan non-koperasi PERMI adalah pengaruh yang nyata dari PNI - Ir. Sukarno yang telah bubar.

## 2. Partindo

Seperti telah dikatakan bahwa Partindo adalah nama baru dari PNI yang telah dibubarkan. Partindo didirikan oleh Sartono S.H. pada tanggal 30 April 1931. Walaupun Sartono S.H. sendiri waktu itu (sebelum 30 April 1930) telah diserahi memimpin PNI, tetapi karena melihat gelagat pemerintah Hindia Belanda kemungkinan besar PNI akan dibubarkan juga. Maka untuk menghindarkan ancaman bahaya terhadap anggota-anggotanya, PNI dibubarkan dan didirikan Partindo. Walaupun

nama lain tetapi kebijaksanaan politiknya sama dengan PNI yang mendahuluinya. Partindo juga dipimpin oleh Sartono S.H.

Sesudah Ir. Sukarno dibebaskan dari penjara, ia berusaha menyatukan kembali antara Partindo dengan PNI-Baru, tetapi gagal, maka Ir. Sukarno memilih masuk Partindo. Ir. Sukarno dalam waktu yang singkat segera dapat menduduki jabatan ketua dalam Partindo. Partindo mempunyai prinsip yang sama dengan PNI (lama), yaitu bertujuan Indonesia Merdeka menganut asas *self-help*, non-koperasi dan bersikap netral pada agama.

Ir. Sukarno yang telah mempunyai gagasan kerja sama antara Islam, nasionalisme dan marxisme melihat PERMI sebagai suatu kekuatan di daerah yang dapat menaksir kesatuan dalam gerakan Indonesia Merdeka karena itu antra PNI dan PERMI perlu ada hubungan kerja sama, dan sekarang antara Partindo dengan PERMI juga harus ada kerjasama. Karena PERMI berdasarkan Islam, maka kerja sama itu hanya terbatas pada Islam dan kebangsaan, dengan cara yang berbeda, sedangkan marxisme tidak dapat diterima oleh PERMI.

Kerja sama itu dapat dijalin dengan erat, karena kedua-duanya sama-sama menginginkan kesatuan antara kelompok Islam dengan kelompok nasionalis dan keduanya sama mengakui perlunya partai politik yang berpengikut banyak.

Pada waktu itu antara PERMI dan Partindo ada semacam Konsensus, yaitu persetujuan kerja sama antara PERMI dan Partindo. Dimana ada PERMI tak perlu ada Partindo. Di Sumatera yang telah menjadi daerah operasi PERMI tak perlu ada Partindo lagi. Sebaliknya dimana ada PARTINDO, PERMI pun tak perlu ada. Tetapi dalam setiap gerakan PERMI, asas kebangsaan yang merupakan salah satu asas dari Partindo, harus dimasukkan jadi garis perjuangan PERMI, sebaliknya Partindo sangat menghormati agama Islam dalam perjuangannya. Dalam kampanye PERMI di Sumatera, masalah Partindo dimasukkan ke dalamnya. Dalam kampanye Partindo di Jawa masalah PERMI juga dijadikan masalah Partindo. 82)

Tetapi karena gerak-gerik Partindo dan perjuangannya sama saja dengan PNI (hanya nama yang berubah), maka pemerintah Hindia Belanda merasa cemas juga oleh ucapan Ir. Sukarno sebagai tokohnya. Maka tanggal 1 Agustus 1933 kegiatan rapat Partindo di seluruh Indonesia dilarang oleh Pemerin-

tah Hindia Belanda. Pada tanggal 28 Desember 1933 Ir. Sukarno ditangkap dan dipenjarakan. 83) Tahun 1937 Ir. Sukarno dipindahkan ke Ende (Flores) dan kemudian pengasingannya dipindahkan ke Bengkulu sampai Jepang membebaskannya tahun 1942.

Nasib yang sama juga dialami PERMI di Sumatera Barat yang sejak 1933 tokoh-tokohnya juga ditangkap pemerintah Hindia Belanda dan dibuang ke Digul.

### 3. Partai Syarekat Islam Indonesia.

Dalam Oktober 1928 Datuk Singo Mangkuto, Haji Abdul Majid mengunjungi kongres ulama di Kediri. Kongres ini disponsori oleh Partai Sarekat Islam (PSI). Walaupun kongres itu tidak berhasil membentuk persatuan ulama seluruh Indonesia tetapi wakil Sumatera Barat itu telah terpengaruh oleh PSI. Segera setelah kembali ke Sumatera Barat mereka merencanakan membuka cabang PSI.

Datuk Singo Mangkuto juga menjadi ketua persatuan adat di Sungai Batang, Maninjau dan lembaga tersebut dijadikan sebagai forum pertama ke arah pembentukan PSI. Dengan menjelaskan kejahatan imperialisme dan kapitalisme dan menyatakan bahwa Indonesia tidak akan dapat memperoleh kemajuan sebelum dibebaskan dari kekuasaan Belanda. Akhirnya tanggal 22 Desember 1928 Datuk Singo Mangkuto dan Haji Abdul Majid berhasil membentuk cabang PSI yang pertama di Sumatera Barat dan anggotanya kebanyakan terdiri dari pelajar Sumatera Thawalib Padang Panjang dan Maninjau. Anggota pengurus lengkapnya adalah sebagai berikut:

Ketua	:	Datuk Sino Mangkuto
Wakil Ketua	:	Haji Uddin Rahmani
Sekretaris I	:	Datuk Putih
Sekretaris II	:	Darwis Thaib
Komisaris	:	Sutan Bagindo Habladin St. Maaruf Sutan Sulaiman
Penasehat	:	Haji Abdul Majid.

Pada bulan Januari 1929, Datuk Singo Mangkuto, pendiri cabang PSI (Partai Sarekat Islam) di Sungai Batang, Maninjau dan sekretaris Muhammadiyah Sungai Batang pergi ke Ja-

karta menghadiri Kongres nasional PSI. Ikutnya wakil Muhammadiyah dalam Kongres tersebut adalah karena antara Muhammadiyah dengan PSI terjalin hubungan kerja sama yang erat.

Partai Sarekat Islam, atas dorongan dr. Sukirman, yang baru kembali dari Eropah, menunjukkan corak kebangsaan yang lebih menonjol dari sebelumnya. Karena itu nama partai pun berubah dari Partai Sarekat Islam (PSI) menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII). Itulah yang merupakan salah satu keputusan dari Kongres bulan Januari 1929 itu. Pertukaran nama dari PSI ke PSII berarti PSII lebih menunjukkan corak kebangsaannya dari sebelumnya sewaktu masih bernama PSI.

Disamping perubahan nama itu keputusan lain dari kongres adalah peningkatan disiplin partai. Ini berarti bahwa anggota PSII dilarang menjadi anggota organisasi lainnya. Keputusan ini menimbulkan ketegangan antara PSII dan Muhammadiyah. Sebelum tahun 1929 banyak diantara para anggota Muhammadiyah, yang menjadi anggota PSI. Sesudah tahun 1929 diadakan larangan keanggotaan rangkap. Mereka harus memilih salah satu PSII atau Muhammadiyah, walaupun hal ini sudah dibicarakan secara terbuka antara Muhammadiyah dan PSII, tetapi ternyata pemisahan itu menimbulkan persaingan yang hebat antara kedua organisasi itu di Sumatera Barat dalam perebutan pengaruh di tengah masyarakat.

Agar PSII dapat berkembang dengan cepat, maka Datuk Singo Mangkuto sengaja membakar rasa anti pemerintah dari rakyat Sumatera Barat. Pidato-pidatonya yang lantang dan bebas mengenai keburukan imperialisme dan kapitalisme Belanda terhadap rakyat Indonesia banyak menarik perhatian pendengarnya. Disamping itu dalam pidatonya ia sering menakut-nakuti penguasa di Sumatera Barat. Oleh karena itu pada bulan Juni 1929, Datuk Singo Mangkuto dituduh menghasut rakyat untuk melawan pemerintah Belanda dan hal ini dijadikan alasan untuk menangkapnya bersama beberapa orang temannya. Haji Abdul Majid mengalihkan kegiatannya ke Sumatera Thawalib yang telah diperbaharui dan disatukan kembali. Dengan demikian tinggallah Hai Uddin Rahmani sebagai pemimpin PSII.

Tindakan tugas Belanda terhadap PSII ini tidaklah menyebabkan PSII berontak, bahkan sebaliknya lebih mempergiat aktivitas politiknya. Tetapi sampai dengan tahun 1929 PSII di Sumatera Barat baru berkembang di Sungai Batang, Maninjau.

Sementara itu tanggal 19 Mei 1929, Duski Samat seorang alumni Sumatera Thawalib, mengorganisasi perantau-perantau Sumatera Barat yang berada di Lampung dan kekuatan yang menonjol di dalam organisasi perantau itu adalah anggota-anggota PSII yang sengaja menghindar ke sana karena tekanan pemerintah Belanda terhadap kegiatan mereka di Sungai Batang. Pada tahun 1930 cabang-cabang organisasi perantau itu dibentuk di Padang dan Bukittinggi dan PSII mempunyai pengaruh yang besar di sana. Perkumpulan perantau itu bernama *Pembela Nagari* (PN).

Pengaruh PSII terlihat dalam PN ketika organisasi perantauan itu mengadakan kongresnya di Maninjau pada bulan Maret 1930. Karena depresi ekonomi, maka usaha kegiatan PN yang utama adalah menanggulangi masalah ekonomi, sedangkan aspirasi politiknya disalurkan melalui PSII. Demikian besar pengaruh PSII dalam PN ini, hingga setiap kegiatan politiknya dilaksanakan atas nama PSII sementara itu antara PSII dengan PERMI sudah dapat diselesaikan mengenai keanggotaan masing-masing, karena PSII anggotanya tidak boleh merangkap jadi anggota organisasi lain sesuai dengan putusan kongres PSII tahun 1929.

Setelah Datuk Singo Mangkuto bebas dari tahanan tahun 1931, PSII kembali meningkatkan kegiatannya. Pertama, pada bulan November 1931 Datuk Singo Mangkuto berusaha membentuk semacam federasi dengan PERMI, tetapi usaha ini gagal. Kegagalan ini disebabkan karena PSII hanya berpengaruh di daerah pedesaan seperti Maninjau, Agam Tua, Suliki, Kamang dan lain-lain dan masing-masingnya masih terpisah satu sama lain dengan pengeritan belum adanya cabang daerah. Sedangkan PSII merupakan suatu organisasi politik yang sudah mempunyai susunan pusat, cabang dan ranting-rantingnya secara tegas dan teratur. Karena itu PERMI tak mau bergabung dalam suatu federasi yang diusahakan oleh Datuk Singo Mangkuto. Oleh karena itu pekerjaan Datuk Singo Mangkuto berikutnya adalah meminta otonomi yang besar dari Dewan Pusat PSII.

Menurut Dewan Pusat PSII di Jawa, PSII di Sumatera Barat hanya merupakan perwakilan daerah. Oleh karena itu pimpinan PSII daerah Sumatera Barat harus sadar bahwa mereka hanya sebagai penyambung lidah dari Dewan Pusat PSII di Ja-

wa Hal ini tidak dapat diterima oleh PSII di Sumatera Barat, karena segala instruksi PSII pusat perlu penyesuaian dengan situasi dan kondisi setempat, supaya jangan terjadi kegoncangan.

Bulan April 1932 diadakan konperensi PSII Daerah Sumatera Barat. Konperensi diusahakan mengubah suasana antara PSII pusat dengan PSII daerah. Pimpinan Daerah PSII Sumatera Barat dibentuk. Pimpinan daerah PSII dipegang oleh Datuk Singo Mangkuto dan segera mengusulkan pada PSII pusat untuk memberikan otonomi yang lebih besar pada PSII daerah Sumatera Barat supaya dapat mengkoordinasi seluruh cabang-cabang PSII di Sumatera Barat menjadi *Perserikatan PSII Minangkabau*. Dengan demikian PSII daerah Sumatera Barat dapat merencanakan kegiatan organisasi sesuai dengan lingkungan setempat dan masalah khusus mereka sendiri. Tetapi Dewan Pusat PSII tak dapat menerima usul ini, hingga mengakibatkan Datuk Singo Mangkuto jadi kurang semangat memimpin PSII daerah Sumatra Barat.

Di Sumatera Barat pada umumnya disiplin partai agak sukar diterapkan pada waktu itu. Sewaktu Muhammadiyah mulai didirikan banyak tokoh Islam yang masuk jadi anggota Muhammadiyah. Sesudah PSII lahir, kemudian PSII banyak pula tokoh Islam yang masuk PSII, di antaranya ada yang telah menjadi pimpinan Muhammadiyah setempat. Selanjutnya setelah PERMI diresmikan tahun 1930, banyak pula ulama Islam yang masuk PERMI di antaranya ada pula pimpinan Muhammadiyah dan PSII setempat. Jadi dalam hal ini terjadi keanggotaan rangkap, bahkan ada yang tiga sekaligus.

Tetapi hal ini mengalami perubahan setelah PSII pusat menekankan masalah disiplin partai. Timbul ketegangan antara Muhammadiyah, PSII dan PERMI. Masing-masing bersaing saling memperebutkan anggota. Tetapi hal ini tak dapat dijalankan dengan lancar. Kalau di daerah Padang Panjang dan Bukittinggi misalnya persaingan antara ketiga organisasi itu sangat keras, hingga konsolidasi partai mudah dilaksanakan dan siapa yang menjadi anggota sesuatu partai dengan jalan dapat diketahui.

Tetapi lain halnya dengan daerah Maninjau dan beberapa tempat lainnya, dimana terjalin hubungan yang sangat rapat antara ketiga organisasi itu, bahkan sangat sukar untuk menentukan seorang menjadi anggota organisasi yang mana, karena

dia hadir pada tiap pertemuan yang diadakan oleh ketiga organisasi itu. Bahkan mempunyai hak suara yang sama seperti seorang anggota penuh. Jadi di daerah seperti ini disiplin partai sukar dilaksanakan dan jumlahnya cukup besar di Sumatera Barat. Umumnya daerah agak diluar kota akan berbuat seperti itu. Oleh karena itu persaingan yang sengit dalam memperebutkan anggota antara ketiga organisasi itu kebanyakan terjadi kota-kota saja.

Walaupun demikian, sudah semenjak tahun 1931 pemimpin partai daerah Sumatera Barat meningkatkan kegiatan mereka, terutama dalam memperkuat kesadaran ideologi anggota-anggotanya dan pembentukan atau pendidikan kader partai melalui kursus politik, brosur mengenai partai, majalah dan sebagainya. Terutama kursus politik diberikan secara intensif dan rahasia. Sewaktu pemerintah Hindia Belanda melarang semua kegiatan partai ini di Sumatera Barat justru kursus politik ini tetap dijalankan secara mobil, artinya setiap kali tempatnya berganti, ada yang di tengah sawah ada dalam tegalan, ada yang dipondok-pondok tinggal dan sebagainya dengan keyakinan bahwa saatnya akan tiba untuk berjuang secara terbuka lagi untuk mencapai Indonesia Merdeka.

#### 4. Parindra

Parindra (Partai Indonesia Raya) tidak terasa pengaruhnya di Sumatera Barat. Hal ini mungkin disebabkan karena pusatnya terdapat di Surabaya, dimana kurang banyak dikunjungi oleh perantau Sumatera Barat waktu itu. Walaupun demikian disini akan diuraikan sedikit mengenai sejarah singkat dari Parindra itu.

Permulaan dari Parindra adalah *Indonesische Studie Club Surabaya* yang dipimpin oleh Dr. Sutomo. Setelah kegiatan PNI dilumpuhkan semuanya oleh pemerintah Hindia Belanda, maka *studie club* ini mengembangkan pengaruhnya di kalangan masyarakat dengan mengubah nama menjadi *Persatuan Bangsa Indonesia* (PBI) tahun 1931. Tujuannya untuk menyempurnakan derajat bangsa Indonesia dan Tanah Air. PBI menjalankan taktik koperasi. PBI sering melakukan pendekatan dengan Budi Utomo untuk mengadakan fusi. Tahun 1935 terjadilah fusi antara PBI dengan Budi Utomo yang waktu itu diketuai oleh Wuryaningrat. Fusi menghasilkan "Partai Indonesia Raya"

(Parindra) dengan ketuanya Dr. Sutomo dengan tujuan mencapai Indonesia Raya. Salah seorang anggota Parindra di *Volksraad* adalah: M. Husni Thamrin yang terkenal juga dengan julukan *Abang Betawi*. Tokoh-tokoh Parindra lain yang terkenal adalah Wuryaningrat, Sukarjo Wiryopranoto, Susanto Tirtoprojo S.H., Panji Suroso dan sebagainya.

Mungkin karena sikapnya yang moderat itu Parindra tak berpengaruh di Sumatera Barat yang kebanyakan partai-partainya bersikap non-koperasi dan radikal. Sarekat Sumatera yang di Jakarta akhirnya menggabung dalam Parindra bersama-sama beberapa partai lainnya seperti Sarekat Celebes, Sarekat Ambon, Kaum Betawi, Tirtayasa dan *Timors Verbond*.

## 5. Ca pi.

Setelah Partindo dan PNI-Baru mengalami kehidupan yang menyedihkan akibat pemimpin-pemimpinnya ditangkap dan diasingkan pemerintahan Hindia Belanda, maka tahun 1937 muncul satu partai baru dengan nama *Gerakan Rakyat Indonesia* (Gerindo). Watak Gerindo adalah nasionalistis, marxistis dan taktiknya koperasi.

Kebanyakan pemimpin Partindo dan PNI-Baru bergabung dalam Gerindo, seperti Sartono S.H., Amir Syarifuddin S.H., dr. Adnan Kapau Gani, Wikana, Muhammad Yamin S.H. Tahun 1939 Muhammad Yamin S.H. dipecat dari Gerindo, karena menerima keanggotaan *Volksraad* tanpa persetujuan partai. Muhammad Yamin lalu mendirikan partai baru yang bernama "Partai Persatuan Indonesia" (Parpindo).

Gerindo waktu itu telah melihat bahaya fasisme Jepang dan telah memperingatkan pemerintah Hindia Belanda bahwa musuh utama Asia yang akan datang adalah fasisme Jepang. Oleh karena itu Gerindo menuntut supaya pemimpin-pemimpin Indonesia yang masih ditahan Belanda dilepaskan, karena mereka juga anti fasisme.

Dalam usaha perjuangannya Gerindo berhasil membentuk *Gabungan Politik Indonesia* (GAPI), yang merupakan suatu badan koordinasi dari partai-partai politik dalam menyusun front bersama untuk menghadapi pemerintah Hindia Belanda yang melakukan tekanan berat akibat negeri Belanda diduduki Jerman.

GAPI, sama halnya dengan Partindo kurang begitu tera-

sa di Sumatera Barat, selain melaksanakan jiwa GAPI dengan penggabungan partai-partai politik itu. Dalam hal perkembangan di Jakarta orang Sumatera Barat memang sangat sensitif dan cepat pula menyesuaikan diri.

Walaupun GAPI tidak ada di Sumatera Barat tetapi ide GAPI telah berjalan disana, seperti tuntutan Indonesia berparlemen, karena tahun pendirian GAPI itu di Sumatera Barat telah didirikan oleh Pemerintah Hindia Belanda *Minangkabau Raad* karena tuntutan rakyat Sumatera Barat sudah sangat santer, walaupun *Minangkabau Raad* itu akhirnya hanya merupakan sebuah badan penasehat bagi Residen.

## 6. M i a i

Usaha untuk mempersatukan organisasi-organisasi yang berasaskan Islam sudah dimulai semenjak tahun 1022. Dalam tahun itu diadakan kongres Al Islam di Cirebon atas anjuran PSII, namun belum berhasil karena terjadi sedikit bentrokan pendapat antara Muhammadiyah dengan kaum ortodoks Islam. Setelah kongres Al Islam ke sepuluh di Malang tahun 1933, kongres Al Islam tidak bergerak sampai tahun 1937. 84)

Namun sikap kompromis dan toleransi yang telah berkembang antara sesama organisasi Islam tetap hidup terus dengan subur. Akhirnya atas anjuran Muhammadiyah, Nahdatul Ulama dan PSII pada tanggal 21 September 1937, di Surabaya, lahirlah *Majelis Islam A'laa Indonesia* yang disingkat MIAI, juga terkenal dengan nama *Majelis Luhur Islam*.

Sponsor pendirian MIAI ini adalah K.H. Mansyur dari Muhammadiyah, K.H. Muhammad Dahlan dari Nahdatul Ulama dan W. Wongsoamisena dari PSII. Disepakati bahwa MIAI akan menjadi suatu forum diskusi, suatu badan perwakilan dari organisasi-organisasi Islam dari seluruh Indonesia. Tujuannya ialah mendiskusikan dan memutuskan berbagai masalah penting yang berhubungan dengan masyarakat dan agama Islam. Sangat ditekankan perlunya persatuan kegiatan Muslim Indonesia dan MIAI akan berusaha mencari dasar yang kuat untuk mempersatukan perbedaan pendapat antara kelompok-kelompok Islam.

Nampaknya MIAI diterima dengan tangan terbuka oleh organisasi-organisasi Islam di Indonesia. Waktu berdirinya MIAI baru mempunyai anggota 7 organisasi, tapi tahun 1941, em-

pat tahun sesudah berdirinya, MIAI telah mempunyai 21 anggota organisasi. Tidak satupun organisasi Islam Sumatera Barat yang masuk MIAI. Dari Sumatera yang ikut serta dalam MIAI ialah *Persatuan Ulama Seluruh Aceh* dari Sigli, *Al-Jamiatul Washliyah* dari Medan. 85)

Di Sumatera Barat sikap kerja sama dalam organisasi-organisasi Islam diperlihatkan dalam kegiatan dan aksi tertentu. Pada tahun 1928 pemerintah Hindia Belanda akan menjalankan *Guru Ordonansi* di Sumatera Barat. Rencana itu ditentang oleh seluruh tokoh Islam di Sumatera Barat, baik Ulama-ulama tua, maupun ulama-ulama muda bersatu semua menentang Guru Ordonansi itu. Persatuan itu dipimpin oleh Dr. Haji Abdul Karim Am Amarullah. Mereka mengutus dua orang wakil menemui Gubernur Jenderal untuk meminta supaya Guru Ordonansi itu tidak dijalankan. Salah seorang dari utusan itu adalah Haji Abdul Majid Abdullah dari golongan Ulama tua yang sangat bertentangan paham dengan Dr. Haji Abdulkarim Amarullah. 86) Demikian eratnya persatuan antara golongan Islam di Sumatera Barat dalam menghadapi Guru Ordonansi itu.

Begitu persatuan itu terlihat dalam propaganda Islam sewaktu Haji Rasul ditangkap Belanda, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli menyerang pemerintah Belanda dengan tajam dan keras, sedangkan dia termasuk ulama golongan tua yang berselisih paham dengan ulama kaum muda. Dalam hal ini Syekh Sulaiman Ar-rasuli menegaskan bahwa dalam *khilafiyah* dan *furuk* memang berbeda antara ulama tua dan muda, tetapi mengenai prinsip agama Islam kami tak berbeda. 87)

Kesimpulannya MIAI waktu itu belum sampai masuk ke Sumatera Barat, namun kegiatan seperti yang dilakukan MIAI di Jawa, telah dilakukan di Sumatera Barat.

## 7. Petisi Soetarjo

*Volksraad*, walaupun tidak mempunyai fungsi sebagaimana yang diharapkan sesungguhnya, tetapi banyak sedikitnya ada juga keuntungannya bagi bangsa Indonesia. Selain tempat untuk melampiaskan kritik yang tajam kepada pemerintah Hindia Belanda, *Volksraad* akhirnya merupakan tempat yang baik untuk pembinaan perasaan satu bangsa. *Volksraad*, bagi bangsa Indonesia merupakan perwakilan dari bermacam-macam daerah dan suku bangsa. Bagaimanapun cara pemerintah Hindia Be-

landa memilih anggota-anggota *Volksraad* asal bangsa Indonesia, artinya disengaja supaya banyak yang memihak Belanda; ada yang pro dan ada yang anti Belanda, akhirnya mereka bersatu juga karena sikap pemerintah Hindia Belanda yang sangat kaku dan karena terpengaruh oleh pembicaraan-pembicaraan wakil-wakil Indonesia yang radikal dan Muhammad Yamin, dua orang ahli pidato yang mengemukakan pandangan tanpa merasa takut dan bebas. Karena rasa persatuan satu bangsa itu makin lama makin terbina, maka apalagi yang bersikap radikal akhirnya pembicaraan-pembicaraannya menuju ke arah menuntut Indonesia merdeka.

Demikianlah, tahun 1936 diajukan satu petisi oleh Sutarjo, yang akhirnya terkenal dengan nama Petisi Sutarjo. Isi petisi itu menuntut agar Hindia Belanda (Indonesia) diberi status semacam *Dominion* dalam ikatan dengan negeri Belanda.

Pada tahun 1922, Indonesia, Curacao Suriname dan negeri Belanda disatukan dalam kerajaan Belanda. 88) Secara teoritis hakekat penyatuan ini adalah penyamaan hak antara bangsa Belanda dengan bangsa-bangsa dari negara bagian lainnya. Tetapi prakteknya sama sekali berbeda. Bagi Indonesia masih tetap merupakan negara jajahan tanpa mempunyai hak dalam negerinya sendiri. Oleh karena itu status pernyataan dalam kerajaan Belanda itu menjadi titik tolak untuk berjuang lebih giat lagi melalui forum yang telah ada untuk menuntun Indonesia merdeka, melalui forum yang lebih baik.

Demikianlah Petisi Sutarjo merupakan salah satu usaha untuk menuntut hak yang lebih bagi bangsa Indonesia. Petisi ini antara lain ditandatangani oleh Sutarjo, Ratulangi, Kasimo. Walaupun petisi itu sangat lunak dan tidak sesuai dengan tuntutan Indonesia Merdeka banyak mendapat tantangan dari wakil-wakil Indonesia sendiri, seperti M.H. Thamrin tapi akhirnya disetujui, juga dengan kelebihan suara yang tipis oleh *Volksraad*.

Walaupun bagaimana lunaknya Petisi Sutarjo itu, tetapi pemerintah Belanda tetap menolaknya. Penolakan ini menimbulkan rangsangan yang keras pada bangsa Indonesia, karena dengan tuntutan yang sangat lunak saja pemerintah Belanda tak mau menerimanya. Oleh karena itu perjuangan melalui *Volksraad* makin ditingkatkan.

Pada waktu itu bangsa Belanda tetap merupakan bang-

sa penjajah, suatu negara imperialis dan kapitalis yang tak mau menghiraukan kepentingan rakyat jajahannya. Dalam keadaan terdesak mereka mau memberikan janji yang baik, tetapi kalau sudah keluar dari kesulitannya mereka akan menjalankan sikap penjajahnya kembali.

Bagi Sumatera Barat Petisi Sutarjo ini tidak ada pengaruhnya, karena wakilnya dalam *Volksraad*, Muhammad Yamin, tidak menyetujui petisi tersebut, karena dianggap merupakan langkah mundur dari perjuangan petisi sebelumnya yang jelas-jelas menuntut Indonesia Merdeka.

## 8. Gerakan Indonesia Berparlemen

Tahun 1938 Gabungan Politik Indonesia (GAPI) didirikan yang anggota-anggotanya terdiri dari bermacam-macam organisasi di Indonesia. Pengurus harian GAPI dipimpin oleh sebuah Sekretariat, pada pendirian GAPI Sekretariat dipegang oleh Abikusno oleh PSII, Thamrin dari Parindra dan Amir Syarifuddin dari Gerindo. Tuntutan yang terkenal dari GAPI adalah *Indonesia Berparlemen*.

Karena *Volksraad* tidak memenuhi kehendak rakyat Indonesia, yang oleh H.A. Salim dinamakan *Komidi Omong*, maka GAPI yang merupakan gabungan dari partai-partai politik mengajukan tuntutan supaya Indonesia mempunyai sebuah parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat) yang betul-betul dipilih oleh rakyat secara jujur; *Volksraad* yang ada sekarang ini dibubarkan saja, karena tidak mencerminkan wakil rakyat Indonesia.

Untuk menyatakan tuntutan GAPI itu, maka tahun 1939 diadakan Kongres Rakyat Indonesia di Jakarta. Kongres Rakyat Indonesia ini tidak saja dihadiri oleh partai politik yang berasaskan kebangsaan tetapi juga dihadiri oleh seluruh wakil rakyat Indonesia dari golongan agama, pegawai negeri dan lain-lain.

Karena kongres dihadiri oleh hampir seluruh golongan Indonesia dalam masyarakat, maka nama Kongres Rakyat Indonesia ditukar menjadi *Majelis Rakyat Indonesia* dengan acara: Tuntutan Indonesia berparlemen. Majelis ini dipimpin oleh suatu badan yang bernama Dewan Pimpinan yang terdiri dari unsur-unsur dari:

- GAPI : Abikusno Tjokrosuyoso  
Sartono S.H.  
Sukarjo Wiryopranoto
- MIAI : Wahid Hasyim  
dr. Sukirman
- PUPN<sup>89)</sup> : S u r o s o  
Atik Suardi

Pengurus Hariannya dipimpin oleh :

- Ketua : Sartono S.H.  
Sekretaris : Sukarjo Wiryopranoto  
Bendahara : Atik Suardi.

Tidak banyak yang dapat diperbuat oleh Majelis ini, karena kemudian datanglah pendudukan balatentara Jepang di Indonesia. Untuk menghadapi fasisme Jepang Majelis ini buat sementara bekerjasama dengan pemerintah Hindia Belanda.

Bagaimana hubungan antara tuntutan Indonesia berparlemen di Sumatera Barat? Di Sumatera Barat, Majelis Rakyat Indonesia dengan sendirinya tidak ada, karena badan itu adalah merupakan Majelis perwakilan seluruh rakyat Indonesia, karena itu dengan sendirinya berkedudukan di pusat pemerintahan Hindia Belanda, yaitu di Jakarta. Yang ada di daerah cabang-cabang organisasi yang ikut bergabung dalam GPI, MIAI dan lain-lainnya. Jadi Majelis Rakyat Indonesia bersifat pusat. Walaupun demikian, tidak berarti bahwa keadaan Sumatera Barat adem ayem saja menunggu tuntutan di Jakarta berhasil, melainkan juga melakukan kegiatan yang tidak kalah nilainya dengan tokoh-tokoh di pusat.

Sebelum Jepang menjejakkan kakinya di Sumatera Barat disana telah berdiri suatu badan yang bernama *Komite Rakyat* Pendiri dari Komite Rakyat ini antara lain, adalah Mr. Abu Bakar Jafar, Syarif Usman, Abdullah St. Sinaro, Suska, Ismail Lengah dan Ir. Sukarno dengan bantuan Persatuan Saudagar Indonesia di Padang. Antara lain tujuan dari Komite Rakyat ini adalah memelihara semangat kemerdekaan.

Komite Rakyat mendapat sambutan dari masyarakat Sumatera Barat karena melalui Komite ini mereka dapat menyalurkan rasa kebangsaan dan cita-cita kemerdekaan yang sudah

ditekan pemerintah Hindia-Belanda semenjak tahun 1937. Dengan adanya Komite Rakyat itu bangkit kembali hasrat kebangsaan dan kemerdekaan rakyat Sumatra Barat.

Berbeda dengan keadaan di Jawa di mana para pemimpin nasional ketika itu mengambil sikap koperasi dengan pemerintah Hindia-Belanda untuk menghadapi fasisme Jepang yang jauh lebih berbahaya dari Belanda sendiri, maka tidak demikian halnya dengan Sumatra Barat. Di Sumatra Barat rakyat menolak bekerjasama dengan Belanda untuk menghadapi fasisme Jepang yang sudah sangat mengancam.

Pemerintah Hindia-Belanda hanya galak terhadap rakyat Indonesia yang lemah, tetapi sangat rapuh pertahanannya terhadap serangan Jepang. Karena kekuatan pisik Belanda di Indonesia umumnya, di Sumatra Barat khususnya, tidak berarti sedikit juga untuk menghadapi bala tentara Jepang, maka di Sumatra Barat Belanda mengajak rakyat untuk membumi-hanguskan tempat-tempat vital yang mungkin akan dapat dipergunakan Jepang kalau sudah sampai di Sumatra Barat. Tetapi ajakan ini ditolak oleh rakyat karena mereka tidak mau membumi-hanguskan daerahnya. Apa lagi selama ini pemerintah Belanda sudah sangat banyak mendatangkan kesengsaraan terhadap rakyat Sumatra Barat. Akibatnya Belanda di Sumatra Barat menjadi panik. Kepanikan ini terutama disebabkan karena bala tentara Jepang sudah mendekat juga sedangkan bantuan dari rakyat tak dapat diharapkan, seolah-olah mereka menghadapi dua lawan sekaligus, dari luar bala tentara Jepang dan dari dalam rakyat Sumatra Barat sendiri.

Sikap Belanda yang sangat menyakitkan hati rakyat Sumatra adalah bahwa Belanda mengajak untuk menyerah saja sambil membumi-hanguskan daerah Sumatra Barat. Sebaliknya rakyat Sumatra Barat sendiri, menjawab ajakan kerjasama Belanda itu dengan membentuk sebuah badan yang diorganisasi oleh Khatib Sulaiman, Leon Salim, dan lain-lainnya. Tujuan badan itu adalah untuk mengibarkan Sang Saka Merah Putih di Padang Panjang sebagai satu pernyataan terhadap dunia luar, terhadap Belanda dan terhadap Jepang sendiri, bahwa bangsa Indonesia masih ada di permukaan bumi ini dengan kepribadian dan kekuatannya sendiri. Badan itu dinamakan *Komite menegakkan Merah Putih* Pengibaran bendera Merah Putih itu menyatakan bahwa Belanda boleh bertekuk lutut kepada kekuatan Jepang, tetapi bangsa Indonesia akan tetap berdiri dengan kepribadiannya sendiri.

Padang Panjang dipilih sebagai tempat pengibaran bendera Merah Putih itu tidaklah merupakan kebetulan. Sudah semenjak awal abad XX kota Padang Panjang mempunyai kedudukan yang agak istimewa dalam Sejarah Sumatera Barat. Kebanyakan tokoh pembaruan pendidikan Islam di Sumatera Barat melalui usahanya di Padang Panjang, pemuka-pemuka masyarakat Sumatera Barat waktu itu mengambil Padang Panjang sebagai pusat kegiatannya. Hal ini mungkin disebabkan karena di Padang dan Bukit Tinggi kedudukan Belanda sudah kuat. Karena tokoh-tokoh Islam itu umumnya bersikap non-koperasi dengan pemerintah Hindia-Belanda di Sumatera Barat, maka mereka mengambil tempat di Padang Panjang sebagai pusat kegiatannya. Karena itu Padang Panjang seolah-olah merupakan pusat kegiatan menentang pemerintahan Hindia-Belanda di Sumatera Barat. Kebanyakan tokoh di Padang Panjang adalah dari ulama-ulama muda intelektual. Hal ini tidak berarti bahwa di daerah lain tidak ada kegiatan, hanya Padang Panjang agak menonjol waktu itu.

Sangat disayangkan bahwa kegiatan Komite Menegakkan Merah Putih tidak dapat dilaksanakan karena ada orang yang tidak senang dengan kegiatan Komite itu dan memberitahukannya kepada Belanda. Sebelum bendera Merah Putih dikibarkan, Belanda sudah menangkapi pelopor-pelopornya, termasuk Chatib Sulaiman dan empat orang lainnya terus dibawa ke Bukit Tinggi, selanjutnya dibawa ke Kutacane untuk diadili dengan tuduhan subversi.

Tetapi untunglah sehari sesudah penangkapan yaitu tanggal 13 Maret 1942 bala tentara Jepang sudah memasuki Sumatera Barat dan empat hari kemudian kota-kota penting di Sumatera Barat sudah diduduki oleh Jepang bersama dengan sebuah daerah Sumatera lainnya. Kemudian Jepang membebaskan Chatib Sulaiman dan kawan-kawannya, karena pengaruh Chatib Sulaiman sangat besar di kalangan pemuda Sumatera Barat waktu itu dan hal ini diperlukan Jepang untuk merebut hati rakyat.

Demikianlah keadaan Sumatera Barat pada waktu di Jakarta sedang keras-kerasnya tuntutan Indonesia berparlemen. Apa yang terjadi di Jakarta itu tidak terlepas dari pengamatan tokoh-tokoh politik Sumatera Barat, bahkan selalu diikuti dengan teliti. Hanya situasi di Sumatera Barat waktu itu yang tidak memungkinkan pemimpin-pemimpin Sumatera Barat untuk bergerak, karena ketatnya pengawasan Belanda yang sudah mulai panik melihat kemajuan yang diperoleh Jepang dalam medan Perang Asia.

## D. KEADAAN DI DAERAH SUMATERA BARAT MENJELANG KERUNTUHAN PEMERINTAHAN HINDIA-BELANDA DAN KEDATANGAN TENTARA JEPANG.

### 1. Sikap Pemerintah Hindia-Belanda

Sikap pemerintah Hindia-Belanda di Sumatera Barat tidak banyak bedanya dengan sikap pusat pemerintahan Hindia-Belanda di Batavia (Jakarta). Untuk mengetahui bagaimana sikap itu sebaiknya dilihat gambaran yang secara menyeluruh.

Bangkitnya Jepang sebagai suatu negara fasis militer di Asia (Jerman Nazi dan Italia fasis di Eropah) menggelisahkan seluruh negara di dunia, terutama di Eropah dan di Asia. Dalam hal ini tidak terkecuali pemerintahan Hindia-Belanda di Indonesia. Bukan hanya kaum pergerakan di Indonesia yang merasa sangat gelisah melihat perkembangan fasisme Jepang. Hal ini menyebabkan mereka mengambil sikap kerjasama dengan pemerintah Hindia-Belanda untuk menghadapi Jepang, karena fasisme militer Jepang akan jauh lebih berbahaya dari penjajahan Belanda. Dalam hal ini sikap partai-partai politik di Indonesia sangat tegas menolak bahaya fasisme Jepang yang sedang mengancam dari utara.

Perang Asia Timur Raya yang dilancarkan Jepang dimulai tanggal 8 Desember 1941 dengan pengebomannya Pearl Harbour (Hawaii) Pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Lautan Teduh. Pada tanggal yang sama Gubernur Jenderal Hindia-Belanda yang bernama Jhr. Mr. A.W.L. Tjarda Starkenborgh Stachouwer mengumumkan perang kepada Jepang.

Tetapi ketika Hindia-Belanda kelihatannya tak mungkin dipertahankan, pasukan Sekutu (Amerika, Inggris, Belanda, dan Australia) meninggalkan Indonesia pergi ke Colombo. Singapura yang dibanggakan Inggris waktu itu sebagai suatu benteng yang kuat di Asia menyerah tanggal 15 Pebruari 1942. Kejatuhan Singapura menyebabkan larinya tentara Sekutu ke Kolombo tanggal 25 Januari 1942. Akibatnya di Indonesia hanya tinggal Belanda sendiri menghadapi Jepang. Tanggal 5 Maret 1942 Batavia sudah diduduki Jepang, tanggal 8 Maret 1942 Bandung juga direbut Jepang. Tanggal 9 Maret 1942 Gubernur Jenderal Hindia-Belanda, Tjarda bersama anggota-anggota Sekutu lainnya menyerah tanpa syarat pada bala tentara Jepang. Penyerahan ini berarti seluruh daerah Hindia-Belanda berada di bawah kekuasaan bala tentara pendudukan Jepang dan berakhirilah riwayat penjajahan Belanda di

Indonesia.

Daerah Sumatera Barat juga tidak terlepas dari kaitan ini. Tanggal 13 Maret 1942 bala tentara Jepang masuk ke sana dan empat hari kemudian seluruh Sumatera Barat sudah berada di bawah pengawasannya. Dari keterangan di atas terlihat betapa rapuhnya pertahanan pemerintah Hindia-Belanda. Kekuatan serdadunya hanya mampu menghadapi rakyat yang tidak bersenjata api. Karena itu sewaktu Jepang akan mendarat Belanda sangat panik.

Di Sumatera Barat kepanikan itu terlihat dengan berbunyi sirene tanda bahaya tiap waktu. Pada setiap rumah disuruh membuat lubang perlindungan. Kepanikan Belanda itu berakibat buruk terhadap rakyat Sumatera Barat, karena sedikit saja gerak-gerik rakyat yang mencurigakan sudah dilakukan penangkapan dan dikirim ke luar daerah. Banyak pemuda masyarakat Sumatera Barat yang hilang demikian saja waktu itu, tetapi untunglah kedatangan Jepang menolong mereka.

## 2. Keadaan masyarakat

Secara ekonomis hanya sebagian kecil masyarakat Sumatera Barat yang baik penghidupannya yaitu terbatas pada orang-orang yang bekerja pada pemerintah Belanda atau orang-orang yang membantu Belanda. Sedangkan secara umum kehidupan masyarakat sangat tertekan, karena mereka hanya hidup sekedar dapat menyambung nafas saja, sedangkan untuk segi kehidupan lainnya mereka tak sanggup lagi melakukannya.

Kehidupan sosial budaya Sumatera Barat berjalan seperti biasa, di mana kekuatan hukum adat mengatur penghidupan masyarakat. Hanya saja beberapa orang pemangku adat di Sumatera Barat terbuka arus politik *divide et impera* atau politik pecah-belah Belanda, sehingga mereka ikut menambah andil untuk menambah kesengsaraan rakyat. Tetapi secara keseluruhan keadaan yang demikian itu tidak sampai merusak struktur adat dan sistem adat Minangkabau sendiri. Karena hanya kulitnya yang dapat disentuh Belanda, sedangkan isinya tetap kuat mengatur segi kehidupan masyarakat. Di situlah letak keistimewaan adat Minangkabau itu, yaitu daya kemampuannya menyesuaikan diri dengan situasi yang sedang dihadapi sangat kuat. Kalau pengaruh itu datang sangat kuat, maka ia akan bertahan yang akan memperlihatkannya seperti statis, tertutup, tetapi lambat-laun unsur yang datang itu

akan diserapnya hingga akhirnya tenggelam dalam kehidupan adat itu sendiri. Itulah yang menyebabkan adat Minangkabau yang telah hidup selama beberapa abad dapat bertahan sampai sekarang, dengan mengalami sedikit erosi zaman pada kulitnya sedangkan prinsipnya tetap seperti sediakala, sesuai dengan pepatah: tak lekang karena panas, tak lapuk karena hujan.

Apabila dilihat sepintas lalu, yaitu dalam keadaan masyarakat aman dan damai, maka tak kelihatan kekuatan adat itu sama sekali dan akan berjalan seperti kehidupan biasa. Tetapi apabila ada sesuatu unsur yang datang dari luar menyentuhnya otomatis adat itu akan mengadakan reaksi spontan dan dengan sifatnya yang dinamis dalam ketenangan adat itu akan menyerap unsur yang baru tadi sampai lenyap dan lebur dalam kehidupan adat itu sendiri, sampai kelihatan seperti kehidupan biasa lagi.

Dilihat dari segi pendidikan, keadaan masyarakat Sumatera Barat terbagi atas dua golongan besar berdasarkan, alumninya, yaitu masyarakat intelektual Barat dan masyarakat intelektual Islam. Intelektual Barat adalah mereka yang telah menamatkan sekolah Gubernemen baik di daerah maupun di pusat atau di luar negeri yang memperoleh kebudayaan Barat sebagai dasar pengetahuannya. Sedangkan kaum intelektual agama adalah golongan masyarakat yang menamatkan sekolahnya dari Lembaga Pendidikan Islam di Sumatera Barat atau di pusat atau di luar negeri yang memperoleh agama Islam sebagai dasar ilmu pengetahuannya.

Jumlah antara kedua golongan ini sangat berbeda, yaitu jumlah intelektual agama lebih besar dari jumlah intelektual Barat, intelektual Barat hanya terbatas di kota-kota, sedang intelektual agama menyebar di seluruh Sumatera Barat, termasuk di kota-kota sendiri.

Dilihat dari segi kehidupan antara kedua golongan ini, maka terlihat perbedaan yang menyolok. Golongan intelektual Barat, karena agak dimanjakan oleh Belanda dan kebanyakan bekerja pada Belanda maka penghasilannya agak lebih dari golongan intelektual agama. Karena itu statusnya dalam masyarakat kelihatan agak lebih baik, kekurangannya ialah sebagian besar golongan ini menderita batinnya, karena mereka hanya mendapat kehormatan semu saja, sedangkan kebahagiaan hidup sebenarnya hanya berada pada orang Belanda. Di samping itu mereka agak renggang dengan rakyat kebanyakan.

Golongan intelektual agama adalah sebaliknya, kehidupan

mereka agak susah dibandingkan dengan intelektual Barat karena penghasilan mereka rata-rata lebih rendah dan kebanyakan bekerja di bidang swasta, artinya tidak mau bekerja dengan Belanda. Tetapi mereka memiliki ketenteraman hidup yang lebih baik dari golongan intelektual Barat. Kelebihan mereka adalah justru dari mereka inilah timbulnya inisiatif untuk memperbaiki kehidupan masyarakat dan mereka adalah orang-orang yang militan dalam memperjuangkan cita-citanya dan tidak mudah putus asa. Karena itu pengaruhnya jauh lebih besar di kalangan masyarakat dari golongan intelektual Barat dan merekalah tumpuan harapan rakyat dalam memperjuangkan perbaikan hidup. Dari golongan inilah munculnya pemimpin-pemimpin masyarakat Sumatera Barat.

Kecuali intelektual Barat yang telah sadar dan memahami rasa kebangsaan yang kuat yang kebanyakan memilih Jakarta sebagai tempat kegiatannya, maka biasanya intelektual agama dianggap lawan oleh intelektual Barat, karena mereka menganggap bahwa kedudukan mereka ikut diserang oleh intelektual agama dalam menjalankan cita-citanya memperbaiki nasib rakyat. Di antara intelektual Barat ini ada yang cara hidupnya lebih Barat dari orang Belanda sendiri.

Perbedaan ini disebabkan oleh karena latar belakang pendidikan masing-masing. Mulai hilang perbedaan itu secara nyata ialah ketika bala-tentara Jepang sudah memasuki Sumatera Barat, bahkan di antara mereka kelihatan persatuan yang kuat dalam usahanya melawan arus tekanan Jepang yang deras. Demikian eratnya hingga sukar ditentukan mana intelektual Barat dan agama.

Kehidupan agama memang secara keseluruhan Sumatera Barat menganut agama Islam dan penghidupan mereka sangat dipengaruhi oleh aturan-aturan dalam agama Islam. Hal ini tidak berarti bahwa agama lain tidak ada di Sumatera Barat, karena agama Kristen telah ada semenjak orang Belanda dan orang asing lainnya masuk ke Sumatera Barat. Di samping itu juga terlihat agama yang dianut oleh orang Cina. Tapi mereka ini terbatas di kota-kota saja dan pengaruhnya belum begitu besar, hanya meliputi sebagian kecil dari masyarakat. Demikian keadaan masyarakat Sumatera Barat pada umumnya sebelum Jepang masuk.

### **3. Sikap masyarakat terhadap pemerintah Hindia-Belanda**

Sikap masyarakat Sumatera Barat terhadap pemerintah Hin-

dia-Belanda sebelum Jepang masuk pada umumnya bersifat anti Belanda. Seperti telah dikatakan berulang-ulang kali sebelumnya bahwa penderitaan hidup yang diderita rakyat Sumatera Barat disebabkan oleh tindakan pemerintah Hindia Belanda dalam mengurus kekayaan alamnya. Penderitaan ini menimbulkan rasa benci yang sangat dalam. Di samping itu karena pemerintah Belanda dianggap sebagai pemerintahan kaum kafir, hal ini menambah rasa antipati masyarakat terhadap Belanda.

Demikianlah untuk sama-sama menghadapi Jepang, rakyat Sumatera Barat menolak ajakan kerjasama itu. Bahkan masyarakat Sumatera Barat merasa bersyukur kalau pemerintah Hindia-Belanda dapat diusir oleh Jepang dari daerahnya.

#### **4. Keadaan pemerintah Hindia Belanda di Sumatera Barat pada saat terakhir**

Menjelang Jepang akan masuk daerah Sumatera Barat, banyak daerah lain di Indonesia telah diduduki Jepang. Tanggal 10 Januari 1942 daerah Tarakan, Minahasa, Sulawesi, Timor, Balikpapan, dan Ambon sudah diduduki Jepang. Bulan Pebruari 1942 menyusul Pontianak, Makasar, Banjarmasin, Palembang, dan Bali diduduki bala-tentara Jepang. Tanggal 1 Maret 1942 Jepang mulai menyerang Jawa dan berturut-turut Banten, Indramayu, Juana, Kranggan (antara Rembang – Tuban) diduduki Jepang. Kemudian 5 Maret 1942 Jakarta mendapat giliran dan tanggal 8 Maret 1942 Bandung dikuasai Jepang.

Dengan telah dikelilinginya daerah Sumatra Barat oleh bala tentara Jepang, maka pemerintah Belanda yang ada di Sumatera Barat sangat panik. Kepanikan itu bertambah lagi karena banyak di antara pejabat tinggi mereka yang telah lari mencari selamat sendiri tanpa memperdulikan mereka (Belanda) yang tinggal. Di waktu itu orang-orang Belanda yang masih tinggal di Sumatera Barat kebanyakan tinggal dalam rumah atau di tangsi militer, yang kelihatan mondar-mandir hanya polisi militer Belanda, bahkan masih sempat melakukan penangkapan.

Demikian keadaan pemerintahan Hindia-Belanda di Sumatera Barat menjelang tanggal 13 Maret 1942, di saat bala tentara Jepang memasuki Sumatera Barat dan pemerintahan yang panik itu hanya dapat berbuat dengan menyerah bulat-bulat pada Jepang dan tanggal 17 Maret 1942 seluruh Sumatera Barat telah diduduki tentara Jepang.

## E. KEDATANGAN PASUKAN PENDUDUKAN JEPANG

### 1. Propaganda Jepang yang terasa di Sumatera Barat

Beberapa tahun sebelum Bala tentara Jepang menduduki daerah Sumatra Barat (17 Maret 1942) propaganda Jepang telah mulai menjalar ke seluruh daerah Indonesia. Tahap pertama yang dijalankan oleh Jepang untuk menarik simpati penduduk Hindia-Belanda adalah memasukkan berita-berita propaganda melalui penerbit-penerbit Indonesia dan Cina. Jepang berusaha memperbesar kontrak advertensi dengan harian-harian yang mau menerima materi propaganda Jepang itu. Bahkan diusahakan menerbitkan sebuah harian berbahasa Indonesia (Melayu) yang dibiayai Jepang dan akan memuat berita propaganda Jepang. Harian itu akan disebar-luaskan di kalangan penduduk asli Hindia-Belanda.

Di samping itu mahasiswa dan pelajar-pelajar Indonesia didorong untuk belajar ke Jepang. Kepada mereka ini dipompakan propaganda Jepang dalam gerakan Pan-Asia yang sedang dilakukan Jepang. Mahasiswa-mahasiswa dan pelajar itulah yang diharapkan Jepang untuk dapat membantunya dalam gerakan Pan-Asia itu setelah mereka kembali ke Indonesia.

Di samping itu karena Jepang sangat memahami bahwa Islam merupakan agama yang dianut di Indonesia, maka ada pula kelompok khusus di Jepang yang mulai melancarkan propaganda tentang Islam ini, bahwa Jepang akan menyelamatkan agama Islam. <sup>90)</sup> Dalam propaganda itu sesungguhnya Jepang memperlihatkan simpatinya yang besar terhadap agama Islam dan sikap ini akan banyak membantu Jepang sewaktu mereka mulai menduduki daerah Indonesia.

Dalam gerakan Jepang menuju Pan-Asia ini suatu hal yang sangat menguntungkan Jepang adalah peristiwa kemenangan Jepang terhadap Rusia dalam perang tahun 1904-1905. Semenjak itu Jepang oleh banyak negara Asia secara diam-diam telah diakui sebagai pemimpin mereka yang mempunyai suatu kekuatan yang besar dan menaikkan derajat bangsa Asia terhadap pandangan orang Barat. Kekuatan Jepang itu yang akan memimpin Asia terhadap imperialisme Barat di Asia. Hal ini juga berpengaruh terhadap penduduk Indonesia waktu itu.

Namun ide propaganda Jepang yang dilancarkan di Indonesia sebelum mereka datang, yaitu "Lingkungan Kemakmuran bersama Asia Timur Raya", tidak dapat mengelabui dan mempengaruhi pe-

mimpin-pemimpin pergerakan nasional Indonesia, karena mereka sendiri telah menyadari secara mendalam bahaya fasis militer Jepang. Hal ini telah terbukti dengan Manchukuo, Cina, dan Indo Cina yang telah diduduki bala tentara Jepang sebelumnya. Kenyataan di sana adalah Jepang merampas kemerdekaan dan kebebasan hidup rakyat. Ide propaganda Asia Timur Raya hanya sekedar untuk menutupi keadaan yang sebenarnya, dengan tujuan menarik simpati rakyat saja. Karena itu mereka memilih sikap koperasi dengan pemerintah Hindia-Belanda untuk menghadapi Jepang. Akibat yang akan ditimbulkan agresi Jepang jauh lebih berbahaya dari penjajahan Belanda sendiri.

Keadaan di Sumatera Barat sendiri waktu itu seperti ayam kehilangan induk. Semenjak tahun 1934 pemerintah Belanda mulai melakukan penangkapan terhadap pemimpin-pemimpin Sumatera Barat, ada yang dipenjarakan di Sumatera Barat sendiri, tetapi kebanyakan di luar Sumatera Barat, seperti di Jawa dan di Digul. Boleh dikatakan sebelum Jepang masuk, Sumatera Barat telah kehilangan sebagian besar pemimpinnya, sedangkan yang tinggal tidak pula dapat berbuat banyak karena diawasi pemerintah Belanda dengan sangat ketat, sedikit saja bergerak sudah ditangkap.

Dalam keadaan Sumatera Barat kekosongan pemimpin ini, kaki-tangan atau mata-mata Jepang berkeliaran di Sumatera Barat melakukan propaganda dengan jalan berbisik-bisik, dari mulut ke mulut tentang perubahan besar yang akan terjadi di daerah Sumatra Barat dan di seluruh daerah Indonesia umumnya. Perubahan itu ialah Jepang akan datang membantu rakyat dan pemerintah Hindia-Belanda akan diusir dari Indonesia. Jepang akan menolong bangsa Indonesia bangkit dari penindasan Belanda yang sudah sangat lama. Bangsa Indonesia dan bangsa Jepang adalah sama-sama orang Asia, karena itu harus bersatu mengusir bangsa kulit putih dari Asia ini.

Melalui propaganda dari mulut ke mulut ini, maka berkembanglah isu di tengah masyarakat Sumatera Barat Ada yang menyatakan bahwa setelah Jepang masuk, Indonesia akan merdeka, barang-barang akan murah dan terbeli oleh seluruh rakyat, kehidupan tidak akan melarat lagi dan sebagainya. Dalam hal ini memang terlihat buktinya, bahwa semenjak tahun 1940 Jepang telah membanjiri pasaran Indonesia dengan barang industri yang murah harganya.<sup>91)</sup> Barang industri Jepang itu dapat terbeli oleh rakyat

jelata. Keadaan yang beginilah yang dipergunakan mata-mata Jepang itu sebagai bahan propaganda mereka.

Akibat propaganda yang demikian, di samping menimbulkan respek yang baik di kalangan rakyat, tetapi ada juga akibat negatifnya. Pasar Gadang yang terdapat di kaki Gunung Padang di Padang, merupakan urat nadi perdagangan waktu di Sumatera Barat.<sup>92)</sup> Barang-barang dagangannya terutama adalah batik dan sarung serta bahan tekstil lainnya. Sewaktu pedagang-pedagang ini mendengar itu masyarakat yang sangat santer bahwa bahan tekstil dari Jepang akan membanjiri pasaran di Sumatera Barat, mereka buru-buru melepas persediaan barang mereka yang ada dengan menjual murah dari harga yang sesungguhnya. Tentu saja dengan pengharapan bahwa sewaktu bahan tekstil Jepang masuk mereka akan dapat menguasai sebagian besar barang-barang itu. Tetapi kenyataannya, setelah Jepang masuk ternyata barang-barang tekstil menghilang di pasaran Sumatera Barat, sedangkan jual-beli tidak lagi berlangsung di toko-toko, melainkan melalui makelar-makelar yang waktu itu disebut "mendengar kilat." Dengan demikian banyak di antara pedagang-pedagang Pasar Gadang itu yang jatuh bangkrut di samping munculnya saudagar-saudagar kilat yang kilat yang tidak mempunyai toko tertentu.

Jadi propaganda Jepang di daerah Sumatera Barat membawa bermacam-macam akibat. Rakyat jelata memang terpengaruh oleh propaganda itu karena berkembang dengan cepat dari mulut ke mulut. Para pedagang banyak yang bangkrut. Tetapi pemimpin-pemimpin masyarakat yang sangat awas tidak terpengaruh sama sekali dan merekalah yang mencoba meluruskan isu yang tersebar luas itu.

## **2. Waktu kedatangan Pasukan Jepang**

Pada tanggal 17 Maret 1942 bala tentara Jepang telah menduduki Bukit Tinggi dan Padang tanpa mendapat perlawanan dari pihak Belanda. Bahkan Belanda sibuk dengan gerakan mundur dengan membawa apa saja yang dapat dibawa. Bukannya mereka berusaha mempertahankan harta milik dan kekuasaan mereka yang telah tertanam sangat lama, melainkan lari lintang-pukang dengan sangat ketakutan. Mereka lari ke Kutacane di Aceh Selatan. Dalam usaha lari itu Belanda membawa serta beberapa orang tawanan politik seperti Chatib Sulaiman dan lain-lainnya untuk menjaga keselamatan di perjalanan dari gangguan rakyat. Chatib Sulaiman

waktu itu mempunyai pengaruh yang besar terhadap rakyat Sumatera Barat, terutama golongan pemuda. Belanda juga sudah mencium bahwa ada usaha ke arah itu yang berpusat di Padang Panjang, tetapi karena Chatib Sulaiman termasuk ke dalamnya, mereka dapat lari dengan aman.

Larinya Belanda ke Kutacane dengan serba tergesa-gesa dan dalam keadaan panik, menjatuhkan harga diri dan martabat mereka dalam pandangan rakyat. Belanda yang mereka lihat sebagai makhluk-makhluk yang sangat sombong, pongah, angkuh, congkak selama mereka berkuasa rupanya tidak lebih dari satu gerombolan yang melarikan diri dalam keadaan terdesak, satu gerombolan manusia yang tak punya harga diri sama sekali.

Keadaan Sumatera Barat waktu itu betul-betul tidak mempunyai pemerintahan, karena sebelum Jepang masuk Belanda sudah mulai meninggalkan Sumatera Barat. Dapat dibayangkan bahwa kekacauan terjadi di mana-mana karena polisi penjaga keamanan selama ini sudah tidak terlihat lagi puncak hidungnya. Kekacauan ini tambah meningkat sewaktu Jepang telah memasuki Sumatera Barat. Rakyat dari desa-desa datang ke kota dengan berbondong-bondong dan mereka tidak dapat dikuasai dan dikendalikan lagi setelah melihat penjagaan sama sekali tidak ada lagi. Kalaupun ada tidak berbuat apa-apa karena belum melakukan searah terima dengan Jepang.

Dalam keadaan yang demikian itulah rakyat melampiaskan rasa benci mereka selama ini yang sudah menumpuk dan terpaksa ditahan, meledak menjadi gerakan balas dendam kepada Belanda. Tempat-tempat yang dikenal sebagai tempat tinggal Belanda selama ini digedor dan dirampas. Pembunuhan tak dapat dielakkan. Gerakan balas dendam terjadi di mana-mana terhadap Belanda.

Masyarakat Cina yang selama ini seolah-olah diberi hati oleh Belanda menjadi tumpuan balas dendam rakyat. Daerah Kampung Cina pada setiap kota di Sumatera Barat yang merupakan pusat tempat tinggal dan pusat perdagangan menjadi sasaran karena jumlah Belanda tidak begitu banyak lagi yang ditemui. Toko-toko Cina itu dirampok dan dirusak, kalau perlu dilakukan pembunuhan. Di waktu inilah dikenal istilah Cina mengamuk dalam usaha mereka mempertahankan diri mereka melakukan balas dendam terhadap rakyat. Untunglah hal ini tidak lama berlangsung karena pemimpin-pemimpin rakyat ikut turun tangan mengamankannya dan mengarahkan gerakan rakyat yang sedang marah itu.

### 3. Sikap Jepang terhadap aparatur pemerintahan Hindia-Belanda

Jepang datang ke Indonesia dengan tujuan yang jelas, yaitu melenyapkan seluruh pengaruh Belanda secepat mungkin dari Indonesia, penghapusan semua pengaruh Belanda dan pengaruh Barat di bidang politik, ekonomi, dan bidang kebudayaan. Tujuan ini merupakan tujuan yang fundamental dari rencana Kemakmuran Bersama Asia.

Untuk melihat bagaimana sikap Jepang terhadap aparatur pemerintahan Belanda di Sumatera Barat, sebaiknya diketahui lebih dahulu sikap Jepang terhadap Sumatera, secara keseluruhan dalam rangka membagi seluruh Indonesia di bawah kekuasaan bala tentara Jepang.

Pada masa kekuasaan Jepang, Indonesia dipegang oleh pemerintahan militer. Daerah kekuasaannya adalah seluruh daerah kekuasaan Hindia Belanda dulu.

Indonesia dibagi menjadi tiga wilayah yaitu:

- a. *Jawa dan Madura* dengan pusat Jakarta, di bawah kekuasaan Angkatan Darat (*Rikugun*).
- b. *Sumatra* dengan pusat Bukittinggi (kemudian digabung dengan Singapura yang waktu itu bernama Shonanto) di bawah kekuasaan Angkatan Darat (*Rikugun*).
- c. *Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Irian* dengan pusat Makasar berada di bawah pimpinan Angkatan Laut (*Kaigun*).

Semua bagian wilayah militer ini berada di bawah Komando Panglima Besar untuk Asia Tenggara (Nanpoo Gun) yang berkedudukan di Saigon. Dari Saigon inilah baru boleh langsung ke Tokyo. Dalam dokumen nomor 44 April 1942 dinyatakan bahwa peraturan administrasi pemerintahan akan ditingkatkan di Sumatera. Daerah Sumatera dimasukkan ke dalam rencana daerah Kerajaan Jepang di bagian selatan. Maka semua aspek seperti masalah-masalah militer, komunikasi, ekonomi dan hubungan luar negeri akan dituntun dan dikontrol secara keras.<sup>93)</sup>

Oleh karena itu di daerah Sumatera Barat sebagai bagian dari Sumatera, pengaruh dan kekuatan Belanda harus segera dibasmi secepat mungkin, lebih-lebih dalam rangka *Japanisasi* dan integrasi rakyat Sumatera Barat terhadap Jepang dalam memenangkan Perang Asia Timur Raya. Tetapi rencana Jepang terhadap Sumatera Barat ini tidak dapat dilaksanakan secara keseluruhan-

nya dalam waktu yang singkat. Hal ini disebabkan karena tenaga administratif Jepang tak jadi sampai ke Indonesia. Dalam keadaan perang, maka orang-orang Jepang pertama yang datang ke Sumatera Barat adalah orang militer yang tidak mempunyai ilmu dan pengalaman di lapangan pemerintahan. Tenaga ahli pemerintahan yang didatangkan kemudian tidak pernah sampai ke Indonesia karena kapalnya ditenggelamkan oleh torpedo Sekutu.<sup>94)</sup> Sedangkan kepada bala tentara yang sudah ada itu diharuskan secepat mungkin untuk menegakkan ketertiban dan keamanan umum. Jadi hanya sedikit di antara mereka yang dapat dipergunakan untuk mengatur roda pemerintahan di Sumatera Barat, itu pun terdiri dari orang-orang yang belum berpengalaman di bidang pemerintahan. Oleh karena itu supaya roda pemerintahan tidak sampai macet, maka dipergunakanlah orang Sumatera Barat dengan kantor-kantor yang sama juga dengan pola pemerintahan yang lama dengan syarat tidak melanggar kepentingan Jepang. Kadang-kadang mereka mempergunakan tenaga Belanda yang dikeluarkan dari tahanan untuk ikut membantu secara paksa.

Jadi dalam awal kekuasaannya bala tentara pendudukan Jepang di Sumatera Barat terpaksa mempergunakan orang Sumatera Barat yang telah duduk juga dalam administrasi pemerintahan Belanda dengan pola pemerintahan yang dipergunakan Belanda juga. Dalam hal ini kelihatan bahwa Jepang tidak dapat mengatur sistem pemerintahan seperti yang diharapkannya karena tidak adanya tenaga ahli. Dapat dibayangkan bahwa tidak baiknya pemerintahan di Sumatera Barat, karena umumnya orang bekerja di bawah ancaman senjata. Tetapi kalau senjata tidak ada, artinya pengawasan Jepang lengah, para pegawai itu akan mengambil kesempatan yang menguntungkan dirinya-sendiri atau kepentingan daerahnya sendiri, tidak untuk kepentingan Jepang. Jadi niat semula Jepang tidak dapat dilaksanakan.

Demikian juga dengan struktur pemerintahan, Jepang juga terpaksa mengikuti sistem administrasi pemerintah Hindia Belanda, hanya nama-nama semuanya diganti dengan nama Jepang. Semua posisi penting dalam pemerintahan dipegang oleh orang Jepang.

Keresidenan Sumatera Barat yang bernama *Sumatera West-kust* diganti dengan nama *Sumatera Neishi Kaigun Shu*. Kepalaanya dari residen ditukar jadi *Shu-Cho. Afdeeling* yang dikepalai oleh Asisten Residen diganti dengan nama *Bun* (Luhak) yang dikepalai

oleh *Bun Shu-Cho*. *Onder-Afdeeling* yang dikepalai oleh kontrolur menjadi *Fuku Bun Cho*. Distrik yang dikepalai Demang dirubah menjadi *Gun* dan dikepalai oleh *Gun Cho*. *Onder District* yang dikepalai oleh Asisten Demang diganti dengan *Fuku Gun* (kecamatan) yang dikepalai oleh *Fuku-gun Cho*. Unit pemerintahan terkecil Nagari tetap seperti dulu juga tetapi dikepalai oleh seorang Kepala Nagari, bukan penghulu kepala.

Jabatan *Shu-Cho*, *Bun shu-Cho*, *Fuku-bun Cho* dipegang langsung oleh orang Jepang, sedangkan jabatan di bawahnya diberikan kepada orang Sumatera Barat. Semua kedudukan penting dalam pemerintahan militer dipegang oleh orang Jepang, baik yang berasal dari Jepang sendiri, maupun yang dari Korea atau Formosa (Taiwan). Orang Belanda yang masih dipakai hanya buat sementara waktu dan hanya untuk jabatan yang kurang penting.

Setelah pemerintahan Jepang berjalan, ternyata memang orang Belanda itu tak dapat dipertahankan lebih lama lagi, karena akan merusak hubungan Jepang dengan rakyat Sumatera Barat. Bagi Jepang sendiri keterlambatan menghabiskan sisa pengaruh Belanda berarti makin lambat rencana Japanisasi di Sumatera Barat. Oleh karena itu sisa-sisa orang Belanda mesti segera diganti dan jalan satu-satunya adalah mengganti mereka dengan orang Sumatera Barat sendiri. Hal ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi orang Sumatera Barat, karena mereka mengetahui seluk-beluk pemerintahan yang lebih tinggi yang selama ini belum mereka pegang. Hal ini akan menguntungkan nanti setelah Jepang kalah perang.

Pada tahun 1943 baru pegawai-pegawai sipil Jepang yang dimiliterisasi sampai ke Indonesia dan disebar ke seluruh daerah untuk menduduki pos-pos penting dalam pemerintahan, demikian juga di Sumatera Barat. Setiap jabatan penting harus ada orang Jepang yang mendapinginya, apakah dia sebagai kepala atau wakil atau pengawas saja, tetapi walaupun Jepang itu rendah pangkatnya, kekuasaan riil berada di tangan mereka. Akhirnya sampai dengan jabatan Asisten Residen dengan cara demikian dapat dipegang oleh orang-orang Sumatera Barat.

Jadi kelihatan Jepang sama saja dengan Belanda, yaitu seluruh kekuasaan berada di tangan mereka, walaupun formalnya orang Sumatera Barat ada yang sudah menjadi Wakil Kepala Daerah, tapi hanya sebagai topeng dalam rangka mengambil hati rakyat.

#### 4. Sikap Jepang terhadap Bangsa Indonesia

Sebagai suatu bangsa yang telah berpengalaman dalam menduduki beberapa negara di Asia, Jepang memperlihatkan sikap yang sistematis terhadap Bangsa Indonesia pada umumnya dan Sumatera Barat untuk di Jepangkan. Sikap ini diperoleh Jepang melalui hasil studi tentang politik, ekonomi, sosial, kebudayaan Indonesia yang telah dilakukan orang Jepang jauh sebelum mereka masuk wilayah Indonesia.

Pertama kali menjejakkan kakinya di Sumatera Barat, Jepang memperlihatkan rasa simpati dan rasa bersaudara terhadap rakyat Sumatera Barat terutama tentang cita-cita kemerdekaan. Boleh dikatakan segala-galanya dapat diperbuat oleh rakyat termasuk tokoh-tokoh politik yang telah dibebaskan semuanya. Rakyat gembira menyambut hal ini dan mereka menikmatinya sepuas-puasnya. Selama ini belum pernah mereka merasakan nikmatnya memiliki kebebasan bergerak. Bendera Merah Putih boleh dikibarkan di samping bendera *Hinomaru*, rakyat boleh menyanyikan Lagu Indonesia Raya di samping lagu *Kimigayo*. Komite Rakyat yang telah dibekukan Belanda dulu boleh bergerak kembali. Pada waktu ini Jepang betul-betul menempatkan dirinya sebagai bangsa yang seketurunan dan satu rasa dengan bangsa Indonesia. Tetapi kebebasan itu hanya dapat dinikmati kira-kira tiga bulan oleh rakyat Sumatera Barat.

Setelah Jepang mulai dapat mempelajari situasi dan kondisi Sumatera Barat dan sesudah roda pemerintahan agak jalan, mulailah Jepang melakukan kekerasan dalam menjalankan keamanannya di Sumatera Barat. Jepang mulai bersikap seperti sebuah negara militer imperialis. Udara kebebasan yang mulai hidup di tengah masyarakat mulai dikurangi dan ditekan. Pengibaran Bendera Merah Putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya mulai dilarang. Komite Rakyat yang baru dibuka kembali, dibubarkan Jepang cepat-cepat. Partai-partai politik dan organisasi-organisasi yang bersifat nasional dinyatakan dilarang. Perguruan Taman Siswa yang telah dikenal sebagai lembaga pendidikan yang berdasarkan kebangsaan dan kebudayaan bangsa Indonesia, dipaksa menukar nama menjadi *Taman Nippon Raya*. Segala kegiatan rapat, penerbitan dan mendengar radio luar negeri dilarang, organisasi atau perkumpulan yang non-politik pun dilarang Jepang. Pelanggaran terhadap salah satu peraturan itu menyebabkan orang akan berhubungan dengan siksaan *Kempetai* Jepang (polisi militer

Jepang)

Sikap Jepang terhadap pemimpin-pemimpin masyarakat Sumatera Barat telah dilukiskan oleh H.J. Benda dalam dokumen Nomor 47, 27 April 1942.<sup>95)</sup> Jepang sangat menyadari bahwa pengakuan terhadap sumber kekuatan politik di Sumatera Barat perlu dilakukan. Tokoh pergerakan nasional Sumatera Barat perlu dirangkul. Tokoh politik serta sumber kekuatan lain dalam masyarakat perlu dipergunakan untuk mencapai tujuan Jepang, yaitu men-Jepangkan orang Sumatera Barat. Melalui Moh. Syafei, Chatib Sulaiman, dan lain-lain tokoh pemimpin masyarakat Sumatera Barat, Jepang berusaha menghapuskan pengaruh Barat yang buruk serta menanamkan rasa benci rakyat terhadap segala sesuatu yang berbau kebudayaan Barat. Slogan yang sengaja dibuat Jepang untuk rakyat Sumatera Barat seperti "Inggeris dilinggis", "Amerika diseterika", "Belanda kurang-ajar", merupakan usaha Jepang untuk menanamkan rasa kebencian rakyat terhadap pengaruh Barat itu di Sumatra Barat.

Terhadap kelompok Islam, Jepang memperlihatkan sikap yang berbeda kalau dibandingkan dengan sikapnya terhadap kaum nasionalisme. Jepang mengetahui bahwa Islam merupakan agama yang dianut oleh hampir seluruh penduduk Sumatera Barat dan mempunyai pengaruh yang menentukan dalam kehidupan masyarakat. Jepang mengetahui bahwa perlawanan yang gigih terhadap pemerintah Belanda dilakukan oleh kaum agama ini. Oleh karena itu Jepang melihat bahwa agama Islam merupakan alat yang sangat baik untuk menanamkan pengaruhnya di tengah masyarakat Sumatera Barat. Oleh karena itu Jepang bersikap toleran terhadap organisasi-organisasi Islam seperti Muhammadiyah, Perti dan lain-lain. Ulama-ulama Islam dirangkulnya supaya mau bekerjasama dengan Jepang. Sekolah agama seperti sekolah-sekolah Muhammadiyah dan Perti dibiarkan terus melaksanakan pendidikannya. Madrasah atau surau yang sangat banyak terdapat di Sumatera Barat yang kelangsungan hidupnya sangat tergantung pada ulama pemimpinnya, dibiarkan terus melakukan segala kegiatan pendidikan dan pengajian agamanya. Bahkan karena toleransi Jepang inilah, berdirinya satu badan yang bernama "Majelis Tinggi Islam Minangkabau" yang diketuai oleh Syekh Jamil Jambek dengan Sekretaris Haji Mansur Daut dan Datuk Panglimo Kayo tetap berjalan.

Kesimpulan Jepang bersikap sangat lunak terhadap keperca-

yaan, agama dan kebiasaan hidup orang Sumatera Barat dengan harapan bahwa melalui semuanya itu Jepang sendiri berusaha mempergunakannya sebagai alat untuk menjadikan rakyat Sumatera Barat seperti orang Jepang, artinya Japanisasi Sumatera Barat diusahakan melalui unsur kepercayaan dan agama ini.

Terhadap urusan pemerintahan sikap Jepang terhadap orang Sumatera Barat jauh lebih maju dari sikap Belanda. Pada masa Belanda masih berkuasa, seluruh jabatan penting dalam pemerintahan dipegang oleh orang Belanda, tetapi di waktu pendudukan bala tentara Jepang hal ini berubah, yaitu orang Sumatera Barat sendiri banyak yang diberi kesempatan oleh orang Jepang untuk menduduki jabatan tinggi dalam pemerintahan. Hal ini tidak saja karena Jepang belum mempunyai tenaga ahli pemerintahan, tetapi juga sesudah tenaga ahli Jepang itu datang. Hanya saja sesudah tenaga ahli Jepang itu datang, orang-orang Sumatera Barat mendapat pengawasan dari tenaga-tenaga ahli Jepang itu yang didudukkan sebagai wakil ataupun sebagai kepala kalau jabatan itu sangat penting sekali. Penguasa militer Jepang dapat saja mencampuri wewenang mereka pada waktu-waktu yang dikehendakinya. Tetapi walaupun bagaimana pengawasan itu dijalankan Jepang, orang Sumatera Barat sangat beruntung, karena di waktu kemerdekaan telah diumumkan, banyak di antara mereka yang sangat diperlukan dalam menyusun pemerintahan Republik Indonesia di Sumatera Barat.

## **5. Sikap Rakyat Indonesia terhadap Jepang**

Sikap para pemimpin pergerakan yang berada di Jakarta pada umumnya menunjukkan sikap anti fasisme Jepang. Hal ini mereka tunjukkan dengan sikap mau bekerjasama dengan pemerintahan Hindia-Belanda untuk menghadapi bahaya ekspansi militer Jepang ke selatan.

Di Sumatera Barat terdapat sikap yang berbeda-beda. Rakyat umum memberikan sambutan yang hangat. Di kalangan rakyat, sebelum Jepang masuk, sudah lama tersebar berita bahwa Jepang akan datang mengusir Belanda, Jepang akan memerdekakan Indonesia dari Belanda, Jepang akan memberikan kemakmuran buat bangsa-bangsa Asia, Jepang akan datang membebaskan Asia dari kekuasaan imperialisme, dan lain-lain. Berita-berita ini mendatangkan kegembiraan di kalangan rakyat yang di waktu Belanda masih berkuasa, kegembiraan itu masih disembunyi-semunyikan. Te-

tapi sewaktu Jepang masuk kegembiraan itu diperlihatkan dengan meriah sambil mengibarkan bendera merah putih di samping bendera Jepang (*Hinomaru*) menyambut kedatangan Jepang itu. Rakyat betul-betul merasa merdeka waktu itu.

Tetapi hal itu hanya berjalan selama kira-kira tiga bulan di saat mana Jepang memulai melakukan tindakan tangan besi dalam melaksanakan kemauannya di Sumatera Barat. Rakyat Sumatera Barat dipaksa untuk melakukan kerja-kerja yang diperintahkan Jepang. Dalam hal ini Jepang jauh lebih kejam dari Belanda, tetapi rakyat terpaksa bekerja karena Jepang mempunyai banyak cara untuk memaksa rakyat.

Kaum politisi Sumatera Barat yang terus melakukan pengamatan terhadap perkembangan politik di pusat pergerakan nasional di Jakarta mempunyai pandangan yang berbeda terhadap Jepang. Ada yang beranggapan bahwa Jepang tidak akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Pendapat ini didasarkan pada apa yang terjadi di Manchukuo dan Formosa, di mana di dalam waktu beberapa tahun saja kedua daerah itu sudah hampir kehilangan integritas dan kepribadiannya, artinya proses Japanisasi berhasil dilaksanakan dalam beberapa tahun saja.

Ada pula yang beranggapan bahwa dengan masuknya Jepang ke Sumatera Barat, nasib rakyat tidak akan berubah lebih baik daripada di waktu Belanda, karena suatu daerah yang dikuasai oleh kelompok fasis-militer pasti bersifat diktator otoriter, demokrasi tak akan hidup. Di samping itu kekejaman Jepang di medan perang memperkuat anggapan ini; mereka yang beranggapan begini hanya bersikap masa bodoh dan cari selamat.

Ada pula yang berpendapat bahwa kedatangan Jepang memang lebih baik lagi, karena dengan kekuatannya imperialisme Belanda dapat segera diusir. Di samping itu Jepang sendiri atau situasi yang ditimbulkan akibat kedatangan Jepang mungkin dapat dipergunakan untuk menyusun kekuatan sendiri buat mencapai cita-cita Indonesia Merdeka. Mereka yang beranggapan begini termasuk pemimpin-pemimpin rakyat yang betul-betul sadar bahwa nasib rakyatnya harus diperjuangkan supaya lebih baik dengan jalan bagaimanapun juga, kalau perlu kerjasama dengan Jepang buat sementara kalau kesempatan ada akan dipergunakan sebaik-baiknya. Mereka inilah pemimpin-pemimpin rakyat yang militan.

Di samping itu ada pula segolongan masyarakat yang ketakutan dengan kedatangan bala tentara Jepang karena akan menga-

caukan keadaan mereka yang relatif sudah baik. Mereka ini termasuk orang-orang yang menjadi pegawai pemerintah Belanda yang sudah lebih Belanda dari Belanda sendiri. Mereka tidak mengharapkan kedatangan Jepang sama sekali. Demikian sikap rakyat Sumatera Barat di waktu Jepang akan datang dan masuk ke Sumatera Barat, terdapat bermacam-macam sikap dari berbagai-bagai golongan dalam masyarakat.

Tetapi hanya beberapa bulan sesudah Jepang berada di Sumatera Barat seluruh anggapan dan sikap itu berubah. Jepang mulai menunjukkan kekuasaannya untuk membantu mereka dalam menyukseskan Perang Asia Timur Raya. Kalau rakyat tak mau membantu, mereka dipaksa. Oleh karena itu umumnya orang Sumatera Barat takut terhadap Jepang, kalau dapat jangan berurusan dengan Jepang. Di samping itu sesuai dengan kehidupan militer, maka orang Jepang di Sumatera Barat, memperlihatkan sifat kasarnya terhadap rakyat, mereka tidak mengenal batas mana yang menjadi hak dan mana yang bukan hak, semuanya sama rata saja dalam pengertian semuanya milik mereka. Hal ini bukan saja menimbulkan ketakutan rakyat tetapi juga menimbulkan kebencian yang amat sangat. Tetapi karena tak dapat berbuat apa-apa mereka terpaksa diam dan menekan perasaan.

Di samping itu pemimpin-pemimpin masyarakat Sumatera Barat yang militan selalu berusaha bergerak ke arah tercapainya tujuan Indonesia merdeka. Karena keadaan memaksa mereka terpaksa kerjasama dengan Jepang, kalau tidak mungkin semua akan hancur. Dalam kerjasama itulah mereka berusaha membina kader-kader pemuda dengan berkedok untuk menjaga keamanan, melatih pemuda-pemuda supaya dapat membantu Jepang di medan perang dan sebagainya.

Demikianlah uraian sikap rakyat Indonesia terhadap Jepang, selama masa pendudukan militer Jepang.

## DAFTAR KATA DAN NAMA

### A

Abang Betawi	Alam Minangkabau
Abbas Abdullah, Syekh Haji	Al Azhar
Abdul Karim Amarullah, Haji	Algemeene Studie Club
Abdullah Ahmad, Syekh	Al Hilai
Abdullah Kamil, Syekh	Ali Amran
Abdullah Madjid, Haji	Alimin
Abdullah St. Sinaro	Alim Ulama
Abdul Madjid, Haji	Alumni
Abdul Malik	Al Kuran
Abdul Muis	Al Munir
Abdul Rivai	Amai Setia
Abdul Wahid	Ambon
Abikusno Tjokrosuyoso	Amir Syarifuddin
Abu Bakar Jaar. Mr	Among
Abu Samah	AMS
Aceh	Amtenaar BB
Achmad Chatib	Anak Kemenakan
Adabiyah	Anarkhis
Adam Malik	Anas Munaf
Adat	Angku Doto
Adat Istiadat	Angku Guru
Administrasi	Angku Lareh
Administratif	Anjus
Adnan Kapau Gani	Anwar St. Saidi
Afdeeling	Aparator
A. Faffar Ismail	AR Sutan Mansyur
Agam Utara	Asia Tenggara
Agama	Asia Timur Raya
Ahli Ekonomi	Aspirasi
Ahli Hukum	Asyraq
Ahmad Dahlan, Kyai Haji	Atik Suardi
Aisyiah	Australia
Aisyiah Yahya	
A. Kahar Ma' Oencoe	

**B**

Badan Penyelidik Usaha-Usaha  
Kemerdekaan  
Bagindo Djamaluddin Rasyid  
Bahasa Persatuan Indonesia  
Bahder Johan  
Balai Pustaka  
Balatentara  
Bali  
Balikpapan  
Banda  
Bandar  
Bandung  
Banjarmasin  
Bank Nasional  
Bank Nasional Indonesia  
Banten  
Banzai  
Baron van Hoevell  
Baso Bandaro  
Batavia  
Batusangkar  
Bawah tanah  
Banteng  
Belanda  
Belasting  
Bengkulu  
Bintang Mahaputra RI  
Birokrasi  
Bodi Caniago  
Bonjol  
Budayawan  
Budi baik  
Budi Utomo  
Bukittinggi  
Bun Shu-Cho  
Bupati (Regent)

**C**

Cabang

Candung

Cendrawati

Cirebon

Cerita Rakyat

Chadajah

Chatib Ali, Syekh

Chatib Sulaiman

Chilafiyah

Cik Ani Kusuma

Cina

Cina mengamuk

Colombo

Conrad van Deventer

Controleur

Curaqau

**D**

Daerah Derek

Daerah Rantau

Dahlan Abdullah

Dang Rahadian Sinayangsih Ya-  
min

Daniah Sidik

Dangung-Dangung

Darsiwan

Darwis Datuk Majolelo

Darwis Muin

Darwis Taram

Darwis Thaib

Data Primer

Data Sekunder

Datuk Rangkayo Marajo

Datuk Singo Mangkuto

de Jonge (GG)

Demang

Demokratis

Demonstrasi

Depresi Ekonomi

Dewan

Dewan Daerah

Dewan Kabupaten  
(Regentschap Raad)  
Dewan Kota Praja  
(Stads gemeente Raad)  
Dewan Nagari  
Dewan Pemerintahan Daerah  
(College van Gedeprenten-  
den)  
Dewan Pemerintahan Kabupaten  
Dewan Peradilan  
Dewan Perancang Nasional  
Dewan Pertahanan Nasional  
Dewan Perwakilan Rakyat  
Dewan Pimpinan Pusat  
Dewan Propinsi  
(Provincie Raad)  
Dewan Pusat  
Dewan Sekolah  
Digul  
Diniyah  
Diniyah Putri  
Dinamis dalam ketenangan  
Djago-Djago  
Djamaluddin Thaib  
Djauhari Salim  
DPR-GR/MPRS  
DPR-RI  
DPR-RIS  
Desentralisasi  
Deksripsi  
Dokumen  
Dominasi  
Dominion  
Dt. Bandaro Basa  
Dt. Batuah  
Dt. Nan Bareno  
Dt. Putih  
Dt. Rajo Angek  
Dunia Timur  
Duski Samad

E  
Edward Douwes Dekker  
Ekonomi Desa  
Ekonomi Tertutup  
Explanatory  
Exploratory  
Ekstrim  
Embrio  
Endeh  
Eropah  
Erosi zaman  
Europeesche School

F  
Fachruddin Haji  
Fasisme Militer  
Fatimah Jalil  
Fatimah Latif  
Federasi  
Feodalisme  
Fikih  
Filosof  
Flores  
Formosa (Taiwan)  
Fort de Kock  
Fuku Bun-Cho  
Fuku Gun  
Fuku Gun Cho  
Furuk  
Fusi

G  
Gatot Mangkupraja  
Gapi (Gabungan Politik Indo-  
nesia)  
Generasi Muda  
Gerakan Padri  
Gerakan Wanita  
Gerindo (Gerakan Rakyat In-  
donesia)

Gitar  
GNI (Golongan Nasional Indonesia)

Golongan Muda

Golongan Ketiga

Golongan Tua

Grasi

Gubernur

Gubernur Jenderal

Gularso

Gun-Cho

Guru

Guru Ordonansi

H

Habladin St. Ma'aruf

HBS

Hadist

Haji

Haji Hasyim

Haji Rasul

Hambali (Mazhab)

HAMKA

Hanafi (Mazhab)

Hawai

Heplatonis

Himpunan Saudagar Indonesia

Hindia-Belanda

Hindun Sahih

Hinomaru

Hipotesa

Hirarkhi

HIS

Hitam Sutan Mudo

Hizbul Wathan

HPPI (Himpunan Pemuda Pelajar Indonesia)

Hukum Adat

Hukum Agama

Hukum Perdata

Huku

Hukum Pidana

Hukum Warisan

I

Ibrahim Musa Parabek, Syekh

IKIP (Institut Keguruan Ilmu Pendidikan)

Ilmiawan

Ilmu Kominih

Ilmu Nahu

Ilmu Syaraf

Ilyas Yakub, Haji

Imam Arifin

Indeks

Indische Partij

Individualisasi

Indo-Cina

Indonesia

Indonesia Berparlemen

Indonesia Raya

Indonesia untuk Indonesia

Indonesische Studie Club

Indramayu

Infiltrasi

Inggeris

INS (Indonesiasch. Nationale School)

Inspektur

Insulinde

Intelektual Agama

Intelektual Barat

Interaksi

Interviu

Inyik Bandaro Basa

Inyik Jambek

Inyik Rasul

Irian

Irigasi

Islam

Islamiah

Islamic College  
Ismail Lengah  
Italia Fasis

J

Jahiliah  
Jakarta  
Jakfar Amarullah  
Jakfar Amarullah  
Jakfar Dt. Majo Lelo  
Jaksa  
Jamaluddin  
Jamaran Ahmad  
Jamil Jambek, Syekh  
Japanisasi  
Jawa  
Jawa Barat  
Jawani Syarif  
Jawa Tengah  
Jawa Timur  
Jepang  
Jerman Nazi  
Jong\Islamieten Bond)  
Jong Sumatranen Bond ) Juana  
Jurutulis  
Jurutulis klas I  
Jurutulis klas II  
Jusair

K

Kabinet Ali Sastroamijoyo  
Kabinet Kerja  
Kabinet Sukirman-Suwiryo  
Kabinet Syarir II  
Kafir  
Kaharuddin  
Kahar Taher  
Kaigun (Angkatan Laut)

Kairo  
Kalimantan  
Kamaluddin  
Kamang  
Kampung Cina  
Kandang Empat  
Kasimo  
Kaum  
Kaum Betawi  
Kaum Terpelajar  
Kayutanam  
KBI (Kepanduan Bangsa Indo-  
nesia)  
Kebangkitan Nasional  
Kebangsaan  
Kebudayaan  
Kebudayaan Barat  
Kebudayaan Nasional  
Kecapi  
Kedai Kopi  
Kelarasan  
Kelompok Gadis  
Kemakmuran Bersama Asia  
Kemenakan  
Kemerdekaan  
Kempetai  
Kepala Nagari  
Kepanduan  
Kepemudaan  
Keregenan  
Khadijah Idrus  
Khatib, Haji  
Ki Hajar Dewantara  
Kimigayo  
Klub Debat Internasional  
K M B  
Komidi Omong  
Kolonial  
Komite

Komite Menegakkan Merah Putih	Laras Hoofd
Komite Pembina Persatuan	Lasmina Kahar Mansyur
Komite Pembina Persatuan	Lautan Taduh
Komite Perayaan Islam	Lempar Lembing
Komiter Rakyat	Leon Salim
Komunis	Liberal
Kongres Indonesia Raya	Liberalisme
Kongres Pemuda I	Lokasi
Kongres Pemuda II	Lubuk Alung
Kongres Perempuan Indonesia	Lubuk Basung
Kongres Persatuan Sumatera	Lubuk Sikaping
Kongres Rakyat Indonesia	Luhak
Kongres Seluruh Indonesia	Luhak Agam
Konperensi Asia-Afrika	Luhak Lima Puluh Kota
Konservatif	Luhak Tanah Datar
Konstituante	
Kontra	M
Koperasi	Madrasah
Kopi	Madura
Korea	Mahasiswa
Kota Baru	Maimunah
Kota Gadang	Majelis Cabang Taman Siswa
Kota Lawas	Majelis Luhur Islam
Kota Piliang	Majelis Rakyat Indonesia
Kranggan	Majelis Tinggi Islam Minang-
Kubang	kabau
Kudus	Majelis Wali Kota
Kursi Taji	Makmur St. Penghulu
Kutacane	Maliki (Mazhab)
Kutu Buku	Makasar
Kualitatif	Mamak
Kuantitatif	Manchukuo
K'weekschool	Manggopoh
	Maninjau
L	Mansur Daud, Haji
Landraad	Mansyur KH
Lapau	Marah Sutan
Laras	Marxis

Maluku  
Marzuki Yatim  
Maskun  
Mas Mansyur, Kyai Haji  
Matur  
MD. Dt. Palimo Kayo  
Medan  
Medan Rakyat  
M. Husni Thamrin  
Meisjeskring  
M. Jamil Jaho, Syekh  
Melayu  
Menara Putri  
Menteri Inti Urusan Khusus  
Menteri Kehakiman  
Menteri Pertama Urusan Khusus  
Menteri P dan K  
Menteri Sosial Kultural  
Merah Putih  
Merantau  
MIAI (Majelis Islam A'la Indonesia)  
Minangkabau  
Minangkabau Raad  
Mikraj Nabi  
Militer  
Minahasa  
Mirabecu  
Modern  
Modernisasi  
Moh. Hatta, Drs.  
Moh. Syafei  
Monarki  
Musium  
Musium pusat  
Moskow  
Muara Labuh  
Mubalikh

Muchtar Lufti  
Muhammad Arief, Haji  
Muhammad Wahyu  
Muhammad Yaman Glr. St.  
Rajo Endah  
Muhammad Yamin, Prof. Mr.  
Muhammad Zein, Syekh  
Mungkar  
Mukhtar  
Multatuli  
Mulo  
Muso  
Mustafa Abdullah, Syekh  
M. Saat, Syekh  
M. Thaib Umar, Syekh  
M. Zein Jambek, Syekh  
  
N  
Nagari  
Nampoo Gun  
Naksyabandiah  
Nasional  
Nasionalisme  
Nasionalisme Lokal  
Natar Zainuddin  
Nationaal Fractie  
Nationale Indische Partij  
(NIP)  
Nazir Dt. Pamuncak  
Negara Polisi  
Negara Republik Indonesia  
Negarawan  
Non-Koperasi  
Normaal School voor Meisjes  
NU (Nahdathul Ulama)  
Nurani Zein  
Nurani  
Nurul Islam  
Nusa Tenggara

## O

Observasi  
Onder-Afdeeling  
Onder-District  
Opas  
Ophir  
Oportunis  
Orang Siak  
Ordonansi Sekolah Liar  
Organisasi  
Organisasi Agama  
Organisasi Lokal  
Organisasi Sosial  
Ortodoks  
Otokratis

## P

Padang  
Padang Darat  
Padang Japang  
Padang Panjang  
Padang Pesisir  
Paderi  
Pahlawan Nasional  
Pakan  
Pakan Akat  
Pakan Jum'at  
Pakan Kamih  
Pakan Raban  
Pakan Salasa  
Pakan Sanayan  
Pakan Satu  
Pakiah  
Pakiah Hasyim  
Palembang  
Pan-Asia  
Panca Dharma  
Pancasila

Panji Saroso  
Pantai Barat  
Pantai Timur  
Parabek  
Parada Harahap  
Pariaman  
Parindra  
Parlemen  
Partai  
Partindo  
Pasar Gadang  
Pasar Mingguan  
Pasundan  
Payakumbuh  
P B I  
Pearl Harbour  
Pedagang-Perantau  
Pedati  
Pegawai  
Pegawai Sipil  
Pegawai SS (PJKA)  
Pekalongan  
Pelopor  
Pemangku adat  
Pemandangan Islam  
Pembela Negara (PN)  
Pemerintah  
Pemerintahan  
Pemerintahan Kabupaten  
Pemuda Sumatera  
Penasihat Agama  
Pencatatan  
Pendidikan  
Pendidikan Agama  
Pendidikan Barat  
Pendidikan Formal  
Penelitian  
Penetrasi

Penghulu	PMI
Penghulu Kepala	PNI
Penghulu Suku	PNI – Baru
Penolong Kesusahan Umum	PNI – Hatta
Pantatonis	PNI – Pendidikan
Penyelundup	Pekan
Perang Belasting	Politik Ekonomi
Perang Dunia I	Politik Etis
Perang Dunia II	Politik Rasis
Perang Minangkabau	Pontianak
Perantau	PPPI
Perantau-Pedagang	PPPKI
Perburuhan	P3KD
Perdata	Prambanan
Pergerakan Nasional Indonesia	Pra-Sejarah
Penghimpunan Politik Kebangsaan Indonesia	Pribumi
Perintis	Pro
Peristiwa 3 Juli 1946	Propaganda
Perkumpulan Tani	PSI
Perkumpulan Wanita	PSII
Perpindo	PTPG
PERMI	Pujangga Baru
PERMI Putra	R
PERMI Wanita	RA. Sundari Mertoatmojo
Persatuan Pelajar Sumatera	Radikal
Persatuan Perguruan Taman Siswa	Rahmah El Yunisiah Labai
Persatuan Sabun	Raja
Persatuan Saudagar Indonesia	Raja Ibrahim
Perserikatan PSII Minangkabau	Ramalah
Perserikatan Selebes	Raminsam
Pesisir Selatan	Randai
Petisi Sutarjo	Rantau
PGHB	Rantau Prapat
Piagam Jakarta	Ranting
PID	Rasimah Ismail
Pidana	Rasuna Said
Pitalah	Rasyid Idris
PMDS	
PMI	

Ratna Sari	Sarekat Islam Merah
Ratna Syahrial	Sarekat Islam Putih
Ratulangi	Sarekat Madura
Reaksioner	Sarekat Rakyat
Rebab	Sarekat Sumatera
Rebana	Sastrawan
Reformasi	Sartono, Mr.
Regen	Saudagar Kilat
Regensi	Sawah Lunto
Rembang	Schakel
Residen	Sejarah Daerah
Residenan	Sejarah Nasional Indonesia
Refolusi	Sejarawan
Revolusioner	Sekolah Dokter Hewan
Revolusi Perancis	Sekolah Dokter Jawa
Rikugun	Sekolah Hakim Tinggi
Rodi Kopi	Sekolah Klas I
Rahana Kudus	Sekolah Klas II
Rohani	Sekolah Liar (Swasta)
Rubiah Syuib	Sekolah Nagari
Rumah Adat	Sekolah Normal
Rukayah Rasyed	Sekolah Pertanian
Rusia	Sekolah Tinggi
Rustam Effendi	Selebes
S	Selfhelp
Saalah Sutan Mangkuto	Semarang
Sabilah Rasyad	Sendenbu
Said Ali	Seni Budaya
Saigon	Seni Pahat
Salung	Seni Ukir
Samik Ibrahim	Sepak Raga
Sandi Aman	Sentralisasi
Sang Saka Merah Putih	Shonanta
Sanusi Pane	Shu-Cho
Sanyo	Sigid
Sarekat Ambon	Sigli
Sarekat Combinatie Sumatra (SCM)	Silat
Sarekat Islam	Simabur
	Simabur, Syekh
	Simalakama

Singapura  
Sistem Kelas  
Sitti Sa'adah  
SKIS  
Slogan  
Soegondo  
Sosial Budaya  
Sosialisme  
Sosialisme Kiri  
Solo  
Solok  
Statistik  
Stovia  
St. Syahrir  
Struktur Adat  
Subagio Reksodipuro  
Sukarno, Ir.  
Sukiman, Dr.  
Sukirman, Mr.  
Suku  
Sulaiman  
Sulaiman Ar Rasuli, Syekh  
Sulaiman Effendi  
Sulit Air  
Sumanang  
Sumatera  
Sumatera Barat  
Sumatera Neishi Kaigun Shu  
Sumatra's Westkust  
Sumatra Thawalib  
Sumatera Timur  
Sumpah Pemuda  
Sunarko  
Sunting Melayu  
Surakarta  
Surau  
Surau Jembatan Besi  
Suriname  
Suroso  
Susanto Tirtoprojo, SH

Suska  
Sutan Bagindo  
Sutan Marajo  
Sutan Muhammad Zein  
Sutan Pemuncak  
Sutan Sulaiman  
Sartono, Dr.  
Suwardi Suryaningrat  
Suwiryo  
Syafei (Mazhab)  
Syariat Islam  
Syarifah Nawasi  
Syattariah  
Syiah  
Swasta

## T

Tabat Gadang  
Tabligh Muhamadiyah  
Talago  
Talawi  
Tali Bandar  
Talu  
Taman Dewasa  
Taman Mini  
Taman Muda  
Taman Nippon Raya  
Taman Siswa  
Tamzil  
Tanaman Paksa  
Tanah Arab  
Tanjung Barulak  
Tanjung Pinang  
Tapanuli  
Tapanuli Selatan  
Tapanuli Utara  
Tarakan  
Tarbiyah Islamiah  
Tari Gelombang  
Tarikat

Tari Sewah  
Tenno Heika  
Terompet  
Thalib Marah Sutan  
Tiku  
Timorsch Verbond  
Timur Asing  
Tirtayasa  
Thaya Soematra  
Tjarda Starckenborgh Stachouwer,  
Mr.  
Tjipto Mangunkusumo, Dr.  
Tokyo  
Toleransi  
TOR  
Tradisional  
Tuai  
Tuban  
Tuan Luak  
Tuan Luhak  
Tuanku Imam Bonjol  
Tuanku Lareh  
Tuanku Simabur  
Tugu Pemuda Sumatra  
Turun Ke sawah  
Tutwuri Handayani

## U

Udin  
Udin Rahmani, Haji  
Ujung Tombak  
Ulama  
Ulama Muda  
Ulama Tua  
Urbanisasi  
Usman glr Bagindo Chatib  
UUD '45

## V

Vervolg School

Volksraad  
Vrouwenbond

## W

Wahid Hasyim  
Wali Kota (Burgermeester)  
Wedana  
Wikana  
Wilopo  
Wuryaningrat  
W. Wongsoamiseno

## Y

Yakub Idris  
Yogyakarta  
Yugoslavia  
Yusuf Abdullah, Haji

## Z

Zainal Abidin Ahmad, Haji  
Zainuddin Labar  
Zaman Kebangkitan Nasional  
Zaman Kemerdekaan  
Zaman Pra-Sejarah  
Zamzami Kimin

## APENDIK

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP RINGKAS

N a m a : H. Udin Rahmani  
Tanggal lahir : 5 Januari 1901  
Pendidikan : Sekolah Agama di Maninjau  
Tahun 1916.

#### Riwayat Pekerjaan/Perjuangan

- 1917 Jadi guru Agama di Thawalib, Diniyah dan Mubalich Islam.
- 1918 Jadi anggota Panitia menyongsong Indonesia Merdeka yang dijanjikan Belanda yang dibawa oleh Serikat Islam ke Sumatera Barat.
- 1919-1923 Anggota Sumatera Thawalib Ikut mendirikan Permi.
- 1924-1927 Anggota Serikat Rakyat
- 1928-1933 Anggota PSII.
- 1933-1942 Dibuang ke Digul.  
Waktu Perang Dunia II dipindahkan ke Muting (Kali Bian) dan dibawa kembali ke Tanah Merah (Boven Digul). 1943 dipindahkan ke Cora dan beberapa tempat di Australia akhir tahun 1943 di Queensland diangkat menjadi tentara Australia dan bergerak di Front Belakang. Tahun 1944 dipindahkan ke Camp Casiono dan selama delapan bulan dilatih pengetahuan militer oleh Belanda dalam rangka persiapan pembentukan organisasi SIBAR. Secara diam-diam dalam Camp saya melatih pemuda-pemuda Indonesia yang dibawa lari Belanda ke Australia (dalam rangka SIBAR) untuk menanamkan jiwa kebangsaan, mereka berjumlah lima ratus orang. Usaha Belanda jadi gagal. Akibatnya Februari 1945 dibawa ke Holandia (Jayapura sekarang). Kemudian dipindahkan ke Marotai. 1 Mei 1945 dipindahkan ke Rarakan bersa-

ma tentara Australia. 1 Juni 1945 kembali bersama tentara Australia dan sebagai orang sipil ke Australia dan kemudian ditugaskan oleh Van Der Plas menjadi guru agama Islam untuk dua ribu orang Indonesia dan seribu orang Malaya, di kota Sydney. Juni 1946 ikut dalam Serikat Pelayar Indonesia (Serpelindo) Agustus 1945 berusaha menggabungkan Serpelindo dengan Komite Indonesia Merdeka (KIM) yang dibentuk oleh Partai Kebangsaan Indonesia (Parki) di bawah pimpinan A.G. Pati, sedangkan KIM dipimpin oleh Jamaluddin Tamin. Usaha yang dilakukan dalam Serpelindo adalah mengusahakan pemogokan di pelabuhan-pelabuhan Sydney dan Melbourne hingga delapan belas buah kapal yang membawa perlengkapan Belanda ke Indonesia terhenti. Dengan kerjasama organisasi buruh Australia Serpelindo berusaha mengadakan pemogokan di seluruh industri dan pabrik-pabrik Belanda.

Akhir tahun 1945 Belanda berusaha memulangkan seribu empat ratus orang putra Indonesia ke Indonesia, tetapi didapat kabar mereka akan dibawa ke Digul. Pemulangan ini dibaikot hingga tidak satu pun orang yang datang ke pelabuhan.

Pemerintah Australia turun tangan dan diadakan pertemuan antara Pemerintah Australia dengan Serpelindo. Dalam pertemuan diceritakan niat Belanda dengan bukti-bukti kongkrit.

Kemudian pemulangan diusahakan oleh pemerintah Inggris. Untuk tahap pertama seribu empat ratus orang dan tahap kedua enam ratus orang rombongan kedua berangkat Maret 1946.

- 1946 Berada di Indonesia dan menetap di Purwokerto, masuk menjadi anggota Masyumi dan anggota Pusat Pertahanan Negara di Karesidenan Banyumas.
- 1947 Pulang ke Sumatera Barat.
- 1948-1950 Pimpinan Masyumi Sumatera Barat.
- 1949 Anggota Front Pertahanan Negara daerah Sumatera Barat.

- 1949-1950 Staf Bupati Militer Kabupaten Agam.  
1950 Ketua DPR Agam.  
1951-1958 Ketua Dewan Pemerintahan Daerah Agam.  
1958-1960 Ikut PRRI.  
1961-sekarang, Memimpin Sekolah Agama dan Anggota Majelis Ulama Sumatera Barat.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP RINGKAS

N a m a : Abdul Murad St. Makmur  
Tanggal lahir : 8 Juli 1904  
Pendidikan : Thawalib Padang Panjang

### Riwayat Pekerjaan dan Perjuangan

- 1922 Menjadi anggota Sarikat Rakyat di Padang Panjang.  
1930 Turut membangun Permi di Padang dan jadi Ketua Cabang Afdeeling Agama.  
1940 Bergerak di bawah tanah bersama Anwar St. Saidi dan Khatib Sulaiman dalam usaha mencapai kemerdekaan.

### Jaman Jepang:

Berjuang secara bawah tanah dan mencari hubungan dengan Jawa dalam mempersiapkan kemerdekaan.

- 1946-1948 Ketua Komite Nasional Meninjau dan Ketua Markas Pertahanan Rakyat.  
1953-1957 DPRD Kabupaten Agama.  
1957 Berhenti dan ke luar dari Masyumi.  
1964 Sekarang anggota Perintis Kemerdekaan dan Ketua Yayasan Perguruan Islam di Maninjau.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP RINGKAS

N a m a : Darwis Thaib Dt. Sidi Bandaro  
Tanggal lahir : 11 Nopember 1908  
Pendidikan : Thawalib

### Riwayat Pekerjaan dan Perjuangan

- 1925 Menggabungkan diri dalam Sarikat Rakyat yang diteruskan bersama H. Udin Rahmani sampai tahun 1929.
- 1930 Ikut mendirikan Persatuan Muslim Indonesia dan berkecimpung sampai tahun 1932.
- 1932 Bersama Hatta dan Khatib Sulaiman mendirikan Cabang PNI di Sumatera Barat berlanjut sampai tahun 1934.
- 1934 Bergerak di bawah tanah bersama Sarikat Rakyat dan Parri berlangsung sampai tahun 1945.
- 1943 Berusaha mengambil alih Pemerintahan Belanda dan di tahan di Bukittinggi, dan dibebaskan atas usaha Ir. Sukarno yang saat itu berada di Bukittinggi dari pembuangannya di Bengkulu.

### Jaman Jepang.

Sekretaris Pusat Koperasi Rakyat (gabungan 27 Negeri) afdeling Maninjau.

### Proklamasi.

- Okt. 1945 Diangkat menjadi Wakil Ketua Harian KNI di Padang.
- 1946 Diangkat menjadi Anggota KNI Pusat.
- 1946-1956 Pimpinan Masyumi di Sumatera Barat.
- 1946-1950 Menjadi Pamong di beberapa daerah Pesisir Selatan Kerinci lima puluh kota, Padang dan Agam.
- 1950-1966 Pindah ke Kantor Gubernur.
- 1966 Pensiun.

## SEJARAH RINGKAS DARI KEHIDUPAN/PENGALAMAN HAJI MANSOER DAOED DATUK PALIMO KAYO

---

- Nama/Gelar : Mansoer, H. Mansoer Daoed Palimo Kayo
- Lahir / Negeri : Hari Sabtu jam 8 pagi 17 Safar 1325 H 10 Maret 1907 M di Pahambatan Balingka Kabupaten Agam Bukittinggi Sumatera Barat.
- Alamat terakhir : Jambu Air 1, Bukittinggi.

### I. Zaman Penjajahan Belanda.

- 1918 – 1923 Menempuh pendidikan dan pengajian pada Perguruan Islam Thawalib Padang Panjang dibawah asuhan Almarhum Syekh Abdul Karim Amarullah dan disambung di Parabek dibawah asuhan Almarhum Syekh Ibrahim Musa setelah melalui sekolah rendah Gouvernement 5 tahun.
- 1923 – 1930 Menambah ilmu pengetahuan diluar negeri: di India, Mekkah, Turki, dan melawat di beberapa negara Eropa dan Timur Jauh, Tiongkok, Jepang, Pilipina dan Malaya.
- 1930 – 1935 Turut membentuk dan memimpin Partai Politik Islam PERMI (Persatuan Muslim Indonesia) menjabat Sekretaris Umum mulai dari Kongres Thawalib pertama 22 - 27 Mei 1930 (24 - 26 Z. Hijjah 1338 di Bukittinggi) berkantor Besar di Jalan Kampung Nias Padang. Turut memimpin Majallah Partai "MEDAN RAKYAT" bersama-sama H. Ilyas Yaccub, sehingga "PERMI" dibubarkan oleh Pemerintah Belanda pada 18 Oktober 1937 M.
- 1935 – 1936 Ditangkap oleh penguasa Belanda, dibawa ke Medan ditahan dalam penjara SUKAMULIA MEDAN dari tanggal 24 September 1935 sampai

pai 24 September 1936 selama satu tahun, kemudian dilepaskan.

1936 – 1942 Aktif dalam bidang Da'wah Islamiyah di Daerah-daerah Sumatera Selatan Bengkulu dan Palembang.

## **II. Zaman Penindasan Jepang**

1942 – 1945 Turut membentuk Majelis Islam Tinggi Minangkabau dan kemudian diluaskan menjadi Majelis Islam Tinggi Sumatera, menjabat Sekretaris Umum dengan Ketuanya Almarhum Syekh Muhd. Djamil Djambek, berkantor besar di Bukittinggi dengan cabang-cabangnya di setiap Propinsi Sumatera. Selaku Badan Koordinasi Alim Ulama se-Sumatera, dalam mempertahankan Agama, Bangsa dan Tanah Air dalam menghadapi penindasan Jepang.

## **III. Zaman Kemerdekaan Indonesia**

1945 – 1947 Menjabat Sekretaris Umum dari Partai Politik Islam "MA SYUMI" SE Sumatera setelah Majelis Islam Tinggi Sumatera difungsikan dengan Partai Politik Islam Masyumi, berkedudukan di Pematang Siantar di samping kedudukan Pemerintahan Propinsi Sumatera diwaktu itu dibawah Pimpinan Gubernur Teuku M. Hasan.

1947 – 1955 Dipilih menjadi Ketua Umum Pimpinan Partai Politik Islam "MASYUMI" Sumatera Tengah berkedudukan di Bukittinggi, sesudah Sumatera dibagi kepada tiga Propinsi Utara, Tengah dan Selatan.

1956 Pindah ke Jakarta karena terpilih menjadi anggota Parlemen (Dewan Perkawinan Rakyat) Indonesia mewakili rakyat Sumatera Tengah hasil Pemilihan Umum pertama tanggal 29 September 1955.

1956 – 1960 Menjadi Duta Besar Republik Indonesia untuk kerajaan 'Iraq berkedudukan di Kota Baghdad.

- 1960 – 1961 Setelah kembali ke Jakarta dipilih menjadi Ketua Umum Partai Politik Islam "MASYUMI" Jakarta Raya sampai Partai dibubarkan oleh Presiden Sukarno pada tanggal 2 Pebruari 1961.
- 1962 – 1965 Melakukan kegiatan dalam bidang Da'wah Islamiyah Indonesia berkedudukan di Jakarta bermarkas di Masjid A-Munawwarah.

#### **IV. Zaman Pembangunan Indonesia**

- 1966 Turut membentuk Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia yang diketuai oleh Bapak M. Natsir, dan menjadi Ketua Umum Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
- 1968 Turut membentuk dan memimpin Majelis Ulama Sumatera Barat selaku Badan Koordinasi Alim Ulama Sumatera Barat berkedudukan di Bukittinggi.
- 1969 Turut membentuk dan memimpin Yayasan Rumah Sakit Islam (YARSI) Sumatera Barat berkantor besar di Kota Padang dengan induk proyeknya Balai Kesehatan "IBNU SINA" di Bukittinggi dan cabang-cabangnya di Kota-kota lain Propinsi Sumatera Barat.  
Dan lain-lain kegiatan dalam urusan masyarakat.

## DAFTAR CATATAN

- 1). Pada waktu itu Sumatera Barat bernama *Sumatra's West-kust* yang berarti "Bahagian Pesisir Barat Sumatera".
- 2). Daerah Minangkabau dibagi atas dua bahagian.  
Pertama *Darek* yang meliputi daerah Luhak tanah Datar, Luhak Agam dan Luhak Lima Puluh Kota. Ketiga daerah ini merupakan daerah Minangkabau asli. Orang Belanda menyebut daerah ini sebagai daerah pedalaman Minangkabau.  
Kedua *Rantau*, yaitu semua daerah Minangkabau yang berada diluar daerah *Darek* tadi. Daerah ini merupakan daerah tempat merantau bagi orang Darek.
- 3). Gerakan Kaum Paderi dimulai pada tahun 1803 dibawah pimpinan Tuanku Nan Renceh. Gerakan Kaum Paderi bertujuan untuk memurnikan ajaran Agama Islam yang waktu itu telah banyak menyimpang dari ajaran Islam menurut Al Qur'an dan Hadist.
- 4). Batavia adalah nama lain untuk kota Jakarta yang diberikan oleh Belanda.
- 5). Padang Darat disini dimaksudkan sama dengan "Darek" yang meliputi daerah Agam, Tanah Datar dan Lima Puluh Kota. orang Belanda menganggap daerah Sumatera Barat sebagai Padang saja. Maka untuk membedakan daerah pedalaman dengan daerah pesisir diberi nama Padang Darat untuk daerah pedalaman dan Padang Pesisir untuk daerah pesisir.
- 6). Yang dimaksud dengan administrasi disini adalah administrasi negara, yaitu keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintahan dari suatu negara untuk mencapai tujuan negara tersebut. Negara dalam hal ini adalah pemerintahan Belanda di Sumatera Barat untuk mencapai tujuan konsep minimum *Nederlandsch Indie* (Hindia Belanda).
- 7). *Afdeeling* kira-kira sama dengan daerah kabupaten sekarang.
- 8). Kontrolur BB adalah orang yang langsung berada dibawah jabatan Asisten Residen, seluruh perintah Assisten Resi-

den keluar melalui Kontrolur ini yang selanjutnya akan menghubungi eselon pemerintah lebih rendah. Dalam kenyataannya Kontrolur pejabat yang ditakuti oleh rakyat, karena disamping menjalankan perintah Assisten Residen dia juga diberi wewenang yang sangat besar dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu seorang Kontrolur sangat ditakuti rakyat.

- 9). *Lareh* adalah ejaan Minangkabau untuk menyebutkan Laras. Engku atau Tuanku disini berarti panggilan kehormatan untuk orang yang dimuliakan, dituakan atau dihormati. Arti Tuanku yang lain adalah untuk menyebut seseorang yang mempunyai pengetahuan yang luas tentang seluk beluk agama Islam, atau seorang ulama yang bertindak sebagai pemimpin.
- 10). Sumber yang dipergunakan dalam menyusun masalah pemerintahan ini didapat dengan dua cara, pertama melalui wawancara, kedua melalui data perpustakaan. Wawancara dilakukan kepada bekas Kepala Nagari sebelum Kemerdekaan (D. Dt. Madjo Besar), Pengurus Persatuan Perintis Kemerdekaan RI (Mansoer Thaib), eks Walikota Padang (Said Rasyad dan beberapa pemuka masyarakat lainnya). Data kepustakaan diambil dari antara lain Muhammad Radjab (1954), Drs. M.D. Mansoer dkk (1970), Drs. Badju Surianingrat (1972), H. Bouman (1949), Dr. J.M. Pluvier (1930 - 1942) dan sebagainya.
- 11). Sebuah peribahasa Minangkabau yang menyatakan bagaimana sulitnya kedudukan/situasi seseorang dalam suatu masalah, dilakukan salah, tak dilakukan salah. Apakah saja yang akan diperbuat pasti menimbulkan kerugian bagi dirinya sendiri.
- 12). Secara adat, Minangkabau dikuasai oleh Kepala-kepala suku, yang diangkat jadi penghulu atau kepala kaum atau kepala suku (suku = klan). Karena itu kepala suku ini disebut penghulu suku. Penghulu suku ini berkuasa sepenuhnya secara adat terhadap kaumnya dan hal ini tak dapat dicampuri oleh orang atau kaum lain. Keadaan yang demikianlah yang dipergunakan oleh Belanda.
- 13). Elizabeth Graves, hal. 268.

- 14). Belanda menamainya *Kweek school*, Sekolah ini terkenal dengan nama "Sekolah Raja".
- 15). Drs. M.D. Mansoer dkk, hal. 169.
- 16). Walaupun demikian telah dapat juga membuka pikiran mereka yang selama ini masih tertutup, misalnya dengan jalan membaca koran, majalah dan sebagainya.
- 17). Umumnya juga terjadi demikian di seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah Jawa.
- 18). Di Eropah kekuatan golongan ketiga inilah yang bangkit menghapuskan monarki Perancis dan lain-lain monarki yang telah hidup dengan subur semenjak berabad-abad lamanya.
- 19). *Sekolah Nagari*, umumnya di Indonesia dikenal sebagai Sekolah Desa, ada yang hanya kelas I saja, ada yang sampai kelas II, III saja, dan ada pula yang sampai kelas V. Biasanya kelas-kelas yang lebih tinggi juga disebut oleh rakyat sebagai *Sekolah Sambungan*.
- 20). Rakyat biasa disini bukan sembarang rakyat, artinya petani-petani miskin, tukang-tukang pekerja kasar lainnya. Walaupun disebutkan untuk rakyat biasa, tetapi rakyat itu adalah yang ada hubungannya dengan Belanda, sekurang-kurangnya rakyat yang tidak menentang kemauan Belanda.
- 21). Pegawai-pegawai sipil Indonesia yang bekerja pada Belanda oleh orang Minangkabau juga disebut *orang berpangkat*, karena sebagai pegawai mereka menerima sesuatu pangkat, walaupun hanya pangkat sipil saja.
- 22). Sekolah tradisional disini yang dimaksud adalah sekolah yang didirikan oleh pemuka-pemuka masyarakat berdasarkan pendidikan Islam. Di Minangkabau lembaga pendidikan begini dinamakan dengan pendidikan "surau" yang sama dengan lembaga pendidikan "Pondok Pesantren" di Jawa.
- 23). Elizabeth Graves, hal. 337.
- 24). Elizabeth Graves, hal. 339.  
"Angku Dato" adalah seorang dokter.  
Mereka sangat dihormati oleh rakyat.

Disamping tugas seorang dokter yang mulia, mereka menyelesaikan sekolah dokternya di Jawa. Seorang Minangkabau yang dapat menamatkan sekolah dokter, sebuah sekolah tinggi, dianggap lebih tinggi dari orang Belanda sendiri oleh rakyat.

"Angku Lareh" adalah Tuanku Laras, orang Minangkabau yang menjabat kedudukan paling tinggi dalam hirarki pemerintahan Belanda.

"Angku Guru" adalah seorang guru yang sudah menamatkan sekolah paling tinggi yang ada di Sumatera Barat. Sebagai seorang guru gajinya sangat besar. Disamping itu tugasnya sangat dihargai oleh rakyat, karena ditangan gurulah terletak nasib anak-anak mereka dikemudian hari.

- 25). Sistem madrasah dilaksanakan dengan memakai kelas-kelas seperti sekolah Belanda. Tepatnya tidak di surau lagi, tapi sudah merupakan tempat khusus pendidikan Islam.
- 26). Sepak raga adalah semacam main bola. Bolanya tersebut dari rotan yang dianyam. Cara bermainnya adalah dengan menyepak-nyepak bola melambung ke atas (tidak terlalu tinggi) berkali-kali. Siapa yang paling lama dapat menahan bolanya tidak jatuh ke tanah dalam satu kali kesempatan, dialah yang menang. Menyepak bolanya boleh dengan punggung kaki, tapak kaki, tumit, lutut, paha, asal bolanya tidak jatuh ke tanah. Jenis permainan ini sekarang masih terdapat di Sumatera Barat tetapi tidak sepopuler yang dulu lagi. Permainan sepak takrau adalah sejenis permainan sepak raga yang sistematis.
- 27). Nama pasar ini dinamakan menurut nama hari pasar itu diramaikan. Nama-nama hari menurut ejaan Minangkabau adalah sebagai berikut:
  - "Sanayan" untuk Senen = "Pakan Senayan".
  - "Selasa" untuk Selasa = "Pakan Salasa".
  - "Rabaa" untuk Rabu = "Pakan Rabaa".
  - "Kamih" untuk Kamis = "Pakan Kamih".
  - "Jumaat" untuk Jumat = "Pakan Jumaat".
  - "Satu" untuk Sabtu = "Pakan Satu".
  - "Akat" untuk Minggu = "Pakan Akat".
- 28). Badan ini bernama *Nederlandsche Handel Maatschappij* yang laris disebut *De Factorij* saja yang mempunyai hak

monopoli dan mengangkat kopi dari rakyat.

- 29). Rodi sama artinya dengan kerja paksa.
- 30). Bandar dalam bahasa Minangkabau berarti kali kecil untuk mengairkan air ke sawah.
- 31). Adat dalam masyarakat Minangkabau dibagi atas empat macam yaitu:
  1. "Adat yang sebenarnya adat"
  2. "Adat yang teradat"
  3. "Adat yang diadatkan"
  4. "Adat istiadat".
  - ad.1. ialah sesuatu yang seharusnya menurut alur dan patut (kebenaran) misalnya adat air membasahi, adat api membakar, adat yang berdasarkan sifat-sifat alam undang-undang alam.
  - ad.2. ialah adat yang berdasarkan kenyataan, terdapatnya kenyataan perbedaan-perbedaan menurut keadaan dan situasi setempat.
  - ad.3. ialah adat yang didasarkan atas mufakat menurut alur dan patut. Sesudah disepakati, terus menjadi peraturan hidup yang mengikat.
  - ad.4. ialah seluruh kebiasaan yang berlaku secara tradisional dan diwariskan secara tradisional pula.
- 32). Selama 2½ abad ( $\pm$  1550 - 1800) antara agama Islam Syi'ah berkembang di Minangkabau terjadi ikatan yang "mesra sekali" antara agama Islam dengan adat Minangkabau, artinya tidak terdapat pertentangan antara hukum adat dan hukum agama di tengah masyarakat.
- 33). Keamanan umum menurut katagori pemerintah Belanda waktu di Minangkabau.
- 34). Prof. Nasroen, hal. 161.
- 35). Mamak di sini yang dimaksudkan adalah saudara laki-laki ibu.
- 36). Prof. Nasroen, hal. 39.
- 37). Saudaranya disini tidak saja hanya yang sekandung (seperti adik atau kakak perempuan), tetapi juga termasuk seluruh keluarga perempuan dari suku atau kaumnya, se-

perti :

- Kakak/adik perempuan
  - Kakak/adik perempuan ibu
  - Anak perempuan kakak/adik perempuan
  - Anak perempuan kakak/adik perempuan ibu.
  - Dan semua keturunan perempuan menurut garis keturunan ibu keatas dan kebawah.
- 38). "Kata putus" artinya keputusan terakhir yang tak boleh dibantah lagi.
- 39). A.M. Dt. Maruhum Batuah dan D.H. Bagindo tanameh dalam bukunya:  
*Hukum Adat dan Adat Minangkabau*, halaman 38, mengatakan "rantau" berarti:
- Bahagian sungai antara dua kelok (belokan)
  - Daerah takluk dari sebuah nagari
  - Tempat mencari atau mengumpulkan kekayaan untuk dibawa pulang ke daerah pangkal ( asli).
- 40). Lihat Nasroen hal. 131, I. Dt. Sanggamo Dirajo; M. Rasyyid Manggis hal. 10; Dt. Batuah Sango hal. 93.
- 41). Sampai ke ujung negeri sekalipun maksudnya sampai ke mana saja dan ke tempat yang bagaimana saja harus diturut asal disana ada ilmu yang dibutuhkan untuk dipelajari. Dalam hal ini tidak mengenal batas tempat dan waktu.
- 42). "Pakan" sering juga disebut dengan "balai".
- 43). "lapau" adalah semacam warung dimana dijual ringan seperti ketan dan goreng pisang dengan minum kopi "Lapau" sering ditambah dengan "Lapau kopi" atau "kedai kopi".
- 44). *Inyik* adalah sebutan untuk kakek di Minangkabau.
- 45). Inyik Rasul atau Syekh Abdul Karim Amarullah yang juga terkenal sebagai DR. Haji Abdul Karim Amarullah (DR. HAKMA) adalah ayah dari Buya Dr. HAMKA.
- 46). Taufik Abdullah, *Social and Politics*, hal. 31.
- 47). Makmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Pustaka Muhammadiyah Jakarta, 1957, hal. 50.
- 48). Wawancara dengan M.D. Dt. Panglimo Kayo.

- 49). Taufik abdullah, (S.P). hal. 132.
- 50). Persatuan disini dimaksudkan adalah Perkumpulan atau organisasi-organisasi masa.
- 51). *Ensiklopedi Indonesia*, N - Z N.V. Penerbitan W. van Hoeve Bandung's - Gravenhage, hal. 1313.
- 52). Tingkat-tingkat sekolah Taman Siswa adalah sebagai berikut:
- Taman Muda (SD)
  - Taman Dewasa (SMP)
  - Taman Madya (SMA)
  - Taman Guru (Sekolah Guru).
  - Taman Tani (Sekolah Menengah Pertanian)
  - Taman Masyarakat (lanjutan klas penghabisan Taman Muda bagi yang putus sekolah).
  - Taman Kerti (ruangan pendidikan diluar sekolah untuk menambah pelajaran biasa atau pelajaran Ketrampilan/khusus)  
(Ensiklopedi Indonesia, hal. 1313).
- 53). *Ensiklopedi Indonesia*, hal. 1313.
- 54). Lapisan tingkat atas dalam masyarakat Indonesia waktu itu adalah para intelektual Indonesia yang telah mendapat dasar pendidikan Barat, kedalamnya termasuk intelektual Islam.
- 55). Pada waktu hampir seluruh daerah di Indonesia ini mendirikan organisasi pemuda atas nama daerahnya masing-masing, seperti:
- |              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| Jong Java    | - Pemuda Jawa                  |
| Jong Celebes | - Pemuda Sulawesi              |
| Jong Ambon   | - Pemuda Ambon dan sebagainya. |
- 56). Anwar St. Saidi. *Tugu Pemuda Sumatera*, N.V. Tenunan Padang Asli Padang 1967, hal. 11 - 12.
- 57). Taufik Abdullah, hal. 35.
- 58). I b i d.
- 59). Namanya memang demikian yang terkenal, Baru sesudah tahun 1945 ditukar dengan nama Persatuan Murid-murid sekolah Diniyah.
- 60). HAMKA, Ayahku, hal. 266.

- 61). Lihat Van der Kroef, hal. 64 - 66.
- 62). Di Sumatera Barat tidak dikenal istilah bangsawan adat, karena adat itu sendiri menganut peraturan yang sangat demokratis. Istilah ini hanya dipergunakan oleh kaum komunis dalam usahanya mempengaruhi rakyat.
- 63). *Ensiklopedi Umum*, Penerbitan Yayasan Kanisius, 1973, hal. 870 - 871.
- 64). Waktu sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah Belanda dengan dasar pendidikan Barat dinamakan Sekolah "Gubernemen".
- 65). Istilah "Amal" di Sumatera Barat dipakai untuk memanggil orang tua wanita (ibu).  
Di samping itu di daerah di Bukittinggi dan sekitar istilah amal juga dipergunakan untuk memanggil wanita-wanita setengah tua secara umum.
- 66). R R = *Regerings Reglement*.
- 67). Kaula bangsa Belanda maksudnya adalah orang-orang Indonesia yang dapat dibeli oleh Belanda, artinya segala sesuatu perbuatannya adalah untuk kepentingan Belanda. Orang-orang yang demikianlah dipilih Belanda untuk duduk pada Dewan-dewan itu pada mulanya.
- 68). *Ensiklopedi Umum*, hal. 1397.
- 69). Bumiputra adalah sebutan untuk penduduk asli Indonesia waktu itu dalam Bahasa Belandanya adalah *Inlandere*.
- 70). Sekolah Dasar waktu itu ada dua macamnya, yaitu Sekolah Dasar Bumiputra klas II yang lama pendidikannya 5 tahun dimana Bahasa Belanda tak diajarkan, yang kedua adalah Sekolah Dasar Bumiputra klas I yang mengajarkan Bahasa Belanda, sekolah ini nanti berkembang menjadi HIS (*Hollandsch Inlandsche School*). Lama pendidikan 7 tahun.
- 71). Namanya waktu itu adalah Kerapatan Besar.
- 72). Dalam bahasa Jepangnya bernama *Dokuritsu Jumbi Cosakai*.
- 73). Taufik Abdullah, *Minangkabau 1900 - 1927*, hal. 180.
- 74). Hendrik Bouman, hal. 16.

- 75). I b i d.
- 76). Gubernur nama jabatan kepala daerah propinsi Sumatera Barat buat sementara, karena tak lama kemudian ditukar kembali dengan Residen yang mengepalai Karesidenan Sumatera Barat (*Provincie ordonnantie, Staatsblad* No. 78, tahun 1924).
- 77). Periksa A.K. Pringgodigdo, *Sejarah Pegerakan Rakyat Indonesia*, hal. 74.
- 78). Sartono Kartodirdjo, dalam buku *Sejarah Nasional Indonesia* Jilid V hal. 216 memasukkan *Sumatranen Bond* ke dalam PPPKI.
- 79). Hamka, *Ayahku*, hal. 266.
- 80). Sekolah yang bukan didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda di Indonesia.
- 81). Taufik Abdullah, *S dan P*, hal. 212.
- 82). Wawancara dengan M.S. Dt. Panglimo Kayo tanggal 7 Juni 1977 di Bukittinggi.
- 83). AK. Pringgodigdo, hal. 107.
- 84). I b i d., hal. 153.
- 85). Deliar Noer, hal. 243.
- 86). HAMKA, *Ayahku*, hal. 153.
- 87). Deliar Noer, hal. 240.
- 88). Prof. Mr. A.K. Pringgodigdo, hal. 8.
- 89). PVPN adalah singkatan dari Persatuan Vakhonden Pegawai Negeri yaitu federasi dari perkumpulan-perkumpulan pegawai negeri.
- 90). M.A. Azis, *Japan's Colonialism and Indonesia*, hal. 105.
- 91). M.A. Azis, hal. 148.
- 92). Dalam masa pergerakan kebangsaan Indonesia saudagar-saudagar Pasar Gadang ini sangat banyak membantu pergerakan dengan modal mereka, bahkan tak jarang diantaranya yang ikut dalam pergerakan itu.
- 93). Pemerintah militer Jepang waktu itu resminya disebut pemerintahan "Balatentara Nippon".

- 94). H.J. Benda, hal. 169
- 95). M.A. Azis, hal. 158
- 96). H.J. Benda, hal. 171.

## DAFTAR BACAAN

Abdullah, Taufik, *Minangkabau 1900 – 1927, Preliminary Studies in Social Development*, (A Thesis, Cornell University, New York, 1967.

*Modernization in the Minangkabau World West Sumatra in the Early Decade of the Twentieth Century*, (Stensilan), Service Departement ISD–IKIP Padang, Padang, 1972.

*Schools and Politics (The Kaum Muda Movement in West Sumatra 1927 – 1933*, Modern Indonesia Project Southeast Asia Program, Cornell University, Ithaca, New York, 1977.

A. Azis M; *Japan's Colonialism and Indonesia*, Martinus Nyhoff The Hague, 1955

Azis Thaib cs; *Buku Peringatan 40 tahun PT Band Nasional (27 Desember 1930 – 27 Desember 1970*, PT. Bank Nasional Bukittinggi, 1970.

Benda, Harry J. cs; *Japanese Military Administration in Indonesia ( Selected Documents)*, Yale University, Southeast Asia Studies 1965.

Bouman, H; *Eenige Beschouwingen Over De Ontwikeling Van Het Indonesisch Nationalisme op Sumatera's Weskust*, J.b. Wolters' uitgever maatschappij NV. Groningen, Batavia, 1949.

Enar, Fatimah cs; *Sumatra Barat 1945 – 1950*, Pemerintah Daerah Sumatra Barat, Padang, 1976.

Grave, Elizabeth, *How the Minangkabau Solves the Colonial Problems*, A Disertation.

HAMKA; *Ayahku*, Riwayat Hidup Dr. Haji Abdul Karim Amrullah dan Perjuangan Kaum Agama di Indonesia, cetakan ke 3, Jayamurni, Jakarta, 1967.

*Muhammadiyah di Minangkabau*, Yayasan Nurul Islam Jakarta, 1174;

Hidayat, A.R.; *Kenyataan dalam Perhubungan Indonesia Belanda*, Tjerdas, Medan, 1950.

Kementerian Penerangan, *Republik Indonesia Propinsi Sumatra*

- Tengah, 1953.
- Kodir, Abdul; *Biografi Ringkas Muh. Yamin*, Berita Idayu, Tahun I, No. 8 Jakarta, 1974.
- Kroef, Dr. J.M. van der; *Indonesia in the Modern World* (Part I), Masa Baru – Bandung – Jakarta.
- .; *Indonesia in the Modern World*, Part II, Masa Baru LTD Bandung, 1956.
- Mansur, M.D., cs; *Sejarah Minangkabau*, Bhatara, Jakarta, 1970.
- Medan Rakyat* No. 1, 3, 6 dan 10 tahun 1932 dan No. 9, 10 dan 17 tahun 1933, Mingguan Permi, Padang.
- Naim, Dr. Muchtar, *Merantau, Voluntary Migration*, A Dissertation, University of Singapura, 1973.
- Noer, Deliar; *The Modernist Muslim Movement in Indonesia 1900 – 1942*, Oxford University Press, 1973.
- Pluvier, Dr. J.M.; *Overzicht Van De Ontwikeling Der Nationalistische Beweging Indonesia" (in de Jaren 1930 tot 1942)*.
- Pringgodigdo, Prof. Mr. AG; *Inteligensia*, "Dasar-Dasar Umum Pembangunan Negara RI, Penerbitan Indonesia NV, Jakarta 1950.
- Pringgodigdo SH, AK; *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*, Cetakan keenam, PT. Dian Rakyat, Jakarta, 1967.
- Radjab, M.; *Perang Paderi di Sumatra Barat*, Perpustakaan Departemen P P Dan K Jakarta, 1954.
- Sartono Kartodiardjo, *Sejarah Nasional Indonesia*, Jilid V, Balai Pustaka, Jakarta 1977.
- Siagian, Drs. SP; *Filsafat Administrasi*, Gunung Agung, Jakarta, 1971.
- Sitorus, L M; *Sejarah Pergerakan Kebangsaan Indonesia*, Cetakan Kedua, Pustaka Rakyat NV Jakarta, 1961.
- Slamet, Dra. Ina E.; *Pokok-Pokok Pembangunan Masyarakat Desa*, Bhatara, Jakarta, 1965.
- Soerianingrat Drs. Badju *Peraturan Perundangan Mengenai Pemerintah Daerah*, Penerbit Baru, Bandung, 1972.
- .; *Regerings Almanak Voor Nederlandsch Indie 1941*.

*Statistical of Indonesia 1941*, Koninklijk Boekhandela  
Drukkerij G. Kolf, Batavia, 1941.

Sujono; *Susunan Pemerintahan Desa*, Penerbit Dewata, Jakarta,  
1961.

Yamin, H. Muhammad; *Pembahasan Undang-undang Dasar Re-  
publik Indonesia*, Prapanca, Jakarta.

Zuber Usman, Drs; "Muhammad Yamin, Mahaputra Indonesia",  
*Berita Bibliografi* Tahun IX, No. 6, Juni 1963.





PN BALAI PUSTAKA — JAKARTA